



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : , bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

a. pendapatan:	Rp 3.459.025.374.470,97	
b. belanja dan transfer:	Rp 3.570.959.018.593,06	
surplus/(defisit):		Rp (111.933.644.122,09)
c. pembiayaan:		
1. penerimaan:	Rp 149.768.722.962,58	
2. pengeluaran:	Rp 20.000.000.000,00	
pembiayaan netto:		Rp 129.768.722.962,58

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 393.924.043.270,03) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan:	Rp 3.852.949.417.741,00
2. realisasi:	Rp 3.459.025.374.470,97
selisih lebih/(kurang):	Rp (393.924.043.270,03)
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp406.734.125.664,35) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan:	Rp 3.977.693.144.257,41
2. realisasi:	Rp 3.570.959.018.593,06
selisih lebih/(kurang):	(Rp 406.734.125.664,35)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp12.810.082.394,32 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan:	(Rp	124.743.726.516,41)
2. realisasi:	(Rp	111.933.644.122,09)
selisih lebih/(kurang):	Rp	12.810.082.394,32
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp24.996.446,17 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan:	Rp	149.743.726.516,41
2. realisasi:	Rp	149.768.722.962,58
selisih lebih/(kurang):	Rp	24.996.446,17
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 5.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan:	Rp	25.000.000.000,00
2. realisasi:	Rp	20.000.000.000,00
selisih lebih/(kurang):	(Rp	5.000.000.000,00)
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 5.024.996.446,17 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan:	Rp	124.743.726.516,41
2. realisasi:	Rp	129.768.722.962,58
selisih lebih/(kurang):	Rp	5.024.996.446,17

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut:

a. saldo awal:	Rp	149.743.726.516,41
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan:	Rp	149.768.722.962,58
sub total:	(Rp	24.996.446,17)
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA):	Rp	17.835.078.840,49
sub total:	Rp	17.810.082.394,32
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya:	Rp	24.996.446,17
e. lain-lain:	(Rp	287.059.613,00)
saldo anggaran lebih akhir:	Rp	17.548.019.227,49

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut:

a. kegiatan operasional:		
pendapatan:	Rp	3.336.554.640.672,19
beban:	Rp	3.121.602.423.271,14
surplus/(defisit) dari kegiatan operasional:	Rp	214.952.217.401,05
b. kegiatan non operasional:	(Rp	26.816.334.897,34)
surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional:	(Rp	26.816.334.897,34)
(1) surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa:	Rp	188.135.882.503,71

c. pos luar biasa:	(Rp 2.358.385.973,00)
(2) surplus/(defisit)-LO:	Rp 185.777.496.530,71

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, sebagai berikut:

a. ekuitas awal:	Rp 8.082.480.187.118,96
b. surplus/defisit LO:	Rp 185.777.496.530,71
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan mendasar:	(Rp 24.171.955.249,17)
d. ekuitas akhir:	Rp 8.244.085.728.400,50

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, sebagai berikut:

a. jumlah aset:	Rp 8.585.620.356.198,58
b. jumlah kewajiban:	Rp 341.534.627.798,08
c. jumlah ekuitas:	Rp 8.244.085.728.400,50

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, sebagai berikut:

a. saldo awal kas:	Rp 149.768.722.962,58
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi:	Rp 594.195.384.404,00
c. arus kas dari aktivitas investasi:	(Rp 726.129.028.526,09)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan:	Rp 0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris:	(Rp 0,00)
f. saldo akhir kas:	Rp 17.835.078.840,49
g. koreksi sisa lebih pembiayaan anggaran:	(Rp 287.059.613,00)
h. saldo akhir kas di bendahara penerimaan:	Rp 6.810.000,00
i. kas di kas daerah:	Rp 5.725.309.574,79
j. kas di bendahara pengeluaran:	Rp 1.433.267,97
k. kas di badan layanan umum daerah:	Rp 10.698.134.567,95
l. kas di bendahara bantuan operasional sekolah:	Rp 0,00
m. kas dana bantuan operasional satuan pendidikan:	Rp 1.106.023.965,58
n. saldo akhir kas lainnya:	Rp 10.307.851,20
o. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran:	Rp 417.737.400,00
p. saldo akhir kas per 31 Desember 2024:	Rp 17.965.756.627,49

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas akun laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang di klasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

BUSTAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (2-132/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



RADIAH BT. YOLOHIO, S.H., M.AP
NIP 197310022006042012



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	3.852.949.417.741	3.459.025.374.470,97	(393.924.043.270,03)	89,78
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	200.860.000.000	223.155.722.346,43	22.295.722.346,43	111,10
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	350.000.000	6.557.791.590,58	6.207.791.590,58	1.873,65
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.000.000	6.557.791.590,58	6.207.791.590,58	1.873,65
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	350.000.000	6.557.791.590,58	6.207.791.590,58	1.873,65
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350.000.000	327.991.590,58	(22.008.409,42)	93,71
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	350.000.000	126.652.000,00	(223.348.000,00)	36,19
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	201.339.590,58	201.339.590,58	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	6.229.800.000,00	6.229.800.000,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	0	6.229.800.000,00	6.229.800.000,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	200.100.000.000	216.342.113.192,85	16.242.113.192,85	108,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK	200.100.000.000	216.342.113.192,85	16.242.113.192,85	108,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	200.100.000.000	216.342.113.192,85	16.242.113.192,85	108,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.100.000.000	216.342.113.192,85	16.242.113.192,85	108,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000	95.035.000,00	(4.965.000,00)	95,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.000.000.000	216.247.078.192,85	16.247.078.192,85	108,12
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	400.000.000	246.137.563,00	(153.862.437,00)	61,53
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400.000.000	246.137.563,00	(153.862.437,00)	61,53
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	400.000.000	246.137.563,00	(153.862.437,00)	61,53
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000	246.137.563,00	(153.862.437,00)	61,53
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	400.000.000	244.000.433,16	(155.999.566,84)	61,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	2.137.129,84	2.137.129,84	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.000.000	9.680.000,00	(320.000,00)	96,80
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0001		UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	10.000.000	9.680.000,00	(320.000,00)	96,80
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000	9.680.000,00	(320.000,00)	96,80
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000	9.680.000,00	(320.000,00)	96,80
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000	9.680.000,00	(320.000,00)	96,80
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10.305.000.000	7.057.718.198,00	(3.247.281.802,00)	68,49
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	450.000.000	228.139.200,00	(221.860.800,00)	50,70
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	450.000.000	228.139.200,00	(221.860.800,00)	50,70
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	450.000.000	228.139.200,00	(221.860.800,00)	50,70
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450.000.000	228.139.200,00	(221.860.800,00)	50,70
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	450.000.000	228.139.200,00	(221.860.800,00)	50,70
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.050.000.000	0,00	(1.050.000.000,00)	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.02.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.050.000.000	0,00	(1.050.000.000,00)	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.050.000.000	0,00	(1.050.000.000,00)	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.050.000.000	0,00	(1.050.000.000,00)	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.050.000.000	0,00	(1.050.000.000,00)	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.000.000	7.000.000,00	2.000.000,00	140,00
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.000.000	7.000.000,00	2.000.000,00	140,00
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	5.000.000	7.000.000,00	2.000.000,00	140,00
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000	7.000.000,00	2.000.000,00	140,00
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000	7.000.000,00	2.000.000,00	140,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.800.000.000	6.822.578.998,00	(1.977.421.002,00)	77,53
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	8.800.000.000	6.822.578.998,00	(1.977.421.002,00)	77,53
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	8.800.000.000	6.822.578.998,00	(1.977.421.002,00)	77,53
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.800.000.000	6.822.578.998,00	(1.977.421.002,00)	77,53
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	8.800.000.000	6.822.578.998,00	(1.977.421.002,00)	77,53
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.700.000.000	2.196.782.547,00	(503.217.453,00)	81,36
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.300.000.000	2.096.165.547,00	(203.834.453,00)	91,14
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	2.300.000.000	84.380.890,00	(2.215.619.110,00)	3,67
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.300.000.000	84.380.890,00	(2.215.619.110,00)	3,67
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.300.000.000	84.380.890,00	(2.215.619.110,00)	3,67
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.300.000.000	84.380.890,00	(2.215.619.110,00)	3,67
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001		UPTD Pelabuhan Tengkyu II	0	2.011.784.657,00	2.011.784.657,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0	2.011.784.657,00	2.011.784.657,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2.011.784.657,00	2.011.784.657,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	0	2.011.781.857,00	2.011.781.857,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	2.800,00	2.800,00	0,00
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	400.000.000	100.617.000,00	(299.383.000,00)	25,15
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kehutanan	400.000.000	100.617.000,00	(299.383.000,00)	25,15
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	400.000.000	100.617.000,00	(299.383.000,00)	25,15
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000	100.617.000,00	(299.383.000,00)	25,15
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	400.000.000	100.617.000,00	(299.383.000,00)	25,15
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.639.084.417.741	3.226.615.151.379,54	(412.469.266.361,46)	88,67
5.02			KEUANGAN	3.638.624.417.741	3.225.875.254.879,54	(412.749.162.861,46)	88,66
5.02	5.02.5.02.5.02.02.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.768.597.952.471	2.462.336.701.359,54	(306.261.251.111,46)	88,94
5.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.768.597.952.471	2.462.336.701.359,54	(306.261.251.111,46)	88,94
5.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.530.000.000	43.287.988.756,54	19.757.988.756,54	183,97
5.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	5.530.000.000	253.733.000,00	(5.276.267.000,00)	4,59
5.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	11.371.469.793,77	11.371.469.793,77	0,00
5.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.000.000.000	31.662.785.962,77	13.662.785.962,77	175,90
5.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.744.717.952.471	2.417.275.881.907,00	(327.442.070.564,00)	88,07
5.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.744.717.952.471	2.417.275.881.907,00	(327.442.070.564,00)	88,07
5.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000	1.772.830.696,00	1.422.830.696,00	506,52
5.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	350.000.000	379.620.000,00	29.620.000,00	108,46

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
5.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.393.210.696,00	1.393.210.696,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000		Badan Pendapatan Daerah	626.638.262.752	528.886.508.692,00	(97.751.754.060,00)	84,40
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	626.638.262.752	528.886.508.692,00	(97.751.754.060,00)	84,40
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	626.638.262.752	528.886.508.692,00	(97.751.754.060,00)	84,40
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4.1.01	Pajak Daerah	615.201.042.959	528.831.219.764,00	(86.369.823.195,00)	85,96
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	0	38.219.660,00	38.219.660,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.371.469.793	0,00	(11.371.469.793,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.750.000	17.069.268,00	(48.680.732,00)	25,96
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001		UPT Bapenda Bulungan	73.612.000.000	75.873.527.801,00	2.261.527.801,00	103,07
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	73.612.000.000	75.873.527.801,00	2.261.527.801,00	103,07
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.612.000.000	75.873.527.801,00	2.261.527.801,00	103,07
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	4.1.01	Pajak Daerah	72.500.000.000	75.287.047.181,00	2.787.047.181,00	103,84
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	180.000.000	16.600.000,00	(163.400.000,00)	9,22
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	932.000.000	569.880.620,00	(362.119.380,00)	61,15
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002		UPT Bapenda Tarakan	86.839.080.000	82.270.719.609,00	(4.568.360.391,00)	94,74
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	86.839.080.000	82.270.719.609,00	(4.568.360.391,00)	94,74
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86.839.080.000	82.270.719.609,00	(4.568.360.391,00)	94,74
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	4.1.01	Pajak Daerah	85.550.000.000	81.247.996.909,00	(4.302.003.091,00)	94,97
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.289.080.000	1.022.722.700,00	(266.357.300,00)	79,34
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003		UPT Bapenda Nunukan	43.139.477.518	38.414.036.714,00	(4.725.440.804,00)	89,05
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	43.139.477.518	38.414.036.714,00	(4.725.440.804,00)	89,05
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.139.477.518	38.414.036.714,00	(4.725.440.804,00)	89,05
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	4.1.01	Pajak Daerah	42.600.000.000	38.046.335.259,00	(4.553.664.741,00)	89,31
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000	3.400.000,00	(1.600.000,00)	68,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	534.477.518	364.301.455,00	(170.176.063,00)	68,16
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004		UPT Bapenda Malinau	32.035.970.000	33.522.370.313,00	1.486.400.313,00	104,64
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	32.035.970.000	33.522.370.313,00	1.486.400.313,00	104,64
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.035.970.000	33.522.370.313,00	1.486.400.313,00	104,64
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	4.1.01	Pajak Daerah	31.650.000.000	33.276.030.704,00	1.626.030.704,00	105,14
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000	8.050.000,00	3.050.000,00	161,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	380.970.000	238.289.609,00	(142.680.391,00)	62,55
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005		UPT Bapenda Tana Tidung	7.761.675.000	4.571.390.391,00	(3.190.284.609,00)	58,90
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	7.761.675.000	4.571.390.391,00	(3.190.284.609,00)	58,90
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.761.675.000	4.571.390.391,00	(3.190.284.609,00)	58,90
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	4.1.01	Pajak Daerah	7.700.000.000	4.530.989.650,00	(3.169.010.350,00)	58,84
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.675.000	40.400.741,00	(11.274.259,00)	78,18
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	0,00
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	450.000.000	739.896.500,00	289.896.500,00	164,42
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		Badan Penghubung	450.000.000	739.896.500,00	289.896.500,00	164,42
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	450.000.000	739.896.500,00	289.896.500,00	164,42
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450.000.000	739.896.500,00	289.896.500,00	164,42
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	450.000.000	739.896.500,00	289.896.500,00	164,42
		5	Belanja	3.977.693.144.257,41	3.570.959.018.593,06	-406.734.125.664,35	89,77
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.939.824.074.034	1.788.978.491.559,06	-150.845.582.474,94	92,22
01.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	690.964.540.494	621.733.221.810,82	-69.231.318.683,18	89,98
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	685.395.192.631	616.559.988.547,82	-68.835.204.083,18	89,96
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	685.395.192.631	616.559.988.547,82	-68.835.204.083,18	89,96
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	581.392.968.154	522.903.046.022,82	-58.489.922.131,18	89,94
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	414.481.354.041	364.791.222.382,00	-49.690.131.659,00	88,01
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.264.144.113	141.735.233.628,82	-8.528.910.484,18	94,32
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	16.647.470.000	16.376.590.012,00	-270.879.988,00	98,37
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	104.002.224.477	93.656.942.525,00	-10.345.281.952,00	90,05
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.200.000.000	3.879.960.000,00	-4.320.040.000,00	47,32
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.107.454.000	31.005.772.545,00	898.318.545,00	102,98
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.494.770.477	58.572.709.980,00	-6.922.060.497,00	89,43
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000	198.500.000,00	-1.500.000,00	99,25
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0005		UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	1.420.000.000	1.262.231.502,00	-157.768.498,00	88,89
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0005	5	BELANJA DAERAH	1.420.000.000	1.262.231.502,00	-157.768.498,00	88,89
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.297.600.000	1.143.591.502,00	-154.008.498,00	88,13
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	63.960.000	55.800.000,00	-8.160.000,00	87,24
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.233.640.000	1.087.791.502,00	-145.848.498,00	88,18
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0005	5.2	BELANJA MODAL	122.400.000	118.640.000,00	-3.760.000,00	96,93
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.400.000	118.640.000,00	-3.760.000,00	96,93
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0004		UPT Taman Budaya	1.039.357.762	958.695.503,00	-80.662.259,00	92,24
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0004	5	BELANJA DAERAH	1.039.357.762	958.695.503,00	-80.662.259,00	92,24
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	719.357.762	667.295.503,00	-52.062.259,00	92,76
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	69.960.000	61.800.000,00	-8.160.000,00	88,34
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.397.762	605.495.503,00	-43.902.259,00	93,24
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	320.000.000	291.400.000,00	-28.600.000,00	91,06
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.000.000	291.400.000,00	-28.600.000,00	91,06
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0001		Cabang Dinas Tarakan	1.049.999.701	1.011.421.079,00	-38.578.622,00	96,33
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	1.049.999.701	1.011.421.079,00	-38.578.622,00	96,33
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	900.413.230	864.711.079,00	-35.702.151,00	96,03
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	89.880.000	89.200.000,00	-680.000,00	99,24
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.533.230	775.511.079,00	-35.022.151,00	95,68
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	149.586.471	146.710.000,00	-2.876.471,00	98,08
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.586.471	146.710.000,00	-2.876.471,00	98,08
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0002		Cabang Dinas Nunukan	1.029.998.904	967.098.936,00	-62.899.968,00	93,89
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0002	5	BELANJA DAERAH	1.029.998.904	967.098.936,00	-62.899.968,00	93,89
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	861.828.684	803.468.936,00	-58.359.748,00	93,23
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	78.960.000	78.960.000,00	0	100
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	782.868.684	724.508.936,00	-58.359.748,00	92,55
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	168.170.220	163.630.000,00	-4.540.220,00	97,3
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.170.220	163.630.000,00	-4.540.220,00	97,3

	KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0003		Cabang Dinas KTT-Malinau	1.029.991.496	973.786.243,00	-56.205.253,00	94,54
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0003	5	BELANJA DAERAH	1.029.991.496	973.786.243,00	-56.205.253,00	94,54
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	932.315.496	878.706.243,00	-53.609.253,00	94,25
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	75.280.000	75.280.000,00	0	100
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	857.035.496	803.426.243,00	-53.609.253,00	93,74
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	97.676.000	95.080.000,00	-2.596.000,00	97,34
01.01	1.01.2.22.0.00.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.676.000	95.080.000,00	-2.596.000,00	97,34
01.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	483.692.979.926	484.789.962.156,24	1.096.982.230,24	100,23
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	61.766.189.643	57.160.732.063,00	-4.605.457.580,00	92,54
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	61.766.189.643	57.160.732.063,00	-4.605.457.580,00	92,54
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	56.760.677.883	52.330.591.371,00	-4.430.086.512,00	92,2
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.278.397.007	10.825.364.940,00	-453.032.067,00	95,98
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.682.280.876	40.705.226.431,00	-3.977.054.445,00	91,1
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000	800.000.000,00	0	100
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.005.511.760	4.830.140.692,00	-175.371.068,00	96,5
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	913.511.760	817.996.000,00	-95.515.760,00	89,54
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.370.000.000	3.302.997.200,00	-67.002.800,00	98,01
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	720.000.000	707.147.496,00	-12.852.504,00	98,21
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.000.000	1.999.996,00	-4	100
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK	421.926.790.283	427.629.230.093,24	5.702.439.810,24	101,35
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	421.926.790.283	427.629.230.093,24	5.702.439.810,24	101,35
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	339.783.756.846	351.573.544.301,15	11.789.787.455,15	103,47
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	143.533.292.242	140.352.956.913,00	-3.180.335.329,00	97,78
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.250.464.604	211.220.587.388,15	14.970.122.784,15	107,63
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	82.143.033.437	76.055.685.792,09	-6.087.347.644,91	92,59
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.143.033.437	72.299.146.815,00	-2.843.886.622,00	96,22
01.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.000.000.000	3.756.538.977,09	-3.243.461.022,91	53,66
01.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	615.895.212.301	540.099.313.081,00	-75.795.899.220,00	87,69
01.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	615.895.212.301	540.099.313.081,00	-75.795.899.220,00	87,69
01.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	615.895.212.301	540.099.313.081,00	-75.795.899.220,00	87,69
01.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	178.458.304.744	152.258.081.051,00	-26.200.223.693,00	85,32
01.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	16.520.851.769	15.071.432.321,00	-1.449.419.448,00	91,23
01.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.937.452.975	137.186.648.730,00	-24.750.804.245,00	84,72
01.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	437.436.907.557	387.841.232.030,00	-49.595.675.527,00	88,66
01.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	290.000.000	0	-290.000.000,00	0
01.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.971.774.500	3.384.642.169,00	-587.132.331,00	85,22
01.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.790.991.964	94.163.217.453,00	-17.627.774.511,00	84,23
01.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	321.384.141.093	290.293.372.408,00	-31.090.768.685,00	90,33
01.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	84.218.481.924	80.600.647.400,00	-3.617.834.524,00	95,7
01.04	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	84.218.481.924	80.600.647.400,00	-3.617.834.524,00	95,7
01.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	84.218.481.924	80.600.647.400,00	-3.617.834.524,00	95,7
01.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	83.578.181.924	80.019.397.400,00	-3.558.784.524,00	95,74
01.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	348.600.000	196.800.000,00	-151.800.000,00	56,45
01.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.229.581.924	79.822.597.400,00	-3.406.984.524,00	95,91
01.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	640.300.000	581.250.000,00	-59.050.000,00	90,78
01.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	640.300.000	581.250.000,00	-59.050.000,00	90,78
01.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	42.592.027.320	39.947.720.124,00	-2.644.307.196,00	93,79
01.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.389.227.424	10.958.838.140,00	-1.430.389.284,00	88,45
01.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	12.389.227.424	10.958.838.140,00	-1.430.389.284,00	88,45
01.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.743.627.424	10.347.338.140,00	-1.396.289.284,00	88,11
01.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.717.689.117	5.592.551.125,00	-1.125.137.992,00	83,25
01.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.003.683.307	4.734.097.015,00	-269.586.292,00	94,61
01.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.05	Belanja Hibah	22.255.000	20.690.000,00	-1.565.000,00	92,97
01.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	645.600.000	611.500.000,00	-34.100.000,00	94,72
01.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	645.600.000	611.500.000,00	-34.100.000,00	94,72
01.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	30.202.799.896	28.988.881.984,00	-1.213.917.912,00	95,98
01.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	30.202.799.896	28.988.881.984,00	-1.213.917.912,00	95,98
01.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	30.082.299.896	28.876.426.984,00	-1.205.872.912,00	95,99
01.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.538.041.794	6.047.671.884,00	-490.369.910,00	92,5
01.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.529.853.102	10.814.350.100,00	-715.503.002,00	93,79
01.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	12.014.405.000	12.014.405.000,00	0	100
01.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	120.500.000	112.455.000,00	-8.045.000,00	93,32
01.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.500.000	112.455.000,00	-8.045.000,00	93,32
01.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	22.460.832.069	21.807.626.987,00	-653.205.082,00	97,09
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial	18.850.835.502	18.293.488.976,00	-557.346.526,00	97,04
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	18.850.835.502	18.293.488.976,00	-557.346.526,00	97,04
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	18.109.918.942	17.579.122.460,00	-530.796.482,00	97,07
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.898.378.076	8.625.796.759,00	-272.581.317,00	96,94
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.752.240.866	7.528.204.414,00	-224.036.452,00	97,11
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000	30.000.000,00	-20.000.000,00	60
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.409.300.000	1.395.121.287,00	-14.178.713,00	98,99
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	740.916.560	714.366.516,00	-26.550.044,00	96,42
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	408.000.000	391.928.516,00	-16.071.484,00	96,06
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	282.916.560	272.838.000,00	-10.078.560,00	96,44
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	49.600.000,00	-400.000,00	99,2
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0001		UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	3.609.996.567	3.514.138.011,00	-95.858.556,00	97,34
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	3.609.996.567	3.514.138.011,00	-95.858.556,00	97,34
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.224.996.567	3.136.177.011,00	-88.819.556,00	97,25
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	82.320.000	77.580.000,00	-4.740.000,00	94,24
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.142.676.567	3.058.597.011,00	-84.079.556,00	97,32
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	385.000.000	377.961.000,00	-7.039.000,00	98,17
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	4.100.000,00	-900.000,00	82
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	360.000.000	355.311.000,00	-4.689.000,00	98,7
01.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000	18.550.000,00	-1.450.000,00	92,75
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	335.875.239.231	300.921.251.256,00	-34.953.987.975,00	89,59

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
02.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	20.124.365.984	18.389.640.774,00	-1.734.725.210,00	91,38
02.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.124.365.984	18.389.640.774,00	-1.734.725.210,00	91,38
02.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	5 BELANJA DAERAH	20.124.365.984	18.389.640.774,00	-1.734.725.210,00	91,38
02.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.1 BELANJA OPERASI	19.924.965.984	18.256.470.774,00	-1.668.495.210,00	91,63
02.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.1.01 Belanja Pegawai	6.305.280.985	5.759.364.258,00	-545.916.727,00	91,34
02.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	13.619.684.999	12.497.106.516,00	-1.122.578.483,00	91,76
02.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.2 BELANJA MODAL	199.400.000	133.170.000,00	-66.230.000,00	66,79
02.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.400.000	133.170.000,00	-66.230.000,00	66,79
02.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.550.390.325	13.235.508.308,00	-1.314.882.017,00	90,96
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.550.390.325	12.366.479.812,00	-1.183.910.513,00	91,26
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5 BELANJA DAERAH	13.550.390.325	12.366.479.812,00	-1.183.910.513,00	91,26
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1 BELANJA OPERASI	13.299.390.325	12.132.105.812,00	-1.167.284.513,00	91,22
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.01 Belanja Pegawai	8.100.657.883	7.337.854.312,00	-762.803.571,00	90,58
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	3.973.732.442	3.819.251.500,00	-154.480.942,00	96,11
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.05 Belanja Hibah	1.225.000.000	975.000.000,00	-250.000.000,00	79,59
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2 BELANJA MODAL	251.000.000	234.374.000,00	-16.626.000,00	93,38
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251.000.000	234.374.000,00	-16.626.000,00	93,38
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	1.000.000.000	869.028.496,00	-130.971.504,00	86,9
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0001	5 BELANJA DAERAH	1.000.000.000	869.028.496,00	-130.971.504,00	86,9
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0001	5.1 BELANJA OPERASI	925.100.000	798.588.496,00	-126.511.504,00	86,32
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0001	5.1.01 Belanja Pegawai	97.080.000	68.160.000,00	-28.920.000,00	70,21
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0001	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	828.020.000	730.428.496,00	-97.591.504,00	88,21
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0001	5.2 BELANJA MODAL	74.900.000	70.440.000,00	-4.460.000,00	94,05
02.08	2.08.2.14.0.00.02.0001	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.900.000	70.440.000,00	-4.460.000,00	94,05
02.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.032.098.816	1.952.884.419,00	-79.214.397,00	96,1
02.09	3.27.2.09.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.032.098.816	1.952.884.419,00	-79.214.397,00	96,1
02.09	3.27.2.09.0.00.02.0000	5 BELANJA DAERAH	2.032.098.816	1.952.884.419,00	-79.214.397,00	96,1
02.09	3.27.2.09.0.00.02.0000	5.1 BELANJA OPERASI	2.032.098.816	1.952.884.419,00	-79.214.397,00	96,1
02.09	3.27.2.09.0.00.02.0000	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	1.707.098.816	1.627.884.419,00	-79.214.397,00	95,36
02.09	3.27.2.09.0.00.02.0000	5.1.05 Belanja Hibah	325.000.000	325.000.000,00	0	100
2.10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	43.144.355.468	35.324.575.930,00	-7.819.779.538,00	81,88
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	43.144.355.468	35.324.575.930,00	-7.819.779.538,00	81,88
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5 BELANJA DAERAH	43.144.355.468	35.324.575.930,00	-7.819.779.538,00	81,88
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1 BELANJA OPERASI	3.688.611.638	2.917.243.680,00	-771.367.958,00	79,09
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.01 Belanja Pegawai	50.210.000	42.740.000,00	-7.470.000,00	85,12
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	3.638.401.638	2.874.503.680,00	-763.897.958,00	79
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2 BELANJA MODAL	39.455.743.830	32.407.332.250,00	-7.048.411.580,00	82,14
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.01 Belanja Modal Tanah	39.399.243.830	32.383.532.250,00	-7.015.711.580,00	82,19
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.500.000	23.800.000,00	-32.700.000,00	42,12
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.286.634.726	12.306.932.943,00	-1.979.701.783,00	86,14
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	13.178.634.726	11.416.884.359,00	-1.761.750.367,00	86,63
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5 BELANJA DAERAH	13.178.634.726	11.416.884.359,00	-1.761.750.367,00	86,63
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1 BELANJA OPERASI	12.702.821.726	11.044.644.359,00	-1.658.177.367,00	86,95
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01 Belanja Pegawai	5.586.643.705	5.484.332.252,00	-102.291.453,00	98,17
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	7.116.178.021	5.560.292.107,00	-1.555.885.914,00	78,14
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2 BELANJA MODAL	475.813.000	372.240.000,00	-103.573.000,00	78,23
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	475.813.000	372.240.000,00	-103.573.000,00	78,23
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1.108.000.000	890.048.584,00	-217.951.416,00	80,33
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0001	5 BELANJA DAERAH	1.108.000.000	890.048.584,00	-217.951.416,00	80,33
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0001	5.1 BELANJA OPERASI	1.069.425.000	873.199.784,00	-196.225.216,00	81,65
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0001	5.1.01 Belanja Pegawai	63.440.000	59.560.000,00	-3.880.000,00	93,88
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0001	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	1.005.985.000	813.639.784,00	-192.345.216,00	80,88
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0001	5.2 BELANJA MODAL	38.575.000	16.848.800,00	-21.726.200,00	43,68
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0001	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.575.000	16.848.800,00	-6.726.200,00	71,47
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0001	5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000	0	-15.000.000,00	0
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.531.169.479	10.356.357.452,00	-174.812.027,00	98,34
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.531.169.479	10.356.357.452,00	-174.812.027,00	98,34
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5 BELANJA DAERAH	10.531.169.479	10.356.357.452,00	-174.812.027,00	98,34
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1 BELANJA OPERASI	9.811.170.479	9.639.648.452,00	-171.522.027,00	98,25
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01 Belanja Pegawai	5.481.921.131	5.384.919.719,00	-97.001.412,00	98,23
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	4.329.249.348	4.254.728.733,00	-74.520.615,00	98,28
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2 BELANJA MODAL	719.999.000	716.709.000,00	-3.290.000,00	99,54
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	706.199.000	703.011.000,00	-3.188.000,00	99,55
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya	13.800.000	13.698.000,00	-102.000,00	99,26
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.463.070.981	13.434.930.163,00	-1.028.140.818,00	92,89
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.463.070.981	13.434.930.163,00	-1.028.140.818,00	92,89
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5 BELANJA DAERAH	14.463.070.981	13.434.930.163,00	-1.028.140.818,00	92,89
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1 BELANJA OPERASI	14.315.570.981	13.293.109.962,00	-1.022.461.019,00	92,86
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01 Belanja Pegawai	5.663.772.091	5.057.047.781,00	-606.724.310,00	89,29
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	5.281.798.890	4.876.062.181,00	-405.736.709,00	92,32
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.05 Belanja Hibah	3.370.000.000	3.360.000.000,00	-10.000.000,00	99,7
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2 BELANJA MODAL	147.500.000	141.820.201,00	-5.679.799,00	96,15
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.500.000	141.820.201,00	-5.679.799,00	96,15
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	841.756.059	721.898.862,00	-119.857.197,00	85,76
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	841.756.059	721.898.862,00	-119.857.197,00	85,76
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5 BELANJA DAERAH	841.756.059	721.898.862,00	-119.857.197,00	85,76
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1 BELANJA OPERASI	841.756.059	721.898.862,00	-119.857.197,00	85,76
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	841.756.059	721.898.862,00	-119.857.197,00	85,76
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	51.929.812.871	46.140.403.512,00	-5.789.409.359,00	88,85
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	45.024.812.871	39.845.957.576,00	-5.178.855.295,00	88,5
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5 BELANJA DAERAH	45.024.812.871	39.845.957.576,00	-5.178.855.295,00	88,5
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1 BELANJA OPERASI	25.412.520.871	22.967.454.271,00	-2.445.066.600,00	90,38
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01 Belanja Pegawai	12.325.002.285	11.443.408.976,00	-881.593.309,00	92,85
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	13.024.795.586	11.461.322.295,00	-1.563.473.291,00	88
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.04 Belanja Subsidi	62.723.000	62.723.000,00	0	100
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2 BELANJA MODAL	19.612.292.000	16.878.503.305,00	-2.733.788.695,00	86,06

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.129.390.000	1.103.163.000,00	-26.227.000,00	97,68
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.482.902.000	15.775.340.305,00	-2.707.561.695,00	85,35
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		UPTD Pelabuhan Tengkyu I	3.765.000.000	3.428.211.944,00	-336.788.056,00	91,05
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	3.765.000.000	3.428.211.944,00	-336.788.056,00	91,05
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.746.700.000	3.411.879.599,00	-334.820.401,00	91,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	87.120.000	87.120.000,00	0	100
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.659.580.000	3.324.759.599,00	-334.820.401,00	90,85
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	18.300.000	16.332.345,00	-1.967.655,00	89,25
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.300.000	16.332.345,00	-1.967.655,00	89,25
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	3.140.000.000	2.866.233.992,00	-273.766.008,00	91,28
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	3.140.000.000	2.866.233.992,00	-273.766.008,00	91,28
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.134.000.000	2.860.483.992,00	-273.516.008,00	91,27
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	88.920.000	75.100.000,00	-13.820.000,00	84,46
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.045.080.000	2.785.383.992,00	-259.696.008,00	91,47
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	6.000.000	5.750.000,00	-250.000,00	95,83
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000	5.750.000,00	-250.000,00	95,83
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	42.258.947.917	39.237.997.529,00	-3.020.950.388,00	92,85
2.16	2.16.2.21.2.20.04.0000		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	42.258.947.917	39.237.997.529,00	-3.020.950.388,00	92,85
2.16	2.16.2.21.2.20.04.0000	5	BELANJA DAERAH	42.258.947.917	39.237.997.529,00	-3.020.950.388,00	92,85
2.16	2.16.2.21.2.20.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	38.992.144.914	36.319.204.769,00	-2.672.940.145,00	93,14
2.16	2.16.2.21.2.20.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.823.590.641	5.763.813.485,00	-1.059.777.156,00	84,47
2.16	2.16.2.21.2.20.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.168.554.273	30.555.391.284,00	-1.613.162.989,00	94,99
2.16	2.16.2.21.2.20.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.266.803.003	2.918.792.760,00	-348.010.243,00	89,35
2.16	2.16.2.21.2.20.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.018.397.000	2.904.892.760,00	-113.504.240,00	96,24
2.16	2.16.2.21.2.20.04.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.421.003	0	-213.421.003,00	0
2.16	2.16.2.21.2.20.04.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.985.000	13.900.000,00	-1.085.000,00	92,76
2.16	2.16.2.21.2.20.04.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000	0	-20.000.000,00	0
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	18.190.759.744	16.525.651.691,00	-1.665.108.053,00	90,85
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	18.190.759.744	16.525.651.691,00	-1.665.108.053,00	90,85
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5	BELANJA DAERAH	18.190.759.744	16.525.651.691,00	-1.665.108.053,00	90,85
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.936.284.744	15.328.364.835,00	-1.607.919.909,00	90,51
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.532.610.115	7.453.920.931,00	-78.689.184,00	98,96
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.117.674.629	7.601.443.904,00	-1.516.230.725,00	83,37
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	286.000.000	273.000.000,00	-13.000.000,00	95,45
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.254.475.000	1.197.286.856,00	-57.188.144,00	95,44
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.204.475.000	1.147.386.856,00	-57.088.144,00	95,26
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	49.900.000,00	-100.000,00	99,8
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODA	14.242.183.629	13.813.467.485,00	-428.716.144,00	96,99
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.242.183.629	13.813.467.485,00	-428.716.144,00	96,99
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.242.183.629	13.813.467.485,00	-428.716.144,00	96,99
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.060.783.629	13.637.267.485,00	-423.516.144,00	96,99
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.316.194.097	6.192.404.865,00	-123.789.232,00	98,04
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.744.589.532	7.444.862.620,00	-299.726.912,00	96,13
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	181.400.000	176.200.000,00	-5.200.000,00	97,13
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.400.000	151.200.000,00	-5.200.000,00	96,68
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000	25.000.000,00	0	100
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	63.050.043.973	57.575.515.841,00	-5.474.528.132,00	91,32
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga	63.050.043.973	57.575.515.841,00	-5.474.528.132,00	91,32
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	63.050.043.973	57.575.515.841,00	-5.474.528.132,00	91,32
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	62.118.443.973	56.723.858.481,00	-5.394.585.492,00	91,32
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.075.650.000	4.889.008.963,00	-1.186.641.037,00	80,47
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.542.793.973	14.036.549.518,00	-2.506.244.455,00	84,85
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	39.500.000.000	37.798.300.000,00	-1.701.700.000,00	95,69
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	931.600.000	851.657.360,00	-79.942.640,00	91,42
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	646.600.000	571.657.000,00	-74.943.000,00	88,41
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	285.000.000	280.000.360,00	-4.999.640,00	98,25
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	856.518.960	646.339.233,00	-210.179.727,00	75,46
2.20	2.16.2.21.2.20.04.0000		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	856.518.960	646.339.233,00	-210.179.727,00	75,46
2.20	2.16.2.21.2.20.04.0000	5	BELANJA DAERAH	856.518.960	646.339.233,00	-210.179.727,00	75,46
2.20	2.16.2.21.2.20.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	856.518.960	646.339.233,00	-210.179.727,00	75,46
2.20	2.16.2.21.2.20.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	856.518.960	646.339.233,00	-210.179.727,00	75,46
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.231.040.000	1.140.741.743,00	-90.298.257,00	92,66
2.21	2.16.2.21.2.20.04.0000		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.231.040.000	1.140.741.743,00	-90.298.257,00	92,66
2.21	2.16.2.21.2.20.04.0000	5	BELANJA DAERAH	1.231.040.000	1.140.741.743,00	-90.298.257,00	92,66
2.21	2.16.2.21.2.20.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.231.040.000	1.140.741.743,00	-90.298.257,00	92,66
2.21	2.16.2.21.2.20.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.231.040.000	1.140.741.743,00	-90.298.257,00	92,66
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	11.340.373.369	8.550.265.932,00	-2.790.107.437,00	75,4
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.879.773.369	8.092.039.390,00	-2.787.733.979,00	74,38
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	10.879.773.369	8.092.039.390,00	-2.787.733.979,00	74,38
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.829.773.369	3.204.976.222,00	-624.797.147,00	83,69
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.169.773.369	2.544.976.222,00	-624.797.147,00	80,29
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	660.000.000	660.000.000,00	0	100
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	7.050.000.000	4.887.063.168,00	-2.162.936.832,00	69,32
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.050.000.000	4.887.063.168,00	-2.162.936.832,00	69,32
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0004		UPT Taman Budaya	460.600.000	458.226.542,00	-2.373.458,00	99,48
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0004	5	BELANJA DAERAH	460.600.000	458.226.542,00	-2.373.458,00	99,48
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	460.600.000	458.226.542,00	-2.373.458,00	99,48
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.600.000	458.226.542,00	-2.373.458,00	99,48
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	12.394.196.930	11.183.405.839,00	-1.210.791.091,00	90,23
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.394.196.930	11.183.405.839,00	-1.210.791.091,00	90,23
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	12.394.196.930	11.183.405.839,00	-1.210.791.091,00	90,23
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.820.722.051	10.649.651.247,00	-1.171.070.804,00	90,09
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.288.530.168	4.927.115.832,00	-361.414.336,00	93,17
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.532.191.883	5.722.535.415,00	-809.656.468,00	87,61
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	573.474.879	533.754.592,00	-39.720.287,00	93,07
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	573.474.879	533.754.592,00	-39.720.287,00	93,07
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	407.520.000	384.733.600,00	-22.786.400,00	94,41
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	407.520.000	384.733.600,00	-22.786.400,00	94,41

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	407.520.000	384.733.600,00	-22.786.400,00	94,41
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	407.520.000	384.733.600,00	-22.786.400,00	94,41
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.520.000	384.733.600,00	-22.786.400,00	94,41
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	327.725.844.194	285.656.454.845,00	-42.069.389.349,00	87,16
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.753.517.482	34.924.388.613,00	-829.128.869,00	97,68
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	32.059.755.516	31.375.454.534,00	-684.300.982,00	97,87
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	32.059.755.516	31.375.454.534,00	-684.300.982,00	97,87
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	24.820.168.051	24.309.718.438,00	-510.449.613,00	97,94
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.864.754.828	12.646.709.732,00	-218.045.096,00	98,31
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.325.970.223	10.085.848.706,00	-240.121.517,00	97,67
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.629.443.000	1.577.160.000,00	-52.283.000,00	96,79
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	7.239.587.465	7.065.736.096,00	-173.851.369,00	97,6
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.788.587.465	4.750.448.000,00	-38.139.465,00	99,2
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.451.000.000	2.315.288.096,00	-135.711.904,00	94,46
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001		UPTD Pelabuhan Tengkyu II	2.777.012.200	2.688.627.120,00	-88.385.080,00	96,82
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	2.777.012.200	2.688.627.120,00	-88.385.080,00	96,82
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.365.512.200	2.293.566.120,00	-71.946.080,00	96,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	107.880.000	105.840.000,00	-2.040.000,00	98,11
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.257.632.200	2.187.726.120,00	-69.906.080,00	96,9
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	411.500.000	395.061.000,00	-16.439.000,00	96,01
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	391.500.000	375.070.000,00	-16.430.000,00	95,8
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000	19.991.000,00	-9.000,00	99,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002		UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau	483.749.878	442.216.248,00	-41.533.630,00	91,41
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	483.749.878	442.216.248,00	-41.533.630,00	91,41
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	438.449.878	401.231.248,00	-37.218.630,00	91,51
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	65.160.000	61.760.000,00	-3.400.000,00	94,78
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.289.878	339.471.248,00	-33.818.630,00	90,94
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	45.300.000	40.985.000,00	-4.315.000,00	90,47
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.300.000	40.985.000,00	-4.315.000,00	90,47
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	432.999.888	418.090.711,00	-14.909.177,00	96,56
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	432.999.888	418.090.711,00	-14.909.177,00	96,56
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	392.519.888	378.140.711,00	-14.379.177,00	96,34
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	60.040.000	58.680.000,00	-1.360.000,00	97,73
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.479.888	319.460.711,00	-13.019.177,00	96,08
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	40.480.000	39.950.000,00	-530.000,00	98,69
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.480.000	39.950.000,00	-530.000,00	98,69
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	26.446.853.660	23.160.091.331,00	-3.286.762.329,00	87,57
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	26.446.853.660	23.160.091.331,00	-3.286.762.329,00	87,57
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	26.446.853.660	23.160.091.331,00	-3.286.762.329,00	87,57
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	26.136.503.660	22.890.824.331,00	-3.245.679.329,00	87,58
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.875.886.054	4.687.669.358,00	-188.216.696,00	96,14
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.260.617.606	18.203.154.973,00	-3.057.462.633,00	85,62
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	310.350.000	269.267.000,00	-41.083.000,00	86,76
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.350.000	269.267.000,00	-41.083.000,00	86,76
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	55.614.973.310	48.935.949.650,00	-6.679.023.660,00	87,99
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	55.315.035.852	48.678.813.951,00	-6.636.221.901,00	88
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	55.315.035.852	48.678.813.951,00	-6.636.221.901,00	88
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	53.172.988.751	47.064.267.751,00	-6.108.721.000,00	88,51
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.655.516.884	11.149.438.778,00	-1.506.078.106,00	88,1
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.280.371.867	31.677.728.973,00	-4.602.642.894,00	87,31
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	4.237.100.000	4.237.100.000,00	0	100
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.142.047.101	1.614.546.200,00	-527.500.901,00	75,37
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.092.047.101	1.565.526.200,00	-526.520.901,00	74,83
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000	49.020.000,00	-980.000,00	98,04
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0001		UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	299.937.458	257.135.699,00	-42.801.759,00	85,73
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	299.937.458	257.135.699,00	-42.801.759,00	85,73
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	299.937.458	257.135.699,00	-42.801.759,00	85,73
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	47.760.000	47.760.000,00	0	100
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.177.458	209.375.699,00	-42.801.759,00	83,03
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	156.993.008.511	128.569.455.605,00	-28.423.552.906,00	81,9
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kehutanan	92.986.456.077	70.340.607.573,00	-22.645.848.504,00	75,65
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	92.986.456.077	70.340.607.573,00	-22.645.848.504,00	75,65
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	82.637.709.077	62.932.387.463,00	-19.705.321.614,00	76,15
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	36.482.886.413	32.930.544.372,00	-3.552.342.041,00	90,26
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.154.822.664	30.001.843.091,00	-16.152.979.573,00	65
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.348.747.000	7.408.220.110,00	-2.940.526.890,00	71,59
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.148.192.000	7.407.799.510,00	-740.392.490,00	90,91
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.200.000.000	0	-2.200.000.000,00	0
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	555.000	420.600,00	-134.400,00	75,78
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0001		UPT KPH Kabupaten Bulungan	18.499.956.886	17.238.546.104,00	-1.261.410.782,00	93,18
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	18.499.956.886	17.238.546.104,00	-1.261.410.782,00	93,18
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.074.073.270	11.106.898.108,00	-967.175.162,00	91,99
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	149.030.400	136.024.500,00	-13.005.900,00	91,27
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.925.042.870	10.970.873.608,00	-954.169.262,00	92
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	6.425.883.616	6.131.647.996,00	-294.235.620,00	95,42
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.944.383.616	1.816.349.434,00	-128.034.182,00	93,42
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.481.500.000	4.315.298.562,00	-166.201.438,00	96,29
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0004		UPT KPH Kabupaten Malinau	11.296.756.320	9.606.763.143,00	-1.689.993.177,00	85,04
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	11.296.756.320	9.606.763.143,00	-1.689.993.177,00	85,04
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.477.690.139	8.041.223.143,00	-1.436.466.996,00	84,84
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	161.160.000	157.800.000,00	-3.360.000,00	97,92
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.316.530.139	7.883.423.143,00	-1.433.106.996,00	84,62
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	1.819.066.181	1.565.540.000,00	-253.526.181,00	86,06
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.619.066.181	1.565.540.000,00	-53.526.181,00	96,69
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	0	-200.000.000,00	0
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0005		UPT KPH Kabupaten Tana Tidung	11.209.889.525	10.429.603.222,00	-780.286.303,00	93,04
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	11.209.889.525	10.429.603.222,00	-780.286.303,00	93,04
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.811.089.525	7.165.176.435,00	-645.913.090,00	91,73
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	138.480.000	136.860.000,00	-1.620.000,00	98,83

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.672.609.525	7.028.316.435,00	-644.293.090,00	91,6
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	3.398.800.000	3.264.426.787,00	-134.373.213,00	96,05
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.888.800.000	2.765.620.279,00	-123.179.721,00	95,74
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	510.000.000	498.806.508,00	-11.193.492,00	97,81
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0003		UPT KPH Kabupaten Nunukan	11.000.000.000	9.962.474.461,00	-1.037.525.539,00	90,57
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	11.000.000.000	9.962.474.461,00	-1.037.525.539,00	90,57
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.135.315.840	7.409.886.846,00	-725.428.994,00	91,08
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	136.770.000	132.350.000,00	-4.420.000,00	96,77
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.998.545.840	7.277.536.846,00	-721.008.994,00	90,99
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.864.684.160	2.552.587.615,00	-312.096.545,00	89,11
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.664.684.160	2.355.827.615,00	-308.856.545,00	88,41
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	196.760.000,00	-3.240.000,00	98,38
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0002		UPT KPH Kota Tarakan	11.999.949.703	10.991.461.102,00	-1.008.488.601,00	91,6
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	11.999.949.703	10.991.461.102,00	-1.008.488.601,00	91,6
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.894.213.403	8.104.884.160,00	-789.329.243,00	91,13
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	157.560.000	156.880.000,00	-680.000,00	99,57
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.736.653.403	7.948.004.160,00	-788.649.243,00	90,97
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.105.736.300	2.886.576.942,00	-219.159.358,00	92,94
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.095.736.300	2.876.781.192,00	-218.955.108,00	92,93
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000	9.795.750,00	-204.250,00	97,96
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	18.406.420.956	16.733.959.129,00	-1.672.461.827,00	90,91
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.406.420.956	16.733.959.129,00	-1.672.461.827,00	90,91
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	18.406.420.956	16.733.959.129,00	-1.672.461.827,00	90,91
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.803.420.956	15.165.544.129,00	-1.637.876.827,00	90,25
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.244.879.109	5.920.281.209,00	-324.597.900,00	94,8
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.858.541.847	7.411.180.420,00	-447.361.427,00	94,31
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.700.000.000	1.834.082.500,00	-865.917.500,00	67,93
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.603.000.000	1.568.415.000,00	-34.585.000,00	97,84
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.000.000	192.575.000,00	-10.425.000,00	94,86
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.400.000.000	1.375.840.000,00	-24.160.000,00	98,27
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	28.816.577.748	27.749.957.596,00	-1.066.620.152,00	96,3
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	28.816.577.748	27.749.957.596,00	-1.066.620.152,00	96,3
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5	BELANJA DAERAH	28.816.577.748	27.749.957.596,00	-1.066.620.152,00	96,3
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	23.596.577.748	23.359.861.591,00	-236.716.157,00	99
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000	6.000.000,00	-840.000,00	87,72
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.745.183.248	3.579.280.891,00	-165.902.357,00	95,57
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	19.794.554.500	19.724.580.700,00	-69.973.800,00	99,65
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000,00	0	100
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.220.000.000	4.390.096.005,00	-829.903.995,00	84,1
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000	600.000.000,00	0	100
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.620.000.000	3.790.096.005,00	-829.903.995,00	82,04
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.382.703.508	5.271.457.645,00	-111.245.863,00	97,93
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.382.703.508	5.271.457.645,00	-111.245.863,00	97,93
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	5	BELANJA DAERAH	5.382.703.508	5.271.457.645,00	-111.245.863,00	97,93
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.959.363.508	2.895.474.551,00	-63.888.957,00	97,84
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.709.363.508	1.645.474.551,00	-63.888.957,00	96,26
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.250.000.000	1.250.000.000,00	0	100
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.423.340.000	2.375.983.094,00	-47.356.906,00	98,05
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.828.340.000	1.802.850.000,00	-25.490.000,00	98,61
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	555.000.000	533.457.809,00	-21.542.191,00	96,12
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.000.000	39.675.285,00	-324.715,00	99,19
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	311.789.019	311.195.276,00	-593.743,00	99,81
3.32	2.07.3.32.0.00.02.0000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	311.789.019	311.195.276,00	-593.743,00	99,81
3.32	2.07.3.32.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	311.789.019	311.195.276,00	-593.743,00	99,81
3.32	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	281.789.019	281.264.276,00	-524.743,00	99,81
3.32	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.789.019	281.264.276,00	-524.743,00	99,81
3.32	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000	29.931.000,00	-69.000,00	99,77
3.32	2.07.3.32.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000	29.931.000,00	-69.000,00	99,77
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	358.726.176.493	316.119.182.952,00	-42.606.993.541,66	88,12
04.01			SEKRETARIAT DAERAH	234.733.358.154	210.857.685.168,00	-23.875.672.986,66	89,83
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0008		Biro Administrasi Pimpinan	9.864.998.909	9.058.619.689,00	-806.379.220,00	91,83
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	9.864.998.909	9.058.619.689,00	-806.379.220,00	91,83
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.470.348.909	8.694.119.689,00	-776.229.220,00	91,8
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	188.520.000	187.440.000,00	-1.080.000,00	99,43
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.281.828.909	8.506.679.689,00	-775.149.220,00	91,65
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	394.650.000	364.500.000,00	-30.150.000,00	92,36
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	394.650.000	364.500.000,00	-30.150.000,00	92,36
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0003		Biro Kesejahteraan Rakyat	67.691.637.022	61.996.783.051,00	-5.694.853.971,66	91,59
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	67.691.637.022	61.996.783.051,00	-5.694.853.971,66	91,59
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	67.493.828.022	61.816.583.051,00	-5.677.244.971,66	91,59
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	273.330.000	266.600.000,00	-6.730.000,00	97,54
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.336.298.022	20.778.283.051,00	-1.558.014.971,66	93,02
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	44.884.200.000	40.771.700.000,00	-4.112.500.000,00	90,84
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	197.809.000	180.200.000,00	-17.609.000,00	91,1
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.809.000	180.200.000,00	-17.609.000,00	91,1
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0001		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	6.474.779.382	6.086.983.662,00	-387.795.720,00	94,01
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	6.474.779.382	6.086.983.662,00	-387.795.720,00	94,01
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.184.379.382	5.810.483.662,00	-373.895.720,00	93,95
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	233.400.000	228.640.000,00	-4.760.000,00	97,96
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.950.979.382	5.581.843.662,00	-369.135.720,00	93,8
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	290.400.000	276.500.000,00	-13.900.000,00	95,21
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.400.000	257.950.000,00	-12.450.000,00	95,4
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000	18.550.000,00	-1.450.000,00	92,75
04.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		Biro Administrasi Pembangunan	3.174.999.581	2.978.825.812,00	-196.173.769,00	93,82
04.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	3.174.999.581	2.978.825.812,00	-196.173.769,00	93,82
04.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.020.667.101	2.827.520.812,00	-193.146.289,00	93,61
04.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	145.960.000	144.150.000,00	-1.810.000,00	98,76
04.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.874.707.101	2.683.370.812,00	-191.336.289,00	93,34
04.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	154.332.480	151.305.000,00	-3.027.480,00	98,04

	KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
04.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.332.480	151.305.000,00	-3.027.480,00	98,04
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0007		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.253.980.419	4.013.821.111,00	-240.159.308,00	94,35
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	4.253.980.419	4.013.821.111,00	-240.159.308,00	94,35
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.866.180.419	3.648.914.111,00	-217.266.308,00	94,38
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	141.600.000	137.520.000,00	-4.080.000,00	97,12
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.724.580.419	3.511.394.111,00	-213.186.308,00	94,28
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	387.800.000	364.907.000,00	-22.893.000,00	94,1
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	387.800.000	364.907.000,00	-22.893.000,00	94,1
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0002		Biro Hukum	3.174.997.684	2.989.308.587,00	-185.689.097,00	94,15
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	3.174.997.684	2.989.308.587,00	-185.689.097,00	94,15
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.158.997.684	2.978.454.187,00	-180.543.497,00	94,28
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	79.400.000	79.400.000,00	0	100
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.079.597.684	2.899.054.187,00	-180.543.497,00	94,14
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	16.000.000	10.854.400,00	-5.145.600,00	67,84
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000	10.854.400,00	-5.145.600,00	67,84
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0004		Biro Organisasi	3.878.376.013	3.790.814.497,00	-87.561.516,00	97,74
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	3.878.376.013	3.790.814.497,00	-87.561.516,00	97,74
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.802.976.013	3.731.314.497,00	-71.661.516,00	98,12
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	149.300.000	149.300.000,00	0	100
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.653.676.013	3.582.014.497,00	-71.661.516,00	98,04
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	75.400.000	59.500.000,00	-15.900.000,00	78,91
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.400.000	59.500.000,00	-15.900.000,00	78,91
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0006		Biro Umum	132.544.589.144	116.561.190.600,00	-15.983.398.544,00	87,94
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	132.544.589.144	116.561.190.600,00	-15.983.398.544,00	87,94
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	128.037.693.144	112.713.919.320,00	-15.323.773.824,00	88,03
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	53.519.507.546	51.338.197.640,00	-2.181.309.906,00	95,92
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.518.185.598	61.375.721.680,00	-13.142.463.918,00	82,36
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.506.896.000	3.847.271.280,00	-659.624.720,00	85,36
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.506.896.000	3.847.271.280,00	-659.624.720,00	85,36
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0010		Biro Perekonomian	3.675.000.000	3.381.338.159,00	-293.661.841,00	92,01
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	3.675.000.000	3.381.338.159,00	-293.661.841,00	92,01
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.647.000.000	3.356.798.159,00	-290.201.841,00	92,04
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	142.800.000	140.080.000,00	-2.720.000,00	98,1
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.504.200.000	3.216.718.159,00	-287.481.841,00	91,8
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	28.000.000	24.540.000,00	-3.460.000,00	87,64
04.01	4.01.2.10.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000	24.540.000,00	-3.460.000,00	87,64
04.02			SEKRETARIAT DPRD	123.992.818.339	105.261.497.784,00	-18.731.320.555,00	84,89
04.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	123.992.818.339	105.261.497.784,00	-18.731.320.555,00	84,89
04.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	123.992.818.339	105.261.497.784,00	-18.731.320.555,00	84,89
04.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	120.943.614.339	102.659.520.234,00	-18.284.094.105,00	84,88
04.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	31.132.540.584	29.738.378.501,00	-1.394.162.083,15	95,52
04.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.811.073.754	72.921.141.733,00	-16.889.932.021,85	81,19
04.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.049.204.000	2.601.977.550,00	-447.226.450,00	85,33
04.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.049.204.000	2.601.977.550,00	-447.226.450,00	85,33
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	873.088.857.556	743.808.449.680,00	-129.280.407.876,75	85,19
05.01			PERENCANAAN	26.661.296.927	22.657.524.481,00	-4.003.772.446,00	84,98
05.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	26.661.296.927	22.657.524.481,00	-4.003.772.446,00	84,98
05.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	26.661.296.927	22.657.524.481,00	-4.003.772.446,00	84,98
05.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	26.018.956.927	22.020.307.581,00	-3.998.649.346,00	84,63
05.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.871.246.062	7.895.240.975,00	-976.005.087,00	89
05.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.147.710.865	14.125.066.606,00	-3.022.644.259,00	82,37
05.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	642.340.000	637.216.900,00	-5.123.100,00	99,2
05.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	642.340.000	637.216.900,00	-5.123.100,00	99,2
05.02			KEUANGAN	781.416.118.512	664.893.027.872,00	-116.523.090.640,75	85,09
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	715.436.858.917	600.485.571.823,00	-114.951.287.094,75	83,93
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5	BELANJA DAERAH	715.436.858.917	600.485.571.823,00	-114.951.287.094,75	83,93
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	59.411.324.706	46.437.194.700,00	-12.974.130.006,10	78,16
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	17.254.651.157	16.279.179.165,00	-975.471.992,10	94,35
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.335.673.549	23.969.037.535,00	-11.366.636.014,00	67,83
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	6.821.000.000	6.188.978.000,00	-632.022.000,00	90,73
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	23.650.450.000	22.153.821.221,00	-1.496.628.779,00	93,67
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.020.450.000	2.830.845.000,00	-189.605.000,00	93,72
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.630.000.000	19.322.976.221,00	-1.307.023.779,00	93,66
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.000.000.000	7.566.963.773,00	-433.036.227,00	94,59
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	7.566.963.773,00	-433.036.227,00	94,59
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	624.375.084.211	524.327.592.129,00	-100.047.492.082,65	83,98
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	436.318.484.211	336.426.911.141,00	-99.891.573.070,65	77,11
05.02	5.02.5.02.5.02.02.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	188.056.600.000	187.900.680.988,00	-155.919.012,00	99,92
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0000		Badan Pendapatan Daerah	53.733.331.252	52.504.392.706,00	-1.228.938.546,00	97,71
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	53.733.331.252	52.504.392.706,00	-1.228.938.546,00	97,71
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	51.486.791.252	50.312.304.382,00	-1.174.486.870,00	97,72
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	40.566.193.312	39.730.270.452,00	-835.922.860,00	97,94
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.920.597.940	10.582.033.930,00	-338.564.010,00	96,9
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.246.540.000	2.192.088.324,00	-54.451.676,00	97,58
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000	98.840.372,00	-1.159.628,00	98,84
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.604.095.000	1.555.165.537,00	-48.929.463,00	96,95
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000	124.800.000,00	-200.000,00	99,84
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.445.000	108.032.415,00	-2.412.585,00	97,82
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	307.000.000	305.250.000,00	-1.750.000,00	99,43
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0001		UPT Bapenda Bulungan	2.925.000.000	2.886.115.009,00	-38.884.991,00	98,67
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5	BELANJA DAERAH	2.925.000.000	2.886.115.009,00	-38.884.991,00	98,67
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.901.690.000	2.866.145.009,00	-35.544.991,00	98,78
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	78.480.000	78.480.000,00	0	100
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.823.210.000	2.787.665.009,00	-35.544.991,00	98,74
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	23.310.000	19.970.000,00	-3.340.000,00	85,67
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.310.000	19.970.000,00	-3.340.000,00	85,67
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0002		UPT Bapenda Tarakan	3.290.929.054	3.239.367.690,00	-51.561.364,00	98,43
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5	BELANJA DAERAH	3.290.929.054	3.239.367.690,00	-51.561.364,00	98,43
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.227.275.054	3.176.132.690,00	-51.142.364,00	98,42

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	87.300.000	73.740.000,00	-13.560.000,00	84,47
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.139.975.054	3.102.392.690,00	-37.582.364,00	98,8
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	63.654.000	63.235.000,00	-419.000,00	99,34
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.654.000	63.235.000,00	-419.000,00	99,34
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0003		UPT Bapenda Nunukan	2.489.999.801	2.440.666.716,00	-49.333.085,00	98,02
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5	BELANJA DAERAH	2.489.999.801	2.440.666.716,00	-49.333.085,00	98,02
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.467.999.801	2.421.416.716,00	-46.583.085,00	98,11
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	76.800.000	76.800.000,00	0	100
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.391.199.801	2.344.616.716,00	-46.583.085,00	98,05
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	22.000.000	19.250.000,00	-2.750.000,00	87,5
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000	19.250.000,00	-2.750.000,00	87,5
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0004		UPT Bapenda Malinau	1.915.000.000	1.839.781.220,00	-75.218.780,00	96,07
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5	BELANJA DAERAH	1.915.000.000	1.839.781.220,00	-75.218.780,00	96,07
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.915.000.000	1.839.781.220,00	-75.218.780,00	96,07
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	76.800.000	76.800.000,00	0	100
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.838.200.000	1.762.981.220,00	-75.218.780,00	95,91
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0005		UPT Bapenda Tana Tidung	1.624.999.488	1.497.132.708,00	-127.866.780,00	92,13
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5	BELANJA DAERAH	1.624.999.488	1.497.132.708,00	-127.866.780,00	92,13
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.573.112.488	1.451.347.708,00	-121.764.780,00	92,26
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	76.800.000	64.000.000,00	-12.800.000,00	83,33
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.496.312.488	1.387.347.708,00	-108.964.780,00	92,72
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.2	BELANJA MODAL	51.887.000	45.785.000,00	-6.102.000,00	88,24
05.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mcsin	51.887.000	45.785.000,00	-6.102.000,00	88,24
05.03			KEPEGAWAIAN	17.280.949.288	14.856.340.056,00	-2.424.609.232,00	85,97
05.03	5.03.0.00.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian Daerah	17.280.949.288	14.856.340.056,00	-2.424.609.232,00	85,97
05.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	17.280.949.288	14.856.340.056,00	-2.424.609.232,00	85,97
05.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.607.179.288	12.283.662.056,00	-2.323.517.232,00	84,09
05.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.842.461.670	4.478.462.453,00	-1.363.999.217,00	76,65
05.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.764.717.618	7.805.199.603,00	-959.518.015,00	89,05
05.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.673.770.000	2.572.678.000,00	-101.092.000,00	96,22
05.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.336.270.000	2.258.950.000,00	-77.320.000,00	96,69
05.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.500.000	85.478.000,00	-22.022.000,00	79,51
05.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	230.000.000	228.250.000,00	-1.750.000,00	99,24
05.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	18.173.220.942	16.290.552.588,00	-1.882.668.354,00	89,64
05.04	5.04.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.173.220.942	16.290.552.588,00	-1.882.668.354,00	89,64
05.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	18.173.220.942	16.290.552.588,00	-1.882.668.354,00	89,64
05.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.440.376.065	15.652.636.188,00	-1.787.739.877,00	89,75
05.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.940.277.443	5.654.253.690,00	-286.023.753,00	95,19
05.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.098.622	9.998.382.498,00	-1.501.716.124,00	86,94
05.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	732.844.877	637.916.400,00	-94.928.477,00	87,05
05.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	730.844.877	637.916.400,00	-92.928.477,00	87,28
05.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.000.000	0	-2.000.000,00	0
05.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.666.643.165	3.792.630.890,00	-2.874.012.275,00	56,89
05.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	6.666.643.165	3.792.630.890,00	-2.874.012.275,00	56,89
05.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.666.643.165	3.792.630.890,00	-2.874.012.275,00	56,89
05.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.666.643.165	3.792.630.890,00	-2.874.012.275,00	56,89
05.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.666.643.165	3.792.630.890,00	-2.874.012.275,00	56,89
05.06			PENGLOLAAN PERBATASAN	9.207.030.000	8.403.636.546,00	-803.393.454,00	91,27
05.06	5.06.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	9.207.030.000	8.403.636.546,00	-803.393.454,00	91,27
05.06	5.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.207.030.000	8.403.636.546,00	-803.393.454,00	91,27
05.06	5.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.175.370.000	8.372.136.546,00	-803.233.454,00	91,25
05.06	5.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.370.806.739	3.712.757.005,00	-658.049.734,00	84,94
05.06	5.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.804.563.261	4.659.379.541,00	-145.183.720,00	96,98
05.06	5.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	31.660.000	31.500.000,00	-160.000,00	99,49
05.06	5.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.660.000	31.500.000,00	-160.000,00	99,49
05.07			PENGLOLAAN PENGHUBUNG	13.683.598.722	12.914.737.247,00	-768.861.475,00	94,38
05.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		Badan Penghubung	13.683.598.722	12.914.737.247,00	-768.861.475,00	94,38
05.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.683.598.722	12.914.737.247,00	-768.861.475,00	94,38
05.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.460.803.722	12.696.302.648,00	-764.501.074,00	94,32
05.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.158.760.992	2.632.402.564,00	-526.358.428,00	83,34
05.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.302.042.730	10.063.900.084,00	-238.142.646,00	97,69
05.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	222.795.000	218.434.599,00	-4.360.401,00	98,04
05.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.795.000	218.434.599,00	-4.360.401,00	98,04
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	31.451.326.523	26.441.893.334,00	-5.009.433.189,00	84,07
06.01			INSPEKTORAT DAERAH	31.451.326.523	26.441.893.334,00	-5.009.433.189,00	84,07
06.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	31.451.326.523	26.441.893.334,00	-5.009.433.189,00	84,07
06.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	31.451.326.523	26.441.893.334,00	-5.009.433.189,00	84,07
06.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	30.572.826.523	25.583.930.519,00	-4.988.896.004,00	83,68
06.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.001.001.161	10.351.221.169,00	-649.779.992,00	94,09
06.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.571.825.362	15.232.709.350,00	-4.339.116.012,00	77,83
06.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	878.500.000	857.962.815,00	-20.537.185,00	97,66
06.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	878.500.000	857.962.815,00	-20.537.185,00	97,66
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	111.001.626.225	109.033.294.967,00	-1.968.331.258,00	98,23
08.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	111.001.626.225	109.033.294.967,00	-1.968.331.258,00	98,23
08.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	111.001.626.225	109.033.294.967,00	-1.968.331.258,00	98,23
08.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	111.001.626.225	109.033.294.967,00	-1.968.331.258,00	98,23
08.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	110.881.626.225	108.937.294.967,00	-1.944.331.258,00	98,25
08.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.042.060.899	4.680.250.564,00	-361.810.335,00	92,82
08.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.649.651.768	8.267.130.845,00	-1.382.520.923,00	85,67
08.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	96.189.913.558	95.989.913.558,00	-200.000.000,00	99,79
08.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	120.000.000	96.000.000,00	-24.000.000,00	80
08.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.000.000	96.000.000,00	-24.000.000,00	80
			Jumlah	-124.743.726.516	-111.933.644.122,09	12.810.082.394,32	89,73

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

1003/SEK/P.KALTARA

LAMPIRAN I.2
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN APBD YANG DI KLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.852.949.417.741,00	3.459.025.374.470,97	89,78	3.091.012.760.999,05
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.107.881.465.270,00	1.033.746.861.867,97	93,31	980.136.675.968,05
4.1.01	Pajak Daerah	855.201.042.959,00	761.219.619.467,00	89,01	717.253.715.401,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	105.000.000.000,00	101.677.587.600,00	96,84	96.605.027.400,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	631.000.000,00	560.639.500,00	88,85	545.095.300,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	592.250.000,00	524.602.700,00	88,58	509.059.200,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	38.750.000,00	36.036.800,00	93,00	36.036.100,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	5.407.000.000,00	5.481.497.400,00	101,38	4.873.387.900,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	5.013.000.000,00	5.240.739.600,00	104,54	4.728.312.800,00
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	1.000.000,00	141.800,00	14,18	0,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	393.000.000,00	240.616.000,00	61,23	145.075.100,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	38.835.000.000,00	37.354.266.800,00	96,19	34.606.373.100,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	37.550.000.000,00	36.002.133.100,00	95,88	33.291.218.000,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	95.000.000,00	100.107.200,00	105,38	83.319.800,00
4.1.01.01.03.0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	0,00	735.000,00	0,00	0,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	1.190.000.000,00	1.251.291.500,00	105,15	1.231.835.300,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	325.000.000,00	329.312.000,00	101,33	338.254.300,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	226.000.000,00	185.786.300,00	82,21	226.736.600,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	10.000.000,00	12.630.800,00	126,31	19.747.200,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	89.000.000,00	130.894.900,00	147,07	91.770.500,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	65.000.000,00	31.594.200,00	48,61	12.945.800,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	33.000.000,00	13.505.300,00	40,93	5.607.300,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	20.000.000,00	9.815.400,00	49,08	0,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	12.000.000,00	8.273.500,00	68,95	7.338.500,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	16.360.000.000,00	16.192.197.000,00	98,97	15.883.893.900,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	15.575.000.000,00	15.302.834.500,00	98,25	14.897.389.400,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	42.500.000,00	32.930.600,00	77,48	25.446.300,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	742.500.000,00	856.431.900,00	115,34	961.058.200,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	7.745.000.000,00	7.766.507.100,00	100,28	6.354.429.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	7.188.000.000,00	7.188.864.600,00	100,01	5.935.540.300,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	367.000.000,00	356.258.000,00	97,07	232.163.800,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	190.000.000,00	221.384.500,00	116,52	186.725.700,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.460.000.000,00	3.170.592.600,00	91,64	4.974.787.600,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	2.960.000.000,00	2.917.390.000,00	98,56	4.545.161.300,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	320.000.000,00	187.998.600,00	58,75	312.406.700,00
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	6.104.000,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	180.000.000,00	65.204.000,00	36,22	111.115.600,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	46.000.000,00	43.580.700,00	94,74	38.844.700,00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	45.000.000,00	40.808.500,00	90,69	37.613.200,00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1.000.000,00	2.772.200,00	277,22	1.231.500,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	32.105.000.000,00	30.699.273.000,00	95,62	28.939.287.600,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	31.825.000.000,00	30.388.774.800,00	95,49	28.632.365.900,00
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	0,00	306.000,00	0,00	0,00
4.1.01.01.10.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	0,00	1.164.500,00	0,00	0,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	280.000.000,00	309.027.700,00	110,37	306.921.700,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	21.000.000,00	39.488.000,00	188,04	37.727.400,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	11.300.000,00	29.252.500,00	258,87	31.595.400,00
4.1.01.01.11.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	0,00	336.000,00	0,00	0,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	9.700.000,00	9.899.500,00	102,06	6.132.000,00
4.1.01.01.17	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box	0,00	8.046.300,00	0,00	0,00
4.1.01.01.17.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pribadi	0,00	8.046.300,00	0,00	0,00
4.1.01.01.18	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang	0,00	593.000,00	0,00	0,00
4.1.01.01.18.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi	0,00	169.500,00	0,00	0,00
4.1.01.01.18.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Daerah	0,00	423.500,00	0,00	0,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	121.000.000.000,00	124.340.376.200,00	102,76	121.111.532.300,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	195.000.000,00	102.540.000,00	52,58	101.540.000,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	195.000.000,00	102.540.000,00	52,58	101.540.000,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	4.100.000.000,00	4.584.300.000,00	111,81	3.610.640.000,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	4.100.000.000,00	4.584.300.000,00	111,81	3.610.640.000,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	33.200.000.000,00	34.882.164.000,00	105,07	34.046.786.200,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	33.200.000.000,00	34.882.164.000,00	105,07	34.046.786.200,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	595.000.000,00	736.650.000,00	123,81	448.332.000,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	595.000.000,00	736.650.000,00	123,81	448.332.000,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	23.200.000.000,00	21.407.620.000,00	92,27	27.010.418.100,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	23.200.000.000,00	21.407.620.000,00	92,27	27.010.418.100,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	6.000.000.000,00	6.556.596.000,00	109,28	2.884.479.500,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	6.000.000.000,00	6.556.596.000,00	109,28	2.884.479.500,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.250.000.000,00	1.687.118.000,00	134,97	3.181.772.000,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.250.000.000,00	1.687.118.000,00	134,97	3.181.772.000,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	53.000.000,00	50.610.000,00	95,49	16.350.000,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	53.000.000,00	50.610.000,00	95,49	16.350.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	52.365.000.000,00	54.214.289.200,00	103,53	49.768.624.500,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	52.365.000.000,00	54.214.289.200,00	103,53	49.768.624.500,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	42.000.000,00	118.489.000,00	282,12	40.295.000,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	42.000.000,00	118.489.000,00	282,12	40.295.000,00
4.1.01.02.14	BBNKB-Mobil Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00
4.1.01.02.14.0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	550.000.000.000,00	471.835.087.950,00	85,79	442.532.752.438,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	82.000.000.000,00	73.571.699.583,00	89,72	67.329.090.195,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	82.000.000.000,00	73.571.699.583,00	89,72	67.329.090.195,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	468.000.000.000,00	398.263.388.367,00	85,10	375.203.662.243,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	468.000.000.000,00	398.263.388.367,00	85,10	375.203.662.243,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00	4.617.481.703,00	115,44	3.242.380.244,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00	4.617.481.703,00	115,44	3.242.380.244,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00	4.617.481.703,00	115,44	3.242.380.244,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	65.201.042.959,00	56.996.131.814,00	87,42	53.762.023.019,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	65.201.042.959,00	56.996.131.814,00	87,42	53.762.023.019,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	65.201.042.959,00	56.996.131.814,00	87,42	53.762.023.019,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	10.000.000.000,00	1.752.954.200,00	17,53	0,00
4.1.01.17.01	Pajak Alat Berat	10.000.000.000,00	1.752.954.200,00	17,53	0,00
4.1.01.17.01.0001	Pajak Alat Berat	10.000.000.000,00	1.752.954.200,00	17,53	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	20.055.000.000,00	10.789.764.538,16	53,80	17.404.890.968,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	19.605.000.000,00	10.560.455.338,16	53,87	17.264.910.968,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.555.000.000,00	778.952.158,00	9,11	10.261.867.320,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	7.400.000.000,00	768.439.658,00	10,38	10.189.909.820,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.050.000.000,00	3.512.500,00	0,33	56.500,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	105.000.000,00	7.000.000,00	6,67	71.901.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	750.000.000,00	983.896.933,16	131,19	273.138.500,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	750.000.000,00	983.896.933,16	131,19	273.138.500,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000.000,00	8.688.286.847,00	86,88	6.627.048.148,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000.000,00	8.688.286.847,00	86,88	6.627.048.148,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00	100.317.000,00	33,44	102.857.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00	100.317.000,00	33,44	102.857.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	9.002.400,00	0,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0,00	9.002.400,00	0,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	450.000.000,00	229.309.200,00	50,96	139.980.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	1.170.000,00	0,00	13.980.000,00
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	0,00	0,00	0,00	13.980.000,00
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	450.000.000,00	228.139.200,00	50,70	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	450.000.000,00	228.139.200,00	50,70	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.371.469.793,00	11.371.469.793,77	100,00	10.114.672.311,44
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.371.469.793,00	11.371.469.793,77	100,00	10.114.672.311,44
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.371.469.793,00	11.371.469.793,77	100,00	10.114.672.311,44
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.371.469.793,00	11.371.469.793,77	100,00	10.114.672.311,44
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	221.253.952.518,00	250.366.008.069,04	113,16	235.363.397.287,61
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	52.623.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	35.678.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	35.678.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	16.945.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	16.945.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00	1.765.310.303,72	88,27	2.564.694.574,38
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	1.703.601.665,78	85,18	2.496.783.107,55
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	1.703.601.665,78	85,18	2.496.783.107,55
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	53.256.404,98	0,00	59.754.597,20
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	53.256.404,98	0,00	59.754.597,20
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	8.452.232,96	0,00	8.156.869,63
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	8.452.232,96	0,00	8.156.869,63
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	16.000.000.000,00	22.397.030.251,53	139,98	12.649.223.813,31
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00	22.397.030.251,53	139,98	12.649.223.813,31
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00	22.397.030.251,53	139,98	12.649.223.813,31
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	73.668.650,00	0,00	943.745,74
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	73.668.650,00	0,00	943.745,74
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	73.668.650,00	0,00	943.745,74
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.535.547.569,73	0,00	1.433.678.764,57
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.535.547.569,73	0,00	1.433.678.764,57
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.535.547.569,73	0,00	1.433.678.764,57
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.253.952.518,00	2.251.065.000,00	69,18	2.304.563.829,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.362.175.000,00	2.150.751.452,00	91,05	2.000.280.140,00
4.1.04.12.01.0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	0,00	0,00	0,00	13.117.800,00
4.1.04.12.01.0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	0,00	0,00	0,00	99.866.200,00
4.1.04.12.01.0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	0,00	0,00	0,00	657.934.600,00
4.1.04.12.01.0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	0,00	0,00	0,00	11.204.700,00
4.1.04.12.01.0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	0,00	0,00	0,00	391.500,00
4.1.04.12.01.0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0,00	0,00	0,00	323.904.800,00
4.1.04.12.01.0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0,00	0,00	0,00	141.555.400,00
4.1.04.12.01.0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	0,00	0,00	0,00	75.899.240,00
4.1.04.12.01.0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	0,00	0,00	79.700,00
4.1.04.12.01.0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	0,00	0,00	671.945.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.04.12.01.0011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	493.300,00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	14.197.500,00	14.946.700,00	105,28	0,00
4.1.04.12.01.0018	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	0,00	852.400,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	121.657.500,00	103.200.500,00	84,83	0,00
4.1.04.12.01.0022	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	0,00	1.994.800,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	873.462.500,00	724.089.700,00	82,90	0,00
4.1.04.12.01.0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	0,00	767.700,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0026	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	0,00	19.437.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	7.312.500,00	2.924.900,00	40,00	0,00
4.1.04.12.01.0030	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	0,00	3.051.600,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.462.500,00	176.900,00	12,10	0,00
4.1.04.12.01.0034	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	0,00	120.700,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	368.100.000,00	293.633.400,00	79,77	0,00
4.1.04.12.01.0036	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	0,00	328.100,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0038	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	0,00	14.104.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	174.262.500,00	147.982.100,00	84,92	0,00
4.1.04.12.01.0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	0,00	4.935.400,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0042	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	0,00	4.078.500,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	77.850.000,00	60.593.100,00	77,83	0,00
4.1.04.12.01.0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	0,00	1.264.600,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0046	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	0,00	196.200,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	1.035.000,00	799.400,00	77,24	0,00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	722.362.500,00	745.823.052,00	103,25	3.887.100,00
4.1.04.12.01.0054	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	0,00	4.962.600,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	360.000,00	392.100,00	108,92	0,00
4.1.04.12.01.0058	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	112.500,00	77.700,00	69,07	0,00
4.1.04.12.01.0063	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	0,00	18.300,00	0,00	0,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	786.027.518,00	70.917.700,00	9,02	61.475.100,00
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.330.000,00	806.300,00	60,62	1.206.200,00
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	27.100.000,00	521.600,00	1,92	2.112.000,00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	211.500.000,00	32.115.000,00	15,18	9.613.900,00
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.942.518,00	0,00	0,00	179.700,00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	153.800.000,00	7.229.500,00	4,70	28.550.300,00
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	40.500.000,00	17.822.400,00	44,01	4.792.200,00
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	8.100.000,00	673.000,00	8,31	3.714.400,00
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	339.755.000,00	11.240.900,00	3,31	11.306.400,00
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	0,00	509.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	65.750.000,00	16.873.266,00	25,66	231.444.669,00
4.1.04.12.03.0001	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.03.0002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	40.750.000,00	16.873.266,00	41,41	231.444.669,00
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	40.000.000,00	12.522.582,00	31,31	11.363.920,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	40.000.000,00	12.522.582,00	31,31	11.363.920,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	2.266.400,84	0,00	1.961.660,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	2.266.400,84	0,00	1.961.660,00
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.821.660,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	353.600,00	0,00	140.000,00
4.1.04.13.02.0027	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	1.912.800,84	0,00	0,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	380.932.178,13	0,00	0,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	380.932.178,13	0,00	0,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	380.932.178,13	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	4.464.626.779,90	0,00	4.560.079.983,34
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	4.201.080.671,34
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	4.201.080.671,34
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	672.838.317,06	0,00	358.999.312,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	672.838.317,06	0,00	358.999.312,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	127.651.186,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	84.611.240,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	43.039.946,00	0,00	0,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	208.048.030,84	0,00	0,00
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	208.048.030,84	0,00	0,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	75.158.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.10.0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	65.999.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.10.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	9.159.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	179.819.589,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	45.496.096,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	82.674.183,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	51.649.310,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	866.534.921,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	17.105.130,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	215.417.656,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	3.119.657,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	104.202.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0244	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	750.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0926	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	330.286.500,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0990	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis	0,00	130.653.978,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	254.396.693,40	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	44.487.073,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0444	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	20.885.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	189.024.620,40	0,00	0,00
4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	127.564.074,00	0,00	0,00
4.1.04.15.18.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	127.564.074,00	0,00	0,00
4.1.04.15.43	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	4.672.090,09	0,00	0,00
4.1.04.15.43.0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	4.672.090,09	0,00	0,00
4.1.04.15.46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	133.022.507,23	0,00	0,00
4.1.04.15.46.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	133.022.507,23	0,00	0,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	653.871.035,84	0,00	0,00
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	653.871.035,84	0,00	0,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	1.161.050.335,44	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.04.15.65.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	0,00	1.161.050.335,44	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	200.000.000.000,00	216.442.937.935,19	108,22	211.848.250.917,27
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	211.848.250.917,27
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	211.848.250.917,27
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	200.000.000.000,00	216.246.905.692,85	108,12	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	200.000.000.000,00	216.246.905.692,85	108,12	0,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	196.032.242,34	0,00	0,00
4.1.04.16.06.0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	0,00	196.032.242,34	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.107.881.465.270,00	1.033.746.861.867,97	93,31	980.136.675.968,05
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.744.717.952.471,00	2.417.275.881.907,00	88,07	2.104.954.266.065,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.744.717.952.471,00	2.417.275.881.907,00	88,07	2.104.954.266.065,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	24.666.327.000,00
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	24.666.327.000,00
4.2.01.02.01.0001	DID	0,00	0,00	0,00	24.666.327.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.732.069.458.471,00	2.404.627.387.907,00	88,01	2.080.287.939.065,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.328.757.092.471,00	1.006.246.935.000,00	75,73	689.779.609.710,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	42.144.813.000,00	54.321.366.000,00	128,89	97.009.281.941,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	21.667.492.000,00	25.970.975.000,00	119,86	27.903.873.816,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.149.562.000,00	1.199.893.000,00	104,38	2.030.074.610,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	385.000,00	1.000,00	0,26	28.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.777.163.000,00	3.119.865.000,00	112,34	10.071.463.696,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	503.565.000,00	503.565.000,00	100,00	673.411.314,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.590.996.000,00	3.213.752.000,00	124,04	2.129.137.956,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.175.127.860.471,00	833.375.179.000,00	70,92	467.074.691.054,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.098.697.000,00	6.098.697.000,00	100,00	21.332.360.660,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	2.326.877.000,00	2.326.877.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	65.173.260.000,00	66.920.343.000,00	102,68	61.555.286.663,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	9.196.422.000,00	9.196.422.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.154.831.485.000,00	1.153.992.670.001,00	99,93	1.117.056.619.340,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	919.640.493.000,00	919.640.493.000,00	100,00	1.117.056.619.340,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.119.904.000,00	2.281.089.001,00	73,11	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	116.535.602.000,00	116.535.602.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	10.303.350.000,00	10.303.350.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	105.232.136.000,00	105.232.136.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	132.379.441.000,00	127.296.730.178,00	96,16	169.325.171.177,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	29.314.673.000,00	28.015.699.041,00	95,57	0,00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	5.067.526.000,00	4.878.495.414,00	96,27	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	24.102.981.000,00	22.461.235.871,00	93,19	85.604.461.691,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	473.788.000,00	353.364.463,00	74,58	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	8.613.655.000,00	8.516.113.748,00	98,87	6.710.240.311,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	47.515.219.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	47.096.934.000,00	0,00	67.558.836.650,00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	4.962.244.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.425.000.000,00	0,00	0,00	6.366.226.025,00
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	10.904.355.000,00	10.367.790.900,00	95,08	3.085.406.500,00
4.2.01.01.03.0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	0,00	4.441.052.741,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	1.166.044.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	116.101.440.000,00	117.091.052.728,00	100,85	104.126.538.838,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	57.765.680.000,00	57.472.200.263,00	99,49	52.954.076.219,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.852.500.000,00	2.736.250.000,00	95,92	2.973.750.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	47.408.947.000,00	48.947.454.000,00	103,25	39.870.684.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.258.500.000,00	1.396.500.000,00	110,97	1.825.500.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	547.382.000,00	1.278.756.000,00	233,61	678.707.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.256.774.000,00	1.875.829.679,00	83,12	3.466.568.808,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.590.226.000,00	2.098.872.300,00	81,03	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	901.431.000,00	815.619.329,00	90,48	942.870.130,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	469.571.157,00	90,30	311.305.153,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	0,00	1.103.077.528,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	2.732.069.458.471,00	2.404.627.387.907,00	88,01	2.080.287.939.065,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	12.648.494.000,00	12.648.494.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	12.648.494.000,00	12.648.494.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	12.648.494.000,00	12.648.494.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	12.648.494.000,00	12.648.494.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.744.717.952.471,00	2.417.275.881.907,00	88,07	2.104.954.266.065,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000,00	8.002.630.696,00	2.286,47	5.921.818.966,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	350.000.000,00	6.609.420.000,00	1.888,41	5.546.233.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	6.229.800.000,00	0,00	5.204.575.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	6.229.800.000,00	0,00	5.204.575.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	6.229.800.000,00	0,00	5.204.575.000,00
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	341.658.000,00
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	341.658.000,00
4.3.01.03.01.0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	341.658.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	350.000.000,00	379.620.000,00	108,46	0,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	350.000.000,00	379.620.000,00	108,46	0,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	350.000.000,00	379.620.000,00	108,46	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.393.210.696,00	0,00	375.585.966,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	1.393.210.696,00	0,00	375.585.966,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	1.393.210.696,00	0,00	375.585.966,00
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	1.393.210.696,00	0,00	375.585.966,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000,00	8.002.630.696,00	2.286,47	5.921.818.966,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.852.949.417.741,00	3.459.025.374.470,97	89,78	3.091.012.760.999,05
5	BELANJA DAERAH	3.977.693.144.257,41	3.570.959.018.593,06	89,77	3.242.315.178.035,82
5.1	BELANJA OPERASI	2.551.194.193.671,76	2.332.882.811.164,97	91,44	2.042.445.525.498,82
5.1.01	Belanja Pegawai	947.268.188.400,25	868.496.469.825,00	91,68	767.029.049.418,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	388.481.535.903,15	347.081.885.521,00	89,34	307.033.119.644,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	257.875.589.124,15	239.006.919.843,00	92,68	214.412.677.400,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	229.639.313.417,15	214.380.496.244,00	93,36	199.259.405.326,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	28.236.275.707,00	24.626.423.599,00	87,22	15.153.272.074,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.024.622.250,00	20.886.665.910,00	86,94	18.767.898.981,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	21.990.386.010,00	19.136.581.775,00	87,02	17.742.361.803,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.034.236.240,00	1.750.084.135,00	86,03	1.025.537.178,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.319.280.586,00	7.898.098.236,00	84,75	8.363.534.360,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.317.280.586,00	7.898.098.236,00	84,77	8.362.235.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	2.000.000,00	0,00	0,00	1.299.360,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.814.540.486,00	14.724.947.910,00	78,26	12.875.294.370,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.354.644.589,00	12.717.126.150,00	77,76	11.669.212.370,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.459.895.897,00	2.007.821.760,00	81,62	1.206.082.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.884.718.324,00	3.574.496.492,00	73,18	4.106.605.962,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.535.390.768,00	3.283.731.492,00	72,40	3.902.045.962,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	349.327.556,00	290.765.000,00	83,24	204.560.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.728.398.490,00	12.635.042.963,00	75,53	12.590.854.773,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.097.179.920,00	11.454.669.383,00	75,87	11.724.856.419,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.631.218.570,00	1.180.373.580,00	72,36	865.998.354,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.413.522.546,00	22.999.188.505,00	87,07	13.147.627.070,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.413.522.546,00	22.999.188.505,00	87,07	13.146.542.171,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	0,00	1.084.899,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.582.333,00	3.609.242,00	54,83	3.507.318,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.016.202,00	3.213.459,00	53,41	3.310.916,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	566.131,00	395.783,00	69,91	196.402,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	28.056.644.743,00	23.417.881.963,00	83,47	21.014.385.806,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	25.219.518.929,00	21.054.089.071,00	83,48	19.465.784.295,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.837.125.814,00	2.363.792.892,00	83,32	1.548.601.511,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	573.924.002,00	483.756.577,00	84,29	437.682.597,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	573.574.002,00	483.756.577,00	84,34	437.682.597,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.678.448.449,00	1.451.277.880,00	86,47	1.313.051.007,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.677.448.449,00	1.451.277.880,00	86,52	1.313.051.007,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	105.264.570,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	105.264.570,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	397.743.343.727,10	375.673.831.800,00	94,45	340.345.543.829,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	397.743.343.727,10	375.673.831.800,00	94,45	340.345.543.829,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	354.308.741.814,10	333.793.747.305,00	94,21	315.406.338.498,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	43.434.601.913,00	41.880.084.495,00	96,42	24.939.205.331,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	108.989.427.386,00	94.971.229.243,00	87,14	69.896.699.387,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	22.894.523.466,00	22.893.493.422,00	100,00	16.085.878.889,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	2.850.000.000,00	2.849.372.685,00	99,98	2.601.388.321,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.112.500.000,00	3.112.500.000,00	100,00	2.872.500.000,00
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.375.000.000,00	15.374.818.994,00	100,00	8.850.000.000,00
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	88.742.128,00
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	1.467.023.466,00	1.466.801.743,00	99,98	1.673.248.440,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	61.803.756.021,00	53.786.102.521,00	87,03	36.568.497.100,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	61.803.756.021,00	53.786.102.521,00	87,03	36.568.497.100,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.968.204.520,00	728.830.300,00	37,03	662.001.200,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.968.204.520,00	728.830.300,00	37,03	662.001.200,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.921.434.979,00	1.683.750.000,00	57,63	1.410.150.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.921.434.979,00	1.683.750.000,00	57,63	1.410.150.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	46.090.000,00	27.677.000,00	60,05	0,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	46.090.000,00	27.677.000,00	60,05	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	18.378.228.400,00	15.003.266.000,00	81,64	14.237.207.198,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.986.154.000,00	12.300.801.500,00	87,95	11.909.027.198,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.392.074.400,00	2.702.464.500,00	61,53	2.328.180.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	977.190.000,00	848.110.000,00	86,79	932.965.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	977.190.000,00	848.110.000,00	86,79	932.965.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.612.634.958,00	23.684.026.763,00	96,23	23.856.388.948,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.120.000.000,00	1.114.050.000,00	99,47	1.117.200.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.120.000.000,00	1.114.050.000,00	99,47	1.117.200.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	128.184.000,00	106.647.000,00	83,20	113.229.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	128.184.000,00	106.647.000,00	83,20	113.229.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	104.791.740,00	88.714.500,00	84,66	93.783.900,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	104.791.740,00	88.714.500,00	84,66	93.783.900,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	105.336.000,00	95.445.000,00	90,61	95.760.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	105.336.000,00	95.445.000,00	90,61	95.760.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.644.000.000,00	1.615.372.500,00	98,26	1.619.940.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.644.000.000,00	1.615.372.500,00	98,26	1.619.940.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	215.625.150,00	120.497.000,00	55,88	159.735.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	215.625.150,00	120.497.000,00	55,88	159.735.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	36.000.000,00	0,00	0,00	35.430.750,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	36.000.000,00	0,00	0,00	35.430.750,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100,00	6.300.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100,00	6.300.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.607.812.500,00	1.035.000.000,00	64,37	1.575.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.607.812.500,00	1.035.000.000,00	64,37	1.575.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.187.378,00	34.594.352,00	68,93	40.090.684,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.187.378,00	34.594.352,00	68,93	40.090.684,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	33.184,00	25.675,00	77,37	27.570,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	33.184,00	25.675,00	77,37	27.570,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.370.665.006,00	7.305.680.736,00	99,12	7.319.692.044,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	125.665.006,00	97.158.300,00	77,32	97.726.680,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	23.000.000,00	6.432.270,44	27,97	4.429.050,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.000.000,00	8.090.165,56	80,90	5.536.314,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.212.000.000,00	7.194.000.000,00	99,75	7.212.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.544.000.000,00	5.502.000.000,00	99,24	5.376.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.544.000.000,00	5.502.000.000,00	99,24	5.376.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	386.000.000,00	366.000.000,00	94,82	10.500.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	386.000.000,00	366.000.000,00	94,82	10.500.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	253.449.230,00	238.143.043,00	93,96	234.465.224,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.000.000,00	75.600.000,00	96,92	75.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.000.000,00	75.600.000,00	96,92	75.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.128.000,00	7.560.000,00	82,82	7.560.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.128.000,00	7.560.000,00	82,82	7.560.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	138.688.000,00	136.080.000,00	98,12	136.080.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	138.688.000,00	136.080.000,00	98,12	136.080.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.823.776,00	4.055.520,00	84,07	3.476.160,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.823.776,00	4.055.520,00	84,07	3.476.160,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.072.792,00	6.752.733,00	67,04	3.556.544,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.072.792,00	6.752.733,00	67,04	3.556.544,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.848,00	1.680,00	58,99	1.440,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.848,00	1.680,00	58,99	1.440,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.520.000,00	7.516.800,00	78,96	7.516.800,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.520.000,00	7.516.800,00	78,96	7.516.800,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	684.288,00	142.740,00	20,86	181.620,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	684.288,00	142.740,00	20,86	181.620,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	960.000,00	433.570,00	45,16	492.660,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	960.000,00	433.570,00	45,16	492.660,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.569.526,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat	1.569.526,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.887.797.196,00	1.730.699.155,00	91,68	1.568.710.386,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	288.000.000,00	234.000.000,00	81,25	288.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	288.000.000,00	234.000.000,00	81,25	288.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.599.797.196,00	1.496.699.155,00	93,56	1.280.710.386,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.599.797.196,00	1.496.699.155,00	93,56	1.280.710.386,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	25.300.000.000,00	25.116.654.300,00	99,28	24.094.122.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	25.300.000.000,00	25.116.654.300,00	99,28	24.094.122.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	25.300.000.000,00	25.116.654.300,00	99,28	24.094.122.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.349.997.641.213,51	1.218.671.997.282,97	90,27	1.097.028.389.768,82
5.1.02.01	Belanja Barang	365.769.752.377,79	316.705.890.924,00	86,59	248.753.050.677,50
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	363.216.224.412,79	314.567.175.074,00	86,61	247.261.940.780,50
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	24.597.000,00	17.522.000,00	71,24	69.851.046,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	235.273.700,00	205.340.726,00	87,28	348.538.919,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.250.546.207,00	18.281.114.284,00	82,16	19.015.522.861,50
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	50.000.000,00	49.502.501,00	99,01	4.038.900,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.840.170.000,00	1.981.112.000,00	69,75	1.561.464.600,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	66.926.570,00	50.618.500,00	75,63	49.907.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	61.715.200,00	35.571.000,00	57,64	45.123.300,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	201.661.100,00	181.330.200,00	89,92	159.337.800,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.646.866.300,00	1.117.368.319,00	67,85	1.561.904.012,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.624.256.451,00	1.317.300.400,00	81,10	1.567.874.879,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	20.000.000,00	3.750.000,00	18,75	0,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	204.300.000,00	153.853.860,00	75,31	177.125.900,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	273.900.000,00	250.845.449,00	91,58	280.132.175,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	4.800.000,00	1.840.000,00	38,33	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	85.730.000,00	84.890.000,00	99,02	105.376.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	600.000,00	600.000,00	100,00	250.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	633.250.000,00	611.617.110,00	96,58	704.662.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.623.487.363,85	4.628.162.252,00	82,30	3.746.436.910,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.559.349.796,00	3.000.244.440,00	84,29	2.860.683.894,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.832.396.477,82	8.024.121.053,00	67,81	7.942.830.464,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.028.592.650,00	951.049.000,00	92,46	743.910.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	250.000.000,00	248.813.750,00	99,53	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.294.178.150,00	1.055.383.998,00	81,55	953.017.917,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.681.022.290,90	1.354.234.978,00	80,56	835.766.250,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	869.958.180,00	645.348.676,00	74,18	702.001.368,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	305.914.700,00	209.430.000,00	68,46	263.067.922,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	552.600.000,00	515.705.000,00	93,32	259.698.998,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.214.477.240,00	5.695.913.477,00	91,66	4.129.073.391,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.759.509.567,00	2.262.656.925,00	81,99	2.931.280.683,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	598.552.166,22	327.878.737,00	54,78	618.461.484,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.367.062.545,00	1.324.518.200,00	96,89	1.498.233.773,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.999.352.501,00	31.738.771.058,00	85,78	21.450.833.593,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	186.353.938.593,00	166.442.419.776,00	89,32	108.702.598.665,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	862.500.000,00	852.012.000,00	98,78	0,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	4.329.000,00	4.329.000,00	100,00	13.782.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.636.766.140,00	3.306.668.914,00	90,92	2.310.840.907,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	316.842.400,00	281.533.400,00	88,86	300.822.910,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.668.000.000,00	1.495.047.056,00	89,63	1.755.487.278,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	25.744.000,00	6.095.000,00	23,68	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.713.163.099,00	36.761.282.678,00	84,10	43.469.059.939,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.449.633.705,00	10.615.865.966,00	92,72	8.458.224.989,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13.000.000,00	12.900.000,00	99,23	16.726.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	33.900.000,00	33.884.100,00	99,95	17.674.308,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.000.000,00	1.400.000,00	46,67	1.610.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.444.205.000,00	1.266.940.661,00	87,73	442.892.830,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	305.650.000,00	304.640.360,00	99,67	345.606.800,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	369.702.500,00	341.738.250,00	92,44	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	138.600.000,00	133.350.000,00	96,21	144.842.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.122.205.500,00	895.265.000,00	79,78	798.922.710,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.057.386.575,00	1.763.155.600,00	85,70	1.911.373.035,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	115.500.000,00	110.250.000,00	95,45	11.245.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	363.650.000,00	257.020.000,00	70,68	0,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	24.000.000,00	22.896.000,00	95,40	0,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	18.210.400,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	436.200.000,00	278.115.000,00	63,76	174.505.600,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.596.690.720,00	1.434.028.000,00	89,81	860.932.900,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.571.025,00	1.619.930.420,00	80,97	2.536.445.770,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	359.429.800,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.417.171.544,00	1.171.245.837,00	82,65	1.491.109.897,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	13.125.000,00	4.250.000,00	32,38	0,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	329.772.480,00
5.1.02.01.02.0005	Belanja Komponen-Attachment	1.304.046.544,00	1.066.995.837,00	81,82	1.161.337.417,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.136.356.421,00	967.470.013,00	85,14	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	795.000.000,00	749.110.000,00	94,23	0,00
5.1.02.01.04.0049	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.250.000,00	1.175.000,00	94,00	0,00
5.1.02.01.04.0102	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	5.550.000,00	5.500.000,00	99,10	0,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.900.000,00	1.800.000,00	94,74	0,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	49.700.000,00	48.537.000,00	97,66	0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.807.280,00	1.570.750,00	41,26	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(I,Home Use],	11.250.000,00	10.825.000,00	96,22	0,00
5.1.02.01.04.0127	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	13.000.000,00	11.500.000,00	88,46	0,00
5.1.02.01.04.0137	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	18.000.000,00	17.782.200,00	98,79	0,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.217.500,00	8.270.000,00	89,72	0,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0551	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	20.000.000,00	10.500.000,00	52,50	0,00
5.1.02.01.04.0563	Belanja Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	3.885.000,00	3.500.000,00	90,09	0,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0721	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	99.630.570,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0722	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	94.966.071,00	89.400.063,00	94,14	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	386.099.970.773,82	333.134.355.131,69	86,28	276.205.633.899,82
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	246.357.447.547,00	213.990.916.970,69	86,86	172.082.742.625,82
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	114.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.227.209.000,00	7.503.849.429,00	66,84	5.104.063.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.928.660.000,00	6.121.025.000,00	77,20	5.576.622.500,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	95.400.000,00	90.000.000,00	94,34	122.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	690.000.000,00	340.656.600,00	49,37	965.325.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	89.000.000,00	35.200.000,00	39,55	22.600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	199.160.000,00	76.420.000,00	38,37	38.220.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	378.750.000,00	170.400.000,00	44,99	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	551.500.000,00	367.380.000,00	66,61	22.500.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	847.200.000,00	737.685.000,00	87,07	446.360.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.410.000.000,00	7.049.250.000,00	95,13	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.697.200.000,00	9.149.700.000,00	94,35	514.274.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	247.344.000,00	171.329.181,00	69,27	240.184.980,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.770.997.584,00	4.729.447.409,00	99,13	3.697.678.968,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	874.445.664,00	765.630.277,00	87,56	500.531.677,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	227.175.000,00	196.370.000,00	86,44	144.000.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	125.600.000,00	117.084.647,00	93,22	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	513.450.000,00	496.650.000,00	96,73	216.026.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	115.610.000,00	75.220.000,00	65,06	20.500.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.325.400.000,00	2.033.570.000,00	87,45	1.426.700.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	66.780.144.180,00	61.178.351.013,00	91,61	24.312.390.364,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.144.996.702,00	5.713.562.662,00	92,98	4.497.339.523,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.673.754.850,00	17.974.640.948,69	91,36	53.699.216.104,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.447.509.500,00	5.090.169.960,00	78,95	4.402.820.426,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.320.692.800,00	7.875.652.415,00	94,65	6.255.288.408,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.191.151.698,00	5.495.848.940,00	88,77	5.067.228.945,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	194.522.832,00	188.570.961,00	96,94	158.645.843,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.028.502.654,00	942.084.256,00	91,60	1.212.092.752,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	125.551.416,00	125.464.726,00	99,93	125.180.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	628.710.000,00	555.250.000,00	88,32	578.850.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	17.250.000,00	10.750.000,00	62,32	1.999.996,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	88.584.000,00	80.133.779,00	90,46	71.871.280,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	266.348.650,00	205.845.175,00	77,28	772.922.885,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.688.665.000,00	1.466.883.918,00	86,87	1.146.789.630,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.860.750.000,00	8.009.225.698,00	90,39	6.154.094.186,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	215.000.000,00	140.000.000,00	65,12	277.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	88.735.000,00	50.232.745,00	56,61	57.837.169,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	9.864.000,00	9.324.000,00	94,53	7.512.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	116.300.000,00	99.809.731,00	85,82	84.650.500,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	21.600.000,00	21.545.000,00	99,75	0,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	185.500.000,00	134.513.000,00	72,51	151.818.400,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	25.055.530.000,00	23.866.349.571,00	95,25	19.525.240.300,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	2.045.050.000,00	1.781.565.300,00	87,12	1.864.811.059,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	332.160.000,00	155.167.980,00	46,71	171.319.713,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.861.253.640,00	2.445.738.005,00	63,34	757.130.630,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	24.191.209.447,00	18.597.904.085,00	76,88	10.428.497.641,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.765.520.000,00	1.631.201.000,00	92,39	624.256.250,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.237.719.300,00	7.217.060.185,00	78,13	4.840.560.663,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.372.711.200,00	1.042.729.412,00	75,96	514.680.409,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	45.000.000,00	39.968.400,00	88,82	0,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	34.550.000,00	33.661.770,00	97,43	13.611.900,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.151.909.430,00	1.188.649.292,00	55,24	1.265.545.706,82
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	750.000.000,00	304.595.500,00	40,61	643.732.389,00
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	3.219.821.429,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.746.616.878,00	36.481.196.845,00	89,53	24.212.771.034,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	25.100.000.000,00	23.044.101.900,00	91,81	21.687.380.700,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.213.065.972,00	2.467.817.050,00	76,81	2.142.395.161,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.043.035.000,00	547.542.776,00	52,50	320.490.226,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	313.192.706,00	277.134.544,00	88,49	60.537.947,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	85.800.000,00	81.870.975,00	95,42	724.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	14.000.000,00	0,00	0,00	1.243.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	6.534.240.000,00	5.989.720.000,00	91,67	0,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	4.443.283.200,00	4.073.009.600,00	91,67	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	41.500.000,00	41.000.000,00	98,80	76.952.702,00
5.1.02.02.03.0009	Belanja Sewa Tanah Kering	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	61.952.702,00
5.1.02.02.03.0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.171.995.166,82	4.415.102.700,00	71,53	5.435.315.312,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	285.000.000,00	216.500.000,00	75,96	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.500.000,00	1.000.000,00	18,18	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.301.250.000,00	1.217.362.377,00	93,55	1.323.883.460,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	41.500.000,00	29.350.000,00	70,72	27.150.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	11.700.000,00	2.000.000,00	17,09	10.320.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	379.600.000,00	222.600.000,00	58,64	284.165.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	56.000.000,00	50.000.000,00	89,29	22.000.000,00
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	1.765.909.101,00	708.054.639,00	40,10	1.820.677.500,00
5.1.02.02.04.0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	190.980.000,00	149.695.000,00	78,38	75.042.600,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	46.338.936,00	11.680.000,00	25,21	20.240.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	470.164.034,82	309.068.000,00	65,74	296.176.350,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	900.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	509.915.000,00	458.635.000,00	89,94	414.457.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	274.650.000,00
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	693.550.000,00	674.400.000,00	97,24	190.320.000,00
5.1.02.02.04.0139	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	3.900.000,00	0,00	0,00	2.588.974,00
5.1.02.02.04.0248	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	3.000.000,00	2.502.900,00	83,43	0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	45.000.000,00	42.500.000,00	94,44	192.000.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	119.658.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	63.788.095,00	26.177.284,00	41,04	135.786.428,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	257.900.000,00	252.577.500,00	97,94	0,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.282.574.536,00	11.770.086.076,00	88,61	14.848.178.092,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.047.648.900,00	2.738.286.261,00	89,85	3.588.654.800,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	854.999.992,00	696.180.310,00	81,42	830.980.000,00
5.1.02.02.05.0005	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	36.000.000,00	35.000.000,00	97,22	144.300.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.912.090.000,00	3.403.256.896,00	86,99	5.587.302.900,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	118.100.000,00	90.150.000,00	76,33	0,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	22.400.000,00	21.402.360,00	95,55	20.034.360,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	989.340.000,00	971.713.000,00	98,22	756.286.967,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	346.666.672,00	346.666.672,00	100,00	246.666.672,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	1.668.209.980,00	1.640.369.600,00	98,33	1.658.163.996,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.982.119.000,00	1.522.260.977,00	76,80	1.740.988.397,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	199.999.992,00	199.800.000,00	99,90	199.800.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.06.0118	Belanja Sewa Instalasi Lain	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	18.500.000,00	18.200.000,00	98,38	19.700.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	8.500.000,00	8.200.000,00	96,47	16.700.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	37.181.825.236,00	34.029.394.467,00	91,52	29.930.262.553,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	150.000.000,00	149.583.600,00	99,72	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	308.750.000,00	197.813.525,00	64,07	256.653.200,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	156.740.000,00	155.376.750,00	99,13	270.453.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	10.000.000,00	9.879.000,00	98,79	0,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	30.000.000,00	29.950.000,00	99,83	3.083.242.045,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	13.439.753.116,00	13.379.180.512,00	99,55	3.513.712.802,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	13.825.000.000,00	11.981.261.686,00	86,66	5.806.727.400,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	289.498.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00	1.865.024.055,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	1.178.834.652,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	145.540.000,00	144.691.980,00	99,42	9.990.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	2.530.000.000,00	2.529.709.871,00	99,99	2.148.680.390,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	113.750.000,00	105.762.216,00	92,98	75.319.050,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.011.217.750,00	821.420.654,00	81,23	5.983.555.044,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	470.000.000,00	449.904.500,00	95,72	3.811.259.900,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	446.803.815,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	45.000.000,00	44.125.000,00	98,06	92.484.645,00
5.1.02.02.08.0024	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	509.400.000,00	509.290.200,00	99,98	0,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	480.000.000,00	397.513.755,00	82,82	94.701.800,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	600.000.000,00	599.792.000,00	99,97	104.200.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	26.000.000,00	25.285.800,00	97,25	0,00
5.1.02.02.08.0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	200.000.000,00	199.993.700,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	2.355.674.370,00	1.724.562.870,00	73,21	799.478.055,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	400.000.000,00	199.296.848,00	49,82	99.644.700,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	24.660.915.560,00	18.806.344.907,00	76,26	12.659.654.094,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	1.100.000.000,00	1.089.312.500,00	99,03	184.926.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00	1.885.526.637,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.709.500.000,00	1.509.633.300,00	88,31	870.257.506,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	99.067.000,00	99,07	99.998.790,00
5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	735.000.000,00	678.382.050,00	92,30	196.803.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	500.000.000,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	230.000.000,00	79.451.000,00	34,54	847.137.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	14.516.415.560,00	11.044.133.967,00	76,08	6.034.308.137,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	820.000.000,00	565.000.000,00	68,90	891.352.024,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.450.000.000,00	1.841.365.090,00	75,16	0,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00	99.345.000,00
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	1.250.000.000,00	250.000.000,00	20,00	0,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	33.272.250,00	33.241.725,00	99,91	0,00
5.1.02.02.10.0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	33.272.250,00	33.241.725,00	99,91	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	64.857.300,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	64.857.300,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.496.629.600,00	13.473.916.265,00	77,01	16.870.275.687,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.114.740.000,00	4.495.560.857,00	63,19	4.474.632.057,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	6.120.240.000,00	5.915.631.000,00	96,66	10.236.395.500,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.568.300.000,00	2.423.882.008,00	67,93	1.056.289.030,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	693.349.600,00	638.842.400,00	92,14	1.102.959.100,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	49.594.000,00	15.855.176,00	31,97	1.924.500,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	49.594.000,00	15.855.176,00	31,97	1.924.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.770.205.892,50	30.536.382.370,00	80,85	47.793.628.860,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	15.750.000,00	750.000,00	4,76	0,00
5.1.02.03.01.0011	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan	15.750.000,00	750.000,00	4,76	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.755.558.200,00	16.332.192.400,00	78,69	14.144.681.914,00
5.1.02.03.02.0014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	100.000.000,00	99.983.250,00	99,98	0,00
5.1.02.03.02.0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	160.000.000,00	98.176.164,00	61,36	194.622.320,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	49.728.000,00	32.540.652,00	65,44	30.991.098,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	359.644.800,00	309.249.708,00	85,99	289.562.275,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	86.100.000,00	12.956.247,00	15,05	8.393.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	6.300.000,00	4.995.000,00	79,29	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.094.333.000,00	8.141.727.535,00	80,66	7.940.174.520,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	115.980.000,00	114.590.240,00	98,80	119.740.799,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	980.612.700,00	488.404.546,00	49,81	1.053.168.440,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	179.116.000,00	171.897.940,00	95,97	90.731.862,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	807.944.400,00	785.988.380,00	97,28	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.443.626.400,00	1.049.684.577,00	72,71	1.423.474.053,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	339.000.000,00	334.136.270,00	98,57	49.985.000,00
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	3.500.000,00	2.872.000,00	82,06	0,00
5.1.02.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	55.500.000,00	41.820.000,00	75,35	37.500.000,00
5.1.02.03.02.0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	27.417.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	94.400.000,00	65.107.050,00	68,97	170.695.800,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	679.806.500,00	571.782.330,00	84,11	335.159.762,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.150.500,00	7.492.500,00	46,39	11.024.320,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.009.150.300,00	813.411.982,00	80,60	946.246.191,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	84.046.000,00	61.929.660,00	73,69	68.250.400,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	56.220.000,00	1.507.793,00	2,68	3.549.999,00
5.1.02.03.02.0136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.715.000.000,00	1.320.000.000,00	76,97	0,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	100.000.000,00	5.586.000,00	5,59	0,00
5.1.02.03.02.0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	300.000.000,00	296.500.000,00	98,83	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000,00	0,00	0,00	1.299.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	539.066.700,00	405.924.966,00	75,30	266.230.588,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	101.500.000,00	78.492.072,00	77,33	24.486.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	230.000.000,00	213.090.000,00	92,65	10.646.939,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	284.834.000,00	232.669.291,00	81,69	201.332.670,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	37.026.000,00	33.825.000,00	91,35	284.925.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	556.972.900,00	386.896.247,00	69,46	344.904.878,00
5.1.02.03.02.0414	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	50.000.000,00	49.395.000,00	98,79	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	100.000.000,00	99.560.000,00	99,56	199.170.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.822.253.548,00	6.439.353.556,00	72,99	29.609.285.119,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.972.979.888,00	5.513.457.991,00	79,07	23.519.957.352,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	86.950.000,00	86.925.000,00	99,97	0,00
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	220.000.000,00	219.570.440,00	99,80	0,00
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	200.000.000,00	167.097.300,00	83,55	148.857.341,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	432.500.000,00	425.255.945,00	98,33	2.513.088.408,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	141.835.800,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	2.920.334.572,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	33.203.440,00	9.350.000,00	28,16	43.774.576,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	381.620.220,00	17.696.880,00	4,64	155.487.070,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	390.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00
5.1.02.03.03.0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.737.374.144,50	7.400.545.414,00	95,65	3.147.770.827,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	3.396.475.272,50	3.323.840.272,00	97,86	1.907.579.822,00
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	229.888.437,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.267.073.872,00	2.266.909.872,00	99,99	0,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	565.000.000,00	372.105.000,00	65,86	576.895.488,00
5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	377.943.000,00	377.943.000,00	100,00	178.906.951,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	3.460.000,00	3.437.670,00	99,35	0,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	27.000.000,00	26.975.000,00	99,91	0,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	18.000.000,00	17.962.000,00	99,79	19.952.750,00
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.000.000.000,00	990.852.600,00	99,09	0,00
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	204.856.549,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	22.422.000,00	20.520.000,00	91,52	19.975.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.715.830,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	44.770.000,00	36.341.000,00	81,17	68.987.000,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	30.000.000,00	28.500.000,00	95,00	29.700.000,00
5.1.02.03.05.0055	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	14.770.000,00	7.841.000,00	53,09	39.287.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	394.500.000,00	327.200.000,00	82,94	822.904.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	394.500.000,00	327.200.000,00	82,94	822.904.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	303.794.233.486,40	261.464.390.157,00	86,07	198.410.033.948,59
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	298.458.089.565,40	257.213.418.972,00	86,18	197.089.349.500,59
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	266.211.402.802,40	230.641.819.976,00	86,64	187.642.350.266,59
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	630.000.000,00	629.175.786,00	99,87	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.884.777.863,00	5.751.435.228,00	72,94	4.112.192.604,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.406.327.500,00	6.262.619.300,00	84,56	2.867.522.595,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.325.581.400,00	13.928.368.682,00	85,32	2.467.284.035,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	5.336.143.921,00	4.250.971.185,00	79,66	1.320.684.448,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa“Luar Negeri	5.336.143.921,00	4.250.971.185,00	79,66	1.320.684.448,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.213.231.579,00	19.484.587.794,00	91,85	84.992.534.272,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.001.781.579,00	18.776.734.344,00	93,88	14.976.679.631,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.527.450.000,00	3.755.626.875,00	82,95	3.432.762.331,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	240.400.000,00	212.085.890,00	88,22	26.907.300,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	15.124.550.000,00	14.702.190.000,00	97,21	11.516.560.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	109.381.579,00	106.831.579,00	97,67	450.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.211.450.000,00	707.853.450,00	58,43	70.015.854.641,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	594.000.000,00	93.128.910,00	15,68	69.347.320.641,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	617.450.000,00	614.724.540,00	99,56	668.534.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.908.760.000,00	68.676.643.154,13	104,20	54.298.940.016,01
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.908.760.000,00	68.676.643.154,13	104,20	54.298.940.016,01
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.908.760.000,00	68.676.643.154,13	104,20	54.298.940.016,01
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	169.441.487.104,00	188.669.747.752,15	111,35	186.574.568.094,90
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	169.441.487.104,00	188.669.747.752,15	111,35	186.574.568.094,90
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	169.441.487.104,00	188.669.747.752,15	111,35	186.574.568.094,90
5.1.04	Belanja Subsidi	19.857.277.500,00	19.787.303.700,00	99,65	16.513.140.465,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	19.857.277.500,00	19.787.303.700,00	99,65	16.513.140.465,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	19.857.277.500,00	19.787.303.700,00	99,65	16.513.140.465,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	19.857.277.500,00	19.787.303.700,00	99,65	16.513.140.465,00
5.1.05	Belanja Hibah	229.961.786.558,00	222.697.836.570,00	96,84	161.141.184.381,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.240.000.000,00
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.240.000.000,00
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.240.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	220.111.739.680,00	212.551.691.045,00	96,57	150.073.629.325,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	164.356.891.680,00	162.014.869.680,00	98,58	87.944.704.495,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	157.535.891.680,00	155.825.891.680,00	98,91	86.297.991.120,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.821.000.000,00	6.188.978.000,00	90,73	1.646.713.375,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.254.593.000,00	45.406.131.365,00	90,35	55.171.924.830,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	48.760.150.000,00	43.965.671.365,00	90,17	53.630.627.300,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.494.443.000,00	1.440.460.000,00	96,39	1.541.297.530,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.358.255.000,00	3.201.690.000,00	95,34	5.063.500.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.336.000.000,00	3.181.000.000,00	95,35	4.763.500.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.255.000,00	20.690.000,00	92,97	300.000.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	436.000.000,00	423.000.000,00	97,02	1.393.500.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	436.000.000,00	423.000.000,00	97,02	1.393.500.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.606.000.000,00	1.406.000.000,00	87,55	500.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.606.000.000,00	1.406.000.000,00	87,55	500.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	7.032.620.000,00	7.528.718.647,00	107,05	7.252.555.098,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.000.350.000,00	5.496.524.097,00	109,92	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.000.350.000,00	5.496.524.097,00	109,92	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.781.470.000,00	1.781.394.550,00	100,00	7.252.555.098,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.781.470.000,00	1.781.394.550,00	100,00	7.252.555.098,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	250.800.000,00	250.800.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	250.800.000,00	250.800.000,00	100,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.617.426.878,00	2.617.426.878,00	100,00	2.499.999.958,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.617.426.878,00	2.617.426.878,00	100,00	2.499.999.958,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.617.426.878,00	2.617.426.878,00	100,00	2.499.999.958,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.109.300.000,00	3.229.203.787,00	78,58	733.761.466,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	889.300.000,00	875.121.287,00	98,41	93.761.466,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	505.000.000,00	504.998.900,00	100,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	505.000.000,00	504.998.900,00	100,00	0,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	384.300.000,00	370.122.387,00	96,31	93.761.466,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	384.300.000,00	370.122.387,00	96,31	93.761.466,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.220.000.000,00	2.354.082.500,00	73,11	640.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00	640.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00	640.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.700.000.000,00	1.834.082.500,00	67,93	0,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.700.000.000,00	1.834.082.500,00	67,93	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.551.194.193.671,76	2.332.882.811.164,97	91,44	2.042.445.525.498,82
5.2	BELANJA MODAL	794.123.866.374,00	706.181.651.526,09	88,93	651.639.401.736,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	47.989.243.830,00	36.362.332.622,00	75,77	30.379.184.731,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	47.989.243.830,00	36.362.332.622,00	75,77	30.379.184.731,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	47.989.243.830,00	36.362.332.622,00	75,77	30.182.080.667,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	39.499.243.830,00	32.482.372.622,00	82,24	81.556.200,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	8.490.000.000,00	3.879.960.000,00	45,70	30.100.524.467,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	197.104.064,00
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	197.104.064,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.989.694.447,00	163.713.917.310,00	95,74	118.377.089.281,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.980.758.000,00	7.218.770.279,00	90,45	6.635.253.000,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	6.325.000.000,00
5.2.02.01.02.0002	Belanja Modal Floating Excavator	0,00	0,00	0,00	6.325.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	7.980.758.000,00	7.218.770.279,00	90,45	310.253.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	7.110.160.000,00	6.447.500.000,00	90,68	198.511.500,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	811.500.000,00	720.450.279,00	88,78	8.941.500,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	20.000.000,00	15.000.000,00	75,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	39.098.000,00	35.820.000,00	91,62	102.800.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	31.988.353.965,00	30.235.074.426,00	94,52	24.200.551.730,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	26.916.016.500,00	25.232.214.426,00	93,74	22.239.827.710,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.501.500.000,00	4.319.549.268,00	95,96	16.224.179.541,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	10.273.850.000,00	9.526.618.000,00	92,73	2.072.801.402,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.036.066.500,00	4.503.250.000,00	89,42	2.086.264.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.899.600.000,00	1.756.432.158,00	92,46	470.347.767,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	160.929.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.205.000.000,00	5.126.365.000,00	98,49	1.199.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	26.306.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	5.072.337.465,00	5.002.860.000,00	98,63	1.860.724.020,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	435.000.000,00	431.900.000,00	99,29	99.991.020,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	1.570.000.000,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	4.637.337.465,00	4.570.960.000,00	98,57	190.733.000,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.2.02.02.04.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	698.636.500,00	637.321.475,00	91,22	538.508.940,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	53.750.000,00	50.135.000,00	93,27	68.350.000,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	43.750.000,00	40.585.000,00	92,77	0,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	10.000.000,00	9.550.000,00	95,50	66.350.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	162.880.000,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00	0,00	0,00	155.075.000,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.805.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	644.886.500,00	587.186.475,00	91,05	307.278.940,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	41.500.000,00	36.745.000,00	88,54	45.100.000,00
5.2.02.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0,00	0,00	0,00	614.940,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	66.964.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	11.100.000,00	11.000.000,00	99,10	0,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	592.286.500,00	539.441.475,00	91,08	194.600.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	163.190.000,00	160.005.000,00	98,05	33.290.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	163.190.000,00	160.005.000,00	98,05	33.290.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.800.000,00	2.565.000,00	91,61	0,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	33.290.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	40.390.000,00	38.440.000,00	95,17	0,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	120.000.000,00	119.000.000,00	99,17	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.164.950.315,00	22.565.749.402,00	97,41	39.043.376.593,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.008.417.091,00	5.150.356.644,00	102,83	17.666.237.040,00
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	34.000.000,00	17.031.000,00	50,09	37.952.500,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	92.480.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	528.369.280,00	374.476.040,00	70,87	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.446.047.811,00	4.758.849.604,00	107,04	17.535.804.540,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.617.563.224,00	16.898.897.759,00	95,92	20.659.565.553,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	14.304.768.260,00	14.048.128.102,00	98,21	17.379.817.158,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	3.000.000,00	2.975.000,00	99,17	0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	15.000.000,00	11.428.000,00	76,19	7.043.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	590.566.000,00	547.765.270,00	92,75	783.947.150,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	60.250.000,00	57.665.000,00	95,71	25.543.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.802.234.000,00	1.445.059.800,00	80,18	2.096.520.141,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	841.744.964,00	785.876.587,00	93,36	366.694.604,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	538.970.000,00	516.494.999,00	95,83	717.574.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	39.000.000,00	25.749.999,00	66,03	76.760.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	187.400.000,00	186.280.000,00	99,40	58.296.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	146.970.000,00	142.675.000,00	97,08	458.460.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	141.100.000,00	137.890.000,00	97,73	89.158.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	24.500.000,00	23.900.000,00	97,55	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.200.212.000,00	4.906.970.400,00	94,36	3.170.638.238,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.804.687.000,00	4.575.476.450,00	95,23	2.993.057.450,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	268.400.000,00	262.708.900,00	97,88	1.644.274.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	658.709.000,00	600.387.550,00	91,15	1.111.837.450,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	166.090.000,00	154.760.000,00	93,18	107.186.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	85.750.000,00	16.100.000,00	18,78	0,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	32.110.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.625.738.000,00	3.541.520.000,00	97,68	97.650.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	245.015.000,00	186.362.700,00	76,06	168.105.788,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	105.815.000,00	98.642.700,00	93,22	110.955.788,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	47.250.000,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	15.800.000,00	14.850.000,00	93,99	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	123.400.000,00	72.870.000,00	59,05	9.900.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	134.800.000,00	134.300.000,00	99,63	0,00
5.2.02.06.03.0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.03.0033	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	130.000.000,00	129.500.000,00	99,62	0,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	15.710.000,00	10.831.250,00	68,94	9.475.000,00
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	15.710.000,00	10.831.250,00	68,94	9.475.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	66.462.873.437,00	64.321.146.815,00	96,78	20.400.174.848,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	66.462.873.437,00	64.321.146.815,00	96,78	20.387.375.119,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	66.462.873.437,00	64.321.146.815,00	96,78	20.387.375.119,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	12.799.729,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.799.729,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	20.487.947.000,00	20.145.942.010,00	98,33	5.272.157.400,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	19.520.000,00	16.758.900,00	85,86	163.418.400,00
5.2.02.08.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi	1.750.000,00	1.680.000,00	96,00	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	10.000.000,00	7.328.900,00	73,29	163.418.400,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	7.770.000,00	7.750.000,00	99,74	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	17.719.552.000,00	17.444.213.210,00	98,45	5.081.800.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	0,00	0,00	1.436.800.000,00
5.2.02.08.03.0013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	0,00	0,00	0,00	159.000.000,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	10.037.152.000,00	9.821.038.000,00	97,85	2.986.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	7.682.400.000,00	7.623.175.210,00	99,23	500.000.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	68.875.000,00	54.450.000,00	79,06	18.170.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	68.875.000,00	54.450.000,00	79,06	18.170.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.08.06	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.769.000,00
5.2.02.08.06.0003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi	0,00	0,00	0,00	8.769.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.594.000.000,00	1.550.219.900,00	97,25	0,00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	1.585.000.000,00	1.545.000.000,00	97,48	0,00
5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	9.000.000,00	5.219.900,00	58,00	0,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.086.000.000,00	1.080.300.000,00	99,48	0,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	1.086.000.000,00	1.080.300.000,00	99,48	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.677.473.230,00	11.422.259.503,00	90,10	8.257.256.525,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.555.938.181,00	8.807.426.868,00	92,17	6.314.321.119,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	400.950.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.403.523.181,00	7.777.670.868,00	92,55	5.239.441.119,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.143.415.000,00	1.020.756.000,00	89,27	673.930.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.121.535.049,00	2.614.832.635,00	83,77	1.942.935.406,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	90.500.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	568.580.000,00	412.800.000,00	72,60	243.845.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	122.525.000,00	97.135.000,00	79,28	31.651.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.417.930.049,00	2.092.397.635,00	86,54	1.576.939.406,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	49.950.000,00	47.500.000,00	95,10	0,00
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	49.950.000,00	47.500.000,00	95,10	0,00
5.2.02.11.01.0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	49.950.000,00	47.500.000,00	95,10	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	35.964.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	35.964.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	35.964.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.477.350.000,00	1.419.835.000,00	96,11	9.470.450.320,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	100.000.000,00	83.000.000,00	83,00	9.470.450.320,00
5.2.02.15.01.0001	Belanja Modal Radiasi	0,00	0,00	0,00	9.470.450.320,00
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	100.000.000,00	83.000.000,00	83,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	1.362.750.000,00	1.322.235.000,00	97,03	0,00
5.2.02.15.02.0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	1.359.750.000,00	1.319.235.000,00	97,02	0,00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	14.600.000,00	14.600.000,00	100,00	0,00
5.2.02.15.04.0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik	14.600.000,00	14.600.000,00	100,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	611.000.000,00	606.543.000,00	99,27	1.270.987.687,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	611.000.000,00	606.543.000,00	99,27	1.270.987.687,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	611.000.000,00	606.543.000,00	99,27	873.051.687,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	209.764.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	188.172.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	27.000.000,00	26.800.000,00	99,26	48.480.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	27.000.000,00	26.800.000,00	99,26	48.480.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	6.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	10.000.000,00	9.800.000,00	98,00	42.480.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	243.097.502.004,00	208.505.767.057,00	85,77	345.002.801.783,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	241.805.522.004,00	207.321.335.068,00	85,74	343.911.234.783,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	191.588.765.214,00	169.167.948.916,00	88,30	308.296.590.056,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	84.723.638.737,00	77.483.005.789,00	91,45	208.420.765.871,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	125.000.000,00	124.800.000,00	99,84	29.828.364,00
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	180.000.000,00	175.121.660,00	97,29	99.889.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	11.621.257.000,00	9.594.081.598,00	82,56	21.260.847.623,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.300.000.000,00	2.251.494.000,00	97,89	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	53.873.513.477,00	48.978.628.382,00	90,91	65.798.658.087,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.620.000.000,00	3.790.096.005,00	82,04	1.774.810.280,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	10.000.000,00	9.795.750,00	97,96	9.779.100,00
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	7.050.000.000,00	4.887.063.168,00	69,32	4.469.490.553,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	17.474.356.000,00	14.766.794.305,00	84,51	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.310.000.000,00	1.291.121.948,00	98,56	198.606.000,00
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	2.754.038.534,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	3.231.000.000,00	3.187.480.538,00	98,65	1.943.235.709,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.620.000.000,00	2.187.575.873,00	47,35	186.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	180.000.000,00	175.118.900,00	97,29	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	200.000.000,00	196.760.000,00	98,38	604.738.898,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	70.000.000,00	69.011.000,00	98,59	745.902.037,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50.216.756.790,00	38.153.386.152,00	75,98	35.614.644.727,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	20.630.000.000,00	19.322.976.221,00	93,66	3.335.188.767,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	29.586.756.790,00	18.830.409.931,00	63,64	32.279.455.960,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	891.980.000,00	880.431.990,00	98,71	1.091.567.000,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	891.980.000,00	880.431.990,00	98,71	1.091.567.000,00
5.2.03.03.01.0004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	0,00	0,00	0,00	1.091.567.000,00
5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	891.980.000,00	880.431.990,00	98,71	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	400.000.000,00	303.999.999,00	76,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	400.000.000,00	303.999.999,00	76,00	0,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	304.000.000,00	303.999.999,00	100,00	0,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	323.807.071.093,00	292.653.376.604,00	90,38	155.513.502.679,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	271.968.077.810,00	244.171.016.611,00	89,78	142.232.072.223,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	250.944.331.600,00	230.877.605.641,00	92,00	135.800.156.057,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	232.426.116.600,00	213.282.691.269,00	91,76	133.676.244.696,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	16.843.215.000,00	15.944.037.100,00	94,66	1.409.061.361,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.675.000.000,00	1.650.877.272,00	98,56	714.850.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	21.023.746.210,00	13.293.410.970,00	63,23	6.431.916.166,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	20.943.746.210,00	13.214.218.970,00	63,09	6.431.916.166,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	80.000.000,00	79.192.000,00	98,99	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	42.989.353.283,00	40.168.131.874,00	93,44	12.950.874.776,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	821.180.000,00	812.850.332,00	98,99	391.404.800,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	221.180.000,00	220.702.832,00	99,78	391.404.800,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	600.000.000,00	592.147.500,00	98,69	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	42.168.173.283,00	39.355.281.542,00	93,33	12.464.990.976,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	18.661.649.955,00	15.851.006.988,00	84,94	9.528.055.521,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	23.506.523.328,00	23.504.274.554,00	99,99	2.936.935.455,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	94.479.000,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	94.479.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	8.772.460.000,00	8.239.955.019,00	93,93	288.018.380,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	7.076.710.000,00	6.596.016.023,00	93,21	229.071.500,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	7.076.710.000,00	6.596.016.023,00	93,21	229.071.500,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	58.946.880,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00	0,00	58.946.880,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.400.000.000,00	1.375.840.000,00	98,27	0,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.400.000.000,00	1.375.840.000,00	98,27	0,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	120.000.000,00	114.999.996,00	95,83	0,00
5.2.04.03.09.0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	120.000.000,00	114.999.996,00	95,83	0,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	175.750.000,00	153.099.000,00	87,11	0,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	175.750.000,00	153.099.000,00	87,11	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	77.180.000,00	74.273.100,00	96,23	42.537.300,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	77.180.000,00	74.273.100,00	96,23	42.537.300,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	77.180.000,00	74.273.100,00	96,23	42.537.300,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	790.000.000,00	743.850.360,00	94,16	1.904.007.132,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	305.000.000,00	265.350.000,00	87,00	444.675.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	290.000.000,00	265.350.000,00	91,50	384.675.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	290.000.000,00	265.350.000,00	91,50	384.675.000,00
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.2.05.01.04.0001	Belanja Modal Karya Musik	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	148.050.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	148.050.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	148.050.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	485.000.000,00	478.500.360,00	98,66	8.588.903,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	485.000.000,00	478.500.360,00	98,66	8.588.903,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	485.000.000,00	478.500.360,00	98,66	8.588.903,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	1.299.073.229,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	1.299.073.229,00
5.2.05.08.01.0001	Belanja Modal Goodwill	0,00	0,00	0,00	82.251.000,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	480.992.230,00
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	0,00	0,00	0,00	559.818.000,00
5.2.05.08.01.0008	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	76.999.999,00
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.012.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.450.355.000,00	4.202.407.573,09	56,41	462.816.130,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	450.355.000,00	445.868.596,00	99,00	462.816.130,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	450.355.000,00	445.868.596,00	99,00	462.816.130,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	13.800.000,00	13.698.000,00	99,26	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	129.555.000,00	126.920.596,00	97,97	462.816.130,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	307.000.000,00	305.250.000,00	99,43	0,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	7.000.000.000,00	3.756.538.977,09	53,66	0,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	7.000.000.000,00	3.756.538.977,09	53,66	0,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	7.000.000.000,00	3.756.538.977,09	53,66	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	794.123.866.374,00	706.181.651.526,09	88,93	651.639.401.736,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.000.000.000,00	7.566.963.773,00	94,59	9.451.453.256,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	7.566.963.773,00	94,59	9.451.453.256,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	7.566.963.773,00	94,59	9.451.453.256,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	7.566.963.773,00	94,59	9.451.453.256,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	7.566.963.773,00	94,59	9.451.453.256,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	8.000.000.000,00	7.566.963.773,00	94,59	9.451.453.256,00
5.4	BELANJA TRANSFER	624.375.084.211,65	524.327.592.129,00	83,98	538.778.797.545,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	436.318.484.211,65	336.426.911.141,00	77,11	368.800.299.772,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	436.318.484.211,65	336.426.911.141,00	77,11	368.800.299.772,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	355.171.984.404,65	265.191.872.993,00	74,67	289.812.364.640,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	355.171.984.404,65	265.191.872.993,00	74,67	289.812.364.640,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	81.146.499.807,00	71.235.038.148,00	87,79	78.987.935.132,00
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	81.146.499.807,00	71.235.038.148,00	87,79	78.987.935.132,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	188.056.600.000,00	187.900.680.988,00	99,92	169.978.497.773,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	188.056.600.000,00	187.900.680.988,00	99,92	169.978.497.773,00
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	72.585.000.000,00	72.585.000.000,00	100,00	69.877.070.279,00
5.4.02.03.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	72.585.000.000,00	72.585.000.000,00	100,00	69.877.070.279,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	115.471.600.000,00	115.315.680.988,00	99,86	100.101.427.494,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	115.471.600.000,00	115.315.680.988,00	99,86	100.101.427.494,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	624.375.084.211,65	524.327.592.129,00	83,98	538.778.797.545,00
	JUMLAH BELANJA	3.977.693.144.257,41	3.570.959.018.593,06	89,77	3.242.315.178.035,82

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	SURPLUS/DEFISIT	(124.743.726.516,41)	(111.933.644.122,09)	89,73	(151.302.417.036,77)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	124.743.726.516,41	129.768.722.962,58	103,80	301.046.143.553,18
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	149.743.726.516,41	149.768.722.962,58	99,82	316.046.143.553,18
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	149.743.726.516,41	149.743.726.516,41	99,82	316.046.143.553,18
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	(93.067.793.158,17)
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	(93.067.793.158,17)
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	(92.666.568.000,00)
6.1.01.02.01.0068	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	0,00	0,00	0,00	4.056.671,14
6.1.01.02.01.0069	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi	0,00	0,00	0,00	(405.281.829,31)
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	138.002.248.648,30	138.002.248.648,30	99,79	388.254.507.560,40
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	138.002.248.648,30	138.002.248.648,30	99,79	388.254.507.560,40
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	138.002.248.648,30	138.002.248.648,30	99,79	388.254.507.560,40
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	11.741.477.868,11	11.766.474.314,28	100,21	20.859.429.150,95
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	11.741.477.868,11	11.741.477.868,11	100,00	20.089.027.159,63
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	11.741.477.868,11	11.741.477.868,11	100,00	20.089.027.159,63
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	24.996.446,17	0,00	770.401.991,32
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	24.996.446,17	0,00	770.401.991,32
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	149.743.726.516,41	149.768.722.962,58	99,82	316.046.143.553,18
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	80,00	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	80,00	15.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	80,00	15.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	80,00	15.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	80,00	15.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	80,00	15.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	124.743.726.516,41	129.768.722.962,58	104,03	301.046.143.553,18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI	0,00	17.835.078.840,49		149.743.726.516,41
	Koreksi SiLPA	0,00	(287.059.613,00)		0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0,00	17.548.019.227,49		149.743.726.516,41

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.2.1	149.743.726.516,41	409.113.936.711,35
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.2	149.768.722.962,58	316.046.143.553,18
3	Sub Total (1 - 2)		(24.996.446,17)	93.067.793.158,17
4				
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.2.3	17.835.078.840,49	149.743.726.516,41
6	Sub Total (3 + 5)		17.810.082.394,32	242.811.519.674,58
7				
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.2.4	24.996.446,17	(92.662.511.328,86)
9	Lain-lain	5.2.2.5	(287.059.613,00)	(405.281.829,31)
10	Saldo Anggaran Lebih Akhir (6 + 8 + 9)	5.2.2.6	17.548.019.227,49	149.743.726.516,41

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



No.	URAIAN	Catatan	2024	2023	Kenaikan /	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	5.2.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.2.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.2.4.1.1.1	761.208.201.377,00	717.309.540.671,00	43.898.660.706,00	6,12
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.2.4.1.1.2	12.831.979.484,84	9.616.487.861,33	3.215.491.623,51	33,44
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.2.4.1.1.3	11.371.469.793,77	10.114.672.311,44	1.256.797.482,33	12,43
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	5.2.4.1.1.4	249.331.104.910,59	240.819.498.701,72	8.511.606.208,87	3,53
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)		1.034.742.755.566,20	977.860.199.545,49	56.882.556.020,71	5,82
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER	5.2.4.1.2				
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO	5.2.4.1.2.1				
12	Dana Bagi Hasil Pajak - LO		101.596.075.809,00	132.145.622.711,00	(30.549.546.902,00)	(23,12)
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO		737.956.247.673,00	876.302.942.436,00	(138.346.694.763,00)	(15,79)
14	Dana Alokasi Umum - LO		1.153.992.670.001,00	1.117.056.619.340,00	36.936.050.661,00	3,31
15	Dana Alokasi Khusus - LO		244.387.782.906,00	273.451.710.015,00	(29.063.927.109,00)	(10,63)
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 s/d 15)		2.237.932.776.389,00	2.398.956.894.502,00	(161.024.118.113,00)	(6,71)
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LO	5.2.4.1.2.2				
19	Dana Otonomi Khusus - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian - LO		12.648.494.000,00	24.666.327.000,00	(12.017.833.000,00)	(48,72)
21	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (19 s/d 20)		12.648.494.000,00	24.666.327.000,00	(12.017.833.000,00)	(48,72)
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI-LO					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Bantuan Keuangan - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (24 s/d 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 21 + 27)		2.250.581.270.389,00	2.423.623.221.502,00	(173.041.951.113,00)	(7,14)
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.2.4.1.3				
31	Pendapatan Hibah - LO	5.2.4.1.3.1	49.837.404.020,99	42.675.222.227,23	7.162.181.793,76	16,78
32	Pendapatan Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan Lainnya - LO	5.2.4.1.3.1	1.393.210.696,00	375.585.966,00	1.017.624.730,00	270,94
34	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (31 s/d 33)		51.230.614.716,99	43.050.808.193,23	8.179.806.523,76	19,00
35	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 28 + 34)		3.336.554.640.672,19	3.444.534.229.240,72	(107.979.588.568,53)	(3,13)
36						
37	BEBAN	5.2.4.2				
38	BEBAN OPERASI	5.2.4.2.1				
39	Beban Pegawai	5.2.4.2.1.1	868.490.469.825,00	767.019.929.418,00	101.470.540.407,00	13,23
40	Beban Persediaan	5.2.4.2.1.2	283.718.847.890,11	254.619.017.227,53	29.099.830.662,58	11,43
41	Beban Jasa	5.2.4.2.1.3	480.007.495.534,26	521.750.718.355,15	(41.743.222.820,89)	(8,00)
42	Beban Pemeliharaan	5.2.4.2.1.4	27.214.192.909,61	27.166.062.912,00	48.129.997,61	0,18
43	Beban Perjalanan Dinas	5.2.4.2.1.5	262.338.356.646,00	198.491.590.148,59	63.846.766.497,41	32,17
44	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Beban Subsidi	5.2.4.2.1.6	19.787.303.700,00	16.513.140.465,00	3.274.163.235,00	19,83
46	Beban Hibah	5.2.4.2.1.7	219.117.187.570,00	158.218.075.976,00	60.899.111.594,00	38,49
47	Beban Bantuan Sosial	5.2.4.2.1.8	2.859.081.400,00	733.761.466,00	2.125.319.934,00	289,65
48	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.2.4.2.1.9	329.486.738.307,46	305.033.292.718,40	24.453.445.589,06	8,02
49	Beban Penyisihan Piutang	5.2.4.2.1.10	39.296.820,70	661.951.582,80	(622.654.762,10)	(94,06)
50	Beban Transfer	5.2.4.2.1.11	628.543.452.668,00	583.974.347.271,00	44.569.105.397,00	7,63
51	Beban Lain-lain	5.2.4.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Beban Tidak Terduga	5.2.4.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
53	JUMLAH BEBAN (39 s/d 52)		3.121.602.423.271,14	2.834.181.887.540,47	287.420.535.730,67	10,14
54	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (35 - 53)		214.952.217.401,05	610.352.341.700,25	(395.400.124.299,20)	(64,78)
55						
56	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.2.4.3				
57	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(26.816.334.897,34)	(1.574.175.798,00)	(25.242.159.099,34)	1.603,52
62	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (57 s/d 61)		(26.816.334.897,34)	(1.574.175.798,00)	(25.242.159.099,34)	1.603,52
63	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (54 + 62)		188.135.882.503,71	608.778.165.902,25	(420.642.283.398,54)	(69,10)
64						
65	POS LUAR BIASA	5.2.4.4				
66	Pendapatan Luar Biasa	5.2.4.4.1	5.208.577.800,00	3.885.470.458,50	1.323.107.341,50	34,05
67	Beban Luar Biasa	5.2.4.4.2	7.566.963.773,00	10.817.865.023,60	(3.250.901.250,60)	(30,05)
68	Jumlah Pos Luar Biasa (66 - 67)		(2.358.385.973,00)	(6.932.394.565,10)	4.574.008.592,10	(65,98)
69	SURPLUS / DEFISIT - LO (63 + 68)	5.2.4.5	185.777.496.530,71	601.845.771.337,15	(416.068.274.806,44)	(69,13)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	5.2.6.1	8.082.480.187.118,96	7.514.931.922.017,64
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.2.6.2	185.777.496.530,71	601.845.771.337,15
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.2.6.3	(24.171.955.249,17)	(34.297.506.235,83)
4	Koreksi Nilai Persediaan			
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap			
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	5.2.6.4	(24.171.955.249,17)	(34.297.506.235,83)
7	EKUITAS AKHIR (1 + 2 + 4 + 5 + 6)	5.2.6.5	8.244.085.728.400,50	8.082.480.187.118,96

GOVERNOR OF KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No	URAIAN	Catatan	2024	2023
68	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.3.5		
69	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.2.3.5.1	0,00	0,00
70	Utang Bunga		0,00	0,00
71	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
72	Pendapatan Diterima Dimuka	5.2.3.5.2	6.141.798.363,33	7.945.495.040,00
73	Utang Beban	5.2.3.5.3	333.782.483.230,75	184.124.007.037,00
74	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.2.3.5.4	19.737.400,00	57.046.204.774,09
75	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (63 s/d 68)		339.944.018.994,08	249.115.706.851,09
76				
77	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.2.3.6		
78	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan		0,00	0,00
79	Utang Dalam Negeri-Obligasi		0,00	0,00
80	Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
81	Utang Jangka Panjang Lainnya		1.590.608.804,00	1.518.108.304,00
82	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (72 s/d 75)		1.590.608.804,00	1.518.108.304,00
83	JUMLAH KEWAJIBAN (69 + 76)		341.534.627.798,08	250.633.815.155,09
84				
85	JUMLAH EKUITAS	5.2.3.7	8.244.085.728.400,50	8.082.480.187.118,96
86	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.585.620.356.198,58	8.333.114.002.274,05

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



ZAINAL ARIFIN PALIWANG



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023



(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		761.219.619.467,00	717.253.715.401,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		10.789.764.538,16	17.404.890.968,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.371.469.793,77	10.114.672.311,44
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		250.313.385.069,04	235.363.397.287,61
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		81.492.235.000,00	126.943.258.367,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		924.754.700.000,00	562.836.351.343,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.153.992.670.001,00	1.117.056.619.340,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		244.387.782.906,00	273.451.710.015,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		12.648.494.000,00	24.666.327.000,00
13	Penerimaan Hibah		6.609.420.000,00	5.546.233.000,00
14	Penerimaan Lainnya		1.393.210.696,00	375.585.966,00
15	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 14)		3.458.972.751.470,97	3.091.012.760.999,05
16	Arus Kas Keluar			
17	Pembayaran Pegawai		868.496.469.825,00	767.029.049.418,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa		1.218.671.997.282,97	1.097.028.389.768,82
19	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
20	Pembayaran Subsidi		19.787.303.700,00	16.513.140.465,00
21	Pembayaran Hibah		222.697.836.570,00	161.141.184.381,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		3.229.203.787,00	733.761.466,00
23	Pembayaran Tak Terduga		7.566.963.773,00	9.451.453.256,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		336.426.911.141,00	368.800.299.772,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		187.900.680.988,00	169.978.497.773,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
27	Jumlah Arus Kas Keluar (17 s/d 26)		2.864.777.367.066,97	2.590.675.776.299,82
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 27)	5.2.5.1	594.195.384.404,00	500.336.984.699,23
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
30	Arus Kas Masuk		52.623.000,00	
31	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		35.678.000,00	0,00
32	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		16.945.000,00	0,00
33	Jumlah Arus Kas Masuk		52.623.000,00	0,00
34	Arus Kas Keluar			
35	Perolehan Tanah		36.362.332.622,00	30.379.184.731,00
36	Perolehan Peralatan dan Mesin		163.713.917.310,00	118.377.089.281,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan		208.505.767.057,00	345.002.801.783,00
38	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		292.653.376.604,00	155.513.502.679,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya		743.850.360,00	1.904.007.132,00
40	Perolehan Aset Lainnya		4.202.407.573,09	462.816.130,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		20.000.000.000,00	15.000.000.000,00
42	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
43	Jumlah Arus Kas Keluar (35 s/d 42)		726.181.651.526,09	666.639.401.736,00
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (33 - 43)	5.2.5.2	(726.129.028.526,09)	(666.639.401.736,00)
45	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
46	Arus Kas Masuk		0,00	0,00
47	Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
48	Arus Kas Keluar			
49	Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (48 - 50)	5.2.5.3	0,00	0,00
51	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
52	Arus Kas Masuk			
53	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		214.425.593.533,71	45.029.977.761,50
54	Mutasi Antar Kas			8.563.192,61
55	Jumlah Arus Kas Masuk		214.425.593.533,71	45.038.540.954,11
56	Arus Kas Keluar			
57	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		214.425.593.533,71	45.029.977.761,50
58	Jumlah Arus Kas Keluar (58 s/d 59)		214.425.593.533,71	45.029.977.761,50
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (57 - 60)	5.2.5.4	0,00	8.563.192,61
60	Kenaikan/(Penurunan) Kas (28 + 44 + 51 + 61)	5.2.5.5	(131.933.644.122,09)	(166.293.853.844,16)
61	Saldo Awal Kas*	5.2.5.6	149.768.722.962,58	409.090.647.713,74
62	Koreksi SILPA		(287.059.613,00)	(93.067.793.158,17)
63	Saldo Akhir Kas (62 + 63 + 64)	5.2.5.7	17.548.019.227,49	149.729.000.711,41
64	Kas di Kas Daerah		5.725.309.574,79	137.659.217.241,37
65	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.433.267,97	5.310.824,22
66	Kas di Badan Layanan Umum Daerah		10.698.134.567,95	11.798.137.662,00
67	Kas di Bendahara BOS		0,00	231.629.445,90
68	Kas Dana BOSP		1.106.023.965,58	0,00
69	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		6.810.000,00	14.725.805,00
70	Saldo Akhir Kas Lainnya		10.307.851,20	34.705.537,92
71	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		417.737.400,00	3.147.000.000,00
72	Saldo Akhir Kas (66 s.d. 73)		17.965.756.627,49	152.890.726.516,41

* Saldo Awal Kas Tahun 2024 berbeda senilai Rp39.722.251,17 (Rp149.768.722.962,58 - Rp149.729.000.711,41) disebabkan saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 senilai Rp14.725.805,00 tidak merupakan bagian dari Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan koreksi saldo kas sekolah senilai Rp24.996.446,17

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Lampiran VII
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Nomor Tahun 2025
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LKPD
2024

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih, dan bertanggung jawab (*accountable*). Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom berupaya meletakkan dasar-dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program, kegiatan, maupun sub kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2024
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024
Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



c. Neraca per 31 Desember 2024

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

d. Laporan Operasional untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2024

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

e. Laporan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2024

Laporan Arus Kas menggambarkan laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas).

f. Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2024

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target Pendapatan-LRA dan Pendapatan LO, penjelasan pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan posisi dana cadangan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.



c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi yang bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan:

- Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pendapatan yang bisa dicapai;
- Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pengeluaran yang bisa dicapai; dan
- Menyediakan informasi/data guna mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai selama satu periode laporan.

Adapun penerapan SAP yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 adalah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang



- Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18



- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1725);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - v. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - w. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - x. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - y. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - z. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - aa. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - bb. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara



Tahun Anggaran 2024 dibagi ke dalam 7 (tujuh) bab, terdiri dari:

- Bab I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan CaLK;
- Bab II : Memuat informasi tentang ekonomi makro suatu pemerintahan daerah, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- Bab III : Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan selama satu tahun anggaran, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- Bab IV : Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP;
- Bab V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas, dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas;
- Bab VI : Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan;
- Bab VII : Memuat uraian penutup CaLK yang tersaji secara ringkas.

Dalam upaya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara baik dan benar tentunya akan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama dan tahap persiapan penyusunan yang tidak mudah serta adanya komitmen yang kuat dari semua pihak. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan di masa-masa yang akan datang, sesuai norma-norma, etika dan standar/peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dengan demikian, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi pemerintah daerah Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,32%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,90%;
- c. *Gini Ratio* sebesar 0,264;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,41;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,57%; dan
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,29%.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara periode tertentu.

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya.

Berikut disajikan tren persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Provinsi (%)	6,77	6,45	6,32
2	Nasional (%)	9,57	9,36	9,03
3	Peringkat Nasional	11	10	11

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



Tabel di atas menunjukkan adanya tren jumlah penduduk miskin periode Tahun 2022 s.d. 2024 yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Tahun 2023 sebanyak 47,97 ribu (6,45%). Pada Tahun 2022 penduduk miskin berjumlah 49,46 ribu (6,77%), berarti jumlah penduduk miskin turun 1,49 ribu jiwa atau secara persentase turun 0,32% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,13% menjadi 6,32%. Jika dibandingkan rata-rata tingkat nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara masih di bawah nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan jauh lebih besar lagi.

Tabel 2.2
Data Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Wilayah dan Domisili

No	Penduduk Miskin	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah (Ribu)	%	Jumlah (Ribu)	%	Jumlah (Ribu)	%
1	Berdasarkan Wilayah Provinsi						
	a Kabupaten Malinau	5,93	6,64	5,95	6,54	6,45	6,94
	b Kabupaten Bulungan	12,58	9,32	12,19	8,99	11,95	8,76
	c Kabupaten Tana Tidung	1,35	4,45	1,47	4,62	1,50	4,47
	d Kabupaten Nunukan	12,86	6,13	11,88	5,53	12,61	5,73
	e Kota Tarakan	16,75	6,3	16,49	6,10	15,32	5,56
2	Berdasarkan Domisili						
	a Perkotaan	26,55	5,66	24,75	5,18	23,18	4,73
	b Pedesaan	22,91	8,75	23,22	8,74	24,65	9,23

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.3
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara	0,89	0,64	0,82
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,59	1,53	1,46
3	Peringkat Nasional	6	4	9

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 2.4
Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara	0,19	0,11	0,19
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,39	0,38	0,35
3	Peringkat Nasional	6	2	10

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah merencanakan Program/Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.392.305.660,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 34.662.146.938,00 atau 95,25 %. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan tersebut



disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi Kalimantan Utara TA 2024

No	Nama Program / Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.06.0.00.0.00.01.0 000.1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	997.297.592,00	920.958.398,00	92,35
1.06.0.00.0.00.01.0 000.1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	997.297.592,00	920.958.398,00	92,35
1.06.0.00.0.00.01.0 000.1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.883.423.358,00	2.803.278.745,00	97,22
1.06.0.00.0.00.01.0 000.1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	64.900.000,00	63.022.338,00	97,00
1.06.0.00.0.00.01.0 000.1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	637.152.035,00	617.654.393,00	96,94
1.06.0.00.0.00.01.0 000.1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.869.989.744,00	1.813.942.865,00	97,00
1.06.0.00.0.00.01.0 000.1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	311.381.579,00	308.659.149,00	99,13
1.06.0.00.0.00.01.0 000.1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.849.477.948,00	2.823.732.248,00	99,10
1.06.0.00.0.00.01.0 000.1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	48.900.000,00	44.888.000,00	91,80
1.06.0.00.0.00.01.0 000.1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	2.800.577.948,00	2.778.844.248,00	99,22
1.06.0.00.0.00.01.0 000.1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	909.953.052,00	901.907.390,00	99,12
1.06.0.00.0.00.01.0 000.1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	909.953.052,00	901.907.390,00	99,12
3.31.3.30.2.17.02.0 000.2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.033.617.829,00	918.764.577,00	88,89
3.31.3.30.2.17.02.0 000.2.17.07.1.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.033.617.829,00	918.764.577,00	88,89
4.01.2.10.0.00.01.0 003.4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	26.568.535.881,00	25.143.549.948,00	94,64
4.01.2.10.0.00.01.0 003.4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	20.910.915.881,00	19.816.601.527,00	94,77
4.01.2.10.0.00.01.0 003.4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	5.657.620.000,00	5.326.948.421,00	94,16
5.06.0.00.0.00.01.0 000.5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	1.150.000.000,00	1.149.955.632,00	99,99
5.06.0.00.0.00.01.0 000.5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	1.150.000.000,00	1.149.955.632,00	99,99
Jumlah		36.392.305.660,00	34.662.146.938,00	95,25

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu

dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan upaya lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain berupa menjalankan program- program pendukung sebagai berikut:

1) **Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program perencanaan tenaga kerja bertujuan untuk menyusun rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan lainnya secara berkesinambungan. Rencana Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara.

2) **Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi.

3) **Program Hubungan Industrial**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (*industrial peace*), sehingga dapat mendorong produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja.

4) **Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Program pengembangan kawasan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan penguatan SDM dalam rangka pemantapan satuan pemukiman dan mewujudkan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan pemukiman.

2.1.2 **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, menunjukkan tren TPT Provinsi Kalimantan Utara selama tiga tahun terakhir yang cenderung konstan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Table 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024

1	Tingkat Pengangguran Provinsi	4,33	4,01	3,90
2	Tingkat Pengangguran Nasional	5,86	5,32	4,91
3	Peringkat Nasional	12	11	14

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel di atas menunjukkan bahwa TPT di Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan angka TPT Tahun 2023 dan Tahun 2022. Jika dibandingkan TPT tingkat Provinsi/Nasional menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi/Nasional. Berikut disajikan angka pengangguran berdasarkan penyebaran desa kota, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.

Tabel 2.7
Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota

No	Daerah Tempat Tinggal	TPT Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal		
		2022	2023	2024
1	Perkotaan	5,47	4,64	4,26
2	Perdesaan	2,48	2,99	3,27

Sumber Dokumen: BPS

Tabel 2.8
Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi TPT		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Pendidikan				
	a	SD ke bawah	3,59	2,56	2,32
	b	SMP	5,95	4,78	4,11
	c	SMA	8,57	8,15	7,05
	d	SMK	9,42	9,31	9,01
	e	Diploma I/II/III	4,59	4,79	4,83
	f	Universitas	4,80	5,18	5,25
2	Jenis Kelamin				
	a	Laki-Laki	5,93	5,42	4,90
	b	Perempuan	5,75	5,15	4,92

Sumber Dokumen: BPS

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menganggarkan program/kegiatan dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran terbuka pada APBD TA 2024 sebesar Rp5.191.248.764,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp3.964.339.749,00 atau 76,37%. Rincian program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam Upaya Menekan Angka Pengangguran Provinsi Kalimantan UtaraTA 2024

Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.07.3.32.0.00.02.0000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	11.380.000,00	11.172.400,00	98,18
2.07.3.32.0.00.02.0000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	11.380.000,00	11.172.400,00	98,18
2.07.3.32.0.00.02.0000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	215.436.768,00	142.091.700,00	65,96
2.07.3.32.0.00.02.0000	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	215.436.768,00	142.091.700,00	65,96





Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.07.3.32.0.00.02.0000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	178.405.167,00	164.089.179,00	91,98
2.07.3.32.0.00.02.0000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	75.438.911,00	66.836.000,00	88,60
2.07.3.32.0.00.02.0000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	29.986.256,00	29.279.000,00	97,64
2.07.3.32.0.00.02.0000	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	72.980.000,00	67.974.179,00	93,14
3.31.3.30.2.17.02.0000	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.033.617.829,00	918.764.577,00	88,89
3.31.3.30.2.17.02.0000	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.033.617.829,00	918.764.577,00	88,89
3.31.3.30.2.17.02.0000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.752.409.000,00	2.728.281.893,00	72,71
3.31.3.30.2.17.02.0000	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	3.752.409.000,00	2.728.281.893,00	72,71
Jumlah		5.191.248.764,00	3.964.399.749,00	76,37

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih berupaya untuk menekan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan angka yang ditargetkan.

- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menurunkan angka pengangguran, antara lain berupa menjalankan program-program pendukung yaitu Program Hubungan Industrial, Program Pengawasan Ketenagakerjaan, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dan Program Promosi Penanaman Modal.

Namun demikian, upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan program/kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang diantaranya masih terdapat program/kegiatan terkait penanganan pengangguran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan jumlah SDM untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang harus dikerjakan.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui bahwa tren data pencapaian Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara



untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 s.d. 2024

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tingkat Provinsi	0,272	0,277	0,264
2	Tingkat Nasional	0,384	0,388	0,379
3	Peringkat Nasional	2	2	2

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah merencanakan program/kegiatan yang ditujukan untuk menekan tingkat ketimpangan pendapatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.966.473.856,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.398.529.860,00 atau 96,44%. Adapun anggaran dan realisasi atas masing- masing program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Dalam Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara TA 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.13.0.00.0.00.01.0 000.2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.159.856.306,00	1.041.456.522,00	89,79
2.13.0.00.0.00.01.0 000.2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.159.856.306,00	1.041.456.522,00	89,79
2.13.0.00.0.00.01.0 000.2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.941.436.018,00	4.820.804.846,00	97,56
2.13.0.00.0.00.01.0 000.2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.941.436.018,00	4.820.804.846,00	97,56
3.25.0.00.0.00.01.0 000.3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.477.542.800,00	3.353.802.205,00	96,44
3.25.0.00.0.00.01.0 000.3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.369.692.750,00	3.246.078.407,00	96,33
3.25.0.00.0.00.01.0 000.3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	107.850.050,00	107.723.798,00	99,88
3.25.0.00.0.00.01.0 000.3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.211.200.000,00	5.075.464.487,00	97,40
3.25.0.00.0.00.01.0 000.3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	942.500.000,00	871.228.469,00	92,44
3.25.0.00.0.00.01.0 000.3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.611.700.000,00	1.580.337.125,00	98,05
3.25.0.00.0.00.01.0 000.3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100.000.000,00	94.834.400,00	94,83



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.25.0.00.0.00.01.0 000.3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2.557.000.000,00	2.529.064.493,00	98,91
3.25.0.00.0.00.01.0 001.3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	84.704.654,00	77.816.000,00	91,87
3.25.0.00.0.00.01.0 001.3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	84.704.654,00	77.816.000,00	91,87
3.27.2.09.0.00.02.0 000.3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.091.734.078,00	1.029.185.800,00	94,27
3.27.2.09.0.00.02.0 000.3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	216.576.229,00	208.561.300,00	96,30
3.27.2.09.0.00.02.0 000.3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	875.157.849,00	820.624.500,00	93,77
Jumlah		15.966.473.856,00	15.398.529.860,00	96,44

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum berhasil menekan tingkat ketimpangan pendapatan sesuai dengan angka yang ditargetkan dalam APBD.

- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menekan tingkat ketimpangan pendapatan, antara lain berupa menjalankan program-program pendukung sebagai berikut:
- 1) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 2) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
 - 3) Program Pengembangan UMKM; dan
 - 4) Program Pengembangan Ekspor.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut, dikategorikan menjadi empat yaitu:

- a. Rendah (<60)
- b. Sedang (60≤IPM<70)
- c. Tinggi (70≤IPM<80)
- d. Sangat Tinggi (>80)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebesar 73,41 poin yang berarti masuk kategori tinggi dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Indeks Pembangunan Manusia

No	Capaian IPM	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tingkat Provinsi	72,21	72,88	73,41

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel di atas menunjukkan adanya tren yang meningkat atas pencapaian IPM di Provinsi Kalimantan Utara, namun IPM di Provinsi Kalimantan Utara pada saat ini berada pada urutan 24 untuk peringkat nasional dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

Untuk Tahun 2024 terjadi kenaikan IPM dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) sebesar 0,08 Tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,14 Tahun, dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,07 Tahun. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,59 tahun pada Tahun 2023 atau lebih lama 0,08 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,34 tahun dengan harapan lama sekolah 13,20 tahun. Sementara, standar hidup PNB per kapita per tahun sebesar Rp9.734.000,00 atau terjadi kenaikan senilai Rp384.000,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.350.000,00.

Tabel 2.13
IPM Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota Periode Tahun 2022 – 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Malinau	73,55	74,00	74,72
2	Bulungan	72,56	73,20	73,83
3	Tana Tidung	69,45	70,06	70,95
4	Nunukan	67,88	68,43	69,27
5	Tarakan	76,75	77,61	78,03
6	Kalimantan Utara	72,21	72,88	73,41

Sumber Dokumen: BPS, diolah dari hasil sensus, survei, dan berbagai sumber lainnya

Tabel di atas, menunjukkan tren capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara dalam periode Tahun 2022 s.d. 2024 yang mengalami fluktuasi. Kota Tarakan menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Nunukan menduduki peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

Tabel 2.14
Indikator Pembentuk IPM Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator		Tahun		
			2022	2023	2024
1	Kesehatan - Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir		73,51	73,54	73,57
2	Pendidikan				
	A	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	13,06	13,20	13,21
	B	Harapan Lama Sekolah (HLS)	9,27	9,34	9,35
3	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan		9.350,00	9.734,00	10.197,00
Indeks Pembangunan Manusia			72,21	72,88	73,41

Sumber: BPS

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 73,57 tahun. Terkait pencapaian indikator ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Program/Kegiatan Dalam Upaya Meningkatkan UHH TA 2024



Kode	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.02.0.00.0.00.01.00 00.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	109.983.076.365,00	104.519.840.561,00	95,03
1.02.0.00.0.00.01.00 00.1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	77.834.696.767,00	74.990.644.918,00	96,35
1.02.0.00.0.00.01.00 00.1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	31.105.379.598,00	28.510.889.605,00	91,66
1.02.0.00.0.00.01.00 00.1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100.000.000,00	98.954.000,00	98,95
1.02.0.00.0.00.01.00 00.1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	943.000.000,00	919.352.038,00	97,49
1.02.0.00.0.00.01.00 00.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	266.900.000,00	259.647.656,00	97,28
1.02.0.00.0.00.01.00 00.1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	55.800.000,00	54.331.000,00	97,37
1.02.0.00.0.00.01.00 00.1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	48.600.000,00	46.401.250,00	95,48
1.02.0.00.0.00.01.00 00.1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	162.500.000,00	158.915.406,00	97,79
Jumlah		110.249.976.365,00	104.779.488.217,00	95,04

b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16
Program/Kegiatan Dalam Upaya Meningkatkan RLS dan HLS TA 2024

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.01.2.22.0.00.02.0000. 1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	261.142.006.018,00	242.277.632.299,80	92,78
1.01.2.22.0.00.02.0000. 1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	156.294.255.275,00	144.453.125.631,82	92,42
1.01.2.22.0.00.02.0000. 1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	86.780.537.195,00	81.833.071.983,00	94,30
1.01.2.22.0.00.02.0000. 1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	18.067.213.548,00	15.991.434.685,00	88,51
1.01.2.22.0.00.02.0000. 1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	754.485.000,00	584.765.558,00	77,51
1.01.2.22.0.00.02.0000. 1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	754.485.000,00	584.765.558,00	77,51
1.01.2.22.0.00.02.0000. 2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.013.787.929,00	1.766.841.828,00	87,74

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.01.2.22.0.00.02.0000.2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.130.250.939,00	932.915.991,00	82,54
1.01.2.22.0.00.02.0000.2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	883.536.990,00	833.925.837,00	94,38
1.01.2.22.0.00.02.0000.2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	891.754.360,00	843.562.483,00	94,60
1.01.2.22.0.00.02.0000.2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	891.754.360,00	843.562.483,00	94,60
1.01.2.22.0.00.02.0000.2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	7.481.224.540,00	5.215.167.441,00	69,71
1.01.2.22.0.00.02.0000.2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	7.481.224.540,00	5.215.167.441,00	69,71
JUMLAH		272.283.257.847,00	250.687.969.609,80	92,07

c. Indikator Pengeluaran Per Kapita Per Tahun disesuaikan dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Terkait dengan indikator ini, Provinsi Kalimantan Utara juga telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan indikator ini sebesar Rp14.308.390.929,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.17
Program Dalam Upaya Meningkatkan Angka Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Kode	Nama Program/Kegiatan Peningkatan Pengeluaran per Kapita	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.227.316.073,00	3.974.857.874,00	76,04
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	639.096.735,00	595.072.997,00	93,11
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.703.320.000,00	1.674.906.942,00	98,33
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.555.837.064,00	1.386.278.635,00	89,10
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.329.062.274,00	318.599.300,00	23,97
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	9.451.224.120,00	8.452.578.270,00	89,43
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	9.451.224.120,00	8.452.578.270,00	89,43
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	962.995.000,00	904.530.763,00	93,93
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	63.200.000,00	63.137.313,00	99,90
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	899.795.000,00	841.393.450,00	93,51
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.041.569.232,00	976.424.022,00	93,75
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	528.610.464,00	472.294.518,00	89,35
3.26.0.00.0.00.01.00 00.3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	512.958.768,00	504.129.504,00	98,28
JUMLAH		16.683.104.425,00	14.308.390.929,00	85,77



Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala yang ditemukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan IPM di antaranya Letak geografis Provinsi Kalimantan Utara yang secara tidak langsung meningkatkan biaya pendukung dan memperlambat kecepatan progres pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Berikut disajikan tren laju pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 s.d. 2024

No	Uraian	Laju Pertumbuhan (Y on Y) PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%)	5,32	4,94	4,57
2	Peringkat Nasional (Indonesia)	10	19	27

Sumber Dokumen: BPS

Selama kurun waktu Tahun 2022 s.d. 2024, laju perekonomian Provinsi Kalimantan Utara mengalami tren fluktuatif hal ini terlihat pada peringkat nasional, laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ke-27 dari laju pertumbuhan provinsi dalam wilayah Indonesia. Adapun tujuan undang-undang otonomi daerah yakni untuk memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki daerah yang pada gilirannya dapat ikut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaliknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi menjadi 4 kategori yaitu:

- a. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*); ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentase hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*); inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*); kategori inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat

naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.

- d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*); jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui bahwa tren perkembangan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Utara dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.19
Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	4,74	2,44	1,29
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57
3	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Survei Harga Konsumen (*peringkat nasional tidak dapat ditampilkan karena beberapa provinsi di Indonesia tidak menyajikan data inflasi Provinsi)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan laju inflasi pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1,29 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,72. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tarakan sebesar 1,60 persen dengan IHK sebesar 104,98 dan terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,40 persen dengan IHK sebesar 105,18.

Inflasi y-on-y di Provinsi Kalimantan Utara terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,56 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,54 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,77 persen; kelompok transportasi sebesar 0,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,30 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,81 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,38 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,44 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,07 persen.

Inflasi ini terdiri dari 3 faktor yaitu perawatan pribadi/jasa, transportasi dan makanan minuman, serta tembakau yang disebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen libur anak sekolah, Natal 2024, dan tahun baru 2025.

Upaya-upaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengendalikan tingkat inflasi diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Pengendalian Inflasi *Administered Prices* khususnya yang disebabkan karena tingginya Tarif Angkutan Udara dengan menyampaikan rekomendasi pengaturan batasan persentase maksimal dari harga batas atas pada saat *peak season* khususnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
2. Upaya Pengendalian Inflasi *Volatile Foods*/Pangan.
 - a. Menerapkan program kerja strategis yaitu 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) untuk menjaga daya beli pangan masyarakat.
 - b. Melakukan kegiatan pasar murah di beberapa kabupaten dan kota.
 - c. Melakukan kegiatan sidak pasar bersama satgas pangan dan perangkat daerah terkait di Provinsi Kalimantan Utara.

2.2. Kebijakan Keuangan



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi. Peraturan yang sama menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Utara berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD Provinsi Kalimantan Utara dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; dan
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan, serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Sumber pendaptaan asli daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Alat Berat



- 4. Pajak Air Permukaan;
- 5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 6. Pajak Rokok;
- 7. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 8. Retribusi Jasa Umum;
- 9. Retribusi Jasa Usaha; dan
- 10. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pajak rokok diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi TA 2024.

Pendapatan pajak dan retribusi daerah Tahun 2024 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp836.401.042.959,00, dengan rincian:

1. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	95.000.000.000,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	100.000.000.000,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	550.000.000.000,00
4. Pajak Air Permukaan	Rp	4.000.000.000,00
5. Pajak Rokok	Rp	65.201.042.959,00
6. Pajak Alat Berat	Rp	2.000.000.000,00
7. Retribusi Jasa Usaha	Rp	20.000.000.000,00
8. Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	200.000.000,00
Jumlah	Rp	836.401.042.959,00

Sedangkan pendapatan pajak dan retribusi daerah Tahun 2024 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp875.256.042.959,00, dengan rincian:

1. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	105.000.000.000,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	121.000.000.000,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	550.000.000.000,00
4. Pajak Air Permukaan	Rp	4.000.000.000,00
5. Pajak Alat Berat	Rp	10.000.000.000,00
6. Pajak Rokok	Rp	65.201.042.959,00
7. Retribusi Jasa Usaha	Rp	19.605.000.000,00
8. Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	450.000.000,00
Jumlah	Rp	875.256.042.959,00

Selain pendapatan pajak kendaraan dan retribusi, komponen yang mendukung pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp11.371.469.793,00 atau meningkat sebesar Rp 1.256.797.482,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp10.114.672.311,00. Sedangkan, komponen kedua yang mendukung pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian dan pendapatan BLUD dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp221.253.952.518,00 atau meningkat sebesar Rp1.238.202.518,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp220.015.750.000,00.

Alokasi pendapatan dana perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang





Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Terkait pendapatan dari dana perimbangan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun pendapatan dari dana perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp2.040.116.614.000,00 dengan rincian:

1. Dana Bagi Hasil	Rp	624.155.754.000,00
2. Dana Alokasi Umum	Rp	1.154.831.485.000,00
3. DAK Fisik	Rp	132.379.441.000,00
4. DAK Non Fisik	Rp	116.101.440.000,00
5. Dana Insentif Daerah	Rp	12.648.494.000,00
Jumlah	Rp	2.040.116.614.000,00

Sedangkan pendapatan dari dana perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp2.744.717.952.471,00 dengan rincian:

1. Dana Bagi Hasil	Rp	1.328.757.092.471,00
2. Dana Alokasi Umum	Rp	1.154.831.485.000,00
3. DAK Fisik	Rp	132.379.441.000,00
4. DAK Non Fisik	Rp	116.101.440.000,00
5. Dana Insentif Daerah	Rp	12.648.494.000,00
Jumlah	Rp	2.744.717.952.471,00

Dari data di atas dapat disimpulkan terdapat peningkatan anggaran setelah perubahan pada Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan sebesar Rp704.601.338.471,00.

Sedangkan, pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Adapun pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00, dengan rincian:

1. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	Rp	350.000.000,00
2. Pendapatan Lainnya	Rp	0,00
Jumlah	Rp	350.000.000,00

Sedangkan pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 setelah perubahan dianggarkan tetap sebesar Rp350.000.000,00.

Terkait data anggaran pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

B. Belanja Daerah



Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan sebesar Rp3.977.693.144.257,41 akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah sebesar Rp3.030.424.955.853,51, dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp947.268.188.400,25. Penggunaan belanja daerah selain diarahkan dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, juga telah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan dasar.

Namun demikian, penggunaan belanja daerah juga diharapkan akan memberi nilai tambah sektor-sektor ekonomi, yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Di samping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

C. Pembiayaan

Pada sisi pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp149.743.726.516,41 yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dianggarkan sebesar Rp25.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, di masa yang akan datang harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Di samping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber- sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Tercapainya Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.852.949.417.741,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.107.881.465.270,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.744.717.952.471,00, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp350.000.000,00. Sedangkan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.977.693.144.257,41.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 sebesar Rp3.459.025.374.470,97 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.033.746.861.867,97, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.417.275.881.907,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp8.002.630.696,00. Sedangkan realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.570.959.018.593,06.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebelum perubahan dialokasikan sebesar Rp3.106.998.079.270,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.066.531.465.270,00, Dana Perimbangan sebesar Rp2.040.116.614.000,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp350.000.000,00. Sedangkan anggaran pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp3.852.949.417.741,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.107.881.465.270,00, Dana Perimbangan sebesar Rp2.744.717.952.471,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp350.000.000,00.

Sedangkan, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 sebesar Rp3.459.025.374.470,97 (tercapai 89,78%) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.033.746.861.867,97 (tercapai 93,31%), Pendapatan Transfer sebesar Rp2.417.275.881.907,00 (tercapai 88,07%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya) sebesar Rp8.002.630.696,00 (tercapai 2.286,47%).

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 sebesar Rp3.046.631.426.464,06 dari anggaran sebesar Rp3.353.318.060.045,76 (tercapai 90,85%), sedangkan realisasi transfer sebesar Rp524.327.592.129,00 dari anggaran sebesar Rp624.375.084.211,65 (tercapai 83,98%), dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp(111.933.644.122,09).

Pembiayaan neto pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp129.768.722.962,58 merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp149.768.722.962,58 dengan pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal (investasi) pada BUMD sebesar Rp20.000.000.000,00, lalu terdapat Koreksi SiLPA sebesar Rp(287.059.613,00). Berdasarkan data-data tersebut dapat dijelaskan bahwa SiLPA tahun berkenaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebesar Rp17.548.019.227,49.

Secara rinci, realisasi APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	3.852.949.417.741,00	3.459.025.374.470,97	89,78
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.107.881.465.270,00	1.033.746.861.867,97	93,31
Pajak Daerah	855.201.042.959,00	761.219.619.467,00	89,01
Retribusi Daerah	20.055.000.000,00	10.789.764.538,16	53,80



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.371.469.793,00	11.371.469.793,77	100,00
Lain-Lain PAD yang Sah	221.253.952.518,00	250.366.008.069,00	113,16
PENDAPATAN TRANSFER	2.744.717.952.471,00	2.417.275.881.907,00	88,07
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.744.717.952.471,00	2.417.275.881.907,00	88,07
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000,00	8.002.630.696,00	2.286,47
Pendapatan Hibah	350.000.000,00	6.609.420.000,00	1.888,41
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0,00	1.393.210.696,00	0,00
BELANJA	3.353.318.060.045,76	3.046.631.426.464,06	90,85
BELANJA OPERASI	2.551.194.193.671,76	2.332.882.811.164,97	91,44
Belanja Pegawai	947.268.188.400,25	868.496.469.825,00	91,68
Belanja Barang dan Jasa	1.349.997.641.213,51	1.218.671.997.282,97	90,27
Belanja Subsidi	19.857.277.500,00	19.787.303.700,00	99,65
Belanja Hibah	229.961.786.558,00	222.697.836.570,00	96,84
Belanja Bantuan Sosial	4.109.300.000,00	3.229.203.787,00	78,58
BELANJA MODAL	794.123.866.374,00	706.181.651.526,09	88,93
Belanja Tanah	47.989.243.830,00	36.362.332.622,00	75,77
Belanja Peralatan dan Mesin	170.989.694.447,00	163.713.917.310,00	95,74
Belanja Bangunan dan Gedung	243.097.502.004,00	208.505.767.057,00	85,77
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	323.807.071.093,00	292.653.376.604,00	90,38
Belanja Aset Tetap lainnya	790.000.000,00	743.850.360,00	94,16
Belanja Aset Lainnya	7.450.355.000,00	4.202.407.573,09	56,41
BELANJA TIDAK TERDUGA	8.000.000.000,00	7.566.963.773,00	94,59
Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	7.566.963.773,00	94,59
TRANSFER	624.375.084.211,65	524.327.592.129,00	83,98
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	436.318.484.211,65	336.426.911.141,00	77,11
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota	436.318.484.211,65	336.426.911.141,00	77,11
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	188.056.600.000,00	187.900.680.988,00	99,92
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	188.056.600.000,00	187.900.680.988,00	99,92
SURPLUS / (DEFISIT)	(124.743.726.516,41)	(111.933.644.122,09)	89,73
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	149.743.726.516,41	149.768.722.962,58	100,02
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	149.743.726.516,41	149.768.722.962,58	100,02
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	80,00
Penyertaan Modal daerah	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	80,00
PEMBIAYAAN NETO	124.743.726.516,41	129.768.722.962,58	103,80
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) SEBELUM KOREKSI	0,00	17.835.078.040,49	
KOREKSI SiLPA	(0,00)	(287.059.613,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	17.548.019.227,49	0,00

Dari data yang ditampilkan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan sebesar 89,78% atau kurang Rp393.924.043.270,03 dari target yang ditetapkan dan realisasi belanja sebesar 90,85% atau kurang Rp306.686.633.581,70 dari target yang ditetapkan serta realisasi transfer sebesar 83,98 atau kurang Rp100.047.492.082,65 dari target yang ditetapkan.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

A. Penjelasan Hambatan dan Kendala Terkait Capaian Target Pendapatan

Terdapat empat Dinas/Badan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki



realisasi pendapatan dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk melakukan roda pemerintahan selama satu tahun anggaran. Berikut adalah tabel yang menggambarkan anggaran pendapatan yang ada pada perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.000.000,00	6.557.791.590,58	1.873,65
2	Rumah Sakit Umum Daerah dr H Jusuf SK	200.100.000.000,00	216.342.113.192,85	108,12
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400.000.000,00	246.137.563,00	61,53
4	Dinas Sosial	10.000.000,00	9.680.000,00	96,80
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	450.000.000,00	228.139.200,00	50,70
6	Dinas Perhubungan	11.100.000.000,00	8.918.744.545,00	80,35
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.050.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Kehutanan	400.000.000,00	100.617.000,00	25,15
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.000.000,00	7.000.000,00	140,00
10	Badan Pendapatan Daerah	870.026.465.270,00	763.538.553.520,00	87,76
11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.768.597.952.471,00	2.462.336.701.359,54	88,94
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.000.000,00	0,00	0,00
13	Badan Penghubung	450.000.000,00	739.896.500,00	164,42
JUMLAH		3.852.949.417.741,00	3.459.025.374.470,97	89,78

Dari tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan terkait capaian target pendapatan pada perangkat daerah yang melampaui realisasi anggaran pendapatan, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelampauan Pendapatan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 1.873,65% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp.350.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.6.557.791.590,58 disebabkan terdapatnya penerimaan non anggaran yang bersumber Pendapatan BLUD disatuan Pendidikan sebesar Rp.196.032.242, Penerimaan atas jasa giro bank yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp.5.307.348.24 dan Penerimaan Pendapatan atas Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat (Blockgrant) sebesar Rp.6.229.800.000,00. kondisi ini mengakibatkan terjadinya pelampauan pendapatan yang diterima Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024.

2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK

Pelampauan Pendapatan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK sebesar 108,12% dari anggaran yang ditetapkan yaitu meningkatnya kunjungan pasien BPJS dan adanya pembayaran piutang atas pasien ODGJ, kemoterapi dan pasien terlantar.

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Pelampauan Pendapatan yang diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar 140,00% dari anggaran yang ditetapkan karena tingginya permintaan atas sewa tenda acara.

4. Badan Penghubung



Pelampauan Pendapatan yang diterima oleh Badan Penghubung sebesar 164,42% dari anggaran yang ditetapkan yaitu peningkatan jumlah tamu penginapan pada Badan Penghubung di Jakarta.

Terdapat capaian target pendapatan pada perangkat daerah yang realisasi anggaran pendapatan yang masih rendah dan nihil, terdiri dari:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Realisasi Pendapatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar 0,00% dari anggaran yang ditetapkan disebabkan belum memadai peralatan sehingga jasa sewa uji laboratorium belum dapat dilaksanakan.

2. Dinas Kehutanan

Realisasi Pendapatan Dinas Kehutanan sebesar 25,15% dari anggaran yang ditetapkan disebabkan kurang cermat dalam menentukan target pendapatan retribusi.

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 0,00% dari anggaran yang ditetapkan disebabkan objek sewa berupa Gedung yang belum memadai untuk digunakan.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat;
- b. Memantapkan kerjasama (kolaborasi) antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan (*regulatory function*) dan pengelolaan pendapatan (*budgetary function*);
- c. Melakukan intensitas pendataan objek pajak secara terstruktur dan sistematis;
- d. Diperlukannya peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi agar tidak terjadi kebocoran dana pajak dan retribusi daerah;
- e. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan pemberian informasi terhadap wajib pajak kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi supaya masyarakat sadar akan pajak;
- f. Perlu adanya transparansi ke masyarakat dalam pemungutan pajak retribusi untuk mempermudah proses pembayaran pajak, sehingga menghindari proses yang panjang dan menghindari adanya uji pungli dari petugas pajak;
- g. Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang melanggar aturan ataupun yang tidak dan/atau terlambat membayar kewajibannya dan terhadap petugas yang terlibat secara teknis yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Menjaga keakuratan data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan;
- i. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
- j. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus



menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

B. Penjelasan Hambatan dan Kendala Terkait Capaian Target Belanja

Berikut tabel yang menggambarkan realisasi belanja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Per Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1.01.01	Dinas Pendidikan	702.304.913.863,00	630.283.487.742,82	89,74
1.02.01	Dinas Kesehatan	61.766.189.643,00	57.160.732.063,00	92,54
1.02.02	RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan	421.926.790.283,00	427.629.230.093,24	101,35
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	743.258.049.693,00	656.024.536.411,00	88,26
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	30.202.799.896,00	28.988.881.984,00	95,98
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.389.227.424,00	10.958.838.140,00	88,45
1.06.01	Dinas Sosial	22.460.832.069,00	21.807.626.987,00	97,09
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	20.436.155.003,00	18.700.836.050,00	91,51
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	15.392.146.384,00	13.957.407.170,00	90,68
2.03.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	57.647.072.126,00	50.888.834.069,00	88,28
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	14.286.634.726,00	12.306.932.943,00	86,14
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.531.169.479,00	10.356.357.452,00	98,34
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.463.070.981,00	13.434.930.163,00	92,89
2.09.01	Dinas Perhubungan	51.929.812.871,00	46.140.403.512,00	88,85
2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	44.346.506.877,00	41.025.078.505,00	92,51
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.242.183.629,00	13.813.467.485,00	96,99
2.13.01	Dinas Pemuda Dan Olahraga	63.050.043.973,00	57.575.515.841,00	91,32
2.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12.801.716.930,00	11.568.139.439,00	90,36
3.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan	35.753.517.482,00	34.924.388.613,00	97,68
3.02.01	Dinas Pariwisata	26.446.853.660,00	23.160.091.331,00	87,57
3.04.01	Dinas Kehutanan	156.993.008.511,00	128.569.455.605,00	81,89
3.05.01	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	18.406.420.956,00	16.733.959.129,00	90,91
3.07.01	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	52.390.041.000,00	49.547.066.932,00	94,57
4.01.01	Sekretariat Daerah	234.733.358.154,66	210.857.685.168,00	89,83
4.02.01	Sekretariat DPRD	123.992.818.339,00	105.261.497.784,00	84,89
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	33.327.940.092,00	26.450.155.371,00	79,36
4.04.01	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	91.061.774.706,10	76.157.979.694,00	83,63
4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	65.979.259.595,00	64.407.456.049,00	97,62
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	17.280.949.288,00	14.856.340.056,00	85,97
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.173.220.942,00	16.290.552.588,00	89,64
4.08.01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	9.207.030.000,00	8.403.636.546,00	91,27
4.09.01	Badan Penghubung	13.683.598.722,00	12.914.737.247,00	94,38
4.10.01	Inspektorat	31.451.326.523,00	26.441.893.334,00	84,07
4.12.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	111.001.626.225,00	109.033.294.967,00	98,23
TOTAL		3.353.318.060.045,76	3.046.631.426.464,06	90,85

Berdasarkan tabel di atas, dari 34 perangkat daerah yang berada di dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hanya 21 perangkat daerah saja yang persentase realisasi anggaran belanjanya berada di atas persentase realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut adalah tiga perangkat daerah yang memiliki peringkat persentase realisasi anggaran belanja terendah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara:



1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp33.327.940.092,00 dan realisasi belanja sebesar Rp26.450.155.371,00 atau hanya sebesar 79,36% dari anggaran. Rendahnya realisasi belanja disebabkan kegiatan swakelola yang dianggarkan pada APBD Perubahan tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan yang terbatas.

2. Dinas Kehutanan

Anggaran belanja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp156.993.008.511,00 dan realisasi belanja sebesar Rp128.569.455.605,00 atau hanya sebesar 81,89% dari anggaran. Rendahnya realisasi belanja disebabkan kegiatan swakelola yang dianggarkan pada APBD Perubahan tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan yang terbatas.

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp91.061.774.706,75, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp76.157.979.694,00 atau hanya 83,63%. Rendahnya realisasi belanja disebabkan kegiatan swakelola yang dianggarkan pada APBD Perubahan tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan yang terbatas.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik di dalam internal Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai;
- Pemerintah Daerah dalam menganggarkan belanja akan berpedoman pada RPJMD dan RKPD, agar anggaran dapat terserap secara maksimal, serta efisien dan efektif dalam penggunaannya; dan
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan perhitungan secara cermat dalam penganggaran belanja pada perangkat daerah, agar belanja perangkat daerah bisa lebih tepat sasaran dan maksimal penggunaannya.

Adapun permasalahan umum belanja daerah yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Penyerapan anggaran masih belum mampu mencapai angka yang diharapkan, yang antara lain disebabkan karena terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, maupun pelaporan. Namun demikian dari tahun ke tahun penyerapan anggaran menunjukkan tren yang semakin meningkat.
- Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam hal belanja *earmarked* atau yang sudah ditentukan penggunaannya, tanpa melihat kondisi yang ada di suatu daerah yang membuat ruang lingkup penggunaan belanja terbatas.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan diantaranya adalah:

- Belum adanya kesepakatan dengan masyarakat terkait penyediaan lahan untuk lokasi kegiatan pembangunan, terutama dalam pembangunan jalan.
- Terjadinya faktor cuaca sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan, mengingat geografis daerah Provinsi Kalimantan Utara yang



sebagian besar adalah lembah, pegunungan, dan daerah aliran sungai.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang khususnya pada pelaksanaan belanja, sehingga memungkinkan penyelesaian pengadaan secara paripurna;
- b. Perlu penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran sehingga kesalahan penentuan kode rekening dapat diminimalisir;
- c. Mengusahakan kaderisasi SDM baru pengelola keuangan perangkat daerah dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri; dan
- d. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

3.3. Capaian Realisasi *Mandatory Spending* Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Provinsi Kalimantan Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan untuk bidang pendidikan sebesar Rp890.024.874.766,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp810.877.343.022,82 atau 91,11%.
- b. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil atau transfer ke pemerintah daerah lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu tiga tahun terakhir. Provinsi Kalimantan Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan bidang infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp831.819.172.266,00 Dengan capaian realisasi sebesar Rp735.155.535.124,39 atau 88,38%.
- c. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan. Provinsi Kalimantan Utara dengan besaran APBD di bawah empat triliun maka paling sedikit anggaran pengawasan sebesar 0,94%. Provinsi Kalimantan Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan bidang pengawasan sebesar Rp31.451.326.523,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp26.441.893.334,00 atau 84,07%.

Berikut rincian belanja *mandatory spending* berdasarkan masing-masing bidang.

Tabel 3.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja *Mandatory Spending*



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Belanja Bidang Pendidikan	890.024.874.766,00	810.877.343.022,82	91,11
	Belanja Operasi:	679.741.542.719,00	613.264.265.377,82	90,22
	Belanja Pegawai;	426.223.574.209,00	374.968.387.177,00	87,97
	Belanja Barang dan Jasa;	253.517.968.510,00	238.295.878.200,82	94,00
	Belanja Modal	113.415.132.047,00	100.744.877.645,00	88,83
	Belanja Transfer	96.868.200.000,00	96.868.200.000,00	100,00
Rasio Anggaran Pendidikan 26,54 % dari APBD				
2	Belanja Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik	831.819.172.266,00	735.155.535.124,39	88,38
	Belanja Operasi:	37.770.205.892,00	30.536.382.370,00	80,85
	Belanja Barang dan Jasa;	37.770.205.892,00	30.536.382.370,00	80,85
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	794.048.966.374,00	704.619.152.754,39	88,74
Rasio Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik 21,92% dari APBD				
3	Belanja Bidang APIP	31.451.326.523,00	26.441.893.334,00	84,07
	Belanja Operasi:	30.572.826.523,00	25.583.930.519,00	83,68
	Belanja Pegawai;	11.001.001.161,00	10.351.221.169,00	94,09
	Belanja Barang dan Jasa;	19.571.825.362,00	15.232.709.350,00	77,83
	Belanja Modal	878.500.000,00	857.962.815,00	97,66
Rasio Anggaran Pengawasan 0,94% dari APBD				
JUMLAH MANDATORY SPENDING		1.753.295.373.555,00	1.572.474.771.481,21	89,69



BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah sampai dengan perubahan ketiga dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021 dan telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah namun Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tersebut baru diundangkan pada tanggal 20 Desember 2024 sehingga mulai diterapkan pada tahun 2025. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Domisili kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berada di Jalan Kol. H. Soetadji No.1, Tanjung Selor – Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan umum dan pembangunan, struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 30 Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Daerah dibagi beberapa urusan pemerintahan yang terdiri dari:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta unit pelayanannya yang terdiri dari: Cabang Dinas Tarakan, Cabang Dinas Nunukan, Cabang Dinas Malinau – KTT, UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, dan UPT Taman Budaya;
2. Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. Jusuf SK;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
6. Dinas Sosial dan UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;



5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Dinas Perhubungan, UPTD Pelabuhan Tenggayu I, dan UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung;
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

C. Urusan Pilihan, terdiri dari:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan serta unit pelayanannya yang terdiri dari: UPT Pelabuhan Perikanan Tenggayu II, UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau, UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
2. Dinas Pariwisata;
3. Dinas Kehutanan serta unit pelayanannya yang terdiri dari: UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Bulungan, UPTD KPH Dinas Kehutanan Kota Tarakan, UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Nunukan, UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Malinau, dan UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Tana Tidung;
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

D. Urusan Pendukung Pemerintahan, terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Umum; dan
2. Sekretariat DPRD.

E. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah, serta unit pelayanannya yang terdiri dari: UPT Bapenda Kab. Bulungan, UPT Bapenda Kota Tarakan, UPT Bapenda Kab. Nunukan, UPT Bapenda Kab. Malinau, dan UPT Bapenda Kab. Tana Tidung;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Badan Penghubung; dan
7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

F. Urusan Pengawasan, terdiri dari Inspektorat.

G. Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 berdasarkan asumsi bahwa:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan suatu pemerintahan yang mandiri



dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu entitas akan terus berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
3. Keterukuran dalam satuan uang, yaitu bahwa setiap kejadian atau transaksi dapat dinilai dengan satuan uang.
4. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).

Sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, dan surplus/defisit dalam Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas dalam Neraca.

5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan istilah sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA) dalam LRA, dan surplus/defisit dalam LO untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran bergantung kepada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan terhadap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam LRA, sedangkan surplus/defisit bergantung pada selisih pendapatan LO dan beban setelah ditambah atau dikurangi pos luar biasa dalam LO.
6. Pada dasarnya, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas/setara kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
7. Basis akrual untuk LO dan Neraca berarti bahwa pendapatan, beban, dan pos luar biasa serta aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian/kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.
8. Penerapan kebijakan basis kas dan/atau basis akrual tersebut untuk pengakuan pendapatan, belanja, pendapatan LO, beban, aset, dan kewajiban secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 1) Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban dalam hal ini termasuk belanja yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum ada realisasi pengeluaran kas. Kondisi demikian mengakibatkan adanya pengakuan utang belanja dan memisahkan jumlah kas di bendahara pengeluaran yang disisihkan menjadi rekening "Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek" sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran benar-benar merupakan saldo yang harus disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah dan termasuk SiLPA.
 - 2) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil



inventarisasi fisik. Akuntansi persediaan menggunakan *periodic method*, yaitu mencatat persediaan hanya pada akhir periode akuntansi dengan jumlah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan metode FIFO.

- c. Pendapatan LO diakui:
 - 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan.
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - 3) Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- d. Beban diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya kewajiban, adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.
 - 2) Terjadinya konsumsi aset, adalah pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pada dasarnya menggunakan harga perolehan historis dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dengan memakai kurs tengah Bank Indonesia untuk dinyatakan dalam mata uang rupiah. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
3. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas/setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
4. Ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.
5. Penerapan kebijakan basis pengukuran tersebut untuk pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.
- 2) Kas dicatat pada saat diterima atau dibayarkan dengan jumlah sebesar nilai nominal rupiah transaksi.
- 3) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.



- 4) Kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di Bendahara Penerimaan termasuk deposito berjangka yang mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 5) Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek terdiri dari deposito berjangka tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan; dan
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda, dan Piutang Lainnya.

d. Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,00% (nol %);
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan terdiri atas persediaan obat-obatan, hewan ternak, alat tulis kantor,



suku cadang, dsb.

Termasuk dalam persediaan adalah barang/aset tetap yang akan diserahkan kepada masyarakat tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum diserahkan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, sesuai hasil inventarisasi fisik.

Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan (*at cost*) bila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan persediaan untuk mengukur persediaan dilakukan dengan metode periodik. Pencatatan pemakaian persediaan menggunakan pendekatan beban. Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan nilai persediaan dan beban persediaan.

Persediaan dan Beban Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.

f. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi jangka panjang permanen dapat terdiri atas:

- 1) Penyertaan modal pada BUMN/BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
- 2) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Investasi jangka panjang non permanen terdiri dari investasi dalam obligasi, investasi dalam dana kredit bergulir, dan investasi non permanen lainnya.

- 1) Dana Kredit Bergulir adalah aset pemerintah daerah berupa pinjaman kepada masyarakat yang pelunasannya tidak disetorkan ke kas daerah tetapi digulirkan/dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan catatan bahwa sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah dan dibukukan sebagai penerimaan PAD.
- 2) Investasi jangka panjang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 3) Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 4) Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

- 1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan.



Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.²

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau investasi jangka panjang non permanen.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.1
Persentase Penyisihan Atas Pengembalian Investasi Per Periode Jatuh Tempo

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode s.d. 1 Tahun	0,00 %
2	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 3 Tahun	10,00 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 5 Tahun	50,00 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun	100,00 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

g. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan untuk pelayanan publik, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada



masyarakat/pihak ketiga.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri atas:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diukur berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika tidak ada harga perolehan, maka aset tetap dinilai berdasarkan nilai taksiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap peralatan dan mesin yang dicatat dalam Neraca hanya aset tetap yang nilainya satu juta rupiah (Rp1.000.000) atau lebih per satuan/paketnya. Sedangkan untuk aset tetap yang bernilai di bawah satu juta rupiah, dicatat secara ekstra-komptabel. Batas kapitalisasi aset tetap konstruksi sebesar sepuluh juta (Rp10.000.000,00) ke atas.

Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset tetap lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehannya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Dalam pengakuan aset tetap harus diidentifikasi secara cermat antara penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan;
- 2) Pengurangan adalah penurunan nilai karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang;
- 3) Pengembangan adalah peningkatan nilai karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (a) memperpanjang usia



manfaat, (b) meningkatkan efisiensi, dan/atau (c) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap;

- 4) Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap;
- 2) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- 3) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat/usang, hilang dan sebagainya. Penghapusannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama.

h. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Aset tetap hasil pengadaan/pembelian baru, disusutkan pertama kalinya pada bulan pencatatan aset tetap tersebut.

i. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

j. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas:

- 1) Piutang Angsuran

Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lainnya, atau hak lainnya kepada pegawai daerah atau non-pegawai.

- 2) Aset Kemitraan misalnya *Built, Operate, and Transfer* (BOT)



Aset kemitraan misalnya BOT adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.

3) Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill*

Aset Tak Berwujud adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik tetapi dapat memberikan manfaat kepada entitas (aset yang tidak tampak secara fisik) misalnya *Goodwill* atau nama baik suatu pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

4) Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya

Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya adalah Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak bisa digunakan.

k. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas:

1) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan yang dilakukan pada tanggal neraca. Bila dalam bentuk valas, bagian yang direklasifikasikan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI per tanggal neraca.

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan hasil pemotongan dari gaji para pegawai yang merupakan kewajiban mereka kepada pihak ketiga untuk disetorkan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepada Negara, BPJS Kesehatan, TASPEN, dsb.

Utang PFK diakui pada saat terjadinya utang sebesar nilai sekarang kas yang akan dibayar.

3) Utang Bunga

Utang bunga merupakan beban yang harus segera dibayar berkaitan dengan penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan/bank.

4) Utang Beban

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Utang Beban yang belum ada SP2D-nya atau dananya belum keluar dari Rekening Kas Daerah (terutang di BUD), pembayaran dilakukan dengan menganggarkan pada belanja berkenaan. Utang Beban diakui pada saat diterimanya barang/jasa dalam periode berjalan



berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan.

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis utang tersebut di atas, misalnya denda dan utang bank jangka pendek.

Utang bank diakui pada saat diterimanya pinjaman sebesar nilai nominal rupiah yang diterima. Utang bunga dan denda diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah bunga dan denda yang harus dibayar.

l. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Pada prinsipnya, kewajiban jangka panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Pinjaman dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri. Pinjaman dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan utang dalam negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan.

Pinjaman luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri. Pinjaman luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah valas utang luar negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI per tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang ini terdiri atas:

- 1) Utang kepada Pemerintah Pusat;
- 2) Utang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- 3) Utang kepada Bank Dalam Negeri;
- 4) Utang kepada Lembaga Keuangan Non - Bank Dalam Negeri;
- 5) Utang Dalam Negeri Obligasi;
- 6) Utang Luar Negeri; dan
- 7) Utang Jangka Panjang Lainnya.

m. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) yang penerapannya diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan kebijakan akuntansi yang bertema umum untuk hal-hal yang bersifat spesifik.

Penyajian Laporan Keuangan

- a. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



- b. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.
- c. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual (*Accrual Basis*).
- d. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.
- e. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi oleh entitas pelaporan dilakukan dengan cara metode langsung.

Kebijakan Akuntansi yang Belum Diterapkan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 telah menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kebijakan Akuntansi Penerapan Permendagri 108 Tahun 2016

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan kebijakan akuntansi ini untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Penyesuaian dilakukan pada penggolongan jenis aset dan perubahan masa manfaat jenis aset.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

BAB V. PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN

5.1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 (Sebelum Perubahan). APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebelum perubahan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.066.531.465.270,00
b. Dana Perimbangan	Rp	2.040.116.614.000,00
c. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	350.000.000,00
Jumlah	Rp	3.106.998.079.270,00

2. Belanja

a. Belanja Operasi	Rp	2.254.725.220.218,00
b. Belanja Modal	Rp	578.239.586.981,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	15.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	Rp	654.627.028.710,
Jumlah	Rp	3.502.591.835.909,00
Surplus / (Defisit)	Rp	(395.593.756.639,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	415.593.756.639,00
b. Pengeluaran	Rp	20.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	395.593.756.639,00

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp 0,00

Dalam rangka penyesuaian terhadap realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 dan meningkatkan kinerja serta perubahan kondisi ekonomi pada Tahun 2024, maka dilakukan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2024.

APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan dan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp	3.106.998.079.270,00
b. Bertambah	Rp	745.951.338.471,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.852.949.417.741,00

2. Belanja Operasi

a. Semula	Rp	2.254.725.220.218,00
b. Bertambah	Rp	294.637.604.839,76

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp 2.549.362.825.057,76

3. Belanja Modal



a. Semula	Rp	578.239.586.981,00
b. Bertambah	Rp	217.615.648.007,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	795.855.234.988,00
4. Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp	15.000.000.000,00
b. Berkurang	Rp	(7.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	8.000.000.000,00
5. Belanja Transfer		
a. Semula	Rp	654.627.028.710,00
b. Berkurang	Rp	(30.151.944.498,35)
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	624.475.084.211,65
6. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	415.593.756.639,00
b. Berkurang	Rp	(265.850.030.122,59)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	149.743.726.516,41
7. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp	5.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	25.000.000.000,00

APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 juga mengalami pergeseran setelah perubahan APBD menjadi sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	3.852.949.417.741,00
b. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah pendapatan pergeseran setelah perubahan	Rp	3.852.949.417.741,00
2. Belanja Operasi		
a. Semula	Rp	2.549.362.825.057,76
b. Bertambah	Rp	1.831.368.614,00
Jumlah Belanja Operasi pergeseran setelah perubahan	Rp	2.551.194.193.671,76
3. Belanja Modal		
a. Semula	Rp	795.855.234.988,00
b. Berkurang	Rp	(1.731.368.614,00)
Jumlah Belanja Modal pergeseran setelah perubahan	Rp	794.123.866.374,00
4. Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp	8.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga pergeseran setelah perubahan	Rp	8.000.000.000,00
5. Belanja Transfer		
a. Semula	Rp	624.475.084.211,65



b. Berkurang	Rp	(100.000.000,00)
Jumlah Belanja Transfer pergeseran setelah perubahan	Rp	624.375.084.211,65
6. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	149.743.726.516,41
b. Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan pergeseran setelah perubahan	Rp	149.743.726.516,41
7. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	25.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan pergeseran setelah perubahan	Rp	25.000.000.000,00

APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 pergeseran setelah perubahan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Rincian APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2024

NO	URAIAN		ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN – LRA			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA		
	A	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	855.201.042.959,00
	B	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	20.055.000.000,00
	C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	11.371.469.793,00
	D	Lain-Lain PAD yang Sah – LRA	221.253.952.518,00
		JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	1.107.881.465.270,00
2	PENDAPATAN TRANSFER – LRA		
	A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	
	1	Dana Perimbangan	2.732.069.458.471,00
	2	Dana Insentif Daerah	0,00
		Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	2.732.069.458.471,00
	B	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	
	1	Dana Penyesuaian – LRA	12.648.494.000,00
		Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	12.648.494.000,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA		
	A	Pendapatan Hibah – LRA	350.000.000,00
	B	Pendapatan Lainnya – LRA	0,00
		TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA (A+B)	350.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN - LRA (1+2+3)			3.852.949.417.741,00
BELANJA			
1	BELANJA OPERASI		
	A	Belanja Pegawai	947.268.188.400,25
	B	Belanja Barang dan Jasa	1.349.997.641.213,51
	C	Belanja Bunga	0
	D	Belanja Subsidi	19.857.277.500,00



NO	URAIAN		ANGGARAN (Rp)
	E	Belanja Hibah	229.961.786.558,00
	F	Belanja Bantuan Sosial	4.109.300.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI (A s.d. F)		2.551.194.193.671,76
2	BELANJA MODAL		
	A	Belanja Modal Tanah	47.989.243.830,00
	B	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.989.694.447,00
	C	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	243.097.502.004,00
	D	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	323.807.071.093,00
	E	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	790.000.000,00
	F	Belanja Modal Aset Lainnya	7.450.355.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL (A s.d. F)		794.123.866.374,00
3	BELANJA TAK TERDUGA		
	A	Belanja Tak Terduga	8.000.000.000,00
	JULAH BELANJA TAK TERDUGA (A)		8.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA (1+2+3)			3.353.318.060.045,76
TRANSFER			
1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		
	A	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	436.318.484.211,65
	JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN (A)		436.318.484.211,65
2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		
	A	Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	188.056.600.000,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (A+B)		188.056.600.000,00
JUMLAH TRANSFER (A+B)			624.375.084.211,65

Jenis Belanja yang mengalami pergeseran setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Rincian Pergeseran Anggaran Antar Jenis Belanja 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Anggaran Pergeseran setelah Perubahan (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Pegawai	947.227.458.401,15	947.268.188.400,25	40.729.999,10
2	Belanja Barang dan Jasa	1.348.207.002.598,61	1.349.997.641.213,51	1.790.638.614,90
3	Belanja Modal Tanah	47.986.413.830,00	47.989.243.830,00	2.830.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.267.782.947,00	170.989.694.447,00	(278.088.500,00)
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	248.541.949.004,00	243.097.502.004,00	(5.444.447.000,00)
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	319.818.734.207,00	323.807.071.093,00	3.988.336.886,00
7	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	436.418.484.211,65	436.318.484.211,65	(100.000.000,00)
Jumlah		3.519.467.825.199,41	3.519.467.825.199,41	0,00

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.2.1 Laporan Realisasi Anggaran

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa



pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Umum Kas Daerah, sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penjelasan atas pos-pos dalam LRA adalah sebagai berikut:

5.2.1.1	Pendapatan LRA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		3.459.025.374.470,97	3.091.012.760.999,05

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.459.025.374.470,97 atau 89,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.852.949.417.741,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp3.091.012.760.999,05, maka realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp368.012.613.471,92 atau 11,91%. Adapun perbandingan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.107.881.465.270,00	1.033.746.861.867,97	93,31	980.136.675.968,05
2	Pendapatan Transfer	2.744.717.952.471,00	2.417.275.881.907,00	88,07	2.104.954.266.065,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	350.000.000,00	8.002.630.696,00	2.286,47	5.921.818.966,00
JUMLAH		3.852.949.417.741,00	3.459.025.374.470,97	89,78	3.091.012.760.999,05

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi terbesar kenaikan pendapatan daerah adalah dari Pendapatan Transfer sebesar Rp312.321.615.842,00 atau 14,84%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

Uraian		Anggaran	Realisasi	%	
		(Rp)	(Rp)	Anggaran	Total
Pendapatan Asli Daerah		1.107.881.465.270,00	1.033.746.861.867,97	93,31	29,89
-	Pendapatan Pajak Daerah	855.201.042.959,00	761.219.619.467,00	89,01	22,01
-	Pendapatan Retribusi Daerah	20.055.000.000,00	10.789.764.538,16	53,80	0,31
-	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.371.469.793,00	11.371.469.793,77	100,00	0,33
-	Lain-Lain PAD yang Sah	221.253.952.518,00	250.366.008.069,04	113,16	7,24
Pendapatan Transfer		2.744.717.952.471,00	2.417.275.881.907,00	88,07	69,88
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.732.069.458.471,00	2.404.627.387.907,00	88,01	69,52
-	Bagi Hasil Pajak	64.962.252.000,00	81.492.235.000,00	125,45	2,36
-	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.263.794.840.471,00	924.754.700.000,00	73,17	26,73
-	Dana Alokasi Umum	1.154.831.485.000,00	1.153.992.670.001,00	99,93	33,36
-	Dana Alokasi Khusus	248.480.881.000,00	244.387.782.906,00	98,35	7,07

Uraian		Anggaran	Realisasi	%	
		(Rp)	(Rp)	Anggaran	Total
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya		12.648.494.000,00	12.648.494.000,00	100,00	0,37
-	Dana Penyesuaian	12.648.494.000,00	12.648.494.000,00	100,00	0,37
Lain-Lain Pendapatan yang Sah		350.000.000,00	8.002.630.696,00	2.286,47	0,23
-	Pendapatan Hibah	350.000.000,00	6.609.420.000,00	1.888,41	0,19
-	Pendapatan Lainnya	0	1.393.210.696,00	-	0,04
Jumlah		3.852.949.417.741,00	3.459.025.374.470,97	89,78	100,00

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pendapatan LRA tersebut:

5.2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	1.033.746.861.867.97	980.136.675.968.05

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah berupa Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.033.746.861.867,97 atau 93,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.107.881.465.270,00 dengan rincian:

Tabel 5.5
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LRA

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	855.201.042.959,00	761.219.619.467,00	89,01	717.253.715.401,00
2	Pendapatan Retribusi - LRA	20.055.000.000,00	10.789.764.538,16	53,80	17.404.890.968,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.371.469.793,00	11.371.469.793,77	100,00	10.114.672.311,44
4	Lain-Lain PAD yang Sah	221.253.952.518,00	250.366.008.069,04	113,16	235.363.397.287,61
	Jumlah	1.107.881.465.270,00	1.033.746.861.867,97	93,31	980.136.675.968,05

5.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	– LRA	761.219.619.467,00	717.253.715.401,00

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp761.219.619.467,00 atau 89,01% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp855.201.042.959,00.

Jumlah tersebut merupakan penerimaan pajak daerah yang diterima di Kas Daerah selama Tahun 2024. Pendapatan Pajak Daerah 2024 terdiri dari:

Tabel 5.6
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	105.000.000.000,00	101.677.587.600,00	96.605.027.400,00
	SKPD Pengelola			



No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	UPT Bapenda Bulungan	28.000.000.000,00	28.112.047.500,00	25.901.079.300,00
	UPT Bapenda Tarakan	47.000.000.000,00	44.190.249.800,00	43.107.274.300,00
	UPT Bapenda Nunukan	16.000.000.000,00	15.790.756.400,00	15.337.732.700,00
	UPT Bapenda Malinau	12.000.000.000,00	11.538.282.400,00	10.470.094.200,00
	UPT Bapenda Tana Tidung	2.000.000.000,00	2.046.251.500,00	1.788.846.900,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	121.000.000.000,00	124.340.376.200,00	121.111.532.300,00
	SKPD Pengelola			
	UPT Bapenda Bulungan	41.000.000.000,00	45.275.381.200,00	39.428.953.500,00
	UPT Bapenda Tarakan	38.000.000.000,00	36.665.695.300,00	38.552.354.800,00
	UPT Bapenda Nunukan	24.000.000.000,00	21.082.601.000,00	27.594.268.000,00
	UPT Bapenda Malinau	18.000.000.000,00	21.316.698.700,00	15.535.956.000,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	550.000.000.000,00	471.835.087.950,00	442.532.752.438,00
	SKPD Pengelola			
	Badan Pendapatan Daerah	550.000.000.000,00	471.835.087.950,00	442.532.752.438,00
4	Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00	4.617.481.703,00	3.242.380.244,00
	SKPD Pengelola			
	UPT Bapenda Bulungan	1.500.000.000,00	1.885.796.681,00	1.091.288.987,00
	UPT Bapenda Tarakan	400.000.000,00	392.051.809,00	354.025.757,00
	UPT Bapenda Nunukan	1.100.000.000,00	1.161.158.459,00	882.171.431,00
	UPT Bapenda Malinau	300.000.000,00	407.044.204,00	243.516.955,00
	UPT Bapenda Tana Tidung	700.000.000,00	771.430.550,00	671.377.114,00
5	Pajak Rokok	65.201.042.959,00	56.996.131.814,00	53.762.023.019,00
	SKPD Pengelola			
	Badan Pendapatan Daerah	65.201.042.959,00	56.996.131.814,00	53.762.023.019,00
6	Pajak Alat Berat	10.000.000.000,00	1.752.954.200,00	0,00
	SKPD Pengelola			
	UPT Bapenda Bulungan	2.000.000.000,00	13.821.800,00	0,00
	UPT Bapenda Tarakan	150.000.000,00	0,00	0,00
	UPT Bapenda Nunukan	1.500.000.000,00	11.819.400,00	0,00
	UPT Bapenda Malinau	1.350.000.000,00	14.005.400,00	0,00
	UPT Bapenda Tana Tidung	5.000.000.000,00	1.713.307.600,00	0,00
Jumlah		855.201.042.959,00	761.219.619.467,00	717.253.715.401,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp43.965.904.066,00 atau 6,13% dibandingkan realisasi Tahun 2023. Semua penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, serta pada realisasi 2024 terdapat penambahan realisasi baru yaitu Pajak Alat Berat sebesar Rp1.752.954.200,00. Pajak Alat Berat merupakan pendapatan pajak atas adanya perolehan hak atas alat berat.

5.2.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	31 Desember 2024 10.789.764.538,16	31 Desember 2023 17.404.890.968,00
-------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp10.789.764.538,16 atau 53,80% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp20.055.000.000,00.





Pendapatan Retribusi merupakan pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pendapatan atas penyewaan tanah dan bangunan, retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan, retribusi penggunaan tenaga kerja asing, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.555.000.000,00	778.172.158,00	10.261.867.320,00
	SKPD Pengelola			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.000.000,00	126.652.000,00	0,00
	RSUD dr. H. Jusuf SK	100.000.000,00	94.255.000,00	0,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000,00	0,00	0,00
	UPT Panti Sosial	10.000.000,00	9.680.000,00	0,00
	Dinas Perhubungan	800.000.000,00	220.282.498,00	0,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000.000,00	0,00	0,00
	Dinas Kehutanan	100.000.000,00	300.000,00	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	0,00	38.219.660,00	9.992.562.320,00
	UPT Bapenda Bulungan	180.000.000,00	16.600.000,00	174.538.000,00
	UPT Bapenda Tarakan	0,00	0,00	79.567.000,00
	UPT Bapenda Nunukan	5.000.000,00	3.400.000,00	3.150.000,00
	UPT Bapenda Malinau	5.000.000,00	8.050.000,00	2.850.000,00
	UPT Bapenda Tana Tidung	10.000.000,00	0,00	9.200.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.530.000.000,00	253.733.000,00	0,00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.000.000,00	0,00	0,00
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.050.000.000,00	0,00	0,00
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	750.000.000,00	984.676.933,16	273.138.500,00
	SKPD Pengelola			
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	300.000.000,00	244.000.433,16	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	273.138.500,00
	Badan Penghubung	450.000.000,00	740.676.500,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000.000,00	8.688.286.847,00	6.627.048.148,00
	SKPD Pengelola			
	Dinas Perhubungan	8.000.000.000,00	6.602.296.500,00	0,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.000.000.000,00	74.208.490,00	0,00
	UPTD Pelabuhan Tengkyu II	0,00	2.011.781.857,00	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	6.627.048.148,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00	100.317.000,00	102.857.000,00



No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	SKPD Pengelola			
	Dinas Kehutanan	300.000.000,00	100.317.000,00	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	102.857.000,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	9.002.400,00	0,00
	SKPD Pengelola			
	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	9.002.400,00	0,00
6	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	126.000.000,00
	SKPD Pengelola			
	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	126.000.000,00
7	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	1.170.000,00	13.980.000,00
	SKPD Pengelola			
	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	1.170.000,00	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	13.980.000,00
8	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	450.000.000,00	228.139.200,00	0,00
	SKPD Pengelola			
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	450.000.000,00	228.139.200,00	0,00
Jumlah		20.055.000.000,00	10.789.764.538,16	17.404.890.968,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Retribusi Daerah- LRA mengalami penurunan sebesar Rp6.615.126.429,84 atau 38,00% dibandingkan realisasi tahun 2023.

5.2.1.1.1.3

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2024

11.371.469.793,77

31 Desember 2023

10.114.672.311,44

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dividen atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada BPD Kaltimara sesuai Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 tanggal 08 Maret 2024 dan telah masuk pada Kas Daerah sesuai surat Bankaltimara Nomor 0288/A-1/BPD-AKT&KEU/IV/2024 tanggal 04 April 2024.

Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp11.371.469.793,77 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.371.469.793,00. Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 mengalami peningkatan Rp1.256.797.482,33 atau 12,43% dari realisasi Tahun 2023.

5.2.1.1.1.4

Lain-Lain PAD yang Sah - LRA

31 Desember 2024

250.366.008.069,04

31 Desember 2023

235.363.397.287,61

Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah. Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp250.366.008.069,04 atau 113,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp221.253.952.518,00 dengan rincian:

Tabel 5.8
Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LRA



No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	52.623.000,00	0,00
	SKPD Pengelola			
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	52.623.000,00	0,00
2	Jasa Giro	2.000.000.000,00	1.765.310.303,72	2.564.694.574,38
	SKPD Pengelola			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	5.307.348,24	5.477.539,25
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.000.000.000,00	1.760.002.955,48	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	2.559.217.035,13
3	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00	22.397.030.251,53	12.649.223.813,31
	SKPD Pengelola			
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.000.000.000,00	22.397.030.251,53	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	12.649.223.813,31
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	73.668.650,00	943.745,74
	SKPD Pengelola			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	(250,00)
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	224.329,00	0,00
	UPTD Pelabuhan Tengku II	0,00	2.800,00	0,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	72.023.228,00	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	0,00	186.002,00	943.995,74
	UPT Bapenda Bulungan	0,00	100.000,00	0,00
	UPT Bapenda Tarakan	0,00	441.000,00	0,00
	UPT Bapenda Nunukan	0,00	148.791,00	0,00
	UPT Bapenda Malinau	0,00	542.500,00	0,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.535.547.569,73	1.433.678.764,57
	SKPD Pengelola			
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.535.547.569,73	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	1.433.678.764,57
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.253.952.518,00	2.251.065.000,00	2.304.563.829,00
	SKPD Pengelola			
	Badan Pendapatan Daerah	65.750.000,00	16.873.266,00	231.444.669,00
	UPT Bapenda Bulungan	932.000.000,00	569.639.020,00	531.137.534,00
	UPT Bapenda Tarakan	1.289.080.000,00	1.022.281.700,00	951.118.200,00
	UPT Bapenda Nunukan	534.477.518,00	364.123.164,00	308.867.290,00
	UPT Bapenda Malinau	380.970.000,00	237.747.109,00	236.099.300,00
	UPT Bapenda Tana Tidung	51.675.000,00	40.400.741,00	45.896.836,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	2.266.400,84	1.961.660,00
	SKPD Pengelola			
	RSUD dr. H. Jusuf SK	0,00	172.500,00	0,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	1.912.800,84	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	0,00	10.000,00	531.500,00
	UPT Bapenda Bulungan	0,00	141.600,00	1.123.160,00
	UPT Bapenda Tarakan	0,00	0,00	65.000,00



No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	UPT Bapenda Nunukan	0,00	29.500,00	102.000,00
	UPT Bapenda Tana Tidung	0,00	0,00	140.000,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	380.932.178,13	0,00
SKPD Pengelola				
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	380.932.178,13	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	4.464.626.779,90	4.560.079.983,34
SKPD Pengelola				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	(890.317,38)
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.464.626.779,90	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	4.560.970.300,72
10	Pendapatan BLUD	200.000.000.000,00	216.442.937.935,19	211.848.250.917,27
SKPD Pengelola				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	196.032.242,34	56.659.793,89
	RSUD dr. H. Jusuf SK	200.000.000.000,00	216.246.905.692,85	211.791.591.123,38
Jumlah		221.253.952.518,00	250.366.008.069,04	235.363.397.287,61

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil atas penjualan peralatan dan mesin dan hasil atas penjualan gedung dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

		Realisasi 2024	Realisasi 2023
· Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp	35.678.000,00	0,00
· Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	Rp	16.945.000,00	0,00
Jumlah	Rp	52.623.000,00	0,00

Pendapatan Jasa Giro diperoleh atas penempatan Rekening Kas Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran perangkat daerah pada BPD Kaltimara Cabang Tanjung Selor serta pendapatan atas bunga rekening Kas Sekolah Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9
Rincian Pendapatan Jasa Giro

No.	Jenis Jasa Giro	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	1.703.601.665,78	2.496.783.107,55
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	53.256.404,98	59.754.597,20
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	3.144.884,72	8.156.869,63
		2.000.000.000,00	1.760.002.955,48	2.564.694.574,38

· Jasa Giro Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	53.256.404,98
· Jasa Giro Rekening Dana BOS	Rp	8.452.232,96
· Jasa Giro Rekening Kas Daerah	Rp	1.703.601.665,78



Jumlah Rp 1.765.310.303,72

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh karena penempatan deposito berjangka dalam rangka manajemen kas (setara kas) pada beberapa bank dan remunerasi atas penempatan *Treasury Deposit Facility* (TDF) di Bank Indonesia, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10
Rincian Pendapatan Bunga

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bankaltimara Cabang Tanjung Selor	16.000.000.000,00	3.788.524.589,79	3.714.657.533,76
2	BNI KLN Tanjung Selor		845.753.429,00	1.029.452.062,00
3	BRI Cabang Tanjung Selor		3.335.958.745,00	2.826.139.423,51
4	BTN Tanjung Selor		4.450.342.465,74	4.122.041.140,04
5	Remunerasi TDF		9.976.451.022,00	956.933.654,00
		16.000.000.000,00	22.397.030.251,53	12.649.223.813,31

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan pendapatan yang timbul dari selisih lebih pembayaran pajak oleh wajib pajak, kelebihan pembayaran retribusi rumah susun, pengembalian dana sekolah dan beasiswa Kaltara Unggul, pengembalian kelebihan pembayaran barang habis pakai, dan penerimaan lain yang tidak dapat diidentifikasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11
Rincian Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Selisih Lebih Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak	0,00	5.137.293,00	943.745,74
2	Kelebihan Pembayaran Retribusi Rusun	0,00	227.129,00	0,00
3	Pengembalian Dana Sekolah dan Beasiswa Kaltara Unggul	0,00	13.000.000,00	0,00
4	Kelebihan Pembayaran Barang Habis Pakai	0,00	47.622.428,00	0,00
5	Penerimaan Lain yang Tidak Dapat Diidentifikasi	0,00	7.681.800,00	0,00
		0,00	73.668.650,00	943.745,74

Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan karena penyelesaian pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga yang tidak tepat waktu dengan total sebesar Rp2.535.547.569,73.

Pendapatan denda pajak diperoleh karena keterlambatan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rincian Pendaptan Denda Pajak

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Denda Pajak Kendaraan Bermotor	2.362.175.000,00	2.150.751.452,00	2.000.280.140,00
UPT Bapenda Bulungan	630.000.000,00	550.682.300,00	513.950.800,00
UPT Bapenda Tarakan	1.057.500.000,00	980.211.600,00	935.273.800,00
UPT Bapenda Nunukan	360.000.000,00	345.656.200,00	277.890.400,00
UPT Bapenda Malinau	270.000.000,00	235.194.052,00	233.357.900,00
UPT Bapenda Tana Tidung	44.675.000,00	39.007.300,00	39.807.240,00



Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	786.027.518,00	70.917.700,00	61.475.100,00
UPT Bapenda Bulungan	287.000.000,00	15.455.400,00	15.216.400,00
UPT Bapenda Tarakan	227.580.000,00	42.070.100,00	15.844.400,00
UPT Bapenda Nunukan	163.477.518,00	11.163.700,00	27.672.900,00
UPT Bapenda Malinau	107.970.000,00	2.228.500,00	2.741.400,00
Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	65.750.000,00	16.873.266,00	231.444.669,00
Badan Pendapatan Daerah	65.750.000,00	16.873.266,00	231.444.669,00
Denda Pajak Air Permukaan	40.000.000,00	12.522.582,00	11.363.920,00
UPT Bapenda Bulungan	15.000.000,00	3.501.320,00	1.970.334,00
UPT Bapenda Tarakan	4.000.000,00	0,00	0,00
UPT Bapenda Nunukan	11.000.000,00	7.303.264,00	3.303.990,00
UPT Bapenda Malinau	3.000.000,00	324.557,00	0,00
UPT Bapenda Tana Tidung	7.000.000,00	1.393.441,00	6.089.596,00
Jumlah	3.253.952.518,00	2.251.065.000,00	2.304.563.829,00

Pendapatan denda retribusi diperoleh karena keterlambatan pembayaran sewa rumah dinas yang ditempati oleh wajib retribusi dan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan total sebesar Rp2.266.400,84.

Pendapatan dari pengembalian merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengembalian kelebihan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Rincian Pendapatan dari Pengembalian

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	4.201.080.671,34
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	672.838.317,06	358.999.312,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	127.651.186,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	208.048.030,84	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	75.158.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	179.819.589,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	866.534.921,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	254.396.693,40	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	127.564.074,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	4.672.090,09	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	0,00	133.022.507,23	0,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	653.871.035,84	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	1.161.050.335,44	0,00
Jumlah	0,00	4.464.626.779,90	4.560.079.983,34

Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan pola BLUD yaitu RSUD dr. H Jusuf SK sebesar Rp216.246.905.692,85 dan beberapa Satuan Pendidikan Menengah sebesar Rp196.032.242,34 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14
Rincian Pendapatan BLUD

SKPD	No SP3B	No SP2B	Realisasi (Rp)
RSUD dr. H. Jusuf SK	1/03.01/SP3BP.BLUD/I/2024	001/SP2BP.BLUD/RSUD/I/2024	18.637.898.256,09
	2/03.01/SP3BP.BLUD/II/2024	002/SP2BP.BLUD/RSUD/II/2024	3.002.350.699,88
	3/03.01/SP3BP.BLUD/III/2024	003/SP2BP.BLUD/RSUD/III/2024	20.124.159.240,97
	4/03.01/SP3BP.BLUD/IV/2024	004/SP2BP.BLUD/RSUD/IV/2024	30.714.024.592,45
	5/03.01/SP3BP.BLUD/V/2024	005/SP2BP.BLUD/RSUD/V/2024	1.733.488.695,99
	6/03.01/SP3BP.BLUD/VI/2024	006/SP2BP.BLUD/RSUD/VI/2024	15.557.721.860,86
	7/03.01/SP3BP.BLUD/VII/2024	007/SP2BP.BLUD/RSUD/VII/2024	33.866.369.736,06
	8/03.01/SP3BP.BLUD/VIII/2024	008/SP2BP.BLUD/RSUD/VIII/2024	18.974.949.672,52
	9/03.01/SP3BP.BLUD/IX/2024	009/SP2BP.BLUD/RSUD/IX/2024	18.635.358.019,87
	10/03.01/SP3BP.BLUD/X/2024	010/SP2BP.BLUD/RSUD/X/2024	16.832.180.500,60
	11/03.01/SP3BP.BLUD/XI/2024	011/SP2BP.BLUD/RSUD/XI/2024	20.737.522.711,62
	12/03.01/SP3BP.BLUD/XII/2024	012/SP2BP.BLUD/RSUD/XII/2024	17.430.881.705,94
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7609/SP3B/DISDIKBUD/XII/2024	015/SP2B/DISDIKBUD/XII/2024	196.032.242,34
			216.442.937.935,19

5.2.1.1.2
Pendapatan Transfer–LRA

31 Desember 2024

2.417.275.881.907,00

31 Desember 2023

2.104.954.266.065,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah pusat lainnya, dengan rincian:

Tabel 5.15
Rincian Pendapatan Transfer – LRA

 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN					LKPD 2024
No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Transfer Dana Perimbangan	2.732.069.458.471,00	2.404.627.387.907,00	88,01	2.080.287.939.065,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	12.648.494.000,00	12.648.494.000,00	100,00	24.666.327.000,00
Jumlah		2.744.717.952.471,00	2.417.275.881.907,00	88,07	2.104.954.266.065,00

5.2.1.1.2.1
Transfer Pemerintah Pusat – LRA

31 Desember 2024

31 Desember 2023

2.404.627.387.907,00

2.080.287.939.065,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.404.627.387.907,00 atau 88,01% dari anggaran sebesar Rp2.732.069.458.471,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16

Rincian Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Bagi Hasil Pajak	64.962.252.000,00	81.492.235.000,00	126.943.258.367,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	1.263.794.840.471,00	924.754.700.000,00	562.836.351.343,00
Dana Alokasi Umum	1.154.831.485.000,00	1.153.992.670.001,00	1.117.056.619.340,00
Dana Transfer Khusus- DAK Fisik	132.379.441.000,00	127.296.730.178,00	169.325.171.177,00
Dana Transfer Khusus- DAK Non Fisik	116.101.440.000,00	117.091.052.728,00	104.126.538.838,00
Jumlah	2.732.069.458.471,00	2.404.627.387.907,00	2.080.287.939.065,00

Dari jumlah keseluruhan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp2.404.627.387.907,00 tersebut, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan DAU sebesar Rp1.153.992.670.001,00 atau 47,99%.

5.2.1.1.2.1.1
Bagi Hasil Pajak – LRA

31 Desember 2024

31 Desember 2023

81.492.235.000,00

126.943.258.367,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp81.492.235.000,00 atau 125,45% dari anggaran sebesar Rp64.962.252.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.17

Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA

Uraian		Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
Bagi Hasil Pajak				
-	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	42.144.813.000,00	54.321.366.000,00	97.009.281.941,00
-	DBH PPh Pasal 21	21.667.492.000,00	25.970.975.000,00	27.903.873.816,00
-	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	1.149.562.000,00	1.199.893.000,00	2.030.074.610,00
-	DBH Cukai Hasil Tembakau	385.000,00	1.000,00	28.000,00

Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Jumlah	64.962.252.000,00	81.492.235.000,00	126.943.258.367,00

5.2.1.1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	<u>31 Desember 2024</u> 924.754.700.000,00	<u>31 Desember 2023</u> 562.836.351.343,00
---------------	---	---	---

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp924.754.700.000,00 atau 73,17% dari anggarannya sebesar Rp1.263.794.840.471,00 terdiri dari:

Tabel 5.18
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) - LRA

Uraian		Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
-	DBH SDA Minyak Bumi	2.777.163.000,00	3.119.865.000,00	10.071.463.696,00
-	DBH SDA Gas Bumi	503.565.000,00	503.565.000,00	673.411.314,00
-	DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>	2.590.996.000,00	3.213.752.000,00	2.129.137.956,00
-	DBH SDA Mineral dan Batubara - <i>Royalty</i>	1.175.127.860.471,00	833.375.179.000,00	467.074.691.054,00
-	DBH SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.098.697.000,00	6.098.697.000,00	21.332.360.660,00
-	DBH SDA Kehutanan - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	2.326.877.000,00	2.326.877.000,00	0,00
-	DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)	65.173.260.000,00	66.920.343.000,00	61.555.286.663,00
-	DBH Sawit	9.196.422.000,00	9.196.422.000,00	0,00
Jumlah		1.263.794.840.471,00	924.754.700.000,00	562.836.351.343,00

5.2.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum - LRA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		1.153.992.670.001,00	1.117.056.619.340,00

Realisasi Pendapatan dari DAU sebesar Rp1.153.992.670.001,00 atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp1.154.831.485.000,00. Realisasi Pendapatan dari DAU Tahun 2024 meningkat Rp36.936.050.661,00 atau 3,31% dari realisasi Tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi DAU adalah sebagai berikut :

Tabel 5.19
Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA

Uraian		Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
-	DAU	919.640.493.000,00	919.640.493.000	1.117.056.619.340,00
-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.119.904.000,00	2.281.089.001,00	0,00
-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	116.535.602.000,00	116.535.602.000,00	0,00



Uraian		Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	10.303.350.000,00	10.303.350.000,00	0,00
-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	105.232.136.000,00	105.232.136.000,00	0,00
Jumlah		1.154.831.485.000,00	1.153.992.670.001,00	1.117.056.619.340,00

5.2.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LRA 31 Desember 2024 31 Desember 2023
244.387.782.906,00 273.451.710.015,00

Realisasi Pendapatan dari DAK sebesar Rp244.387.782.906,00 merupakan realisasi penyaluran selama Tahun 2024 atau 98,35% dari anggaran sebesar Rp248.480.881.000,00. Rincian anggaran dan realisasi DAK adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20
Rincian Anggaran dan Realisasi DAK

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Khusus - LRA				
Dana Transfer Khusus - DAK Fisik		132.379.441.000,00	127.296.730.178,00	169.325.171.177,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA	29.314.673.000,00	28.015.699.041,00	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	5.067.526.000,00	4.878.495.414,00	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan- SMK	24.102.981.000,00	22.461.235.871,00	85.604.461.691,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	473.788.000,00	353.364.463,00	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	8.613.655.000,00	8.516.113.748,00	6.710.240.311,00
-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	47.515.219.000,00	0,00	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	47.096.934.000,00	67.558.836.650,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	4.962.244.000,00	0,00	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.425.000.000,00	0,00	6.366.226.025,00
-	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan- Penugasan	10.904.355.000,00	10.367.790.900,00	3.085.406.500,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	0,00	4.441.052.741,00	0,00
-	DAK Fisik - Bidang Kesehatan Penguatan Sisitem Kesehatan	0,00	1.166.044.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik		116.101.440.000,00	117.091.052.728,00	104.126.538.838,00
-	DAK Non Fisik-BOS Reguler	57.765.680.000,00	57.472.200.263,00	52.954.076.219,00
-	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.852.500.000,00	2.736.250.000,00	2.973.750.000,00
-	DAK Non Fisik-TPG PNSD	47.408.947.000,00	48.947.454.000,00	39.870.684.000,00



Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
-	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.258.500.000,00	1.396.500.000,00	1.825.500.000,00
-	DAK Non Fisik-TKG PNSD	547.382.000,00	1.278.756.000,00	678.707.000,00
-	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	2.256.774.000,00	1.875.829.679,00	3.466.568.808,00
-	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.590.226.000,00	2.098.872.300,00	0,00
-	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	901.431.000,00	815.619.329,00	942.870.130,00
-	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	469.571.157,00	311.305.153,00
-	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	1.103.077.528,00
Jumlah		248.480.881.000,00	244.387.782.906,00	273.451.710.015,00

5.2.1.1.2

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA

31 Desember 2024
12.648.494.000,00

31 Desember 2023
24.666.327.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah penganggaran rekening Insentif Fiskal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mendapatkan Insentif Fiskal sebesar Rp12.648.494.000,00.

5.2.1.1.3

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

31 Desember 2024
8.002.630.696,00

31 Desember 2023
5.921.818.966,00

Realisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.002.630.696,00 atau 2.286,47% dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00. Lain-lain pendapatan yang sah tersebut merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri, dan pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	350.000.000,00	8.002.630.696,00	5.921.818.966,00
Pendapatan Hibah	350.000.000,00	6.609.420.000,00	5.546.233.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	6.229.800.000,00	5.204.575.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/ Perorangan dalam Negeri	0,00	0,00	341.658.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	350.000.000,00	379.620.000,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.393.210.696,00	375.585.966,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	1.393.210.696,00	375.585.966,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Jumlah	350.000.000,00	8.002.630.696,00	5.921.818.966,00

5.2.1.1.3.1 Pendapatan Hibah 31 Desember 2024 31 Desember 2023
6.609.420.000,00 5.546.233.000,00

Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Hibah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.609.420.000,00 atau 1.888,41% dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00. Pendapatan hibah tersebut merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rincian Lain-Lain Pendapatan Hibah – LRA

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	6.229.800.000,00	5.204.575.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	350.000.000,00	379.620.000,00	341.658.000,00
Jumlah		350.000.000,00	6.609.420.000,00	5.546.233.000,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6.229.800.000,00 adalah hibah uang dari Kementerian Pendidikan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri sebesar Rp379.620.000,00 adalah hibah dari PT Jasa Raharja atas kerja sama pemungutan asuransi di kantor Samsat UPT Badan Pendapatan Daerah.

5.2.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
1.393.210.696,00 375.585.966,00

Realisasi Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.393.210.696,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan di Tahun Anggaran 2023 dan 2024 merupakan pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

5.2.1.2 Belanja LRA 31 Desember 2024 31 Desember 2023
3.046.631.426.464,06 2.703.536.380.490,82

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.046.631.426.464,06 atau 90,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.353.318.060.045,76 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja – LRA

Uraian	Tahun 2024		Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan) Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Operasi	2.551.194.193.671,76	2.332.882.811.164,97	2.042.445.525.498,82	290.724.146.505,46
Belanja Modal	794.123.866.374,00	706.181.651.526,09	651.639.401.736,00	54.542.249.790,09



Uraian	Tahun 2024		Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan) Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Tak Terduga	8.000.000.000,00	7.566.963.773,00	9.451.453.256,00	(1.884.489.483,00)
Jumlah	3.353.318.060.045,76	3.046.631.426.464,06	2.703.536.380.490,82	343.382.105.586,24

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 meningkat Rp343.095.045.973,24 atau 12,69% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.703.536.380.490,82. Rincian realisasi Belanja sebesar Rp3.046.631.426.464,06 pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja LRA per Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan	702.304.913.863,00	630.283.487.742,82	588.284.195.706,83
Dinas Kesehatan	61.766.189.643,00	57.160.732.063,00	50.922.598.516,00
RSUD dr. H Jusuf SK	421.926.790.283,00	427.629.230.093,24	366.924.176.485,90
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	743.258.049.693,00	656.024.536.411,00	638.998.928.545,00
Satuan Polisi Pamong Praja	30.202.799.896,00	28.988.881.984,00	13.295.716.039,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.389.227.424,00	10.958.838.140,00	9.354.057.165,00
Dinas Sosial	22.460.832.069,00	21.807.626.987,00	17.513.695.015,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.436.155.003,00	18.700.836.050,00	7.407.492.449,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.392.146.384,00	13.957.407.170,00	11.130.538.293,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	57.647.072.126,00	50.888.834.069,00	34.148.367.844,00
Dinas Lingkungan Hidup	14.286.634.726,00	12.306.932.943,00	14.940.532.020,00
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.531.169.479,00	10.356.357.452,00	8.419.917.444,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.463.070.981,00	13.434.930.163,00	12.708.608.417,00
Dinas Perhubungan	51.929.812.871,00	46.140.403.512,00	34.350.790.650,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	44.346.506.877,00	41.025.078.505,00	34.113.245.543,86
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.242.183.629,00	13.813.467.485,00	10.941.565.917,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	63.050.043.973,00	57.575.515.841,00	41.480.148.937,30
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.801.716.930,00	11.568.139.439,00	9.111.257.362,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	35.753.517.482,00	34.924.388.613,00	34.307.048.856,00
Dinas Pariwisata	26.446.853.660,00	23.160.091.331,00	21.981.109.827,00
Dinas Kehutanan	156.993.008.511,00	128.569.455.605,00	111.086.886.557,00

U r a i a n	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.406.420.956,00	16.733.959.129,00	12.646.455.448,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	52.390.041.000,00	49.547.066.932,00	40.794.994.467,00
Sekretariat Daerah	234.733.358.154,66	210.857.685.168,00	200.443.989.311,00
Sekretariat DPRD	123.992.818.339,00	105.261.497.784,00	100.010.737.443,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	33.327.940.092,00	26.450.155.371,00	24.181.829.494,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	91.061.774.706,10	76.157.979.694,00	56.123.248.627,00
Badan Pendapatan Daerah	65.979.259.595,00	64.407.456.049,00	54.190.819.430,93
Badan Kepegawaian Daerah	17.280.949.288,00	14.856.340.056,00	11.012.104.985,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.173.220.942,00	16.290.552.588,00	15.485.349.759,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	9.207.030.000,00	8.403.636.546,00	7.314.996.781,00
Badan Penghubung	13.683.598.722,00	12.914.737.247,00	12.516.035.359,00
Inspektorat	31.451.326.523,00	26.441.893.334,00	23.135.285.381,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	111.001.626.225,00	109.033.294.967,00	74.259.656.415,00
TOTAL	3.353.318.060.045,76	3.046.631.426.464,06	2.703.536.380.490,82

Dari data di atas dapat dijelaskan masing-masing rekening belanja yang terdiri dari:

5.2.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2024
2.332.882.811.164,97

31 Desember 2023
2.042.445.525.498,82

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi ini meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.332.882.811.164,97 atau 91,44% dari anggaran sebesar Rp 2.551.194.193.671,76 dan meningkat sebesar Rp290.724.741.651,15 atau 14,23% dari realisasi Belanja Operasi Tahun 2023. Rincian belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasional – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	947.268.188.400,25	868.496.469.825,00	91,68	767.029.049.418,00
Belanja Barang dan Jasa	1.349.997.641.213,51	1.218.671.997.282,97	90,27	1.097.028.389.768,82
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	19.857.277.500,00	19.787.303.700,00	99,65	16.513.140.465,00
Belanja Hibah	229.961.786.558,00	222.697.836.570,00	96,84	161.141.184.381,00
Belanja Bantuan Sosial	4.109.300.000,00	3.229.203.787,00	78,58	733.761.466,00
TOTAL	2.551.194.193.671,76	2.332.882.811.164,97	91,44	2.042.445.525.498,82

Rincian realisasi Belanja Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:



5.2.1.2.1.1 Belanja Pegawai 31 Desember 2024 31 Desember 2023
868.496.469.825,00 767.029.049.418,00

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi belanja pegawai Tahun 2024 meningkat sebesar Rp101.467.420.407,00 atau 13,23% dari realisasi belanja pegawai Tahun 2023. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp868.496.469.825,00 atau 91,68% dari anggaran sebesar Rp.947.268.188.400,25 adalah belanja pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai BLUD dengan uraian:

Tabel 5.26
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	388.481.535.903,15	347.081.885.521,00	89,34	307.033.119.644,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	397.743.343.727,10	375.673.831.800,00	94,45	340.345.543.829,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	108.989.427.386,00	94.971.229.243,00	87,14	69.896.699.387,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.612.634.958,00	23.684.026.763,00	96,23	23.856.388.948,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	253.449.230,00	238.143.043,00	93,96	234.465.224,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.887.797.196,00	1.730.699.155,00	91,68	1.568.710.386,00
Belanja Pegawai BLUD	25.300.000.000,00	25.116.654.300,00	99,28	24.094.122.000,00
Jumlah	947.268.188.400,25	868.496.469.825,00	91,68	767.029.049.418,00

5.2.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31 Desember 2024 31 Desember 2023
1.218.671.997.282,97 1.097.028.389.768,82

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp1.218.671.997.282,97 meningkat sebesar Rp121.643.607.514,15 atau 11,09% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp1.097.028.389.768,82. Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap dan belanja pegawai langsung.

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.218.671.997.282,97 adalah realisasi belanja barang dan jasa pada perangkat daerah atau 90,27% dari anggarannya sebesar Rp1.349.997.641.213,51. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	363.216.224.412,79	314.567.175.074,00	247.261.940.780,50



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.417.171.544,00	1.171.245.837,00	1.491.109.897,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.136.356.421,00	967.470.013,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	246.357.447.547,00	213.990.916.970,69	172.082.742.625,82
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.746.616.878,00	36.481.196.845,00	24.212.771.034,00
Belanja Sewa Tanah	41.500.000,00	41.000.000,00	76.952.702,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.171.995.166,82	4.415.102.700,00	5.435.315.312,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.282.574.536,00	11.770.086.076,00	14.848.178.092,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.100.000,00	9.100.000,00	3.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	18.500.000,00	18.200.000,00	19.700.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	37.181.825.236,00	34.029.394.467,00	29.930.262.553,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	24.660.915.560,00	18.806.344.907,00	12.659.654.094,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	33.272.250,00	33.241.725,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	64.857.300,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.496.629.600,00	13.473.916.265,00	16.870.275.687,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	49.594.000,00	15.855.176,00	1.924.500,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	15.750.000,00	750.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.755.558.200,00	16.332.192.400,00	14.144.681.914,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.822.253.548,00	6.439.353.556,00	29.609.285.119,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.737.374.144,50	7.400.545.414,00	3.147.770.827,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	44.770.000,00	36.341.000,00	68.987.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	394.500.000,00	327.200.000,00	822.904.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	298.458.089.565,40	257.213.418.972,00	197.089.349.500,59
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	5.336.143.921,00	4.250.971.185,00	1.320.684.448,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.001.781.579,00	18.776.734.344,00	14.976.679.631,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.211.450.000,00	707.853.450,00	70.015.854.641,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	65.908.760.000,00	68.676.643.154,13	54.298.940.016,01
Belanja Barang dan Jasa BLUD	169.441.487.104,00	188.669.747.752,15	186.574.568.094,90
JUMLAH	1.349.997.641.213,51	1.218.671.997.282,97	1.097.028.389.768,82



Realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2024 sebesar Rp1.218.671.997.282,97 merupakan total belanja barang dan jasa yang sebagian menjadi persediaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk persediaan dapat dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.28
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA yang Membentuk Persediaan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	24.597.000,00	17.522.000,00	69.851.046,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	235.273.700,00	205.340.726,00	348.538.919,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.250.546.207,00	18.281.114.284,00	19.015.522.861,50
Belanja Bahan-Bahan Baku	50.000.000,00	49.502.501,00	4.038.900,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.840.170.000,00	1.981.112.000,00	1.561.464.600,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	66.926.570,00	50.618.500,00	49.907.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	61.715.200,00	35.571.000,00	45.123.300,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	201.661.100,00	181.330.200,00	159.337.800,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.646.866.300,00	1.117.368.319,00	1.561.904.012,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.624.256.451,00	1.317.300.400,00	1.567.874.879,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	20.000.000,00	3.750.000,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	204.300.000,00	153.853.860,00	177.125.900,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	273.900.000,00	250.845.449,00	280.132.175,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	4.800.000,00	1.840.000,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	85.730.000,00	84.890.000,00	105.376.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	600.000,00	600.000,00	250.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	633.250.000,00	611.617.110,00	704.662.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.623.487.363,85	4.628.162.252,00	3.746.436.910,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.559.349.796,00	3.000.244.440,00	2.860.683.894,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.832.396.477,82	8.024.121.053,00	7.942.830.464,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.028.592.650,00	951.049.000,00	743.910.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	250.000.000,00	248.813.750,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.294.178.150,00	1.055.383.998,00	953.017.917,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.681.022.290,90	1.354.234.978,00	835.766.250,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	869.958.180,00	645.348.676,00	702.001.368,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	305.914.700,00	209.430.000,00	263.067.922,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	552.600.000,00	515.705.000,00	259.698.998,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.214.477.240,00	5.695.913.477,00	4.129.073.391,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.759.509.567,00	2.262.656.925,00	2.931.280.683,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	598.552.166,22	327.878.737,00	618.461.484,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.367.062.545,00	1.324.518.200,00	1.498.233.773,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.999.352.501,00	31.738.771.058,00	21.450.833.593,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	186.353.938.593,00	166.442.419.776,00	108.702.598.665,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	862.500.000,00	852.012.000,00	0,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	4.329.000,00	4.329.000,00	13.782.500,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.636.766.140,00	3.306.668.914,00	2.310.840.907,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	316.842.400,00	281.533.400,00	300.822.910,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.668.000.000,00	1.495.047.056,00	1.755.487.278,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	25.744.000,00	6.095.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.713.163.099,00	36.761.282.678,00	43.469.059.939,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.449.633.705,00	10.615.865.966,00	8.458.224.989,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13.000.000,00	12.900.000,00	16.726.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	33.900.000,00	33.884.100,00	17.674.308,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.000.000,00	1.400.000,00	1.610.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.444.205.000,00	1.266.940.661,00	442.892.830,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	305.650.000,00	304.640.360,00	345.606.800,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	369.702.500,00	341.738.250,00	0,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	138.600.000,00	133.350.000,00	144.842.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.122.205.500,00	895.265.000,00	798.922.710,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.057.386.575,00	1.763.155.600,00	1.911.373.035,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	115.500.000,00	110.250.000,00	11.245.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	363.650.000,00	257.020.000,00	0,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	24.300.000,00
Belanja Pakaian Siaga	24.000.000,00	22.896.000,00	0,00
Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	18.210.400,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	436.200.000,00	278.115.000,00	174.505.600,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.596.690.720,00	1.434.028.000,00	860.932.900,00
Belanja Pakaian Olahraga	2.000.571.025,00	1.619.930.420,00	2.536.445.770,00
Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	359.429.800,00
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	13.125.000,00	4.250.000,00	0,00
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	100.000.000,00	100.000.000,00	329.772.480,00
Belanja Komponen-Attachment	1.304.046.544,00	1.066.995.837,00	0,00
Jumlah	364.633.395.956,79	315.738.420.911,00	247.591.713.260,50

Realisasi belanja barang yang membentuk persediaan pada Pemerintah provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp315.738.420.911,00, di mana di dalamnya termasuk belanja Komponen-Attachment yang pada Tahun Anggaran 2023 belum termasuk belanja pembentuk persediaan. Akun belanja Komponen-Attachment pada Tahun Anggaran 2023 diperuntukkan sebagai akun penampungan belanja barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dikarenakan belum adanya pemutakhiran kode rekening belanja pada tahun tersebut.

Sedangkan belanja barang dan jasa yang tidak membentuk persediaan dapat dirincikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.29
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA
yang Tidak Membentuk Persediaan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
BELANJA KOMPONEN-ATTACHMENT			
Belanja Komponen-Attachment	0,00	0,00	1.161.337.417,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	1.161.337.417,00
BELANJA ASET TETAP YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA KAPITALISASI			
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	795.000.000,00	749.110.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.250.000,00	1.175.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	5.550.000,00	5.500.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.900.000,00	1.800.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	49.700.000,00	48.537.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	3.807.280,00	1.570.750,00	0,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Rumah Tangga-Alat Pembersih			
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(I,Home Use],	11.250.000,00	10.825.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	13.000.000,00	11.500.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.200.000,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	18.000.000,00	17.782.200,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.217.500,00	8.270.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	20.000.000,00	10.500.000,00	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	3.885.000,00	3.500.000,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	99.630.570,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	94.966.071,00	89.400.063,00	0,00
SUBTOTAL	1.136.356.421,00	967.470.013,00	0,00
BELANJA JASA			
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	114.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.227.209.000,00	7.504.521.529,00	5.104.063.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.928.660.000,00	6.121.025.000,00	5.576.622.500,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	95.400.000,00	90.000.000,00	122.400.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	690.000.000,00	340.656.600,00	965.325.000,00
Honorarium Rohaniwan	89.000.000,00	35.200.000,00	22.600.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	199.160.000,00	76.420.000,00	38.220.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	378.750.000,00	170.400.000,00	6.000.000,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	551.500.000,00	367.380.000,00	22.500.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	847.200.000,00	737.685.000,00	446.360.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.410.000.000,00	7.049.250.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.697.200.000,00	9.149.700.000,00	514.274.000,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	247.344.000,00	171.329.181,00	240.184.980,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.770.997.584,00	4.729.447.409,00	3.697.678.968,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	874.445.664,00	765.630.277,00	500.531.677,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	227.175.000,00	196.370.000,00	144.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	125.600.000,00	117.084.647,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	513.450.000,00	496.650.000,00	216.026.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	115.610.000,00	75.220.000,00	20.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.325.400.000,00	2.033.570.000,00	1.426.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	66.780.144.180,00	61.178.351.013,00	24.312.390.364,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.144.996.702,00	5.713.562.662,00	4.497.339.523,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.673.754.850,00	17.974.640.948,69	53.699.216.104,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.447.509.500,00	5.090.169.960,00	4.402.820.426,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.320.692.800,00	7.875.652.415,00	6.255.288.408,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.191.151.698,00	5.495.848.940,00	5.067.228.945,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	194.522.832,00	188.570.961,00	158.645.843,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	1.028.502.654,00	942.084.256,00	1.212.092.752,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	125.551.416,00	125.464.726,00	125.180.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	628.710.000,00	555.250.000,00	578.850.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	17.250.000,00	10.750.000,00	1.999.996,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	88.584.000,00	80.133.779,00	71.871.280,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	266.348.650,00	205.845.175,00	772.922.885,00
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.688.665.000,00	1.466.883.918,00	1.146.789.630,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.860.750.000,00	8.009.225.698,00	6.154.094.186,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	215.000.000,00	140.000.000,00	277.000.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	88.735.000,00	50.232.745,00	57.837.169,00
Belanja Jasa Kalibrasi	9.864.000,00	9.324.000,00	7.512.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	116.300.000,00	99.809.731,00	84.650.500,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	21.600.000,00	21.545.000,00	0,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	185.500.000,00	134.513.000,00	151.818.400,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	25.055.530.000,00	23.866.349.571,00	19.525.240.300,00
Belanja Jasa Operator Kapal	2.045.050.000,00	1.781.565.300,00	1.864.811.059,00
Belanja Tagihan Telepon	332.160.000,00	155.167.980,00	171.319.713,00
Belanja Tagihan Air	3.861.253.640,00	2.445.738.005,00	757.130.630,00
Belanja Tagihan Listrik	24.191.209.447,00	18.597.904.085,00	10.428.497.641,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.765.520.000,00	1.631.201.000,00	624.256.250,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.237.719.300,00	7.217.060.185,00	4.840.560.663,00
Belanja Paket/Pengiriman	1.372.711.200,00	1.042.729.412,00	514.680.409,00
Belanja Penambahan Daya	45.000.000,00	39.968.400,00	0,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	34.550.000,00	33.661.770,00	13.611.900,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.151.909.430,00	1.188.649.292,00	1.265.545.706,82
Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	5.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Medical Check Up	750.000.000,00	304.595.500,00	643.732.389,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	3.219.821.429,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Penanganan COVID-19			
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	25.100.000.000,00	23.044.101.900,00	21.687.380.700,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.213.065.972,00	2.467.817.050,00	2.142.395.161,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.043.035.000,00	547.542.776,00	320.490.226,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	313.192.706,00	277.134.544,00	60.537.947,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	85.800.000,00	81.870.975,00	724.000,00
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	14.000.000,00	0,00	1.243.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	6.534.240.000,00	5.989.720.000,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	4.443.283.200,00	4.073.009.600,00	0,00
Belanja Sewa Tanah Kering	41.000.000,00	41.000.000,00	15.000.000,00
Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	61.952.702,00
Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	500.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	285.000.000,00	216.500.000,00	30.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.500.000,00	1.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.301.250.000,00	1.217.362.377,00	1.323.883.460,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	41.500.000,00	29.350.000,00	27.150.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	11.700.000,00	2.000.000,00	10.320.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	379.600.000,00	222.600.000,00	284.165.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	56.000.000,00	50.000.000,00	22.000.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	1.765.909.101,00	708.054.639,00	1.820.677.500,00
Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	4.050.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	190.980.000,00	149.695.000,00	75.042.600,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	46.338.936,00	11.680.000,00	20.240.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	470.164.034,82	309.068.000,00	296.176.350,00
Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	11.250.000,00
Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	900.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	509.915.000,00	458.635.000,00	414.457.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	274.650.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	180.000.000,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	693.550.000,00	674.400.000,00	190.320.000,00
Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	3.900.000,00	0,00	2.588.974,00
Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	3.000.000,00	2.502.900,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	45.000.000,00	42.500.000,00	192.000.000,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	119.658.000,00
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	63.788.095,00	26.177.284,00	135.786.428,00
Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	257.900.000,00	252.577.500,00	0,00
Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.047.648.900,00	2.738.286.261,00	3.588.654.800,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	854.999.992,00	696.180.310,00	830.980.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	36.000.000,00	35.000.000,00	144.300.000,00
Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.912.090.000,00	3.403.256.896,00	5.587.302.900,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	118.100.000,00	90.150.000,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	22.400.000,00	21.402.360,00	20.034.360,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	989.340.000,00	971.713.000,00	756.286.967,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	346.666.672,00	346.666.672,00	246.666.672,00
Belanja Sewa Asrama	1.668.209.980,00	1.640.369.600,00	1.658.163.996,00
Belanja Sewa Hotel	1.982.119.000,00	1.522.260.977,00	1.740.988.397,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	199.999.992,00	199.800.000,00	199.800.000,00
Belanja Sewa Instalasi Lain	9.100.000,00	9.100.000,00	3.000.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	8.500.000,00	8.200.000,00	16.700.000,00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	3.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	150.000.000,00	149.583.600,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	308.750.000,00	197.813.525,00	256.653.200,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	156.740.000,00	155.376.750,00	270.453.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	10.000.000,00	9.879.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	30.000.000,00	29.950.000,00	3.083.242.045,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	13.439.753.116,00	13.379.180.512,00	3.513.712.802,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	13.825.000.000,00	11.981.261.686,00	5.806.727.400,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	289.498.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	375.000.000,00	375.000.000,00	1.865.024.055,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	1.178.834.652,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	145.540.000,00	144.691.980,00	9.990.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	2.530.000.000,00	2.529.709.871,00	2.148.680.390,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	113.750.000,00	105.762.216,00	75.319.050,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.011.217.750,00	821.420.654,00	5.983.555.044,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	470.000.000,00	449.904.500,00	3.811.259.900,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	446.803.815,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	45.000.000,00	44.125.000,00	92.484.645,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	509.400.000,00	509.290.200,00	0,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	480.000.000,00	397.513.755,00	94.701.800,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	600.000.000,00	599.792.000,00	104.200.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	26.000.000,00	25.285.800,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	200.000.000,00	199.993.700,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	2.355.674.370,00	1.724.562.870,00	799.478.055,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	400.000.000,00	199.296.848,00	99.644.700,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	1.100.000.000,00	1.089.312.500,00	184.926.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	1.885.526.637,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.709.500.000,00	1.509.633.300,00	870.257.506,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	99.067.000,00	99.998.790,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	735.000.000,00	678.382.050,00	196.803.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	100.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	400.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	0,00	0,00	150.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	230.000.000,00	79.451.000,00	847.137.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	14.516.415.560,00	11.044.133.967,00	6.034.308.137,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	820.000.000,00	565.000.000,00	891.352.024,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.450.000.000,00	1.841.365.090,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	99.345.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	1.250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	0,00	0,00	700.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	0,00	0,00	200.000.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	33.272.250,00	33.241.725,00	0,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	50.000.000,00	50.000.000,00	64.857.300,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.114.740.000,00	4.495.560.857,00	4.474.632.057,00
Belanja Sosialisasi	6.120.240.000,00	5.915.631.000,00	10.236.395.500,00
Belanja Bimbingan Teknis	3.568.300.000,00	2.423.882.008,00	1.056.289.030,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	693.349.600,00	638.842.400,00	1.102.959.100,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	49.594.000,00	15.855.176,00	1.924.500,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.527.450.000,00	3.755.626.875,00	3.432.762.331,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	240.400.000,00	212.085.890,00	26.907.300,00
Belanja Beasiswa	15.124.550.000,00	14.702.190.000,00	11.516.560.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	109.381.579,00	106.831.579,00	450.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada	594.000.000,00	93.128.910,00	69.347.320.641,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pihak Ketiga/Pihak Lain			
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	617.450.000,00	614.724.540,00	668.534.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	65.908.760.000,00	68.676.643.154,13	54.298.940.016,01
Belanja Barang dan Jasa BLUD	169.441.487.104,00	188.669.747.752,15	186.574.568.094,90
SUBTOTAL	642.663.449.456,82	609.966.005.931,97	602.071.676.282,73
BELANJA PEMELIHARAAN			
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan	15.750.000,00	750.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	100.000.000,00	99.983.250,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	160.000.000,00	98.176.164,00	194.622.320,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	49.728.000,00	32.540.652,00	30.991.098,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	359.644.800,00	309.249.708,00	289.562.275,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	86.100.000,00	12.956.247,00	8.393.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	6.300.000,00	4.995.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.094.333.000,00	8.141.727.535,00	7.940.174.520,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	115.980.000,00	114.590.240,00	119.740.799,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	980.612.700,00	488.404.546,00	1.053.168.440,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	179.116.000,00	171.897.940,00	90.731.862,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	807.944.400,00	785.988.380,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.443.626.400,00	1.049.684.577,00	1.423.474.053,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	339.000.000,00	334.136.270,00	49.985.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	3.500.000,00	2.872.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	55.500.000,00	41.820.000,00	37.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	27.417.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	94.400.000,00	65.107.050,00	170.695.800,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	679.806.500,00	571.782.330,00	335.159.762,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.150.500,00	7.492.500,00	11.024.320,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.009.150.300,00	813.411.982,00	946.246.191,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	84.046.000,00	61.929.660,00	68.250.400,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	56.220.000,00	1.507.793,00	3.549.999,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	1.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.715.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	100.000.000,00	5.586.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	300.000.000,00	296.500.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000,00	0,00	1.299.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	539.066.700,00	405.924.966,00	266.230.588,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	101.500.000,00	78.492.072,00	24.486.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	230.000.000,00	213.090.000,00	10.646.939,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	284.834.000,00	232.669.291,00	201.332.670,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	37.026.000,00	33.825.000,00	284.925.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	556.972.900,00	386.896.247,00	344.904.878,00
Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	50.000.000,00	49.395.000,00	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	100.000.000,00	99.560.000,00	199.170.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.972.979.888,00	5.513.457.991,00	23.519.957.352,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	86.950.000,00	86.925.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	220.000.000,00	219.570.440,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	200.000.000,00	167.097.300,00	148.857.341,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	90.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	432.500.000,00	425.255.945,00	2.513.088.408,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	0,00	141.835.800,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	2.920.334.572,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	1.960.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	33.203.440,00	9.350.000,00	43.774.576,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	381.620.220,00	17.696.880,00	155.487.070,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	390.000.000,00	0,00	154.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	15.000.000,00	0,00	9.990.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	3.396.475.272,50	3.323.840.272,00	1.907.579.822,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	229.888.437,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.267.073.872,00	2.266.909.872,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	565.000.000,00	372.105.000,00	576.895.488,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	377.943.000,00	377.943.000,00	178.906.951,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	3.460.000,00	3.437.670,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	27.000.000,00	26.975.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	18.000.000,00	17.962.000,00	19.952.750,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.000.000.000,00	990.852.600,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	60.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	22.422.000,00	20.520.000,00	19.975.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	0,00	204.856.549,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	9.715.830,00
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	30.000.000,00	28.500.000,00	29.700.000,00
Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	14.770.000,00	7.841.000,00	39.287.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	394.500.000,00	327.200.000,00	822.904.000,00
SUBTOTAL	37.770.205.892,50	30.536.382.370,00	47.793.628.860,00
BELANJA PERJALANAN DINAS			



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	266.211.402.802,40	230.928.207.489,00	187.642.350.266,59
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	630.000.000,00	629.175.786,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.884.777.863,00	5.751.435.228,00	4.112.192.604,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.406.327.500,00	6.262.619.300,00	2.867.522.595,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.325.581.400,00	13.928.368.682,00	2.467.284.035,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	5.336.143.921,00	4.250.971.185,00	1.320.684.448,00
SUBTOTAL	303.794.233.486,40	261.750.777.670,00	198.410.033.948,59
JUMLAH	985.364.245.256,72	903.220.635.984,97	849.436.676.508,32

Total realisasi belanja barang dan jasa yang tidak membentuk persediaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp903.220.635.984,97.

5.2.1.2.1.3 Belanja Bunga

31 Desember 20240,00

31 Desember 20230,00

Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Anggaran dan realisasi Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

5.2.1.2.1.4 Belanja Subsidi

31 Desember 202419.787.303.700,00

31 Desember 202316.513.140.465,00

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp19.787.303.700,00 meningkat sebesar Rp3.274.163.235,00 atau 19,83% dari realisasi Belanja Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp16.513.140.465,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian belanja subsidi ongkos angkut (SOA) barang dan subsidi ongkos angkut penumpang di daerah perbatasan. Rincian belanja subsidi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.30
Rincian Realisasi Belanja Subsidi

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	19.794.554.500,00	19.724.580.700,00	15.790.628.865,00
Jenis SOA			
SOA Barang			
Kerjasama Perusahaan			
CV Gaddiel Makmur Perkasa	19.794.554.500,00	212.992.000,00	0,00
CV Mitra Karya Persada		436.880.000,00	332.100.000,00
CV Area Kita		102.100.000,00	0,00
Toko Cahaya Pindrang		0,00	7.050.000,00
PT Smart Cakrawala Aviation		5.595.260.265,00	5.452.320.000,00
CV Azienda Perkasa Jaya		449.075.500,00	419.772.800,00
CV Arendi Putri		115.600.000,00	192.760.160,00
CV Gaddiel Makmur Perkasa		115.800.000,00	0,00
CV Sumantipal Putra		127.500.000,00	0,00



SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
CV Hayathy		734.155.000,00	730.993.500,00
CV Lumbis Hulu Mandiri		240.400.000,00	123.179.688,00
CV Aeera Sakti		249.600.000,00	198.000.000,00
CV Mitra Karya Persada		149.805.000,00	199.553.597,00
CV Pujungan Jaya Abadi		348.920.000,00	0,00
CV Patria Jaya Manggala		398.690.000,00	370.896.000,00
CV Bintang Lumbis Perkasa		0,00	124.986.000,00
CV Sentral		0,00	125.008.200,00
SOA Penumpang			
Kerjasama Perusahaan			
PT Smart Cakrawala Aviation		10.447.802.935,00	7.514.008.920,00
Dinas Perhubungan	62.723.000,00	62.723.000,00	722.511.600,00
Jenis SOA			
SOA Penumpang			
Kerjasama Perusahaan			
CV Batu Naluir Putra Langason	62.723.000,00	62.723.000,00	542.511.600,00
CV Super Jaya		0,00	180.000.000,00
Jumlah	19.857.277.500,00	19.787.303.700,00	16.513.140.465,00

5.2.1.2.1.5 Belanja Hibah

31 Desember 2024
222.697.836.570,00

31 Desember 2023
161.141.184.381,00

Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp161.141.184.381,00 meningkat sebesar Rp61.556.652.189,00 atau 38,20% dari realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp161.141.184.381,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp222.697.836.570,00 atau 96,84% dari anggaran yang ditetapkan Rp229.961.786.558,00 dapat dirincikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.31
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	0,00	75.000.000,00
SKPD Pengelola			
Biro Kesejahteraan Rakyat	200.000.000,00	0,00	75.000.000,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	1.240.000.000,00
SKPD Pengelola			
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	1.240.000.000,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	220.111.739.680,00	212.551.691.045,00	150.073.629.325,00
SKPD Pengelola			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.274.850.000,00	9.507.871.365,00	6.211.784.100,00
Dinas Kesehatan	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	12.014.405.000,00	12.014.405.000,00	1.180.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.255.000,00	20.690.000,00	0,00
Dinas Sosial	50.000.000,00	30.000.000,00	185.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.225.000.000,00	975.000.000,00	592.125.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.370.000.000,00	3.360.000.000,00	3.050.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	39.500.000.000,00	37.798.300.000,00	21.037.881.030,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.629.443.000,00	1.577.160.000,00	1.295.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.562.100.000,00	4.562.100.000,00	1.235.000.000,00
Dinas Pariwisata	0,00	0,00	360.000.000,00
UPT KPH Nunukan	0,00	0,00	190.413.375,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	1.586.000.000,00	1.573.000.000,00	2.365.416.500,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	1.786.118.200,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	44.684.200.000,00	40.771.700.000,00	45.288.400.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.821.000.000,00	6.188.978.000,00	1.668.500.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93.572.486.680,00	93.372.486.680,00	62.827.991.120,00
Belanja Hibah Dana BOS	7.032.620.000,00	7.528.718.647,00	7.252.555.098,00
SKPD Pengelola			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.032.620.000,00	7.528.718.647,00	7.252.555.098,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.617.426.878,00	2.617.426.878,00	2.499.999.958,00
SKPD Pengelola			
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.617.426.878,00	2.617.426.878,00	2.499.999.958,00
Jumlah	229.961.786.558,00	222.697.836.570,00	161.141.184.381,00

5.2.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2024 31 Desember 2023
3.229.203.787,00 733.761.466,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp3.229.203.787,00 meningkat sebesar Rp2.495.442.321,00 atau 340,09% dari realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp733.761.466,00. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp4.109.300.000,00, dengan realisasi Rp3.229.203.787,00 atau 78,58%, dengan rincian sebagai

berikut.

Tabel 5.32
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	889.300.000,00	875.121.287,00	93.761.466,00
SKPD Pengelola			
Dinas Sosial	889.300.000,00	875.121.287,00	55.761.466,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	38.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.220.000.000,00	2.354.082.500,00	640.000.000,00
SKPD Pengelola			
Dinas Sosial	520.000.000,00	520.000.000,00	640.000.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.700.000.000,00	1.834.082.500,00	0,00
Jumlah	4.109.300.000,00	3.229.203.787,00	733.761.466,00

5.2.1.2.2 Belanja Modal 31 Desember 2024 31 Desember 2023
706.181.651.526,09 651.639.401.736,00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp706.181.651.526,09 meningkat sebesar Rp54.542.249.790,09 atau 8,37% dari realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp651.639.401.736,00. Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp706.181.651.526,09 atau 88,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp794.123.866.374,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Tanah	47.989.243.830,00	36.362.332.622,00	30.379.184.731,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.989.694.447,00	163.713.917.310,00	118.377.089.281,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	243.097.502.004,00	208.505.767.057,00	345.002.801.783,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	323.807.071.093,00	292.653.376.604,00	155.513.502.679,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	790.000.000,00	743.850.360,00	1.904.007.132,00
Belanja Modal Aset Lainnya	7.450.355.000,00	4.202.407.573,09	462.816.130,00
Jumlah	794.123.866.374,00	706.181.651.526,09	651.639.401.736,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp706.181.651.526,09 terdiri dari pembayaran pengadaan aset tetap dan aset lainnya tahun anggaran 2024 dan pembayaran pengadaan aset tetap yang pekerjaannya di tahun anggaran 2023 dan diakui sebagai utang pengadaan aset di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebesar Rp7.661.900.745,16 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rincian Belanja Aset Tetap per



perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.34
Rincian Belanja Modal per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Belanja Modal untuk Pekerjaan TA 2024 (Rp)	Belanja Modal untuk Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Belanja Modal
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.359.465.693,00	0,00	99.359.465.693,00
2	Dinas Kesehatan	4.830.140.692,00	0,00	4.830.140.692,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr H Jusuf SK	76.055.685.792,09	0,00	76.055.685.792,09
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	413.167.913.534,84	7.661.900.745,16	420.829.814.280,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	611.500.000,00	0,00	611.500.000,00
6	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	112.455.000,00	0,00	112.455.000,00
7	Dinas Sosial	1.092.327.516,00	0,00	1.092.327.516,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	163.101.000,00	0,00	163.101.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	304.814.000,00	0,00	304.814.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	389.088.800,00	0,00	389.088.800,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	716.709.000,00	0,00	716.709.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	141.820.201,00	0,00	141.820.201,00
13	Dinas Perhubungan	16.900.585.650,00	0,00	16.900.585.650,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.918.792.760,00	0,00	2.918.792.760,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	7.963.365.955,00	0,00	7.963.365.955,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	176.200.000,00	0,00	176.200.000,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	851.657.360,00	0,00	851.657.360,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	533.754.592,00	0,00	533.754.592,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.541.732.096,00	0,00	7.541.732.096,00
20	Dinas Pariwisata	269.267.000,00	0,00	269.267.000,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.614.546.200,00	0,00	1.614.546.200,00
22	Dinas Kehutanan	23.808.999.450,00	0,00	23.808.999.450,00
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.568.415.000,00	0,00	1.568.415.000,00
24	Sekretariat Daerah	5.279.577.680,00	0,00	5.279.577.680,00
25	Sekretariat DPRD	2.601.977.550,00	0,00	2.601.977.550,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	637.216.900,00	0,00	637.216.900,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.153.821.221,00	0,00	22.153.821.221,00
28	Badan Pendapatan Daerah	2.340.328.324,00	0,00	2.340.328.324,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	2.572.678.000,00	0,00	2.572.678.000,00



No	Perangkat Daerah	Belanja Modal untuk Pekerjaan TA 2024 (Rp)	Belanja Modal untuk Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Belanja Modal
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	637.916.400,00	0,00	637.916.400,00
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
32	Badan Penghubung	218.434.599,00	0,00	218.434.599,00
33	Inspektorat	857.962.815,00	0,00	857.962.815,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
Jumlah		698.519.750.780,93	7.661.900.745,16	706.181.651.526,09

Rincian realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah 31 Desember 2024 31 Desember 2023
36.362.332.622,00 30.379.184.731,00

Jumlah tersebut merupakan biaya pembelian tanah dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2024 sebesar Rp 36.362.332.622,00 atau 75,77% dari anggaran sebesar Rp 47.989.243.830,00 dan meningkat sebesar Rp5.983.147.891,00 atau 19,69% dari realisasi Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.35
Rincian Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Tanah Persil	47.989.243.830,00	36.362.332.622,00	30.182.080.667,00
Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	197.104.064,00
Jumlah	47.989.243.830,00	36.362.332.622,00	30.379.184.731,00

Rincian Belanja Modal Tanah per masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.36
Rincian Belanja Modal Tanah Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.200.000.000,00	3.879.960.000,00	30.100.524.467,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	197.104.064,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	39.689.243.830,00	32.383.532.250,00	0,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	81.556.200,00
5	Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	98.840.372,00	0,00
Jumlah		47.989.243.830,00	36.362.332.622,00	30.379.184.731,00

5.2.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 31 Desember 2023
163.713.917.310,00 118.377.089.281,00

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2024 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk



memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp163.713.917.310,00 meningkat sebesar Rp45.336.828.029,00 atau 38,30% dari realisasi Tahun 2023, dan terealisasi 95,74% dari anggaran sebesar Rp170.989.694.447,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	7.980.758.000,00	7.218.770.279,00	6.635.253.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	31.988.353.965,00	30.235.074.426,00	24.200.551.730,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	698.636.500,00	637.321.475,00	538.508.940,00
Belanja Modal Alat Pertanian	163.190.000,00	160.005.000,00	33.290.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.164.950.315,00	22.565.749.402,00	39.043.376.593,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.200.212.000,00	4.906.970.400,00	3.170.638.238,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	66.462.873.437,00	64.321.146.815,00	20.400.174.848,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	20.487.947.000,00	20.145.942.010,00	5.272.157.400,00
Belanja Modal Komputer	12.677.473.230,00	11.422.259.503,00	8.257.256.525,00
Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	35.964.000,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	49.950.000,00	47.500.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.477.350.000,00	1.419.835.000,00	9.470.450.320,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	611.000.000,00	606.543.000,00	1.270.987.687,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	27.000.000,00	26.800.000,00	48.480.000,00
Jumlah	170.989.694.447,00	163.713.917.310,00	118.377.089.281,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.38
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.965.286.691,00	31.821.232.545,00	27.215.826.854,00
2	Dinas Kesehatan	913.511.760,00	817.996.000,00	676.861.500,00
3	RSUD dr. H. Jusuf SK	75.143.033.437,00	72.299.146.815,00	31.229.325.439,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	4.668.574.500,00	3.989.692.169,00	14.439.884.401,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	120.500.000,00	112.455.000,00	16.045.456,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	645.600.000,00	611.500.000,00	52.224.000,00
7	Dinas Sosial	413.000.000,00	396.028.516,00	1.568.057.500,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	199.400.000,00	133.170.000,00	125.482.500,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	325.900.000,00	304.814.000,00	53.870.000,00

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.092.047.101,00	1.565.526.200,00	392.290.350,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	499.388.000,00	389.088.800,00	509.937.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	706.199.000,00	703.011.000,00	222.388.162,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	147.500.000,00	141.820.201,00	24.374.480,00
14	Dinas Perhubungan	1.153.690.000,00	1.125.245.345,00	1.680.341.190,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	3.018.397.000,00	2.904.892.760,00	3.555.145.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	156.400.000,00	151.200.000,00	64.672.000,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	646.600.000,00	571.657.000,00	962.787.660,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	573.474.879,00	533.754.592,00	174.167.790,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.265.867.465,00	5.206.453.000,00	2.345.880.340,00
20	Dinas Pariwisata	310.350.000,00	269.267.000,00	205.300.000,00
21	Dinas Kehutanan	20.360.862.257,00	18.787.918.030,00	17.399.684.410,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	203.000.000,00	192.575.000,00	55.874.900,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM	3.632.815.000,00	3.550.236.856,00	1.926.007.600,00
24	Sekretariat Daerah	6.031.287.480,00	5.261.027.680,00	2.261.914.855,00
25	Sekretariat DPRD	3.049.204.000,00	2.601.977.550,00	597.780.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	642.340.000,00	637.216.900,00	179.464.800,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.020.450.000,00	2.830.845.000,00	4.215.633.778,00
28	Badan Pendapatan Daerah	1.764.946.000,00	1.703.405.537,00	2.209.893.117,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	2.336.270.000,00	2.258.950.000,00	283.196.800,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	730.844.877,00	637.916.400,00	1.397.169.829,00
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	31.660.000,00	31.500.000,00	150.080.900,00
32	Badan Penghubung	222.795.000,00	218.434.599,00	889.315.320,00
33	Inspektorat	878.500.000,00	857.962.815,00	1.194.841.350,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	120.000.000,00	96.000.000,00	101.370.000,00
Jumlah		170.989.694.447,00	163.713.917.310,00	118.377.089.281,00

5.2.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024
208.505.767.057,00

31 Desember 2023
345.002.801.783,00

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp208.505.767.057,00 menurun sebesar Rp136.497.034.726,00 atau 39,56% dari realisasi Tahun 2023, dan terealisasi sebesar 85,77% dari anggaran sebesar Rp243.097.502.004,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39



Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung	241.805.522.004,00	207.321.335.068,00	343.911.234.783,00
Belanja Modal Bangunan Menara	891.980.000,00	880.431.990,00	1.091.567.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	400.000.000,00	303.999.999,00	0,00
Jumlah	243.097.502.004,00	208.505.767.057,00	345.002.801.783,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.40
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.544.770.477,00	63.459.773.148,00	87.097.939.663,00
2	Dinas Kesehatan	3.370.000.000,00	3.302.997.200,00	367.138.898,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	111.790.991.964,00	94.163.217.453,00	234.252.646.803,00
4	Dinas Sosial	642.916.560,00	628.149.000,00	0,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000.000,00	49.020.000,00	656.679.037,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	4.431.056.600,00
7	Dinas Perhubungan	18.482.902.000,00	15.775.340.305,00	0,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	213.421.003,00	0,00	0,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.471.000.000,00	2.335.279.096,00	1.744.040.709,00
10	Dinas Kehutanan	7.601.500.000,00	5.020.660.820,00	7.908.523.242,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM	5.175.000.000,00	4.323.553.814,00	4.727.454.814,00
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.630.000.000,00	19.322.976.221,00	3.335.188.767,00
13	Badan Pendapatan Daerah	125.000.000,00	124.800.000,00	244.533.250,00
14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	237.600.000,00
Jumlah		243.097.502.004,00	208.505.767.057,00	345.002.801.783,00

5.2.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
292.653.376.604,00 155.513.502.679,00

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp292.653.376.604,00, meningkat sebesar Rp137.139.873.925,00 atau 88,19% dari realisasi Tahun 2023 dan terealisasi sebesar 90,38% dari anggaran sebesar Rp323.807.071.093,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	271.968.077.810,00	244.171.016.611,00	142.232.072.223,00
Belanja Modal Bangunan Air	42.989.353.283,00	40.168.131.874,00	12.950.874.776,00
Belanja Modal Instalasi	8.772.460.000,00	8.239.955.019,00	288.018.380,00
Belanja Modal Jaringan	77.180.000,00	74.273.100,00	42.537.300,00
Jumlah	323.807.071.093,00	292.653.376.604,00	155.513.502.679,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.42
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	720.000.000,00	707.147.496,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	321.384.141.093,00	290.293.372.408,00	154.468.096.999,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.000.000,00	29.931.000,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	1.002.868.380,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	14.985.000,00	13.900.000,00	0,00
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.400.000.000,00	1.375.840.000,00	0,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM	40.000.000,00	39.675.285,00	42.537.300,00
8	Badan Pendapatan Daerah	110.445.000,00	108.032.415,00	0,00
9	Badan Kepegawaian Daerah	107.500.000,00	85.478.000,00	0,00
Jumlah		323.807.071.093,00	292.653.376.604,00	155.513.502.679,00

5.2.1.2.2.5

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024

743.850.360,00

31 Desember 2023

1.904.007.132,00

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2024 untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp743.850.360,00, menurun sebesar Rp1.160.156.772,00 atau 60,93% dari realisasi Tahun 2023, dan terealisasi sebesar 94,16% dari anggaran Rp790.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.43
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	305.000.000,00	265.350.000,00	444.675.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	485.000.000,00	478.500.360,00	8.588.903,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	148.050.000,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	3.620.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	1.299.073.229,00
Jumlah	790.000.000,00	743.850.360,00	1.904.007.132,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.44
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000,00	198.500.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	6.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	311.400.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	76.999.999,00
5	Dinas Sosial	20.000.000,00	18.550.000,00	7.000.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	15.000.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	285.000.000,00	280.000.360,00	131.798.903,00
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	69.999.930,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	273.264.000,00
11	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	60.000.000,00
12	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	54.174.000,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM	0,00	0,00	197.025.000,00
14	Sekretariat Daerah	20.000.000,00	18.550.000,00	66.744.300,00
15	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	3.200.000,00
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	447.850.000,00
17	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	82.251.000,00
18	Badan Kepegawaian Daerah	230.000.000,00	228.250.000,00	0,00
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	9.500.000,00
20	Badan Penghubung	0,00	0,00	106.800.000,00
Jumlah		790.000.000,00	743.850.360,00	1.904.007.132,00

5.2.1.2.2.6Belanja Modal Aset Lainnya

31 Desember 20244.202.407.573,09

31 Desember 2023462.816.130,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp4.202.407.573,09 meningkat sebesar Rp3.739.591.443,09 atau 808,01% dari realisasi Tahun 2023, dan terealisasi sebesar 56,41% dari anggaran Rp7.450.355.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.45
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	450.355.000,00	445.868.596,00	462.816.130,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	7.000.000.000,00	3.756.538.977,09	0,00
Jumlah	7.450.355.000,00	4.202.407.573,09	462.816.130,00

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya per masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.46
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.000.000,00	1.999.996,00	0,00
2	RSUD dr. H. Jusuf SK	7.000.000.000,00	3.756.538.977,09	0,00
3	Dinas Sosial	50.000.000,00	49.600.000,00	0,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.800.000,00	13.698.000,00	0,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	72.500.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7	Dinas Kehutanan	555.000,00	420.600,00	0,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM	50.000.000,00	49.900.000,00	0,00
9	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	294.316.130,00
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	96.000.000,00
11	Badan Pendapatan Daerah	307.000.000,00	305.250.000,00	0,00
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		7.450.355.000,00	4.202.407.573,09	462.816.130,00

5.2.1.2.3 Belanja Tak Terduga

31 Desember 2024
7.566.963.773,00

31 Desember 2023
9.451.453.256,00

Belanja tak terduga merupakan belanja yang pengeluarannya tidak dapat diduga secara pasti baik itu besaran jumlah angkanya maupun realisasinya dan juga untuk pembayaran bantuan sosial tidak terencana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp8.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.566.963.773,00.

5.2.1.3 Transfer

31 Desember 2024
524.327.592.129,00

31 Desember 2023
538.778.797.545,00

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Jumlah anggaran transfer adalah sebesar Rp624.375.084.211,65 dan terealisasi sebesar Rp524.327.592.129,00 atau 83,98%. Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.47
Rincian Belanja Transfer

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	436.318.484.211,65	336.426.911.141,00	368.800.299.772,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	188.056.600.000,00	187.900.680.988,00	169.978.497.773,00
Jumlah	624.375.084.211,65	524.327.592.129,00	538.778.797.545,00

5.2.1.3.1 Transfer Bagi Hasil

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Pendapatan	336.426.911.141,00	368.800.299.772,00
-------------------	---------------------------	---------------------------

Jumlah anggaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah sebesar Rp436.318.484.211,65 dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp336.426.911.141,00 atau 77,11%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2024 menurun sebesar Rp32.373.388.631,00 atau 8,78% dari realisasi Tahun 2023.

Jumlah tersebut merupakan transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/128/2025 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 yang telah disalurkan dari rekening kas daerah provinsi kepada masing-masing kabupaten/kota seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.48
Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	355.171.984.404,65	265.191.872.993,00	289.812.364.640,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	81.146.499.807,00	71.235.038.148,00	78.987.935.132,00
Jumlah	436.318.484.211,65	336.426.911.141,00	368.800.299.772,00

Rincian penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak per masing-masing kabupaten dan kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.49
Rincian Penyaluran Transfer Bagi Hasil Pajak

Jenis Belanja Bagi Hasil	Realisasi Penyaluran (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	265.191.872.993,00
Kabupaten Bulungan	92.172.949.425,00
Kabupaten Nunukan	80.936.421.201,00
Kabupaten Malinau	57.044.884.225,00
Kabupaten Tana Tidung	35.037.618.142,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	71.235.038.148,00
Kota Tarakan	71.235.038.148,00
Jumlah	336.426.911.141,00

5.2.1.3.2	Transfer Bantuan	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Keuangan	187.900.680.988,00	169.978.497.773,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya adalah bantuan



keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. Mekanisme penyaluran bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

Jumlah transfer bantuan keuangan yang telah disalurkan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp187.900.680.988,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp188.056.600.000,00, dengan rincian:

Tabel 5.50
Rincian Transfer Bantuan Keuangan - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	72.585.000.000,00	72.585.000.000,00	69.877.070.279,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	115.471.600.000,00	115.315.680.988,00	100.101.427.494,00
Jumlah	188.056.600.000,00	187.900.680.988,00	169.978.497.773,00

Rincian penyaluran Belanja Bantuan Keuangan per masing-masing kabupaten dan kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.51
Rincian Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan

Jenis Bantuan Keuangan	Realisasi Penyaluran (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	72.585.000.000,00
Kabupaten Bulungan	42.835.000.000,00
Kabupaten Tana Tidung	29.750.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	115.315.680.988,00
Kabupaten Bulungan	28.822.384.483,00
Kabupaten Nunukan	31.597.448.792,00
Kabupaten Malinau	20.562.052.648,00
Kabupaten Tana Tidung	8.153.888.171,00
Kota Tarakan	26.179.906.894,00
Jumlah	187.900.680.988,00

5.2.1.4 Surplus/Defisit 31 Desember 2024 31 Desember 2023
(111.933.644.122,09) (151.302.417.036,77)

Surplus/Defisit merupakan selisih antara realisasi total pendapatan dengan total belanja dan transfer selama Tahun Anggaran 2024. Jumlah realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.459.025.374.470,97, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer masing-masing sebesar Rp3.046.631.426.464,06 dan Rp524.327.592.129,00, dengan demikian menyebabkan defisit sebesar Rp(111.933.644.122,09) (pendapatan lebih kecil dari pada belanja dan transfer).

5.2.1.5 Pembiayaan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
129.768.722.962,58 301.046.143.553,18

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali



dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan, dan Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Neto.

Pembiayaan Neto Tahun 2024 sebesar Rp129.768.722.962,58 berasal dari Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp149.768.722.962,58 dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp20.000.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan		
- Penggunaan SiLPA	Rp	149.768.722.962,58
Pengeluaran Pembiayaan		
- Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	Rp	(20.000.000.000,00)
Pembiayaan Neto Tahun 2024	Rp	129.768.722.962,58

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 berasal dari penggunaan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp149.743.726.516,41 dan penambahan saldo kas lainnya atas kas yang belum tersaji Tahun 2023 sebesar Rp24.996.446,17. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan di Tahun 2024 berupa penyertaan modal/investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada PT. Bank Kaltimara sebesar Rp20.000.000.000,00.

5.2.1.6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sebelum Koreksi	<u>31 Desember 2024</u> 17.835.078.840,49	<u>31 Desember 2023</u> 149.743.726.516,41
----------------	---	--	---

SiLPA sebelum Koreksi pada tahun 2024 sebesar Rp17.835.078.840,49 merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran sebelum adanya koreksi.

5.2.1.7	Koreksi SiLPA	<u>31 Desember 2024</u> (287.059.613,00)	<u>31 Desember 2023</u> 0,00
----------------	----------------------	---	---

Koreksi SiLPA pada tahun 2024 merupakan koreksi atas adanya ketekoran kas di bendahara pengeluaran pembantu sebesar Rp(287.059.613,00).

5.2.1.8	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	<u>31 Desember 2024</u> 17.548.019.227,49	<u>31 Desember 2023</u> 149.743.726.516,41
----------------	---	--	---

SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.548.019.227,49 merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran selama satu tahun anggaran dan setelah memperhitungkan pembiayaan neto, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan	Rp	3.459.025.374.470,97
--------------	----	----------------------

- Belanja	Rp	(3.046.631.426.464,06)
- Transfer	Rp	(524.327.592.129,00)
- Defisit	Rp	(111.933.644.122,09)
- Pembiayaan Netto	Rp	129.768.722.962,58
- Koreksi SiLPA	Rp	(287.059.613,00)
SiLPA Tahun Anggaran 2024	Rp	17.548.019.227,49

Rincian kas pembentuk SiLPA Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

	<u>Tahun Anggaran</u> <u>2024</u>	<u>Tahun Anggaran</u> <u>2023</u>
- Kas di Kas Daerah	5.725.309.574,79	137.659.217.241,37
- Kas di Bendahara Penerimaan	6.810.000,00	14.725.805,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	1.433.267,97	5.310.824,22
- Kas di BLUD	10.698.134.567,95	11.798.137.662,00
- Kas Dana BOS	0,00	231.629.445,90
- Kas Lainnya	10.307.851,20	34.705.537,92
- Kas Dana BOSP	1.106.023.965,58	0,00
SiLPA	17.548.019.227,49	149.743.726.516,41

Kas di kas daerah sebesar Rp5.725.309.574,79 merupakan dana yang telah ditentukan peruntukannya yang berasal dari sisa Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun anggaran 2024.

5.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tahun pelaporan, yang merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan komparatif dengan tahun sebelumnya.

Perubahan Saldo Anggaran Lebih periode Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	149.743.726.516,41	409.113.936.711,35
Penggunaan SAL (sebagai Penerimaan Pembiayaan)	(149.768.722.962,58)	316.046.143.553,18
Sub Total	(24.996.446,17)	93.067.793.158,17
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	17.835.078.840,49	149.743.726.516,41
Sub Total	17.810.082.394,32	242.811.519.674,58
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	24.996.446,17	(92.662.511.328,86)
Lain-lain	(287.059.613,00)	(405.281.829,31)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	17.548.019.227,49	149.743.726.516,41

5.2.2.1 Saldo Anggaran Lebih

31 Desember 2024

31 Desember 2023



Awal 149.743.726.516,41 409.113.936.711,35

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp149.743.726.516,41 merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2023.

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 sebesar Rp149.743.726.516,41 mengalami penurunan Rp259.370.210.194,94 atau 63,40% dari Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 sebesar Rp409.113.936.711,35.

5.2.2.2 Penggunaan SAL 31 Desember 2024 31 Desember 2023
(Penerimaan Pembiayaan) (149.768.722.962,58) (316.046.143.553,18)

Penggunaan SAL sebesar (Rp149.768.722.962,58) adalah untuk menutup defisit anggaran Tahun Anggaran 2024. Jumlah tersebut merupakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp149.743.726.516,41 dan penambahan saldo kas lainnya atas kas yang belum tersaji di tahun 2023 sebesar Rp24.996.446,17.

Penggunaan SAL tahun 2024 sebesar (Rp149.768.722.962,58) menurun Rp166.277.420.590,60 atau 52,61% dari Penggunaan SAL tahun 2023 sebesar (Rp316.046.143.553,18).

5.2.2.3 Sisa Lebih/Kurang 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Pembiayaan Anggaran 17.835.078.840,49 149.743.726.516,41
(SiLPA/SiKPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp17.835.078.840,49 merupakan selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja dan transfer, setelah memperhitungkan pembiayaan Neto.

SiLPA tahun 2024 sebesar Rp17.835.078.840,49 mengalami penurunan Rp131.908.647.675,92 atau 88,09% dari SiLPA tahun 2023 sebesar Rp149.743.726.516,41.

5.2.2.4 Koreksi Kesalahan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Pembukuan Tahun 24.996.446,17 (92.662.511.328,86)
Sebelumnya

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih. Dalam Tahun Anggaran 2024, koreksi kesalahan pembukuan sebesar Rp24.996.446,17 merupakan koreksi atas pengakuan kas dana BOSNAS, kas lainnya *Block Grant* dan kas dana BOP di bendahara satuan pendidikan menengah, seperti dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.53
Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jenis Kas	Satuan Pendidikan	Nilai (Rp)
Kas Dana BOSNAS	SMA 1 Peso	29.325.443,31
Kas Dana BOP	SMA 6 Malinau	(3.190.632,14)
Kas Dana <i>Blockgrant</i>	SMK 3 Tanjung Selor SMK 1 Tanjung Palas Tengah	(1.138.365,00)
Jumlah		24.996.446,17

5.2.2.5 Lain-lain 31 Desember 2024 31 Desember 2023
(287.059.613,00) (405.281.829,31)



Koreksi Ekuitas Lainnya - Lain-lain per 31 Desember 2024 senilai Rp287.059.613,00 merupakan pengurangan Sisa Anggaran Lebih atas pengembalian belanja yang dianggap tidak dilaksanakan dan kas yang tidak tersedia pada rekening bendahara pengeluaran pembantu.

5.2.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2024 17.548.019.227,49	31 Desember 2023 149.743.726.516,41
---------	----------------------------	---------------------------------------	--

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp17.548.019.227,49 merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2024, yaitu selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja dan transfer, setelah memperhitungkan pembiayaan neto dan merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan.

5.2.3 Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2024.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Posisi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2024 menunjukkan Aktiva dan Pasiva masing-masing adalah sebesar Rp8.585.620.356.198,58.

Jumlah Aktiva tersebut di atas terdiri dari:

Aset Lancar	Rp	762.967.788.345,45
Investasi Non Permanen	Rp	0,00
Investasi Permanen	Rp	264.361.766.466,00
Aset Tetap	Rp	10.441.040.514.386,53
(Akumulasi Penyusutan)	Rp	(3.020.739.613.793,87)
Aset Lainnya	Rp	137.989.900.794,47
Jumlah Aset	Rp	8.585.620.356.198,58

Jumlah Pasiva tersebut di atas terdiri dari

Kewajiban	Rp	341.534.627.798,08
Ekuitas	Rp	8.244.085.728.400,50
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	8.585.620.356.198,58

5.2.3.1	Aset Lancar	31 Desember 2024 762.967.788.345,45	31 Desember 2023 578.096.845.903,41
---------	-------------	--	--

Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp762.967.788.345,45 yang terdiri dari:

Tabel 5.54
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024



URAIAN	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	5.725.309.574,79	137.659.217.241,37
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.433.267,97	5.310.824,22
Kas di Bendahara Penerimaan	6.810.000,00	14.725.805,00
Kas di Bendahara BOS	-	231.629.445,90
Kas di Bendahara BOSP	1.106.023.965,58	-
Kas di BLUD	10.698.134.567,95	11.798.137.662,00
Kas Lainnya	130.045.251,20	34.705.537,92
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	298.000.000,00	3.147.000.000,00
Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak	159.034.220,00	170.452.310,00
Penyisihan Piutang Pajak	(15.753.234,20)	(9.967.913,50)
- Piutang Pajak Neto	143.280.985,80	160.484.396,50
Piutang Retribusi	121.393.853,34	61.280.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(33.511.500,00)	(23.872.500,00)
- Piutang Retribusi Neto	87.882.353,34	37.407.500,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	43.454.337.626,04	45.579.070.754,53
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(21.586.427.400,33)	(22.600.950.529,01)
- Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Neto	21.867.910.225,71	22.978.120.225,52
Piutang Transfer	164.799.761.000,00	7.518,00
Belanja Dibayar Dimuka	792.864.170,22	929.165.055,82
Piutang Lainnya	4.216.935.904,00	4.464.246.961,00
Persediaan	553.093.397.078,89	396.636.687.730,16
Jumlah	762.967.788.345,45	578.096.845.903,41

Rincian Aset Lancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.3.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024

31 Desember 2023

5.725.309.574,79

137.659.217.241,37

Saldo Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah tersimpan pada rekening giro BPD Kaltimara Cabang Tanjung Selor, dengan nomor rekening 0071200001. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 menurut Buku Besar sebesar Rp5.725.309.574,79 dan Rekening Koran sebesar Rp5.745.046.974,79, terdapat Kas Lainnya yang dipisahkan dari Kas di Kas Daerah yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah.

Sisa saldo dana yang telah ditentukan penggunaanya yang seharusnya tersaji pada saldo kas pemerintah daerah per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

- Sisa DAU	Rp	23.349.512.389,00
- Sisa DAK non Fisik	Rp	2.112.057.185,00



- Sisa DAK Fisik	Rp	10.457.865.238,00
- Sisa DBH Sawit	Rp	1.046.286.400,00
- Sisa DBH Pajak	Rp	273.547.034.623,00
- Sisa DBH DR	Rp	337.890.271.413,00
Kas ditentukan penggunaanya	Rp	648.403.027.248,00

Saldo dari masing-masing sumber dana tersebut telah digunakan sementara untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas daerah yang mendesak dan membutuhkan pendanaan segera, dengan memanfaatkan kas yang tersedia saat itu, yaitu kas yang penggunaannya telah ditentukan sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran 2024, saldo kas yang tersisa di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp5.725.309.574,79 hanya berasal dari sisa penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR).

5.2.3.1.2

Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024

1.433.267,97

31 Desember 2023

5.310.824,22

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2024 adalah merupakan sisa kas Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Tabel 5.55
Rincian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Sisa Kas BOP di SMA/SMK/SLB	1.433.267,97	5.310.824,22
2	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah	0,00	0,00
	Jumlah	1.433.267,97	5.310.824,22

Saldo BOP sebesar Rp1.433.267,97 masih terdapat di rekening sekolah sampai dengan 31 Desember 2024 dan belum disetorkan ke Kas Daerah. Rincian disajikan pada **Lampiran 1**.

5.2.3.1.3

Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2024

6.810.000,00

31 Desember 2023

14.725.805,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.56
Rincian Kas Bendahara Penerimaan

No.	Perangkat Daerah	Jenis Pendapatan	Keterangan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	UPT Pelabuhan Tengayu II	Retribusi	Penyetoran ke Kasda tanggal 2 Januari 2024 & 2 Januari 2025	460.000,00	14.725.805,00
2	Badan Penghubung	Retribusi	Penyetoran ke Kasda tanggal 3 Januari 2025	2.500.000,00	0,00
3	RSUD dr. H. Jusuf SK	Retribusi	Penyetoran ke Kasda tanggal 6 Januari 2025	3.850.000,00	0,00
	Jumlah			6.810.000,00	14.725.805,00

5.2.3.1.4

Kas di BLUD

31 Desember 2024

10.698.134.567,95

31 Desember 2023

11.798.137.662,00

Kas di BLUD sebesar Rp10.698.134.567,95 merupakan saldo Kas di RSUD dr. H. Jusuf SK dan di beberapa Satuan Pendidikan Menengah per 31 Desember 2024, yang terdiri dari:

Tabel 5.57

Rincian Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas Tunai dan Kas Giro pada BPD Kaltimara Cabang Tarakan No Rek. 0051505161 atas nama BEND. BLUD DR. H. JUSUF SK	10.445.442.531,72	11.741.477.868,11
2	Kas BLUD Sekolah	252.692.036,23	56.659.793,89
Jumlah		10.698.134.567,95	11.798.137.662,00

Rincian Kas di BLUD disajikan pada **Lampiran 1**.

5.2.3.1.5	Kas di Bendahara BOS	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		0,00	231.629.445,90

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp0,00 merupakan saldo Kas Bantuan Operasional Sekolah Pusat di Bendahara Satuan Pendidikan Menengah yang belum dibelanjakan per 31 Desember 2024. Pos akun Kas di Bendahara BOS tidak lagi digunakan dan dialihkan menggunakan pos akun Kas di Bendahara BOSP mengikuti pemutakhiran Permendagri 90 tahun 2019.

5.2.3.1.6	Kas di Bendahara BOSP	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		1.106.023.965.58	0.00

Kas di Bendahara BOSP sebesar Rp1.106.023.965,58 merupakan saldo Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dari Pemerintah Pusat di Bendahara Satuan Pendidikan Menengah yang belum dibelanjakan sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Kas di Bendahara BOSP disajikan pada **Lampiran 1**.

5.2.3.1.7	Kas Lainnya	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		10.307.851,20	34.705.537,92

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.307.851,20 merupakan saldo akhir dana *blockgrant* pada satuan pendidikan menengah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.2.3.1.8	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2024</u> 417.737.400,00	<u>31 Desember 2023</u> 3.147.000.000,00
------------------	---	---	---

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 tersaji sebesar Rp.3.147.000.000,00 yang merupakan saldo Dana beasiswa Kaltara Unggul yang telah disalurkan pada tahun 2024. Saldo kas lainnya di bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp417.737.400,00 terdiri atas Rp9.000.000,00 merupakan Utang Jangka Pendek Dinas Perhubungan atas Izin Trayek, Rp.3.228.000 merupakan Penerimaan Kas UPT Bapenda Malinau atas kesalahan Pendapatan PKB yang seharusnya disetorkan ke Jasa Raharja, Rp7.509.400,00 merupakan Kelebihan Setoran dari Pemkab Malinau saat membayar PKB, dan Rp100.000.000,00 atas salah setor ke Rekening BLUD yang seharusnya di setorkan ke Rekening RSUD dr. H. Jusuf SK.

Tabel 5.58
Rincian Saldo Kas Lainnya



No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Jangka Pendek atas Izin Trayek	9.000.000,00	0,00
2	Penerimaan Kas atas Kesalahan Pendapatan PKB	3.228.000,00	0,00
3	Penerimaan Kas atas Kelebihan Setor Pemkab Malinau	7.509.400,00	0,00
4	Salah Setor Ke Rekening Bank RSUD dr. H. Jusuf SK	100.000.000,00	0,00
5	Kas BTT Dana Sosial pada Biro Kesejahterann Rakyat	298.000.000,00	0,00
6	Dana Beasiswa Kaltara Unggul	0,00	3.147.000.000,00
Jumlah		417.737.400,00	3.147.000.000,00

Rincian lebih lanjut saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.

5.2.3.1.9Setara Kas

31 Desember 20240,00

31 Desember 20230,00

Setara Kas sebesar Rp0,00 disebabkan oleh Penempatan Deposito Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah dicairkan ke Kas Daerah sebelum 31 Desember 2024 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember 2024.

Tabel 5.59
Rincian Saldo Setara Kas

No	Bank	Jumlah Penempatan Deposito	Jumlah Pencairan Deposito	Deposito 31 Desember 2024
1	Bankaltim Kantor Cabang Tanjung Selor	210.000.000.000,00	210.000.000.000,00	0,00
2	BNI KCP Tanjung Selor	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
3	BRI Cabang Tanjung Selor	135.000.000.000,00	135.000.000.000,00	0,00
4	BTN Cabang Tarakan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00
Jumlah Deposito		495.000.000.000,00	495.000.000.000,00	0,00

5.2.3.1.10Piutang Pajak

31 Desember 2024159.034.220,00

31 Desember 2023170.452.310,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pajak	159.034.220,00	170.452.310,00
Penyisihan Piutang Pajak	(15.753.234,20)	(9.967.913,50)
Piutang Pajak Neto	143.280.985,80	160.484.396,50

a. Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 merupakan pajak daerah yang belum dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak, yaitu Pajak Air Permukaan senilai Rp159.034.220,00. Berikut rincian piutang air permukaan berdasarkan tahun piutang.

Tabel 5.60
Rincian Piutang Pajak Air Permukaan berdasarkan Tahun Piutang

No	Tahun Penetapan Pajak Air Permukaan	Saldo s.d. 2024 (Rp)
1	2016	1.281.253,00
2	2017	2.013.515,00
3	2018	2.225.403,00
4	2019	2.172.689,00
5	2020	3.453.329,00
6	2021	3.269.467,00
7	2022	-
8	2023	46.989.762,00
9	2024	97.628.802,00
	Jumlah	159.034.220,00

Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp159.034.220,00 merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang telah jatuh tempo tetapi per 31 Desember 2024 belum dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61
Rincian Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Bapenda UPT Bulungan	135.759.017,00
Bapenda UPT Nunukan	12.559.503,00
Bapenda UPT Malinau	932.300,00
Bapenda UPT Tarakan	9.783.400,00
Bapenda UPT Tana Tidung	0,00
Jumlah	159.034.220,00

b. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang adalah akun di neraca yang berguna untuk menjaga agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yang dihitung dengan persentase tertentu berdasarkan umurnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan unsur pengurang dari piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar, umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Kualitas Piutang Kurang Lancar, umur piutang 1-2 tahun;
- Kualitas Piutang Diragukan, umur piutang 2-5 tahun;
- Kualitas Piutang Macet, umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- Kualitas Lancar sebesar 0% (nol persen);
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen);





- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus persen)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.753.234,20 terinci sebagai berikut:

Tabel 5.62
Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024

No.	Piutang Pajak	Penyisihan Piutang (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4	Pajak Air Permukaan	(15.753.234,20)
Jumlah		(15.753.234,20)

Rincian perhitungan Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 2.

Adapun kualitas penyisihan tidak tertagih dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.63
Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Piutang Pajak Air Permukaan

No.	Kualitas Piutang	% Tidak Tertagih	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,00%	97.628.802,00
2	Kurang Lancar	10,00%	46.989.762,00
3	Diragukan	50,00%	6.722.796,00
4	Macet	100,00%	7.692.860,00
Jumlah			159.034.220,00

c. Piutang Pajak Neto

Saldo Piutang Pajak Neto adalah piutang pajak setelah dikurangi Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Pajak Neto sebesar Rp143.280.985,80 dengan rincian:

Tabel 5.64
Saldo Piutang Pajak Neto per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto
		(Rp)		(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Air Permukaan	159.034.220,00	(15.753.234,20)	143.280.985,80
Jumlah		159.034.220,00	(15.753.234,20)	143.280.985,80

5.2.3.1.11 Piutang Retribusi

31 Desember 2024
121.393.853,34

31 Desember 2023
61.280.000,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp121.393.853,34 adalah retribusi atas sewa rumah dinas UPT Bapenda Bulungan dan Dinas Kehutanan, retribusi tempat penginapan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta retribusi pelayanan kepelabuhanan UPTD Tengayu II di Tarakan yang belum dilunasi pembayarannya dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.65
Rincian Piutang Retribusi Tahun 2024

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Dinas Kehutanan	53.250.000,00	0,00
DPUPRPKP	25.058.503,34	0,00
UPTD Tengayu II	39.595.350,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	540.000,00
UPTD Bapenda Kab. Bulungan	3.490.000,00	60.740.000,00
Jumlah	121.393.853,34	61.280.000,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Retribusi	121.393.853,34	61.280.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(33.511.500,00)	(23.872.500,00)
Piutang Retribusi Neto	87.882.353,34	37.407.500,00

Adapun perhitungan penyisihan piutang retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.66
Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2024

Umur Piutang	Penyisihan Piutang	Jumlah	Nilai Penyisihan	Nilai Buku per 31 Desember 2024
0-1 Tahun	0%	57.328.853,34	0,00	57.328.853,34
> 1 - 2 Tahun	10%	17.490.000,00	1.749.000,00	15.741.000,00
> 2 - 5 Tahun	50%	29.625.000,00	14.812.500,00	14.812.500,00
> 5 Tahun	100%	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00
Jumlah		121.393.853,34	33.511.500,00	87.882.353,34

5.2.3.1.12	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 43.454.337.626,04	31 Desember 2023 45.579.070.754,53
------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp43.454.337.626,04, disajikan sebagai berikut:

Table 5.67
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian Jenis Piutang Lainnya	Piutang Bruto per 31 Desember 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto per 31 Desember 2024 (Rp)	Piutang Neto per 31 Desember 2023
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	261.986.301,00	0,00	261.986.301,00	86.575.342,46
Piutang PPN Jasa Konsultasi	22.101.127,00	0,00	22.101.127,00	22.101.127,00
Piutang Pendapatan BLUD	43.170.250.198,04	21.586.427.400,33	21.583.822.797,71	22.869.443.756,06



Jumlah	43.454.337.626,04	21.586.427.400,33	21.867.910.225,71	22.978.120.225,52
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp261.986.301,00 merupakan piutang atas kekurangan pembayaran bunga atas penempatan deposito pada Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Piutang PPN Jasa Konsultansi sebesar Rp22.101.127,00 merupakan kelebihan pembayaran PPN atas Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Pelabuhan Tenggayu I Tahap III Tahun 2018.

Piutang pendapatan BLUD sebesar Rp43.170.250.198,04 merupakan saldo piutang usaha berupa tagihan atas jasa layanan yang telah diberikan RSUD H. Jusuf SK kepada pasien. Terdapat pelunasan piutang pendapatan pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp206.490.666.881,85.

Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 3A.**

Kualitas penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 5.68
Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Piutang Lain-Lain yang Sah

No.	Kualitas Piutang	Saldo
1	Lancar (dibawah 1 Tahun - 0%)	20.858.659.001,28
2	Kurang Lancar (1-2 Tahun - 10%)	587.275.192,70
3	Diragukan (2-5 Tahun - 50%)	393.232.246,00
4	Macet (Diatas 5 Tahun - 100%)	21.331.083.758,06
	Total	43.170.250.198,04

5.2.3.1.13	Piutang Transfer	<u>31 Desember 2024</u> 164.799.761.000,00	<u>31 Desember 2023</u> 7.518,00
------------	------------------	---	-------------------------------------

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp164.799.761.000,00 berdasarkan PMK Nomor 89 Tahun 2024. Rincian lebih lanjut Piutang Transfer per tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3B.**

5.2.3.1.14	Piutang Lainnya	<u>31 Desember 2024</u> 4.216.935.904,00	<u>31 Desember 2023</u> 4.464.246.961,00
------------	-----------------	---	---

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut :

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Lainnya	4.216.935.904,00	4.464.246.961,00
Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Piutang Lainnya Neto	4.216.935.904,00	4.464.246.961,00



Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.216.935.904,00. Piutang lainnya merupakan Piutang Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara (*multiyears*), Pembangunan Jalan Pendekat KIPi Tanah Kuning ruas jalan Tanjung Selor – Sajau Binai, Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Polda Kalimantan Utara oleh Dinas PUPR-PERKIM, serta Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Pembangunan Ruang Guru di SMAN 16 Malinau oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 5.69
Rincian Piutang Lainnya

No	Uraian	Piutang Lainnya Per 31 Desember 2024	Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023
1	Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Tahap IX	0,00	400.716.417,00
2	Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara (<i>Multiyears</i>)	1.421.902.757,00	1.421.902.757,00
3	Uang Muka atas Pekerjaan MK Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara (<i>Multi Years</i>)	417.586.296,00	417.586.296,00
4	Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur	0,00	695.777.760,00
5	Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Pendekat KIPi Tanah Kuning Ruas Jalan Tanjung Selor - Sajau Binai	1.528.263.731,00	1.528.263.731,00
6	Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Polda Kalimantan Utara	423.144.000,00	0,00
7	Uang Muka atas Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 16 Malinau	178.754.280,00	0,00
8	Uang Muka atas Pembangunan Ruang Guru SMA 16 Malinau	247.284.840,00	0,00
Jumlah		4.216.935.904,00	4.464.246.961,00

5.2.3.1.15 Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2024 31 Desember 2023
792.864.170,22 929.165.055,82

Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp792.864.170,22 merupakan biaya- biaya barang dan jasa pada perangkat daerah dan RSUD yang telah dibayar namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima atau belum dimanfaatkan seluruhnya, terdiri dari:

- Premi Asuransi	Rp	47.758.068,75
- Sewa Server	Rp	162.154.268,13
- Sewa Gedung	<u>Rp</u>	<u>582.951.833,34</u>
Jumlah	Rp	792.864.170,22

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 4A – 4C.

5.2.3.1.16 Persediaan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
553.093.397.078,89 396.636.687.730,16

Saldo Persediaan sebesar Rp553.093.397.078,89 merupakan persediaan barang atau perlengkapan pada perangkat daerah dan RSUD yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per 31 Desember 2024. Adapun saldo Persediaan per 31 Desember 2024 terinci sebagai berikut:





Table 5.70
Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Bahan	4.870.356.955,19	4.915.045.360,19
Suku Cadang	428.049.888,29	282.189.906,10
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	6.808.499.308,60	6.335.244.219,40
Obat-obatan	12.804.144.044,69	16.553.400.317,35
Natura dan Pakan	316.664.860,00	405.427.543,00
Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan	527.013.670.022,12	368.145.380.384,12
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	852.012.000,00	0,00
Jumlah	553.093.397.078,89	396.636.687.730,16

Penjelasan masing-masing jenis Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Persediaan bahan sebesar Rp4.870.356.955,19 merupakan persediaan berupa bahan bangunan dan kontruksi, bahan kimia, bahan peledak, bahan bakar dan pelumas, bahan/bibit tanaman, isi tabung gas dan bahan lainnya di perangkat daerah yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum digunakan atau didistribusikan;
- b. Persediaan suku cadang sebesar Rp428.049.888,29 berupa suku cadang alat kedokteran, laboratorium, pertanian dan suku cadang lainnya yang belum digunakan;
- c. Persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp6.808.499.308,60 merupakan persediaan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, persediaan dokumen/administrasi tender, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik, perlengkapan dinas, perlengkapan pendukung olahraga, souvenir/cendera mata, maupun alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya yang ada pada perangkat daerah sampai dengan 31 Desember 2024;
- d. Persediaan obat-obatan sebesar Rp12.804.144.044,69 terdapat pada:

Table 5.71
Rincian Persediaan Obat-Obatan

Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Kesehatan	5.739.719.817,51	8.895.912.115,36
RSUD dr. H. Jusuf SK (BLUD)	7.028.120.038,18	7.564.052.211,99
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	59.480.000,00
UPTD. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	3.043.398,00	0,00
UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	2.000.000,00	0,00
UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	773.670,00	773.670,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.468.081,00	9.976.680,00
UPTD KPH. Tarakan	21.931.200,00	21.117.800,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.087.840,00	2.087.840,00
Jumlah	12.804.144.044,69	16.553.400.317,35

- e. Persediaan natura dan pakan sebesar Rp316.664.860,00 merupakan makanan atau sembako, minuman, pakan hewan yang masih tersisa per 31 Desember 2024;
- f. Persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp527.013.670.022,12 adalah barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain, tetapi sampai



dengan 31 Desember 2024 belum diserahkan, yaitu:

- | | | |
|---|----|--------------------|
| - Belanja bantuan hibah bangunan yang diserahkan ke SMA IT Ulul Albab dan SMK Terpadu Citra Bangsa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. | Rp | 5.117.958.927,00 |
| - Peralatan kesehatan berupa <i>vaccine carrier</i> dan <i>pulse oxymeter</i> pada Dinas Kesehatan yang akan diserahkan ke Kabupaten/Kota. | Rp | 61.971.000,00 |
| - Gedung kantor, peralatan dan mesin, jalan dan irigasi dan bahan material yang akan diserahkan kepada Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah atau Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. | Rp | 508.826.843.503,12 |
| - Sembako, alat-alat kesehatan dan alat-alat dapur lainnya yang akan diserahkan kepada masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka bantuan kebencanaan di Kabupaten/Kota. | Rp | 501.617.920,00 |
| - Sembako yang akan diserahkan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial dalam rangka bantuan Pencegahan Kemiskinan dan Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten/Kota. | Rp | 433.388,00 |
| - Peralatan pendukung untuk mencetak e-KTP berupa blanko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan diserahkan kepada Kabupaten/Kota. | Rp | 346.589.698,00 |
| - Pekerjaan pemeliharaan Dermaga Ancam dan pekerjaan peningkatan Jembatan Dermaga Tanjung Selor-Pujungan yang akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Dinas Perhubungan. | Rp | 3.337.001.383,00 |
| - Pekerjaan pengecatan lapangan Agathis, rehabilitasi taman makam pahlawan, peralatan olahraga dan alat rumah tangga lainnya yang akan diserahkan ke Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota pada Dinas Pemuda dan Olahraga. | Rp | 424.685.000,00 |
| - Pekerjaan pengecatan dan penataan siring Tanjung Selor, rehabilitasi makam Sultan Kaharuddin II dan Al Habib Abdurahman Bin Abdullah Bil Faqih Desa Baratan serta Makam Said Abdullah Bil Faqih, pembangunan ruang terbuka publik Tepian Kayan, pengukiran dan penataan Kulteka Tanjung Selor, pengecatan dan penataan siring Tanjung Palas, pengadaan sarana dan prasarana | Rp | 3.739.915.030,00 |

nihil.

5.2.3.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2024 264.361.766.466,00	31 Desember 2023 248.454.509.623,00
-----------	-----------------------------------	--	--

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Daerah adalah Penyertaan Modal kepada BPD Kaltimara didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan Penyertaan modal kepada 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Benuanta Kaltara Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Benuanta Kaltara Jaya dan PT Migas Kaltara Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya.

Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 terdapat penambahan Rp16.174.400.894,69 yang terdiri atas penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada PT BPD Kaltimara sebesar Rp20.000.000.000,00 dan berkurangnya nilai investasi atas koreksi nilai kerugian PT. Migas Kaltara Jaya Tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan PT Migas Kaltara Jaya *Audited* Tahun 2023 sebesar Rp4.092.743.157,00. Nilai investasi jangka panjang permanen 2024 belum menyajikan nilai investasi dari laporan keuangan PT Benuanta Kaltara Jaya dan PT Migas Kaltara Jaya Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan dari kedua BUMD tersebut masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik dan belum dapat diintegrasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 5.73
Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2024

No.	Uraian	Persentase kepemilikan	Saldo 1 Januari 2024 (Rp)	Koreksi Laba/Rugi Investasi Tahun Sebelumnya (Rp)	Penambahan Investasi (Rp)	Laba/Rugi Investasi (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
1	PT BPD Kaltimara	3,58% (metode biaya)	235.000.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00	255.000.000.000,00
2	PT Benuanta Kaltara Jaya	100% (metode ekuitas)	5.467.296.921,00	0,00	0,00	0,00	5.467.296.921,00
3	PT Migas Kaltara Jaya	100% (metode ekuitas)	7.987.212.702,00	(4.092.743.157,00)	0,00	0,00	3.894.469.545,00
Jumlah			248.454.509.623,00	(4.092.743.157,00)	20.000.000.000,00	0,00	264.361.766.466,00

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat Penyertaan Modal terhadap PT. BPD Kaltimara sebesar Rp20.000.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.29/2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

Nilai investasi pada PT. Benuanta Kaltara Jaya tidak mengalami perubahan dari Tahun 2022 dikarenakan permasalahan penyajian laporan keuangan perusahaan akibat dari peralihan tanggung jawab dari manajemen Periode 2019-2022 ke manajemen Periode 2022-2025. Nilai yang disajikan pada laporan keuangan Tahun 2021 tidak dapat diyakini oleh manajemen baru untuk disajikan kembali sebagai





saldo awal laporan keuangan Tahun 2022. Konsolidasi data dan penyajian kembali laporan keuangan PT. Benuanta Kaltara Jaya sedang diupayakan agar kondisi keuangan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.3.3 Aset Tetap 31 Desember 2024 31 Desember 2023
7.420.300.900.592,66 7.040.506.265.064,41

Aset Tetap pada Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.420.300.900.592,66. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.040.506.265.064,41 maka jumlah Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp379.794.635.528,25 atau 13,49%.

Aset Tetap terdiri dari aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74
Rekapitulasi Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2024

No.	Klasifikasi	Saldo per 1 Januari 2024	Mutasi Tambah Tahun 2024	Mutasi Kurang Tahun 2024	Saldo per 31 Desember 2024
1	Tanah	1.876.910.986.015,12	55.020.993.787,87	5.934.369.472,00	1.925.997.610.330,99
2	Peralatan dan Mesin	1.403.150.044.281,00	204.968.327.472,28	60.750.713.118,10	1.547.367.658.635,18
3	Gedung dan Bangunan	2.135.668.950.617,39	476.770.435.433,00	171.248.704.742,31	2.441.190.681.308,08
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.139.207.051.665,98	312.762.778.362,31	213.020.603.757,00	3.238.949.226.271,29
5	Aset Tetap Lainnya	22.690.023.838,01	3.733.957.586,02	1.236.860.798,02	25.187.120.626,01
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	1.277.389.663.931,64	211.891.521.875,50	226.932.968.592,16	1.262.348.217.214,98
	Nilai Perolehan Aset Tetap	9.855.016.720.349,14	1.265.148.014.516,98	679.124.220.479,59	10.441.040.514.386,53
7	Akumulasi Penyusutan	(2.814.510.455.284,73)	(324.627.070.164,24)	(118.397.911.655,10)	(3.020.739.613.793,87)
	Nilai Buku Aset Tetap	7.040.506.265.064,41	940.520.944.352,74	560.726.308.824,49	7.420.300.900.592,66

Mutasi tambah dan mutasi kurang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.75
Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2024

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023		9.855.016.720.349,14
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA	701.979.243.953,00
2	Penerimaan Hibah Barang	24.326.057.765,87
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	38.062.392.729,31
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	198.750.900.690,00
5	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	217.248.044.877,00
6	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	3.763.838.977,09
7	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	14.245.356.108,00
8	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	7.251.772.644,00
9	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	6.000.000,00
10	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	12.618.995.156,00
11	Kurang catat saldo awal tahun	645.367.968,41
12	Perolehan Aset dari Utang/Piutang	3.948.071.474,50



No.	Keterangan	Nilai (Rp)
13	Mutasi Barang dari SKPD lain	43.187.587.673,80
14	Barang dibawah Kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	4.872.987.625,00
15	Mutasi Tambah Dari Kab/Kota/Pemerintah Pusat karena amanat Peraturan Perundang-Undangan (P3D)	5.208.577.800,00
16	Salah Pos Belanja Hibah (Seharusnya Belanja Modal)	515.000.000,00
Jumlah		1.276.630.195.441,98
Mutasi Kurang		
1	Penghapusan Rusak Berat/Hilang	1.654.835.128,32
2	Pemberian Hibah Barang (Sudah ada SK Penghapusan)	4.228.613.900,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	38.062.392.729,31
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	198.750.900.690,00
5	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	217.248.044.877,00
6	Reklasifikasi dari Aset tetap dikarenakan Aset Rusak Berat/Hilang	1.187.110.730,00
7	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	23.659.368.140,00
8	Pemberian Hibah Barang (Belum terbit SK Penghapusan, Reklasifikasi ke Aset Lainnya)	136.959.424.561,00
9	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	504.713.852,00
10	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan jasa Persediaan)	7.324.358.660,00
11	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi)	4.374.586.873,00
12	Lebih catat saldo awal tahun	15.779.100,00
13	Pembayaran Utang Aset Tetap tahun sebelumnya	7.661.900.745,16
14	Mutasi Kurang ke SKPD Lain	43.187.587.673,80
15	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	4.872.987.625,00
16	Pemindahtanganan Aset melalui penjualan (sudah ada SK Penghapusan)	487.757.000,00
17	Uang Muka Pengadaan Aset Tetap yang masih di Pihak Ketiga	426.039.120,00
Jumlah		690.606.401.404,59
Kenaikan/(Penurunan)		690.606.401.404,59
Saldo per 31 Desember 2024		10.441.040.514.386,53

Rincian lebih lanjut mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengalihan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Dalam rangka pelaksanaan undang-undang tersebut, telah diserahkan aset tetap dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi pada Tahun 2017, namun demikian masih ada sebagian aset tetap yang masih belum diserahkan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima aset tetap hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) pada tahun 2024 dari Pemerintah Kota Tarakan melalui Berita Acara Serah Terima Sarana dan Prasarana dari Pemerintah Kota Tarakan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 00.2.3.2/1194/BPKPAD dan Nomor : 00.2.3.2/337/SETDA/2024 tertanggal 18 Maret 2024 sebagai tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kota Tarakan pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 5.76
Rincian P3D Aset Tetap dari Pemerintah Kota Tarakan



No	Satuan Pendidikan	Gedung dan Bangunan
1	SMAN 1 Tarakan	80.950.000,00
2	SMAN 2 Tarakan	5.127.627.800,00
Jumlah		5.208.577.800,00

Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerima hibah aset tetap, baik hibah dari masyarakat maupun hibah dari kementerian/lembaga. Hibah aset tetap tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.77
Rincian Hibah Aset Tetap dari Masyarakat/Kementerian/Lembaga

No	Perangkat Daerah	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan/Jembatan/Irigasi/Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	0,00	29.327.000,00	0,00	0,00	0,00	29.327.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.355.261.108,87	1.245.848.000,00	180.000.000,00	0,00	8.345.000,00	6.789.454.108,87
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.083.756.000,00	0,00	0,00	0,00	1.083.756.000,00
Jumlah		5.355.261.108,87	2.828.931.000,00	180.000.000,00	0,00	8.345.000,00	8.372.537.108,87

Hibah aset tetap yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

- Hibah peralatan dan mesin berupa laptop dan motor dari Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan;
- Hibah Tanah dari Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan masyarakat untuk pembangunan sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Hibah peralatan dan mesin berupa peralatan praktik sekolah dari pihak ketiga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Hibah gedung bangunan berupa mushola dari pihak ketiga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan rumah susun dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman;
- Hibah aset tetap lainnya berupa buku-buku dari pihak ketiga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Hibah peralatan dan mesin berupa *speedboat* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
- Hibah peralatan dan mesin berupa peralatan penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5.2.3.3.1	Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		1.925.997.610.330,99	1.876.910.986.015,12

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 merupakan nilai perolehan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara termasuk di dalam aset tetap tanah adalah tanah di bawah badan jalan.

Dari saldo tanah per 31 Desember 2024 terdapat aset tetap tanah yang sedang



dalam proses tukar menukar aset dengan PT KIPI sebesar Rp43.030.255.000,00.

Dibandingkan saldo Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.876.910.986.015,12, maka Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp49.086.624.315,87 atau 2,62% dengan uraian:

Tabel 5.78
Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2024 – Tanah

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023		1.876.910.986.015,12
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA	36.362.332.622,00
2	Penerimaan Hibah Barang	5.355.261.108,87
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap	11.747.868.100,00
4	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	85.000.000,00
5	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	900.043.798,00
6	Kurang catat saldo awal tahun	570.488.159,00
Jumlah		55.020.993.787,87
Mutasi Kurang		
1	Pemberian Hibah Barang (Sudah ada SK Penghapusan)	2.333.613.900,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	98.840.372,00
3	Pemberian Hibah Barang (Belum terbit SK Penghapusan, Reklasifikasi ke Aset Lainnya)	3.501.915.200,00
Jumlah		5.934.369.472,00
Kenaikan/(Penurunan)		49.086.624.315,87
Saldo per 31 Desember 2024		1.925.997.610.330,99

Rincian saldo Tanah per masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.79
Rincian Aset Tetap Tanah Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Saldo 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	226.151.460.035,17
2	Dinas Kesehatan	8.378.953.950,00
3	RSUD dr. H. Jusuf SK	11.904.517.200,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	1.577.047.265.281,82
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
7	Dinas Sosial	211.620.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	848.579.600,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
14	Dinas Perhubungan	36.452.697.572,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	3.456.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.662.178.000,00
20	Dinas Pariwisata	0,00

No	Perangkat Daerah	Saldo 31 Desember 2024
21	Dinas Kehutanan	704.662.850,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM	8.171.984.000,00
24	Sekretariat Daerah	3.995.284.500,00
25	Sekretariat DPRD	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	0,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.938.318.797,00
28	Badan Pendapatan Daerah	10.118.104.545,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	0,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00
32	Badan Penghubung	22.408.528.000,00
33	Inspektorat	0,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
Jumlah		1.925.997.610.330,99

5.2.3.3.2	Peralatan dan Mesin	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		1.547.367.658.635.18	1.403.150.044.281.00

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Dibandingkan saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp1.403.150.044.281,00 maka Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp144.217.614.354,18 atau 10,28%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.80

Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2024 - Peralatan dan Mesin

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023		1.403.150.044.281,00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA	163.713.917.310,00
2	Penerimaan Hibah Barang	2.990.280.000,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	5.286.587.946,00
4	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	1.735.398.000,00
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	3.209.881.237,09
6	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	11.719.192.774,00
7	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	852.328.294,00
8	Kurang catat saldo awal tahun	74.879.809,41
9	Perolehan Aset dari Utang/Piutang	56.250.000,00
10	Mutasi Barang dari SKPD lain	14.950.879.011,78
11	Barang dibawah Kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	1.740.907.185,00
Jumlah		206.330.501.567,28
Mutasi Kurang		
1	Penghapusan Rusak Berat/Hilang	799.835.128,32
2	Pemberian Hibah Barang (Sudah ada SK Penghapusan)	295.000.000,00



No.	Keterangan	Nilai (Rp)
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	16.425.123.415,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	131.566.000,00
5	Reklasifikasi dari Aset tetap dikarenakan Aset Rusak Berat/Hilang	214.301.580,00
6	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	22.306.462.400,00
7	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	103.982.809,00
8	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan jasa Persediaan)	563.971.560,00
9	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi)	4.087.101.124,00
10	Lebih catat saldo awal tahun	6.000.000,00
11	Mutasi Kurang ke SKPD lain	14.950.879.011,78
12	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	1.740.907.185,00
13	Pemindahtanganan Aset melalui penjualan (sudah ada SK Penghapusan)	487.757.000,00
Jumlah		62.112.887.213,10
Kenaikan/(Penurunan)		144.217.614.354,18
Saldo per 31 Desember 2024		1.547.367.658.635,18

Rincian saldo Peralatan dan Mesin per masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.81
Rincian Peralatan dan Mesin Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Saldo 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	316.263.642.014,24
2	Dinas Kesehatan	29.300.316.677,00
3	RSUD dr. H. Jusuf SK	527.133.763.265,37
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	102.013.157.710,33
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.243.891.286,24
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.341.644.038,00
7	Dinas Sosial	6.555.698.702,96
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.270.992.487,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.409.899.100,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.388.287.312,50
11	Dinas Lingkungan Hidup	13.618.485.269,20
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.615.899.604,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.022.804.081,00
14	Dinas Perhubungan	43.639.168.480,66
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	23.498.053.715,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.039.934.726,76
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.515.069.780,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.582.721.645,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.115.257.799,00
20	Dinas Pariwisata	4.032.949.280,00
21	Dinas Kehutanan	98.863.907.630,50
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.811.273.126,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM	10.168.204.892,00
24	Sekretariat Daerah	140.086.365.116,41
25	Sekretariat DPRD	21.975.955.792,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	8.914.567.023,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	19.379.138.071,00
28	Badan Pendapatan Daerah	28.264.941.187,60
29	Badan Kepegawaian Daerah	8.448.566.307,00



No	Perangkat Daerah	Saldo 31 Desember 2024
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.172.016.266,66
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.989.433.675,00
32	Badan Penghubung	25.094.282.122,00
33	Inspektorat	9.011.977.151,75
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.585.393.300,00
Jumlah		1.547.367.658.635,18

5.2.3.3.3 Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
2.441.190.681.308,08 2.135.668.950.617,39

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, yang meliputi harga beli atau nilai pembangunan, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya konstruksi meliputi nilai kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan konstruksi dan dibayar kepada pihak selain dari kontraktor.

Dibandingkan saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp2.135.668.950.617,39 maka Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp305.521.730.690,69 atau 14,31%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.82
Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2024 – Gedung dan Bangunan

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023		2.135.668.950.617,39
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA	208.505.767.057,00
2	Penerimaan Hibah Barang	15.972.171.657,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	16.258.100.000,00
4	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	215.512.646.877,00
5	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	1.139.946.771,00
6	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	480.178.600,00
7	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	1.309.865.389,00
8	Salah Pos Belanja Hibah (Seharusnya Belanja Modal)	415.000.000,00
9	Perolehan Aset dari Utang/Piutang	310.098.550,00
9	Mutasi Barang dari SKPD lain	20.118.282.507,00
10	Mutasi Tambah Dari Kab/Kota/Pemerintah Pusat karena amanat Peraturan Perundang-Undangan (P3D)	5.208.577.800,00
Jumlah		485.230.635.208,00
Mutasi Kurang		
1	Penghapusan Rusak Berat/Hilang	855.000.000,00
2	Pemberian Hibah Barang (Sudah ada SK Penghapusan)	1.600.000.000,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	19.851.770.958,31
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	129.142.329.620,00
5	Reklasifikasi dari Aset tetap dikarenakan Aset Rusak Berat/Hilang	972.809.150,00
6	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.352.905.740,00
7	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	225.898.043,00
8	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan jasa Persediaan)	5.336.908.500,00
9	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi)	252.999.999,00

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
10	Mutasi Kurang ke OPD lain	20.118.282.507,00
Jumlah		179.708.904.517,31
Kenaikan/(Penurunan)		305.521.730.690,69
Saldo per 31 Desember 2024		2.441.190.681.308,08

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.83
Rincian Gedung dan Bangunan Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Saldo 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	853.622.985.349,00
2	Dinas Kesehatan	28.414.663.476,84
3	RSUD dr. H. Jusuf SK	487.191.566.057,29
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	609.597.002.871,11
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	179.069.848,00
7	Dinas Sosial	4.720.659.986,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.049.919.505,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	601.839.700,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
14	Dinas Perhubungan	86.407.107.581,41
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	22.303.622.800,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.935.419.036,67
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.334.137.985,25
20	Dinas Pariwisata	121.682.000,00
21	Dinas Kehutanan	23.817.110.291,06
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21.688.035.757,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM	55.734.289.011,45
24	Sekretariat Daerah	0,00
25	Sekretariat DPRD	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	0,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	182.926.562.892,00
28	Badan Pendapatan Daerah	19.401.533.680,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	0,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00
32	Badan Penghubung	388.358.480,00
33	Inspektorat	755.115.000,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
Jumlah		2.441.190.681.308,08

5.2.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2024
3.238.949.226.271,29

31 Desember 2023
3.139.207.051.665,98

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi

biaya perolehan dan biaya konstruksi sampai jaringan tersebut siap digunakan/dimanfaatkan.

Dari saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 terdapat aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang sedang dalam proses tukar menukar aset dengan PT KIPi sebesar Rp147.297.267.783,46.

Dibandingkan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp3.139.207.051.665,98 maka Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp99.742.174.605,31 atau 3,18%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.84
Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2024 – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023		3.139.207.051.665,98
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA	292.653.376.604,00
2	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	2.934.320.368,31
3	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	553.957.740,00
4	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	979.320.000,00
5	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	6.345.408.138,00
6	Perolehan Aset dari Hutang/Piutang	491.927.410,00
7	Mutasi Barang dari SKPD lain	7.335.260.717,00
Jumlah		311.293.570.977,31
Mutasi Kurang		
1	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	1.198.679.996,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	69.378.164.698,00
3	Pemberian Hibah Barang (Belum terbit SK Penghapusan, Reklasifikasi ke Aset Lainnya)	133.457.509.361,00
4	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	174.833.000,00
5	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan Jasa Persediaan)	6.948.600,00
6	Mutasi Kurang ke SKPD lain	7.335.260.717,00
Jumlah		211.551.396.372,00
Kenaikan/(Penurunan)		99.742.174.605,31
Saldo per 31 Desember 2024		3.238.949.226.271,29

Rincian saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.85
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Saldo 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.217.035.567,60
2	Dinas Kesehatan	301.809.923,00
3	RSUD dr. H. Jusuf SK	15.567.930.988,68
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	2.473.781.838.526,81
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
7	Dinas Sosial	148.540.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	899.578.563,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	0,00

No	Perangkat Daerah	Saldo 31 Desember 2024
	Berencana	
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
14	Dinas Perhubungan	7.817.176.800,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.830.187.950,00
20	Dinas Pariwisata	0,00
21	Dinas Kehutanan	2.489.172.129,58
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	709.917.255.645,62
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM	710.560.177,00
24	Sekretariat Daerah	0,00
25	Sekretariat DPRD	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	0,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
28	Badan Pendapatan Daerah	109.140.000,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	0,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00
32	Badan Penghubung	159.000.000,00
33	Inspektorat	0,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
Jumlah		3.238.949.226.271,29

5.2.3.3.5Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024

25.187.120.626,01

31 Desember 2023

22.690.023.838,01

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian dari Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.86

Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Bahan Perpustakaan	1.280.854.817,80	1.234.710.729,80
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	4.018.102.060,00	3.445.905.670,00
Hewan	29.750.000,00	29.750.000,00
Biota Perairan	132.665.000,00	132.665.000,00

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanaman	350.377.600,00	350.377.600,00
Barang Koleksi Non Budaya	29.298.900,00	29.298.900,00
Aset Tetap Renovasi	19.346.072.248,21	17.467.315.938,21
Jumlah	25.187.120.626,01	22.690.023.838,01

Dibandingkan saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp22.690.023.838,01 maka Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.497.096.788,00 atau 11,01%. Kenaikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.87

Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2024 – Aset Tetap Lainnya

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023		22.690.023.838,01
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA	743.850.360,00
2	Penerimaan Hibah Barang	8.345.000,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	1.207.367.315,00
4	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	1.082.768.563,00
5	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	6.466.000,00
6	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	49.928.910,00
7	Mutasi Barang Dari OPD lain	661.020.938,02
8	Barang dibawah Kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	3.132.080.440,00
Jumlah		6.891.827.526,02
Mutasi Kurang		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap	586.818.360,00
2	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi)	14.811.000,00
3	Mutasi Kurang ke OPD lain	661.020.938,02
4	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	3.132.080.440,00
Jumlah		4.394.730.738,02
Kenaikan/(Penurunan)		2.497.096.788,00
Saldo per 31 Desember 2024		25.187.120.626,01

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya per masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.88

Rincian Aset Tetap Lainnya Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Saldo 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.510.545.353,00
2	Dinas Kesehatan	0,00
3	RSUD dr. H. Jusuf SK	108.999.550,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	7.778.856.537,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	55.413.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58.799.807,99
7	Dinas Sosial	36.287.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	179.695.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.600.000,00



No	Perangkat Daerah	Saldo 31 Desember 2024
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	642.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.906.000,00
14	Dinas Perhubungan	558.058.400,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	455.644.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.230.247.600,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	265.230.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.400.063,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.191.312.789,02
20	Dinas Pariwisata	484.100.000,00
21	Dinas Kehutanan	2.511.482.995,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	177.176.000,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM	149.325.000,00
24	Sekretariat Daerah	1.031.395.467,00
25	Sekretariat DPRD	545.768.500,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	179.814.900,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	826.097.114,00
28	Badan Pendapatan Daerah	288.522.220,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	510.000.000,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	241.967.000,00
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	711.500,00
32	Badan Penghubung	366.686.785,00
33	Inspektorat	289.436.045,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
Jumlah		25.187.120.626,01

Penjelasan masing-masing Aset Tetap Lainnya yaitu:

1. Bahan Perpustakaan

Rp1.280.854.817,80

Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.280.854.817,80 adalah koleksi buku terbitan yang ada pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Rp4.018.102.060,00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan sebesar Rp4.018.102.060,00 adalah berupa peralatan alat musik dan barang kerajinan lain-lain yang ada pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Hewan

Rp29.750.000,00

Hewan sebesar Rp29.750.000,00 adalah berupa hewan ternak potong lainnya yang berada pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Biota Perairan

Rp132.665.000,00

Biota Perairan sebesar Rp132.665.000,00 adalah berupa ikan budidaya yang berada pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Tanaman

Rp350.377.600,00

Tanaman sebesar Rp350.377.600,00 adalah berupa tanaman hias yang ada pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Barang Koleksi Non Budaya

Rp29.298.900,00

Barang Koleksi Non Budaya Rp29.298.900,00 adalah berupa barang koleksi



pada Lampiran 8.

5.2.3.3.7	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024 (3.020.739.613.793,87)	31 Desember 2023 (2.814.510.455.284,73)
-----------	----------------------	--	--

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(3.020.739.613.793,87) dengan uraian sebagai berikut:

-	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	2.814.510.455.284,73
-	Koreksi Akumulasi Penyusutan	1.479.054.547,00
-	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dihapuskan atau pindahtangankan	(2.767.069.082,32)
-	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menjadi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(102.009.295.124,00)
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	2.711.213.145.625,41
-	Beban Penyusutan Tahun 2024	309.526.468.168,46
	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	3.020.739.613.793,87

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 untuk masing-masing jenis aset dapat dirincikan sebagai berikut:

-	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	(1.130.834.269.281,77)
-	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	(424.725.967.752,00)
-	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	(1.457.466.829.490,90)
-	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	(7.712.547.269,20)
	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Rp	(3.020.739.613.793,87)

Rincian akumulasi penyusutan setiap jenis aset tetap pada perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran 9.

5.2.3.4	Aset Lainnya	31 Desember 2024 137.989.900.794,47	31 Desember 2023 466.056.381.683,23
---------	--------------	--	--

Aset Lainnya pada Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp137.989.900.794,47 terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.90
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Rugi	312.809.446,00	19.325.333,00
2	Aset Tidak Berwujud	189.610.985.759,00	171.174.169.815,00
3	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(162.703.102.799,00)	(155.810.675.079,00)
4	Aset Tidak Berwujud Neto	26.907.882.960,00	15.363.494.736,00
5	Aset Lain-Lain	221.111.416.480,30	90.899.669.666,06
6	Akumulasi Penyusutan-Aset Lain-Lain	(124.926.062.091,83)	(20.570.590.051,83)

 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			LKPD 2024
7	Aset Lain-Lain Neto	96.185.354.388,47	70.329.079.614,23
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	14.583.854.000,00	380.344.482.000,00
Jumlah Aset Lainnya		137.989.900.794,47	466.056.381.683,23

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp137.989.900.794,47 menurun sebesar 70,45% dari saldo Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp466.056.381.683,23.

5.2.3.4.1	Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2024 19.325.333,00	31 Desember 2023 19.325.333,00
-----------	---------------------	--	--

Jumlah tersebut merupakan kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dan putusan pengadilan senilai Rp19.325.333,00.

5.2.3.4.2	Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2024 189.610.985.759,00	31 Desember 2023 171.174.169.815,00
-----------	---------------------	---	---

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp 189.610.985.759,00 terdiri dari *Software*, Lisensi, Hak Cipta, dan Kajian yang memberikan manfaat masa panjang. Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 meningkat sebesar 10,77% atau Rp 18.436.815.944,00 dari saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp171.174.169.815,00. Penambahan aset tidak berwujud berasal dari belanja modal, reklasifikasi dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa.

Rincian Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 berdasarkan jenis aset pada perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10.A**.

5.2.3.4.2.1	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2024 (162.703.102.799,00)	31 Desember 2023 (155.810.675.079,00)
-------------	--------------------------------	---	---

Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(162.703.102.799,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91
Akumulasi Amortisasi ATB Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024
Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023	155.810.675.079,00
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi 2024	9.154.613,00
Akumulasi Amortisasi per 1 Januari 2024	155.819.829.692,00
Beban Amortisasi	6.883.273.107,00
Koreksi Akumulasi Amortisasi	0,00
Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2024	162.703.102.799,00

Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud berdasarkan jenis aset pada perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10B**.

5.2.3.4.2.2	Aset Tidak Berwujud Neto	31 Desember 2024 26.907.882.960,00	31 Desember 2023 15.363.494.736,00
-------------	--------------------------	--	--

Saldo Aset Tak Berwujud Neto adalah Aset Tak Berwujud setelah dikurangi Amortisasi. Saldo Aset Tak Berwujud Neto adalah Rp26.907.882.960,00 (Rp189.610.985.759,00 - Rp162.703.102.799,00).



Tabel 5.93
Rincian Aset yang Akan Diserahkan

Perangkat Daerah	Jenis Aset	Instansi Penerima	Nominal (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan	Peralatan dan Mesin	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.101.498.400,00
	Gedung dan Bangunan		10.525.615.269,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		3.717.696.500,00
	Aset Tetap Lainnya		4.061.973.000,00
	Aset Tidak Berwujud		747.472.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman	Tanah	Kementerian Pekerjaan Umum	137.372.824.061,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Peralatan dan Mesin	Lantamal dan Badan Narkotika Nasional	704.800.000,00
Jumlah			158.231.879.230,00

5.2.3.4.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 31 Desember 2024 (124.926.062.091,83) 31 Desember 2023 (20.570.590.051,83)

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat dan Akumulasi Penyusutan Aset yang Akan Diserahkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain TA 2024

Uraian	Saldo 31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023	20.570.590.051,83
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 1 Januari 2023	91.278.475.008,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 1 Januari 2024	111.849.065.059,83
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	
- Beban Penyusutan Aset Rusak Berat	760.861.241,00
- Beban Penyusutan Aset yang Akan Diserahkan	12.316.135.791,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024	(124.926.062.091,83)

Rincian atas Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat dan Akumulasi Penyusutan Aset yang Akan Diserahkan disajikan pada Lampiran 10C dan Lampiran 10D.

5.2.3.4.3.5 Jaminan Reklamasi 31 Desember 2024 1.590.608.804,00 31 Desember 2023 1.518.108.304,00

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan berkewajiban menyerahkan jaminan reklamasi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Saldo Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.590.608.804,00 meningkat sebesar Rp72.500.500 dari saldo Jaminan Reklamasi Tahun 2023 sebesar Rp1.518.108.304,00 Rincian Jaminan Reklamasi dapat dilihat pada Lampiran 11.

5.2.3.4.3.6 Aset Tetap yang Tidak 31 Desember 2023 31 Desember 2022

Ditemukan
234.150.000,00
0,00

Nilai tersebut merupakan penyajian aset peralihan kewenangan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang belum dapat diidentifikasi keberadaannya di SMK Pertanian Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp234.150.000,00.

5.2.3.4.4

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Belum Terdapat SK Penetapan

31 Desember 2024
31 Desember 2023

12.460.434.766,40
8.072.097.956,82

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset lainnya yang merupakan kerugian daerah yang masih berupa informasi/hasil pemeriksaan APIP senilai 12.460.434.766,40. Dengan rincian informasi sebagai berikut:

Tabel 5.95
Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Belum Terdapat SK Penetapan TA 2024

No	Informasi Indikasi Kerugian Daerah		Sisa Kerugian Daerah (2023)	Kasus Baru (2024)	Angsuran & Selesai	Saldo 31 Desember 2024
1	2		3	4	5	6 = (3+4)-5
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	BPK	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	BPK	4.648.016.624,00	518.989.329,31	3.045.952.493,31	2.121.053.460,00
		Inspektorat	15.992.960.384,13	668.447.246,22	12.545.681.579,27	4.115.726.051,08
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Pihak Ketiga	BPK	5.425.508.432,10	4.541.325.884,76	5.150.978.908,59	4.815.855.408,27
		Inspektorat	7.901.039.287,52	142.489.784,54	6.635.729.225,01	1.407.799.847,05
JUMLAH			33.967.524.727,75	5.871.252.244,83	27.378.342.206,18	12.460.434.766,40

Terdapat selisih nilai antara matriks temuan pemeriksaan kerugian daerah sebesar Rp12.489.709.209,71 dengan nilai yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebesar Rp12.460.434.766,40. Perbedaan sebesar Rp29.274.443,31 ini disebabkan oleh adanya setoran pengembalian ke rekening sekolah yang telah dilakukan, namun belum dilaporkan dalam proses pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan oleh BPK RI.

5.2.3.4.5

Kas di TDF pada Bank Indonesia

31 Desember 2024
31 Desember 2023

14.583.854.000,00
380.344.482.000,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023, *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas Kas di TDF diakui sebagai Aset Lainnya. Berdasarkan rekening koran Bank Indonesia dengan Nama Rekening Rek Lain BI TDF TKD Provinsi Kalimantan Utara Tanggal Cetak 7 Januari 2025, saldo rekening TDF Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebesar Rp14.583.854.000.00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.96
Rincian Saldo TDF 31 Desember 2024

No	Sumber Dana	Nilai (Rp)
----	-------------	------------

126


 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		LKPD 2024
1	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum-Royalti	13.965.457.000,00
2	Dana Bagi Hasil Kehutanan-IIUPH	618.396.000,00
3	Dana Bagi Hasil Kehutana-PSDH	1.000,00
		14.583.854.000,00

5.2.3.5	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024 339.944.018.994,08	31 Desember 2023 249.115.706.851,09
---------	-------------------------	--	--

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.97
Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	6.141.798.363,33	7.945.495.040,00
5	Utang Belanja	333.782.483.230,75	184.124.007.037,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	19.737.400	57.046.204.774,09
Jumlah		339.944.018.994,08	249.115.706.851,09

Penjelasan masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

5.2.3.5.1	Utang PFK	31 Desember 2024 0,00	31 Desember 2023 0,00
-----------	-----------	--------------------------	--------------------------

Utang PFK merupakan utang perhitungan pihak ketiga yang berasal dari pungutan PFK. Pungutan PFK sampai dengan 31 Desember 2024 telah disetor seluruhnya.

5.2.3.5.2	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024 6.141.798.363,33	31 Desember 2023 7.945.495.040,00
-----------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa lahan dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa Kantin Gedung Gabungan Dinas	Rp	22.033.333,33
- Sewa Bangunan untuk Kantor Kas PT BPD Kaltim Kaltara di Gedung Gadis	Rp	23.750.000,00
- Sewa Bangunan Banhub Jakarta oleh Bank Kaltimlara	Rp	6.026.744.750,00
- Sewa Kantin UPT. Bapenda Bulungan	Rp	1.030.000,00
- Sewa ATM Bank Kaltimlara di Samsat Tarakan	Rp	17.475.840,00
- Sewa Ruang untuk Kantor Kas BRI di RSUD dr.H.Jusuf SK	Rp	50.764.440,00
Jumlah	Rp	6.141.798.363,33





5.2.3.5.3

Utang Beban

31 Desember 2024
333.782.483.230,75

31 Desember 2023
184.124.007.037,00

Saldo Utang Beban sebesar Rp333.782.483.230,75 merupakan pemanfaatan jasa kantor perangkat daerah dan RSUD, utang belanja modal gedung dan bangunan dan utang belanja bagi hasil bulan Desember 2024 yang belum dibayarkan, dengan rincian:

- Listrik	Rp	1.529.085.982,00
- Air	Rp	140.319.940,00
- Telepon	Rp	2.737.008,00
- Internet/Jaringan	Rp	111.285.826,00
- Asuransi	Rp	411.563.205,00
- Persediaan	Rp	14.566.745.238,55
- Jasa Tenaga Kesehatan	Rp	28.944.800.309,69
- Pengiriman	Rp	1.926.662,00
- Jasa Pemeliharaan	Rp	919.506.709,00
- Pajak	Rp	35.928.148,00
- Pengolahan Sampah	Rp	450.000,00
- Pengadaan Aset tetap / Belanja Modal	Rp	13.273.099.579,51
- Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	Rp	224.566.488.550,00
- Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	Rp	48.980.546.073,00
- Belanja Tidak Terduga - Penanganan Dampak Sosial	Rp	298.000.000,00
Jumlah	Rp	333.782.483.230,75

Rincian lebih lanjut mengenai utang beban dan utang transfer pusat dapat dilihat pada **Lampiran 12A**.

Pos akun utang pengadaan aset tetap dan utang transfer disajikan pada level jenis utang jangka pendek lainnya di tahun 2023 mengikuti pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019, maka pada tahun 2024 kedua pos akun tersebut disajikan pada level jenis utang beban.

Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp273.547.034.623,00 adalah kurang salur transfer bagi hasil pajak, dihitung dari selisih antara jumlah definitif bagi hasil pajak dengan jumlah yang telah disalurkan. Jumlah definitif bagi hasil pajak yang telah ditetapkan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp440.296.120.325,00, sedangkan jumlah yang telah disalurkan sebesar Rp 336.426.911.141,00 sehingga jumlah kurang salur Bagi Hasil Pajak sebesar Rp103.869.209.184,00, kurang salur bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp169.331.174.084,00 dan tambahan atas kurang salur bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp346.651.355,00 dengan rincian:

Tabel 5.98
Rincian Kurang Salur Bagi Hasil Pajak TA 2024

Kabupaten/Kota	Kurang Salur TA 2024 (Rp)	Kurang Salur TA 2023 (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Kabupaten Bulungan	29.144.945.220,00	46.473.388.836,00	75.618.334.056,00
Kota Tarakan	20.775.888.247,00	28.204.657.826,00	48.980.546.073,00

Kabupaten Nunukan	22.775.223.259,00	46.795.469.075,00	69.570.692.334,00
Kabupaten Malinau	17.726.556.317,00	28.875.032.156,00	46.601.588.473,00
Kabupaten Tana Tidung	13.446.596.141,00	19.329.277.546,00	32.775.873.687,00
Jumlah	103.869.209.184,00	169.677.825.439,00	273.547.034.623,00

Rincian lebih lanjut mengenai utang bagi hasil pajak daerah dapat dilihat pada **Lampiran 12B**

5.2.3.5.4	Utang Jangka Pendek	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Lainnya	19.737.400,00	57.046.204.774,09

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Jumlah tersebut terdiri dari:

- Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – Dinas Perhubungan	Rp	9.000.000,00
- Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor - UPT Bapenda Malinau	Rp	10.737.400,00
Jumlah	Rp	19.737.400,00

5.2.3.6 Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Desember 2024</u> 1.590.608.804,00	<u>31 Desember 2023</u> 1.518.108.304,00
---	---	---

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.590.608.804,00 sedangkan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.518.108.304,00. Kewajiban jangka panjang pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Utang Jangka Panjang Lainnya yang merupakan utang yang timbul karena adanya dana jaminan reklamasi pertambangan dan jaminan kesungguhan yang pada waktunya akan dikembalikan kepada pemilik dana. Dana jaminan berupa Deposito dan Bank Garansi. Rincian Jaminan Reklamasi Pertambangan dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.2.3.7 Ekuitas	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	8.244.085.728.400,50	8.082.480.187.118,96

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2024 berasal dari Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas tersebut di dalamnya sudah termasuk SAL akhir.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.244.085.728.400,50. Bila dibandingkan dengan saldo Ekuitas pada periode sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp161.605.541.281,54. Kenaikan Ekuitas tersebut disebabkan karena Surplus LO dan Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2024.

5.2.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Penjelasan atas masing-masing unsur dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

5.2.4.1 Pendapatan – LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
3.336.554.640.672,19	3.444.534.229.240,72

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Nilai Pendapatan - LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.336.554.640.672,19 menurun sebesar Rp107.979.588.568,53 atau 3,13% dari Pendapatan - LO Tahun 2023 sebesar Rp3.444.534.229.240,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99
Rincian Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	1.034.742.755.566,20	977.860.199.545,49	56.882.556.020,71	5,82
Pendapatan Transfer – LO	2.250.581.270.389,00	2.423.623.221.502,00	(173.041.951.113,00)	(7,14)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	51.230.614.716,99	43.050.808.193,23	8.179.806.523,76	19,00
Jumlah	3.336.554.640.672,19	3.444.534.229.240,72	(107.979.588.568,53)	(3,13)

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pendapatan LO tersebut:

5.2.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
1.034.742.755.566,20	977.860.199.545,49

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.034.742.755.566,20. PAD - LO meningkat sebesar Rp56.882.556.020,71 atau 5,82% dari PAD - LO Tahun 2023 sebesar Rp977.860.199.545,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100
Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	761.208.201.377,00	717.309.540.671,00	43.898.660.706,00	6,12
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	12.831.979.484,84	9.616.487.861,33	3.215.491.623,51	33,44
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	11.371.469.793,77	10.114.672.311,44	1.256.797.482,33	12,43
4	Lain-Lain PAD yang Sah – LO	249.331.104.910,59	240.819.498.701,72	8.511.606.208,87	3,53
Jumlah		1.034.742.755.566,20	977.860.199.545,49	56.882.556.020,71	5,82

5.2.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
761.208.201.377,00	717.309.540.671,00

Pendapatan Pajak Daerah – LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar



Rp761.208.201.377,00, meningkat sebesar 6,12% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 sebesar Rp717.309.540.671,00. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 5.101
Rincian Saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	101.677.587.600,00	96.605.027.400,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	124.340.376.200,00	121.111.532.300,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO	471.835.087.950,00	442.532.752.438,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP) – LO	4.606.063.613,00	3.298.205.514,00
5	Pajak Rokok – LO	56.996.131.814,00	53.762.023.019,00
6	Pajak Alat Berat – LO	1.752.954.200,00	0,00
Jumlah		761.208.201.377,00	717.309.540.671,00

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Jumlah PKB yang diakui sebagai Pendapatan – LO adalah sebesar Rp101.677.587.600,00 dengan uraian sebagai berikut:

-	Pendapatan PKB yang diterima di Rekening Kasda	Rp	101.677.587.600,00
-	Pendapatan PKB yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun sebelumnya	Rp	0,00
	Sub Jumlah PKB - LO	Rp	101.677.587.600,00
-	Pendapatan PKB yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang PKB Tahun 2024	Rp	0,00
	Jumlah PKB - LO	Rp	101.677.587.600,00

Pemungutan PKB dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di masing-masing Kabupaten/Kota. Rincian per masing-masing UPT Bapenda adalah sebagai berikut:

Tabel 5.102
Rincian Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor – LO per UPT Bapenda

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	UPT Bapenda Kabupaten Bulungan	28.112.047.500,00
2	UPT Bapenda Kota Tarakan	44.190.249.800,00
3	UPT Bapenda Kabupaten Nunukan	15.790.756.400,00
4	UPT Bapenda Kabupaten Malinau	11.538.282.400,00
5	UPT Bapenda Kabupaten Tana Tidung	2.046.251.500,00
Jumlah		101.677.587.600,00

BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak ini dibayarkan satu kali oleh Wajib Pajak pada saat terjadi pemindahan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor.

BBNKB yang diakui sebagai Pendapatan – LO adalah sebesar Rp124.340.376.200,00. Rincian per masing-masing UPT BAPENDA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.103



Rincian Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO per UPT Bapenda

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	UPT Bapenda Kabupaten Bulungan	45.275.381.200,00
2	UPT Bapenda Kota Tarakan	36.665.695.300,00
3	UPT Bapenda Kabupaten Nunukan	21.082.601.000,00
4	UPT Bapenda Kabupaten Malinau	21.316.698.700,00
5	UPT Bapenda Kabupaten Tana Tidung	0,00
Jumlah		124.340.376.200,00

PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Jumlah PBBKB yang diakui sebagai Pendapatan – LO adalah sebesar Rp471.835.087.950,00 dengan uraian sebagai berikut:

-	Pendapatan PBBKB yang diterima di Rekening Kasda	Rp	471.835.087.950,00
-	Pendapatan PBBKB yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun sebelumnya	Rp	0,00
	Sub Jumlah PBBKB – LO	Rp	471.835.087.950,00
-	Pendapatan PBBKB yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang PBBKB Tahun 2024	Rp	0,00
	Jumlah PBBKB – LO	Rp	471.835.087.950,00

PAP adalah pungutan daerah (Provinsi) atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat.

Jumlah PAP yang diakui sebagai Pendapatan – LO Tahun 2024 sebesar Rp4.606.063.613,00 dengan uraian sebagai berikut:

-	Pendapatan PAP yang diterima di Rekening Kasda	Rp	4.617.481.703,00
-	Pendapatan PAP yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun Sebelumnya	Rp	(170.452.310,00)
	Sub Jumlah PAP - LO	Rp	4.447.029.393,00
-	Pendapatan PAP yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang PAP Tahun 2024	Rp	159.034.220,00
	Jumlah PAP – LO	Rp	4.606.063.613,00

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Jumlah Pajak Rokok yang diakui sebagai Pendapatan – LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp56.996.131.814.00.

Pajak Alat Berat atau disebut juga PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Pajak Alat Berat ini sebagai salah satu jenis pungutan pajak baru yang mana merupakan kewenangan milik provinsi. Jumlah Pajak Alat Berat yang diakui sebagai Pendapatan-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.752.954.200,00.

5.2.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	31 Desember 2024 12.831.979.484,84	31 Desember 2023 9.616.487.861,33
-------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------



Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp12.831.979.484,84, meningkat sebesar Rp3.215.491.623,51 atau 33,44% dari Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 sebesar Rp9.616.487.861,33 dengan rincian seperti berikut.

Tabel 5.104
Rincian Pendapatan Retribusi - LO

No.	Uraian	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.761.713.251,34	2.473.464.213,33
2	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	1.003.755.436,50	273.138.500,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	8.727.882.197,00	6.627.048.148,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	100.317.000,00	102.857.000,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	9.002.400,00	0,00
6	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	126.000.000,00
7	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	1.170.000,00	13.980.000,00
8	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	228.139.200,00	0,00
Jumlah		12.831.979.484,84	9.616.487.861,33

Jumlah tersebut merupakan sewa rumah dinas UPT BAPENDA yang diakui sebagai hak, retribusi sewa tenda, retribusi atas layanan kepelabuhan Tengkeyu I dan Tengkeyu II Kota Tarakan, retribusi pariwisata KKMB (Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan) Kota Tarakan, retribusi atas penyewaan lahan untuk penempatan ATM, serta sewa ruangan Badan Penghubung Jakarta oleh Bankaltimtara, dengan uraian sebagai berikut:

-	Pendapatan retribusi yang diterima di Rekening Kasda	Rp	10.789.764.538,16
-	Pendapatan retribusi yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun sebelumnya	Rp	(61.280.000,00)
-	Pendapatan retribusi yang diterima dimuka Tahun 2024	Rp	(6.141.798.363,33)
	Sub Jumlah Retribusi – LO	Rp	4.586.686.174,83
-	Pendapatan retribusi yang diterima dimuka Tahun 2023	Rp	7.945.495.040,00
-	Koreksi pendapatan retribusi diterima Dimuka	Rp	178.404.416,67
-	Pendapatan retribusi yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang retribusi Tahun 2024	Rp	121.393.853,34
	Jumlah Retribusi – LO	Rp	12.831.979.484,84



Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO **11.371.469.793,77** **10.114.672.311,44**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diakui sebagai Pendapatan - LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp11.371.469.793,77 yang merupakan dividen atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di BPD Kaltimara sesuai Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 tanggal 8 Maret 2024 dan telah masuk pada kas daerah sesuai surat Bank Kaltimara Nomor 0288/A-1/BPD-AKT&KEU/IV/2024 tanggal 04 April 2024.

5.2.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
249.331.104.910,59 **240.819.498.701,72**

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp249.331.104.910,59 dan mengalami kenaikan sebesar 3,53% dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105
Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO

No.	Uraian	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	52.623.000,00	0,00
2	Jasa Giro – LO	1.765.310.303,72	2.564.694.574,38
3	Pendapatan Bunga – LO	22.572.441.210,07	12.725.459.812,05
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	73.668.650,00	943.745,74
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	2.535.547.569,73	1.433.678.764,57
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	2.251.065.000,00	2.304.563.829,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha – LO	2.266.400,84	1.961.660,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	380.932.178,13	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian – LO	4.464.626.779,90	4.560.079.983,34
10	Pendapatan dari BLUD – LO	215.232.623.818,20	217.228.116.332,64
Jumlah		249.331.104.910,59	240.819.498.701,72

5.2.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
2.250.581.270.389,00 **2.423.623.221.502,00**

Saldo Pendapatan Transfer sebesar Rp2.250.581.270.389,00 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.2.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
2.237.932.776.389,00 **2.398.956.894.502,00**

Saldo Pendapatan Transfer sebesar Rp2.237.932.776.389,00 terdiri dari

Transfer Pemerintah Pusat. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.106
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Uraian	Saldo 31 Des 2024	Saldo 31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	101.596.075.809,00	132.145.622.711,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO	737.956.247.673,00	876.302.942.436,00
Dana Alokasi Umum – LO	1.153.992.670.001,00	1.117.056.619.340,00
Dana Transfer Khusus - DAK Fisik - LO	127.296.730.178,00	169.325.171.177,00
Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik – LO	117.091.052.728,00	104.126.538.838,00
Jumlah	2.237.932.776.389,00	2.398.956.894.502,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO sebesar Rp101.596.075.809,00 terdiri dari:

Tabel 5.107
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

Uraian	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
Bagi Hasil Pajak – LO		
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan - LO	77.026.541.128,00	100.601.215.872,00
- DBH PPh Pasal 21 - LO	23.124.951.161,00	29.704.583.839,00
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN - LO	1.444.583.000,00	1.839.823.000,00
- DBH CHT – LO	520,00	0,00
Jumlah	101.596.075.809,00	132.145.622.711,00

- Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang diterima di LRA	Rp	81.492.235.000,00
- Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun sebelumnya	Rp	(16.530.371.191,00)
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	Rp	64.961.863.809,00
- Pendapatan transfer bagi hasil pajak atas penyelesaian lebih bayar s.d TA 2023	Rp	1.751.985.000,00
- Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2024	Rp	34.882.227.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak – LO	Rp	101.596.075.809,00

Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO sebesar Rp737.956.247.673,00, dengan rincian:

Tabel 5.108
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

Uraian	Saldo 31 Des 2024	Saldo 31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
Bagi Hasil Bukan Pajak – LO		
- DBH SDA Minyak Bumi – LO	7.186.777.897,00	9.921.044.103,00



Uraian	Saldo 31 Des 2024	Saldo 31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
- DBH SDA Gas Bumi - LO	625.750.179,00	593.046.821,00
- DBH SDA Mineral dan Batubara - Landrent - LO	6.637.412.000,00	2.488.326.000,00
- DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalty - LO	605.367.388.010,00	789.606.788.099,00
- DBH SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LO	9.704.741.957,00	20.150.907.043,00
- DBH SDA Kehutanan - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) - LO	4.959.447.000,00	0,00
- DBH SDA Kehutanan- Dana Reboisasi - LO	88.965.046.630,00	53.542.830.370,00
- DBH Sawit – LO	14.509.684.000,00	0,00
Jumlah	737.956.247.673,00	876.302.942.436,00

- Pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang diterima di LRA	Rp	924.754.700.000,00
- Pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun sebelumnya	Rp	(363.814.118.327,00)
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak - LO	Rp	560.940.581.673,00
- Pendapatan transfer bagi hasil pajak atas penyelesaian lebih bayar s.d TA 2023	Rp	32.514.278.000,00
- Pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2024	Rp	129.917.534.000,00
- Pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang kasnya di TDF pada Bank Indonesia TA 2024	Rp	14.583.854.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak – LO	Rp	737.956.247.673,00

Pendapatan dari DAU - LO sebesar Rp1.153.992.670.001,00. Jumlah tersebut telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Daerah pada Tahun 2024.

Pendapatan dari DAK - LO sebesar Rp244.387.782.906,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penyaluran yang telah diterima di Rekening Kas Daerah baik DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian per bidang adalah sebagai berikut.

Tabel 5.109
Rincian Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO per Bidang

Uraian	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
Dana Transfer Khusus - DAK Fisik – LO	127.296.730.178,00	169.325.171.177,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	28.015.699.041,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	4.878.495.414,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	22.461.235.871,00	85.604.461.691,00

Uraian	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	353.364.463,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	8.516.113.748,00	6.710.240.311,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	47.096.934.000,00	67.558.836.650,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	6.366.226.025,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan-LO	10.367.790.900,00	3.085.406.500,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting-LO	4.441.052.741,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	1.166.044.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik - LO	117.091.052.728,00	104.126.538.838,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	57.472.200.263,00	52.954.076.219,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	2.736.250.000,00	2.973.750.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	48.947.454.000,00	39.870.684.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.396.500.000,00	1.825.500.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	1.278.756.000,00	678.707.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	1.875.829.679,00	3.466.568.808,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	2.098.872.300,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	815.619.329,00	942.870.130,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	469.571.157,00	311.305.153,00
DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	0,00	1.103.077.528,00
Jumlah	244.387.782.906,00	273.451.710.015,00

5.2.4.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	<u>31 Desember 2024</u> 12.648.494.000,00	<u>31 Desember 2023</u> 24.666.327.000,00
-------------	---	--	--

Pendapatan Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.648.494.000,00 merupakan Insentif Fiskal.

5.2.4.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi – LO	<u>31 Desember 2024</u> 0,00	<u>31 Desember 2023</u> 0,00
-------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024 adalah Rp0,00.

5.2.4.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		35.438.443.059,99	43.050.808.193,23

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari:

Tabel 5.110

Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah – LO	34.045.232.363,99	42.675.222.227,23
Pendapatan Lainnya – LO	1.393.210.696,00	375.585.966,00
Jumlah	35.438.443.059,99	43.050.808.193,23

5.2.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		<u>49.837.404.020,99</u>	<u>42.675.222.227,23</u>

Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebesar Rp49.837.404.020,99. Pendapatan Hibah - LO Tahun 2024 terdiri dari pendapatan tunai sebesar Rp6.609.420.000,00 yang diterima di rekening kas sekolah, serta dalam bentuk barang di beberapa perangkat daerah sebesar Rp43.227.984.020,99. Rincian Pendapatan Hibah - LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.111
Rincian Pendapatan Hibah – LO

Uraian	Saldo 2024
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	48.071.326.670,75
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO	1.386.457.350,24
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO	379.620.000,00
Jumlah	49.837.404.020,99

Pendapatan Hibah - LO yang diterima perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rincian Pendapatan Hibah Per OPD

Perangkat Daerah	Jenis Hibah	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hibah Uang	6.229.800.000,00	5.204.575.000,00
	Hibah Barang	6.988.174.108,87	5.024.989.000,00
Subtotal		13.217.974.108,87	10.229.564.000,00
Dinas Kesehatan	Hibah Barang	15.584.760.904,88	21.284.076.784,40
Subtotal		15.584.760.904,88	21.284.076.784,40
RSUD dr. H. Jusuf SK	Hibah Barang	1.652.107.350,24	1.604.587.000,83
Subtotal		1.652.107.350,24	1.604.587.000,83
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hibah Barang	1.956.756.000,00	665.869.112,00
Subtotal		1.956.756.000,00	665.869.112,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hibah Barang	784.014.000,00	921.471.000,00
Subtotal		784.014.000,00	921.471.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hibah Uang	379.620.000,00	0,00
Subtotal		379.620.000,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	Hibah Barang	470.000.000,00	0,00
Subtotal		470.000.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	Hibah Barang	0,00	671.854.000,00
Subtotal		0,00	671.854.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Hibah Uang	0,00	341.658.000,00
Subtotal		0,00	341.658.000,00
UPTD Bapenda Bulungan	Hibah Barang	0,00	50.000.000,00
Subtotal		0,00	50.000.000,00
UPTD Bapenda Tana Tidung	Hibah Barang	0,00	30.000.000,00



Perangkat Daerah	Jenis Hibah	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Subtotal		0,00	30.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Hibah Barang	0,00	155.103.600,00
Subtotal		0,00	155.103.600,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Hibah Barang	0,00	834.666.250,00
Subtotal		0,00	834.666.250,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Hibah Barang	0,00	3.000.000.000,00
Subtotal		0,00	3.000.000.000,00
UPTD KPH Bulungan	Hibah Barang	0,00	829.611.345,00
Subtotal		0,00	829.611.345,00
UPTD KPH Tarakan	Hibah Barang	0,00	685.587.045,00
Subtotal		0,00	685.587.045,00
UPTD KPH Nunukan	Hibah Barang	0,00	685.587.045,00
Subtotal		0,00	685.587.045,00
UPTD KPH Malinau	Hibah Barang	0,00	685.587.045,00
Subtotal		0,00	685.587.045,00
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Hibah Barang	15.792.171.657,00	0,00
Subtotal		15.792.171.657,00	0,00
Total		49.837.404.020,99	42.675.222.227,23

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp48.071.326.670,75 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.113
Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah di Dinas Pendidikan	13.217.974.108,87
Pendapatan Hibah Barang Persediaan di Dinas Kesehatan	15.584.760.904,88
Pendapatan Hibah Barang di Dinas Lingkungan Hidup	470.000.000,00
Pendapatan Hibah Barang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.956.756.000,00
Pendapatan Hibah Barang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	784.014.000,00
Pendapatan Hibah Persediaan di RSUD dr H. Jusuf SK.	265.650.000,00
Pendapatan Hibah Bangunan Rumah Susun di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	15.792.171.657,00
Jumlah	48.071.326.670,75

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp1.386.457.350,24 merupakan hibah obat dari Instalasi Farmasi Kota Tarakan sebesar Rp1.379.999.155,24 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sebesar Rp6.458.195,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf



SK Tarakan.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO sebesar Rp379.620.000,00 merupakan hibah dari PT Jasa Raharja atas kerja sama pemungutan asuransi di kantor Samsat UPT Bapenda.

5.2.4.1.3.2	Lain – lain Pendapatan – LO	31 Desember 2024 1.393.210.696,00	31 Desember 2023 375.585.966,00
-------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Pendapatan lainnya yang diakui sebagai Lain – lain Pendapatan - LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.393.210.696,00 merupakan pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

5.2.4.2	Beban	31 Desember 2024 3.121.602.423.271,14	31 Desember 2023 2.834.181.887.540,47
---------	-------	--	--

Nilai Beban LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.121.602.423.271,14 adalah beban operasional, di mana beban operasional ini terdiri dari beban pegawai, beban barang & jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.4.2.1	Beban Operasi	31 Desember 2024 3.121.602.423.271,14	31 Desember 2023 2.834.181.887.540,47
-----------	---------------	--	--

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.121.602.423.271,14, meningkat sebesar Rp287.420.535.730,67 atau 10,14% dari Beban Operasi Tahun 2023 sebesar Rp2.834.181.887.540,47, dengan rincian beban sebagai berikut:

Tabel 5.114
Rincian Beban Operasional – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Pegawai	868.490.469.825,00	767.019.929.418,00
Beban Persediaan	283.718.847.890,11	254.619.017.227,53
Beban Jasa	480.007.495.534,26	521.750.718.355,15
Beban Pemeliharaan	27.214.192.909,61	27.166.062.912,00
Beban Perjalanan Dinas	262.338.356.646,00	198.491.590.148,59
Beban Subsidi	19.787.303.700,00	16.513.140.465,00
Beban Hibah	219.117.187.570,00	158.218.075.976,00
Beban Bantuan Sosial	2.859.081.400,00	733.761.466,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	329.486.738.307,46	305.033.292.718,40
Beban Penyisihan Piutang	39.296.820,70	661.951.582,80
Beban Transfer	628.543.452.668,00	583.974.347.271,00
Jumlah	3.121.602.423.271,14	2.834.181.887.540,47

5.2.4.2.1.1	Beban Pegawai	31 Desember 2024 868.490.469.825,00	31 Desember 2023 767.019.929.418,00
-------------	---------------	--	--

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang



berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah beban pegawai sebesar Rp868.490.469.825,00 tersebut telah dibayarkan seluruhnya dalam tahun 2024. Beban pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Beban Pegawai – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	239.006.919.843,00	214.412.677.400,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	20.886.665.910,00	18.767.898.981,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.898.098.236,00	8.363.534.360,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	14.724.947.910,00	12.875.294.370,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.574.496.492,00	4.106.605.962,00
Beban Tunjangan Beras ASN	12.635.042.963,00	12.590.854.773,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	22.999.188.505,00	13.147.627.070,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	3.609.242,00	3.507.318,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.417.881.963,00	21.014.385.806,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	483.756.577,00	437.682.597,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.451.277.880,00	1.313.051.007,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	375.673.831.800,00	340.345.543.829,00
Beban Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	22.893.493.422,00	16.085.878.889,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	53.786.102.521,00	36.568.497.100,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	728.830.300,00	662.001.200,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.683.750.000,00	1.410.150.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	27.677.000,00	0,00
Beban Honorarium	14.997.266.000,00	14.228.087.198,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	848.110.000,00	932.965.000,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.114.050.000,00	1.117.200.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	106.647.000,00	113.229.000,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	88.714.500,00	93.783.900,00
Beban Uang Paket DPRD	95.445.000,00	95.760.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.372.500,00	1.619.940.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	120.497.000,00	159.735.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	35.430.750,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.035.000.000,00	1.575.000.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	34.594.352,00	40.090.684,00
Beban Pembulatan Gaji DPRD	25.675,00	27.570,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.305.680.736,00	7.319.692.044,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.502.000.000,00	5.376.000.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	366.000.000,00	10.500.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.560.000,00	7.560.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	3.476.160,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.752.733,00	3.556.544,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680,00	1.440,00

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.516.800,00	7.516.800,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	142.740,00	181.620,00
Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	433.570,00	492.660,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	234.000.000,00	288.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.496.699.155,00	1.280.710.386,00
Beban Pegawai BLUD	25.116.654.300,00	24.094.122.000,00
JUMLAH	868.490.469.825,00	767.019.929.418,00

5.2.4.2.1.2	Beban Persediaan	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		283.718.847.890,11	254.619.017.227,53

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp283.718.847.890,11. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang pakai habis dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.116
Rincian Beban Persediaan – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.329.759.319,00	175.726.222,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	610.814.219,00	626.567.151,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.091.808.479,00	19.830.508.829,50
Beban Bahan-Bahan Baku	177.977.400,00	60.000,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.460.750.700,00	2.002.512.850,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	78.382.750,00	49.907.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	147.202.570,00	77.354.600,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	283.597.027,00	159.337.800,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.771.790.795,94	3.650.645.754,35
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.558.004.579,00	1.666.808.439,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	3.750.000,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	52.044.727,41	749.855.508,83
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	104.884.251,00	220.953.582,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	1.175.000,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	37.659.400,00	22.376.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	250.297.325,50	22.879.620,00
Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	975.000,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	590.761.200,00	704.662.400,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.480.657.184,05	5.210.479.209,60
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.897.392.652,02	2.608.155.893,23
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.494.917.748,80	11.018.726.084,92



Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.055.547.000,00	735.258.335,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	243.718.198,24	224.988.929,38
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.515.533.376,13	1.652.672.908,83
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.583.894.622,66	1.042.367.725,80
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.007.912.009,88	1.023.243.960,20
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.177.453.600,00	398.938.757,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	4.999.600,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.238.100.890,00	338.384.470,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	5.444.226.100,00	3.903.653.765,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.245.924.929,70	4.327.147.975,05
Beban Obat-Obatan-Obat	49.031.003.598,62	88.669.704.541,32
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	46.231.227.462,16	1.646.400.642,72
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	34.307.315.609,00	22.398.506.280,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.090.887.555,00	12.910.856.187,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	4.329.000,00	0,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	4.021.658.851,00	4.976.522.009,80
Beban Natura dan Pakan-Pakan	636.564.891,00	300.822.910,00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.519.160.856,00	1.756.075.278,00
Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	6.297.375,00	8.360.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	37.677.177.291,00	43.469.851.939,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.627.973.116,00	8.453.934.364,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	12.900.000,00	16.726.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.033.177.940,00	17.674.308,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.400.000,00	1.610.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.266.940.661,00	442.892.830,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	304.640.360,00	345.606.800,00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	341.738.250,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	133.350.000,00	144.842.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	895.265.000,00	825.774.932,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.742.728.600,00	1.903.633.035,00

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	110.250.000,00	11.245.000,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	192.710.000,00	0,00
Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	24.300.000,00
Beban Pakaian Siaga	22.896.000,00	0,00
Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	18.210.400,00
Beban Pakaian Adat Daerah	278.115.000,00	163.205.600,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	1.420.428.000,00	835.908.300,00
Beban Pakaian Olahraga	1.616.930.420,00	2.142.977.820,00
Beban Pakaian Paskibraka	0,00	359.429.800,00
Beban Komponen-Komponen Peralatan	4.250.000,00	0,00
Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	100.000.000,00	329.772.480,00
Beban Komponen-Attachment	140.175.400,00	0,00
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	5.444.000,00	0,00
JUMLAH	283.718.847.890,11	254.619.017.227,53

5.2.4.2.1.3	Beban Jasa	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		480.007.495.534,26	521.750.718.355,15

Beban jasa merupakan beban pemerintah daerah untuk pemanfaatan jasa pihak ketiga dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Rincian Beban Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.117
Rincian Beban Jasa – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Komponen-Attachment	0,00	6.235.332.266,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.175.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	6.130.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.800.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.425.054.735,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	288.923.574,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	77.020.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.800.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	20.587.200,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.800.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	3.000.000,00	0,00
Beban Gedung dan Bangunan-	19.574.850,00	0,00



Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	20.379.000,00	0,00
Beban Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	257.999.999,00	0,00
Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	3.140.466.940,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	114.000.000,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.631.649.429,00	5.104.063.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.129.725.000,00	5.576.622.500,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	90.000.000,00	122.400.000,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.837.342.846,00	965.325.000,00
Beban Honorarium Rohaniwan	35.200.000,00	22.600.000,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	76.420.000,00	38.220.000,00
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	170.400.000,00	6.000.000,00
Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000,00	0,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	367.380.000,00	22.500.000,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	737.685.000,00	446.360.000,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	7.062.109.517,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	16.709.240.412,00	515.170.246,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	171.329.181,00	249.354.980,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.729.447.409,00	3.697.678.968,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	765.630.277,00	500.531.677,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	78.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	196.370.000,00	144.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	117.084.647,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	496.650.000,00	216.026.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	75.220.000,00	20.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.047.991.900,00	1.426.700.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	61.221.169.865,00	24.312.390.364,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	5.713.562.662,00	4.497.339.523,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	101.401.163.147,00	53.699.216.104,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	5.090.169.960,00	4.402.820.426,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	11.081.452.415,00	6.255.288.408,00



Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	5.498.398.940,00	5.067.228.945,00
Beban Jasa Tenaga Caraka	188.570.961,00	158.645.843,00
Beban Jasa Tenaga Supir	942.084.256,00	1.212.092.752,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	210.942.726,00	125.180.000,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	555.250.000,00	578.850.000,00
Beban Jasa Tata Rias	10.750.000,00	25.999.996,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	80.133.779,00	71.871.280,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	205.845.175,00	399.197.885,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	6.253.020,11	172.100,36
Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	3.600.000,00	0,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.491.883.918,00	1.146.399.187,50
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	8.701.061.465,00	6.154.094.186,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	636.362.100,00	277.000.000,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	51.712.745,00	57.837.169,00
Beban Jasa Kalibrasi	9.324.000,00	7.512.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	108.559.731,00	84.650.500,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	21.545.000,00	0,00
Beban Jasa Pengukuran Tanah	12.903.000,00	151.818.400,00
Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	24.096.816.247,00	19.525.240.300,00
Beban Jasa Operator Kapal	1.781.565.300,00	1.864.811.059,00
Beban Tagihan Telepon	144.096.156,00	182.496.634,00
Beban Tagihan Air	2.402.544.251,00	753.453.843,00
Beban Tagihan Listrik	18.665.980.226,00	10.629.565.494,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.639.421.000,00	624.186.250,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.210.493.740,00	4.836.503.840,76
Beban Paket/Pengiriman	1.070.899.459,00	523.731.709,00
Beban Penambahan Daya	39.968.400,00	0,00
Beban Registrasi/Keanggotaan	30.865.737,50	13.611.900,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.246.347.240,00	1.267.716.506,82
Beban <i>Medical Check Up</i>	3.105.095.774,80	0,00
Beban Pengolahan Air Limbah	304.595.500,00	643.732.389,00
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	3.219.821.429,00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	23.044.101.900,00	21.687.380.700,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.956.602.668,00	2.138.268.229,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	664.093.856,00	320.490.226,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	277.134.544,00	60.537.947,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	34.112.906,25	110.709.019,57
Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	0,00	1.243.000,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	5.989.720.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi	4.073.009.600,00	0,00



Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Pekerja Rentan		
Beban Sewa Tanah Kering	41.000.000,00	15.000.000,00
Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	0,00	61.952.702,00
Beban Sewa <i>Electric Generating Set</i>	216.500.000,00	30.000.000,00
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.000.000,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.217.362.377,00	1.323.883.460,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	29.350.000,00	27.150.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.000.000,00	10.320.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	222.600.000,00	284.165.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	50.000.000,00	22.000.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	708.054.639,00	1.820.677.500,00
Beban Sewa Alat Pengolahan Lainnya	0,00	4.050.000,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	149.695.000,00	75.042.600,00
Beban Sewa Alat Pendingin	11.680.000,00	20.240.000,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	309.068.000,00	296.176.350,00
Beban Sewa Meja Rapat Pejabat	0,00	11.250.000,00
Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	0,00	900.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	458.635.000,00	396.423.968,83
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	274.650.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	0,00	180.000.000,00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	674.400.000,00	190.320.000,00
Beban Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	2.588.974,00
Beban Sewa Alat Laboratorium Umum	2.502.900,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Umum	42.500.000,00	221.304.000,00
Beban Sewa Komputer Jaringan	0,00	119.658.000,00
Beban Sewa Peralatan Jaringan	12.190.424,08	135.640.216,42
Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	252.330.000,00	16.838.583,67
Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	41.000.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.950.956.761,00	3.682.369.133,33
Beban Sewa Bangunan Gudang	710.263.643,33	915.832.375,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	35.000.000,00	144.300.000,00
Beban Sewa Bangunan Kesehatan	75.000.000,00	74.750.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.403.256.896,00	5.587.302.900,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	90.150.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	21.402.360,00	20.034.360,00
Beban Sewa Bangunan Terbuka	971.713.000,00	756.286.967,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	0,00
Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	346.666.672,00	246.666.672,00
Beban Sewa Asrama	1.640.369.600,00	1.658.163.996,00
Beban Sewa Hotel	1.439.344.310,33	1.740.988.397,00
Beban Sewa Bangunan Gedung	585.766.666,66	199.800.000,00



Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Tempat Tinggal Lainnya		
Beban Sewa Instalasi Lain	9.100.000,00	3.000.000,00
Beban Sewa Alat Musik	10.000.000,00	0,00
Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	8.200.000,00	16.700.000,00
Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	3.000.000,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	18.457.818,20	1.924.500,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	149.583.600,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	8.750.000,00	54.941.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	135.396.750,00	235.633.985,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	29.950.000,00	500.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.000.000.000,00	2.664.789.911,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	9.056.484.557,00	3.663.928.500,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	289.498.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	375.000.000,00	1.865.024.055,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	1.178.834.652,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	129.484.980,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	519.275.000,00	2.148.680.390,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	81.885.500,00	67.821.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	328.925.000,00	36.522.800,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	251.436.500,00	982.527.250,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	128.593.500,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	24.700.000,00	82.584.000,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	509.290.200,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	397.513.755,00	94.701.800,00



Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	599.792.000,00	104.200.000,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	60.126.300,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	199.993.700,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.724.562.870,00	799.478.055,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	99.644.700,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	1.089.312.500,00	184.926.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	1.885.526.637,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.509.633.300,00	952.508.506,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	99.067.000,00	99.998.790,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	678.382.050,00	196.803.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	400.000.000,00	500.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	0,00	150.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	79.451.000,00	847.137.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	9.221.816.176,00	6.034.308.137,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	280.000.000,00	891.352.024,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.262.228.140,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	1.250.000.000,00	99.345.000,00
Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata- Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	250.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	0,00	700.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	0,00	200.000.000,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	33.241.725,00	0,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	50.000.000,00	64.857.300,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	5.390.964.756,00	4.474.632.057,00
Beban Sosialisasi	5.915.631.000,00	10.236.395.500,00
Beban Bimbingan Teknis	2.423.882.008,00	1.056.289.030,00
Beban Diklat Kepemimpinan	638.842.400,00	1.102.959.100,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.755.626.875,00	3.432.762.331,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	212.085.890,00	26.907.300,00
Beban Beasiswa	14.702.190.000,00	11.516.560.000,00
Beban Penanganan Dampak Sosial	106.831.579,00	450.000,00

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Kemasyarakatan		
Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	0,00	56.600.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	509.806.947,00	69.347.320.641,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	614.724.540,00	668.534.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS	12.801.759.365,00	54.210.649.316,01
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	20.396.351.217,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.131.250.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	114.712.652.250,88
Jumlah	480.007.495.534,26	521.750.718.355,15

5.2.4.2.1.4	Beban Pemeliharaan	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		27.214.192.909,61	27.166.062.912,00

Jumlah tersebut di atas merupakan beban pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang milik daerah dan aset lain yang dikuasai selama Tahun Anggaran 2024. Rincian Beban Pemeliharaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.118
Rincian Beban Pemeliharaan – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan	750.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	99.983.250,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	98.176.164,00	194.622.320,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	32.540.652,00	30.991.098,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	309.249.708,00	289.562.275,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	12.956.247,00	8.393.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	4.995.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.159.519.535,00	7.945.857.720,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	114.590.240,00	119.740.799,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	488.404.546,00	1.053.168.440,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	171.897.940,00	90.731.862,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	785.988.380,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.049.684.577,00	1.423.474.053,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	334.136.270,00	49.985.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan	2.872.000,00	0,00



Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service		
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	41.820.000,00	37.500.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	0,00	27.417.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	94.909.551,00	170.695.800,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	715.048.463,00	335.159.762,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.492.500,00	19.613.223,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.281.930.079,00	946.246.191,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	61.929.660,00	102.416.200,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.507.793,00	3.549.999,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	1.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	2.272.581.125,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	302.739.405,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	296.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	1.299.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>	405.924.966,00	266.230.588,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	78.492.072,00	24.486.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>	213.090.000,00	10.646.939,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>	231.206.208,25	201.332.670,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	33.825.000,00	284.925.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	386.087.797,00	345.229.878,00
Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	49.395.000,00	10.000.000,00
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	99.560.000,00	199.170.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.392.714.606,36	5.400.637.352,00



Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	19.952.250,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	97.077.300,00	148.857.341,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	300.304.945,00	2.513.088.408,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	141.835.800,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	363.325.721,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.960.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	9.350.000,00	43.774.576,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	17.696.880,00	155.487.070,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	0,00	154.000.000,00
Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	9.990.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	0,00	1.907.579.822,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	229.888.437,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	576.895.488,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	178.906.951,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	3.437.670,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	26.975.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	17.962.000,00	19.952.750,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	615.522.130,00	0,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	204.856.549,00

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	20.520.000,00	19.975.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	89.355.000,00	9.715.830,00
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	28.500.000,00	29.700.000,00
Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Algae(Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-AlgaeBudidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	7.841.000,00	39.287.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	327.200.000,00	822.904.000,00
Jumlah	27.214.192.909.61	27.166.062.912.00

5.2.4.2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		<u>262.338.356.646.00</u>	<u>198.491.590.148.59</u>

Jumlah tersebut merupakan beban pemerintah daerah atas perjalanan yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka kedinasan. Rincian beban perjalanan dinas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.119
Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	231.515.786.465,00	187.723.906.466,59
Beban Perjalanan Dinas Tetap	629.175.786,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.751.435.228,00	4.112.192.604,00
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	6.262.619.300,00	2.867.522.595,00
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	13.928.368.682,00	2.467.284.035,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	4.250.971.185,00	1.320.684.448,00
Jumlah	262.338.356.646,00	198.491.590.148,59

5.2.4.2.1.6	Beban Subsidi	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		19.787.303.700,00	16.513.140.465,00

Beban Subsidi merupakan pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat selama tahun 2024. Rincian beban subsidi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.120
Rincian Beban Subsidi - LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	19.787.303.700,00	16.513.140.465,00



Jumlah	19.787.303.700,00	16.513.140.465,00
--------	-------------------	-------------------

5.2.4.2.1.7

Beban Hibah

31 Desember 2024

219.117.187.570,00

31 Desember 2023

158.218.075.976,00

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang dan barang yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan organisasi kemasyarakatan. Jumlah tersebut telah dibayarkan seluruhnya dalam Tahun 2024. Rincian Beban Hibah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.121 Rincian Beban Hibah – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	75.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.240.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	155.310.891.680,00	86.297.991.120,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.321.629.000,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	43.965.671.365,00	53.630.627.300,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.242.160.000,00	1.541.297.530,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.181.000.000,00	3.487.104.970,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.690.000,00	300.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada Koperasi	100.000.000,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	423.000.000,00	1.393.500.000,00
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.406.000.000,00	500.000.000,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.496.524.097,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.781.394.550,00	7.252.555.098,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	250.800.000,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.617.426.878,00	2.499.999.958,00
Jumlah	219.117.187.570,00	158.218.075.976,00

5.2.4.2.1.8

Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2024

2.859.081.400,00

31 Desember 2023

733.761.466,00

Adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp2.859.081.400,00 yang merupakan beban bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan bantuan sosial kepada masyarakat.



5.2.4.2.1.9	Beban Penyusutan & Amortisasi	31 Desember 2024 330.142.307.961,46	31 Desember 2023 305.033.292.718,40
-------------	-------------------------------	--	--

Beban Penyusutan terdiri dari Beban Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain, serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.4.2.1.9.1	Beban Penyusutan Aset	31 Desember 2024 322.603.465.200,46	31 Desember 2023 295.025.057.050,40
---------------	-----------------------	--	--

Adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu nya waktu.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), yang perhitungannya dilakukan secara bulanan. Perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa manfaat yang dimiliki masing-masing aset atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

Beban Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp322.603.465.200,46 adalah beban penyusutan atas Aset Tetap dan Aset Tetap yang di Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain.

Tabel 5.122
Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	122.074.920.578,46	115.571.339.951,40
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	42.934.797.693,00	37.759.510.722,00
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	156.775.998.498,00	141.279.916.363,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	817.748.431,00	414.290.014,00
Jumlah	322.603.465.200,46	295.025.057.050,40

5.2.4.2.1.9.2	Beban Amortisasi	31 Desember 2024 6.883.273.107,00	31 Desember 2023 10.008.235.668,00
---------------	------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Beban amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Beban Amortisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebesar Rp6.883.273.107,00.

5.2.4.2.1.10	Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2024 39.296.820,70	31 Desember 2023 661.951.582,80
--------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 adalah sebesar Rp39.296.820,70.

Tabel 5.123
Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	5.785.320,70	2.420.488,30
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	5.785.320,70	2.420.488,30
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	33.511.500,00	3.667.500,00

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan	32.079.000,00	3.667.500,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.432.500,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	655.863.594,50
Jumlah	39.296.820,70	661.951.582,80

5.2.4.2.1.11

Beban Transfer

31 Desember 2024

628.543.452.668,00

31 Desember 2023

583.974.347.271,00

Merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp628.543.452.668,00 terdiri dari:

Tabel 5.124
Rincian Beban Transfer

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	92.214.421.568,00	78.130.273.067,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten	348.428.350.112,00	335.865.576.431,00
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	72.585.000.000,00	69.877.070.279,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	115.315.680.988,00	100.101.427.494,00
Jumlah	628.543.452.668,00	583.974.347.271,00

a. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp440.642.771.680,00

Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp440.642.771.680,00 sesuai dengan hasil rekonsiliasi Badan Pendapatan Daerah dan Kabupaten/Kota.

Dari jumlah tersebut, yang telah disalurkan dari rekening kas daerah provinsi kepada masing-masing kabupaten/kota, adalah sebesar Rp336.426.911.141,00, sedangkan sisanya sebesar Rp104.215.860.539,00 belum disalurkan dan merupakan Utang Beban Transfer. Rincian beban transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.125
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah – LO

Uraian	Saldo 2024
Kabupaten Bulungan	121.387.315.814,00
Kabupaten Nunukan	103.743.781.311,00
Kabupaten Malinau	74.792.239.623,00
Kabupaten Tana Tidung	48.505.013.364,00
Kota Tarakan	92.214.421.568,00
Jumlah	440.642.771.680,00

b. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp187.900.680.988,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp187.900.680.988,00 adalah bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 5.126
Beban Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya

Jenis Bantuan Keuangan	Saldo 2024
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	72.585.000.000,00
Kabupaten Bulungan	42.835.000.000,00
Kabupaten Tana Tidung	29.750.000.000,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	115.315.680.988,00
Kabupaten Bulungan	28.822.384.483,00
Kabupaten Nunukan	31.597.448.792,00
Kabupaten Malinau	20.562.052.648,00
Kabupaten Tana Tidung	8.153.888.171,00
Kota Tarakan	26.179.906.894,00
Jumlah	187.900.680.988,00

Jumlah tersebut telah disalurkan dari Rekening Kas Daerah Provinsi ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota dalam Tahun 2024. Penyaluran Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

5.2.4.2.1.12	Beban Lain-lain	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		0,00	0,00

Adalah beban operasi yang tidak masuk kategori di atas. Saldo Beban Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

5.2.4.2.1.13	Beban Tidak Terduga	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		0,00	0,00

Adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Saldo Beban Tidak Terduga sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

5.2.4.3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	<u>31 Desember 2024</u> (26.816.334.897,34)	<u>31 Desember 2023</u> (1.574.175.798,00)
---------	--	--	---

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan informasi mengenai surplus/defisit kegiatan pemerintah daerah yang sifatnya tidak rutin, termasuk di antaranya adalah kegiatan penghapusan aset. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(26.816.334.897,34) merupakan nilai defisit atas adanya penghapusan Aset Tetap dan Persediaan seperti terlihat pada tabel



berikut.

Tabel 5.127
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No.	Jenis Aset	Saldo 2024 (Rp)
1	Aset Tetap	(26.795.103.657,34)
2	Persediaan	(21.231.240,00)
	Jumlah	(26.816.334.897,34)

5.2.4.4	Pos Luar Biasa	<u>31 Desember 2024</u> <u>(2.358.385.973,00)</u>	<u>31 Desember 2023</u> <u>(6.932.394.565,10)</u>
----------------	-----------------------	--	--

Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp(2.358.385.973,00), yang merupakan nilai bersih dari selisih pendapatan luar biasa dan beban luar biasa.

5.2.4.4.1	Pendapatan Luar Biasa	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		5.208.577.800.00	3.885.470.458.50

Pendapatan Luar Biasa merupakan penerimaan yang terjadi karena Penerimaan P3D atas peralihan kewenangan amanat UU 23/2014 pada Satuan Pendidikan Menengah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.128
Rincian Pendapatan Luar Biasa

Instansi Pemberi	Jenis Aset	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	Peralatan dan Mesin	0,00	3.868.558.583,50
	Aset Tetap Lainnya	0,00	2.000.000,00
	Aset Lainnya	0,00	14.911.875,00
Pemerintah Kota Tarakan	Gedung dan Bangunan	5.208.577.800,00	0,00
	Jumlah	5.208.577.800,00	3.885.470.458,50

5.2.4.4.2	Beban Luar Biasa	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		7.566.963.773,00	10.817.865.023,60

Beban luar biasa merupakan beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diproyeksikan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali pemerintah. Rincian pendapatan dan beban luar biasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.129
Rincian Pendapatan dan Beban Luar Biasa

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Pendapatan Luar Biasa		
	Penerimaan Barang Milik Daerah pada Sekolah Wilayah Kota Tarakan atas dasar UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	5.208.577.800,00	0,00
	Penerimaan Barang Milik Daerah pada Sekolah Wilayah Kab. Tana Tidung atas dasar UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	0,00	3.885.470.458,50
	Subtotal	5.208.577.800,00	3.885.470.458,50
2	Beban Luar Biasa		
	Belanja Tidak Terduga atas Bantuan Sosial kepada Masyarakat	4.682.983.256,00	9.299.622.210,00
	Pengembalian Dana BOS Kinerja ke Kas Negara	0,00	25.000.000,00
	Pengembalian Dana BOSP ke Kas Negara	334.723.125,00	0,00
	Pengembalian Dana <i>Block Grant</i> Pemerintah Pusat ke Kas Negara	0,00	32.191.046,00

 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		LKPD 2024	
No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
	Reduksi Nilai Persediaan Obat yang telah kedaluarsa (<i>expired</i>)	0,00	1.461.051.767,60
	Pemindahbukuan Kelebihan Setor UPTD Pelabuhan Tenggayu I Tarakan	3.559.000,00	0,00
	Pembayaran Bantuan Akomodasi dan Transportasi Pengobatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu	359.225.892,00	0,00
	Bantuan Sosial Tunai dan Sembako	2.186.472.500,00	0,00
	Subtotal	7.566.963.773,00	10.817.865.023,60
Total		(2.358.385.973,00)	(6.932.394.565,10)

5.2.4.5

Surplus/Defisit – LO

31 Desember 2024

185.777.496.530,71

31 Desember 2023

601.845.771.337,15

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara realisasi total Pendapatan - LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp185.777.496.530,71 dengan rincian:

- Pendapatan – LO	Rp	3.336.554.640.672,19
- Beban	Rp	3.121.602.423.271,14
- Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	214.952.217.401,05
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	(26.816.334.897,34)
- Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	188.135.882.503,71
- Pos Luar Biasa	Rp	(2.358.385.973,00)
Surplus/Defisit -LO	Rp	185.777.496.530,71

5.2.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas menggambarkan aliran kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Non Anggaran yang terjadi di Bendahara Umum Daerah.

5.2.5.1

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024

594.195.384.404,00

31 Desember 2023

500.336.984.699,23

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2024 sebesar Rp594.195.384.404,00 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Rp	3.458.972.751.470,97
Arus Kas Keluar	Rp	2.864.777.367.066,97
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	594.195.384.404,00

5.2.5.1.1

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024

3.458.972.751.470,97

31 Desember 2023

3.091.012.760.999,05

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan kas dan setara kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah. Arus Kas Masuk dari



Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2024 sebesar Rp3.458.972.751.470,97, dengan rincian sebagai berikut:

- Penerimaan Pajak Daerah Rp 761.219.619.467,00
Penerimaan Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah sampai dengan 31 Desember 2024.
- Penerimaan Retribusi Daerah Rp 10.789.764.538,16
Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sampai dengan 31 Desember 2024.
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Rp 11.371.469.793,77
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dividen atas penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2024.
- Penerimaan Lain - lain PAD yang sah Rp 250.313.385.069,04
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah sampai dengan 31 Desember 2024.
- Penerimaan Dana Transfer Pemerintah Rp 2.404.627.387.907,00
Pusat
Penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari APBN dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sampai dengan 31 Desember 2024.
- Penerimaan Insentif Fiskal Rp 12.648.494.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja tertentu sampai dengan 31 Desember 2024.
- Penerimaan Hibah Rp 6.609.420.000,00
Penerimaan Hibah merupakan penerimaan pemerintah daerah yang diperoleh dari pemberi hibah tanpa kewajiban untuk dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2024.
- Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Rp 1.393.210.696,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan sampai dengan 31 Desember 2024.

5.2.5.1.2	Arus Kas Keluar dari	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Aktivitas Operasi	2.864.777.367.066,97	2.590.675.776.299,82

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi merupakan pengeluaran kas dan setara kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2024 sebesar Rp2.864.777.367.066,97, dengan rincian sebagai berikut.

- Pembayaran Pegawai Rp 868.496.469.825,00
merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2024.
- Pembayaran Barang dan Jasa Rp 1.218.671.997.282,97
merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang



- pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aset tetap dan belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2024.
- Pembayaran Subsidi Rp 19.787.303.700,00 merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat sampai dengan 31 Desember 2024.
 - Pembayaran Belanja Hibah Rp 222.697.836.570,00 adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat sampai dengan 31 Desember 2024.
 - Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Rp 3.229.203.787,00 adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
 - Pembayaran Tak Terduga Rp 7.566.963.773,00 merupakan belanja yang pengeluarannya tidak dapat diduga secara pasti baik itu besaran jumlah angkanya maupun realisasinya dan juga untuk pembayaran bantuan sosial tidak terencana sampai dengan 31 Desember 2024.
 - Pembayaran Belanja Transfer Rp 524.327.592.129,00 merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sampai dengan 31 Desember 2024.

5.2.5.2 Arus Kas dari Aktivitas 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Investasi (726.129.028.526,09) (666.639.401.736,00)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2024 sebesar Rp(726.129.028.526,09) dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Rp	52.623.000,00
Arus Kas Keluar	Rp	726.181.651.526,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp	(726.129.028.526,09)

5.2.5.2.1 Arus Kas Masuk dari 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Aktivitas Investasi 52.623.000,00 0,00

Arus kas masuk dari aktivitas investasi pada akhir 2024 sebesar Rp52.623.000,00 merupakan nilai dari perolehan sumber daya ekonomi hasil penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan berupa hasil atas penjualan peralatan dan mesin dan hasil atas penjualan gedung dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

- Penjualan atas Peralatan dan Mesin	Rp.	35.678.000,00
- Penjualan atas Gedung dan Bangunan	Rp.	16.945.000,00
- Total Penjualan atas Barang Milik Daerah	Rp.	52.263.000,00



5.2.5.2.2 **Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi** **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
726.181.651.526,09 666.639.401.736,00

Arus kas keluar dari aktivitas investasi pada akhir 2024 sebesar Rp726.181.651.526,09 merupakan pengeluaran kas bruto dalam rangka pelepasan sumber daya ekonomi berupa perolehan Aset Tetap, Aset Lainnya, dan penyertaan modal.

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

- Perolehan Aset Tetap Tanah Rp 36.362.332.622,00

Perolehan Aset Tetap Tanah merupakan biaya pembelian tanah dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai.

- Perolehan Peralatan dan Mesin Rp. 163.713.917.310,00

Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2024 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

- Perolehan Gedung dan Bangunan Rp. 208.505.767.057,00

Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

- Perolehan Jalas, Irigasi, dan Jaringan Rp. 292.653.376.604,00

Perolehan Jalas, Irigasi, dan Jaringan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

- Perolehan Aset Tetap Lainnya Rp. 743.850.360,00

Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2024 untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai.

- Perolehan Aset Lainnya Rp. 4.202.407.573,09

Perolehan aset lainnya mencakup semua bentuk perolehan aset yang tidak termasuk dalam kategori perolehan aset tetap atau perolehan aset lancar.

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp. 20.000.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2024 berupa penyertaan modal/investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada PT Bank Kaltimara.

5.2.5.3 **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan** **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
 (0,00) (0,00)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2024 sebesar Rp0,00.



5.2.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2024 0,00	31 Desember 2023 8.563.192,61
---------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya dan mutasi antar jenis kas.

Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Transaksi Non Anggaran berasal dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Transaksi Non Anggaran meliputi:

- Arus kas masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan saldo sisa UP tahun sebelumnya.
- Arus kas masuk dari Kas Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, maupun Kas Sekolah.
- Arus kas keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Rp	214.432.729.338,71
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	214.425.593.533,71
Arus Kas Keluar	Rp	214.425.593.533,71
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	214.425.593.533,71
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00

Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.130
Rincian Penerimaan dan Pengeluaran PFK

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	15.710.466.908,00	15.710.466.908,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.514.195.926,00	2.514.195.926,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	232.446.713,00	232.446.713,00
4	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	23.813.339.476,00	23.813.339.476,00
5	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	14.120.644,00	14.120.644,00
6.	Iuran Wajib Pegawai	126.132.942,00	126.132.942,00
7	Iuran Wajib Pegawai 1%	5.865.161.928,00	5.865.161.928,00
8	Taspen	938.872.916,00	938.872.916,00
9	Askes	39.260.161,00	39.260.161,00
10	Lainnya	1.294.098.540,81	1.294.098.540,81
11	Pajak Pertambahan Nilai	103.669.698.552,67	103.669.698.552,67
12	Pajak Penghasilan Ps 22	4.795.498.039,67	4.795.498.039,67
13	PPh 21	39.102.803.457,60	39.102.803.457,60
14	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	89.078.444,00	89.078.444,00
15	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	518.182,00	518.182,00
16	Pajak Penghasilan Ps 23	2.960.868.120,96	2.960.868.120,96
17	Pajak Penghasilan Ps 25	45.784,00	45.784,00
18	Pajak Penghasilan Ps 26	720.000,00	720.000,00
19	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	12.973.240.651,00	12.973.240.651,00

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 mengalami perubahan nilai dari nilai hasil audit BPK RI, semula tersaji sebesar Rp(93.059.229.965,56) menjadi Rp8.563.192,61 pada Laporan Tahun 2024 disajikan menyesuaikan format Laporan Arus Kas pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Perbedaan nilai tersebut disebabkan pos akun Koreksi SiLPA Rp(93.067.793.158,17) yang disajikan di bagian berbeda pada Laporan Arus Kas.

5.2.5.5

Kenaikan/(Penurunan)
Bersih Kas

31 Desember 2024

(131.933.644.122,09)

31 Desember 2023

(166.293.853.844,16)

Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2024 sebesar Rp131.933.644.122,09 menunjukkan adanya defisit realisasi APBD Tahun 2024 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih kecil dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 5.131 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	594.195.384.404,00
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(726.129.028.526,09)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0.00
Penurunan Kas Bersih		(131.933.644.122,09)

5.2.5.6

Saldo Awal Kas

31 Desember 2024

149.768.722.962,58

31 Desember 2023

409.090.647.713,74

Saldo awal kas di Kas Daerah sebesar Rp149.768.722.962,58 terdiri atas saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp149.743.726.516,41 dan Penambahan saldo kas lainnya atas kas yang belum tersaji tahun sebelumnya sebesar Rp24.996.446,17. Perhitungan Saldo Awal Kas Daerah mengikutsertakan Kas Lainnya akibat dari penyesuaian format Laporan Arus Kas. Rincian saldo awal kas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.132
Rincian Saldo Awal Kas

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	137.659.217.241,37
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.310.824,22
3	Kas di BLUD	11.798.137.662,00
4	Kas di BOS	231.629.445,90
5	Kas Lainnya	34.705.537,92
6	Kas di Bendahara Penerimaan	14.725.805,00
7	Kas yang belum tersaji tahun sebelumnya	24.996.446,17
Total		149.768.722.962,58

5.2.5.7

Saldo Akhir Kas

31 Desember 2024

17.548.019.227,49

31 Desember 2023

149.729.000.711,41

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.548.019.227,49 dapat dijabarkan sebagai berikut:

	Uraian	Mutasi
a.	Saldo Awal Kas	Rp 149.768.722.962,58

 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		LKPD 2024
b. Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp	(131.933.644.122,09)
c. Koreksi SiLPA	Rp	(287.059.613,00)
Saldo Akhir Kas	Rp	17.548.019.227,49

Rincian atas Saldo Akhir Kas dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 5.133
Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	5.725.309.574,79
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.433.267,97
3	Kas di BLUD	10.698.134.567,95
4	Kas di BOS	1.106.023.965,58
5	Kas Lainnya	10.307.851,20
6	Kas di Bendahara Penerimaan	6.810.000,00
Total		17.548.019.227,49

5.2.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
- d) Ekuitas akhir

Perubahan Ekuitas periode Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp	8.082.480.187.118,96
Surplus/Defisit – LO	Rp	185.777.496.530,71
	Rp	8.268.257.683.649,67
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(24.171.955.249,17)
Ekuitas Akhir	Rp	8.244.085.728.400,50

5.2.6.1	Ekuitas Awal	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		8.082.480.187.118,96	7.514.931.922.017,64

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Awal adalah sebesar Rp8.082.480.187.118,96. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2023 (*audited*).

5.2.6.2	Surplus/Defisit – LO	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		185.777.496.530,71	601.884.126.470,15

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan - LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.





Sesuai dengan Laporan Operasional, saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp185.777.496.530,71.

5.2.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	31 Desember 2024 0,00	31 Desember 2023 0,00
---------	--	--------------------------	--------------------------

Merupakan koreksi-koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya.

5.2.6.4	Koreksi Ekuitas Lainnya	31 Desember 2024 (24.171.955.249,17)	31 Desember 2023 (34.297.506.235,83)
---------	-------------------------	---	---

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp(24.171.955.249,17) adalah koreksi yang berdampak terhadap laporan keuangan sebelumnya, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.134
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Saldo Awal Dana Kas BOS pada Satuan Pendidikan Menengah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara TA 2024	51.000,00
2	Koreksi Saldo Awal Dana BOP pada Satuan Pendidikan Menengah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara TA 2024	(3.190.632,14)
3	Koreksi Saldo Awal Dana <i>Blockgrant</i> pada Satuan Pendidikan Menengah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara TA 2024	(1.138.365,00)
4	Koreksi Saldo Awal Penyajian Utang Beban pada Dinas Kesehatan, RSUD dr. H. Jusuf SK, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman	(13.387.404.323,69)
5	Koreksi Saldo Awal Penyajian Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD dr. H. Jusuf SK	16.408.914,00
6	Penyajian nilai Kas Lainnya akibat kesalahan penyetoran pada RSUD dr. H. Jusuf SK	100.000.000,00
7	Koreksi Saldo Awal Penyajian Piutang pada RSUD dr. H. Jusuf SK	(66.841.256,00)
8	Pengakuan Utang Lebih Bayar Dana Transfer pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	(11.099.626.000,00)
9	Selisih pembulatan Utang Lebih Bayar Dana Transfer pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	5.441,00
10	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman, Dinas Kehutanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Umum, UPT KPH Tana Tidung, dan Dinas Lingkungan Hidup	5.484.452.021,30
11	Koreksi Saldo Awal Persediaan pada Dinas Kehutanan, UPT KPH Bulungan, UPT KPH Tarakan, UPT KPH Tana Tidung, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	528.723.563,00
12	Koreksi Akumulasi Depresiasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD dr. H. Jusuf SK, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman	(998.221.235,00)
13	Koreksi Akumulasi Amortisasi pada Dinas Lingkungan Hidup	(9.154.613,00)
14	Koreksi Saldo Awal atas Pengakuan Kerugian PT Migas Kaltara Jaya TA 2023	(4.092.743.157,00)
15	Penyesuaian nilai Pendapatan Diterima di Muka atas perbaikan perhitungan <i>cutoff</i> waktu sewa bangunan (LHR Inspektorat)	(154.531.916,67)



No.	Uraian	Nilai (Rp)
16	Pengurangan nilai penyisihan piutang atas kelebihan penyajian piutang jasa layanan kesehatan di RSUD dr. H. Jusuf SK	(7.911.386,97)
17	Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan atas Reklasifikasi Antar Rincian Objek Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD dr. H. Jusuf SK, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Biro Administrasi Pimpinan, Badan Penghubung, UPT KPH Bulungan, UPT KPH Tana Tidung, dan Inspektorat	177.173.842,00
18	Penyesuaian atas Kurang saji Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Terdapat SK Penetapan tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	9,00
19	Penyesuaian nilai akumulasi depresiasi Gedung & Bangunan atas kurang catat penerimaan Hibah Flat/Rumah Susun Permanen Rusun ASN Pemprov Kalimantan Utara	(658.007.154,00)
JUMLAH		(24.171.955.249,17)

5.2.6.5

Ekuitas Akhir

31 Desember 2024

31 Desember 2023

8.244.085.728.400,50

8.082.480.187.118,96

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp8.244.085.728.400,50. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2024.



BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada

Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 50 (lima puluh) kecamatan dan 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) desa/kelurahan. Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah sah sebagai daerah otonomi penuh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Utara yang ke-5.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 72.567,49 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk ± 738.163 jiwa (tahun 2013). Secara geografis terletak pada posisi antara $114^{\circ}35'22''$ - $118^{\circ}03'00''$ Bujur Timur, $4^{\circ}24'55''$ - $1^{\circ}21'36''$ Lintang Utara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah Utara, Laut Sulawesi di sebelah Timur, Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Selatan dan Malaysia di sebelah Barat.

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2024 sebanyak 770.627 penduduk yang terdiri dari 403.628 penduduk laki-laki dan 366.999 ribu penduduk perempuan. Dari 255.310 penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan 227.460 penduduk, Kabupaten Bulungan 170.239 penduduk, Kabupaten Malinau 87.582 penduduk dan Kabupaten Tana Tidung 30.036 penduduk.

Kepadatan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 mencapai 10 penduduk/km². Kepadatan penduduk di 5 (lima) Kabupaten Kota dan Provinsi Kalimantan Utara cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tarakan mencapai 993 penduduk/km² dan terendah di Kabupaten Kabupaten Tana Tidung yang hanya mencapai 2 penduduk/km².

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari berbagai aspek yang mempunyai letak strategis, baik untuk tempat tinggal, untuk mengembangkan usaha maupun untuk pendidikan, akan tetapi letak yang strategis ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, seperti penambahan jumlah penduduk yang tidak terkontrol dan tertata rapi, yang berdampak pada kurang berkualitasnya pelayanan masyarakat. Untuk memahami permasalahan di Wilayah

Provinsi Kalimantan Utara ini, maka baik pemerintah maupun masyarakat perlu memahami kondisi dan permasalahan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, baik dari aspek geografis, kependudukan, pemerintah, perekonomian dan kondisi sosial kemasyarakatan.

6.2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Provinsi Kalimantan



Utara juga menyelenggarakan urusan pemerintah daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pada tahun 2024, urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Utara meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang, yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.

Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pada Tahun 2022 dilakukan pengukuhan terhadap sebagian SKPD yang mengalami perubahan Struktur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi. Untuk Sekretariat Daerah Biro humas dan Protokol diganti menjadi Biro Administrasi Pimpinan, dan bertambah Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Tabel 6.1
Rincian Urusan Pemerintahan dan SKPD Pelaksana

No	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Pendidikan	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Cabang Dinas Tarakan 3. Cabang Dinas Nunukan 4. Cabang Dinas Malinau-KTT 5. UPT Taman Budaya 6. UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (APBD) Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)
3	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	Kententraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
II	URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
3	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan



No	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana
		Kesehatan Masyarakat Veteriner
4	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
5	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Perhubungan	Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Tengkeyu I UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung
8	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	URUSAN PILIHAN	
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan UPT Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata
3	Kehutanan	Dinas Kehutanan UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan UPT KPH Dinas Kehutanan Kota Tarakan UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Tidung
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
IV	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah -Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah -Biro Kesejahteraan Rakyat -Biro Administrasi Pembangunan -Biro Organisasi -Biro Umum -Biro Administrasi Pimpinan -Biro Pengadaan Barang dan jasa -Biro Hukum
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
4	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah UPT Bapenda Kabupaten Bulungan UPT Bapenda Kota Tarakan UPT Bapenda Kabupaten Nunukan UPT Bapenda Kabupaten Malinau UPT Bapenda Kabupaten Tana Tidung
5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
6	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



No	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana
7	Pengawasan	Inspektorat
V	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021- 2026 yang telah diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam lembaran daerah Provinsi Kalimantan Utara Pasal 3 yang bertujuan sebagai berikut:

Pedoman dan panduan bagi seluruh penyelenggara pembangunan dalam jangka menengah daerah;

- a. Mewujudkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Pedoman dan panduan dalam penyusunan Renstra SKPD;
- c. Pedoman dan panduan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
- d. Pedoman dan panduan dalam penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e. Menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2021-2026 yaitu:

1) Visi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021- 2026 adalah **“TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Berubah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya alam daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.

Maju dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurugi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta



usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya sarana dan prasarana yang modern, terpadu, dan merata sampai keseluruhan desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.

Sejahtera dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2) Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui tiga misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
- Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
- Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
- Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
- Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
- Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
- Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
- Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;



- Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;
- Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing- masing Kabupaten/Kota;
- Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun;
- Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Penyelenggaraan pembangunan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 atau 1 (satu) tahun anggaran menghadapi permasalahan yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Pertumbuhan penduduk dan penyebarannya;
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
5. Kualitas dan cakupan layanan infrastruktur;
6. Kualitas lingkungan hidup untuk terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara *Green Province*;
7. Adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim;
8. Pemerintah daerah yang efektif dan efisien;
9. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia;
10. Penegakan dan harmonisasi produk hukum;
11. Pengelolaan aset daerah;
12. Pelestarian budaya lokal;
13. Pengembangan industri wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
14. Harmonisasi perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten kota;
15. Daerah perbatasan;
16. Penanggulangan penduduk miskin;
17. Pasar Global dan *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)*;
18. Keterbatasan energi dan pengembangan energi baru dan terbarukan;
19. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial;
20. Pemerataan pembangunan antar daerah; dan
21. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.



6.4. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun sejak berdiri sebagai provinsi baru serta untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan maka perlu melakukan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.

Pengertian dari Mutasi itu sendiri adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke Perwakilan Negara Indonesia di Luar Negeri serta atas permintaan sendiri. Sedangkan yang dimaksud Promosi jabatan adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi.

Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan ASN pada rutinitas pekerjaan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya ASN dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain dibidang yang berbeda pada suatu tempat. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi diwaktu mendatang.

Adapun Mutasi dan Promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 31 Januari 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional, Dalam penggantian jabatan tersebut terdiri dari 80 (delapan puluh) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami perubahan jabatan. Mutasi yang kedua dilakukannya pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada tanggal 31 Mei 2024 terdiri dari 5 (lima) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Mutasi yang ketiga dilakukannya pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada tanggal 30 September 2024 sebanyak 2 (dua) orang. Mutasi yang keempat dilakukan Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian atau *inpassing* pada tanggal 27 Desember 2024 sebanyak 9 (sembilan) orang.

Mutasi dan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2024 berjumlah 93 ASN yang dilantik, diantaranya adalah 7 (tujuh) orang Pimpinan Tinggi Pratama, dan 89 (delapan puluh sembilan) Jabatan Fungsional Tertentu. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Rincian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Tanggal Mutasi Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah
31 Januari 2024	Pimpinan Tinggi Pratama	0
	Administrator	0
	Pengawas	0
	Fungsional Tertentu*	80
31 Mei 2024	Pimpinan Tinggi Pratama	5
	Administrator	0
	Pengawas	0
	Fungsional Tertentu	0
30 September 2024	Pimpinan Tinggi Pratama	2
	Administrator	0
	Pengawas	0
	Fungsional Tertentu	0
27 Desember 2024	Pimpinan Tinggi Pratama	0
	Administrator	0
	Pengawas	0
	Fungsional Tertentu	9



(Sumber data berasal dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.)

Dari data di atas dapat disimpulkan, tidak banyak pergantian jabatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2024, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berikut adalah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2024:

1. Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

Data jumlah pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Rincian Jumlah Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas

Jabatan	Jumlah ASN
Pimpinan Tinggi Madya	1
Pimpinan Tinggi Pratama	34
Administrator	162
Pengawas	174
Total	371

2. ASN berdasarkan Jabatan

Data jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2024, terdapat Penambahan 88 ASN yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 83 orang dan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 5 orang, adapun rincian jumlah ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4
Rincian jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Uraian Jabatan		Jumlah ASN
Jabatan Struktural		371
-	JPT Madya	1
-	JPT Pratama	34
-	Administrator	162
-	Pengawas	174
-	Widyaiswara	7
-	Guru dan Pengawas Sekolah	1.382
-	Dokter dan Tenaga Kesehatan	562
-	Auditor dan Pengawas Pemerintahan	43
-	Tenaga Teknis Lainnya	506
Jabatan Fungsional Umum		1.359
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)		592

Dari data di atas dapat disimpulkan, jumlah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2024 adalah 4.822 orang yang tersebar di seluruh SKPD/Badan/Biro/UPT/UPTD/Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, baik yang berada di wilayah Kalimantan Utara maupun yang berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara, seperti Badan Penghubung, UPT dan UPTD serta SMK dan SMA.

Selain mutasi dan penggantian, selama kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menerima mutasi masuk dan mutasi keluar atau pindahan Aparatur Sipil Negara dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.



Pada tahun 2024, juga terdapat pegawai yang telah masuk masa pensiun, dalam hal ini pensiun pegawai dan pensiun janda/duda merupakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa ASN selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Adapun pegawai yang pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 6.5
Jumlah Pemberhentian ASN Tahun 2024

No	Jenis Pemberhentian	Jumlah
1.	Batas Usia Pensiun	48 orang
2.	Meninggal Dunia	15 orang
3.	Atas Permintaan Sendiri	2 orang
Total		65 orang

6.5. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembentuk kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Pembentukan perangkat, menurut PP tersebut dilakukan berdasarkan asas: a) urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, b) intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah, c) efisiensi, d) efektivitas, e) pembagian habis tugas, f) rentang kendali, g) tata kerja yang jelas, dan h) fleksibilitas.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari menteri. Menteri sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan perda kepada Gubernur, Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya perda.

Apabila dalam waktu 15 hari, menteri sebagai wakil pemerintah pusat tidak memberikan jawaban, perda sebagaimana dimaksud dianggap telah mendapat persetujuan.

Perangkat daerah provinsi terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas dan Badan.

PP Nomor 72 tahun 2019 menegaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi yang melekat dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal.

6.6. Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menyelenggarakan pelayanan publik yang berintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi bagi masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai bentuk kepastian hukum dan penguatan komitmen antara penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan gubernur tersebut salah satunya meliputi penyediaan pelayanan



administrasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menyatukan seluruh pemrosesan perizinan dan non perizinan dalam satu pintu. Kewenangan DPM-PTSP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Mekanisme pelayanan perizinan telah dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu, sehingga sangat memudahkan bagi pelaku usaha/investor.

BAB VII. PENUTUP

- 7.1. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri atas:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Arus Kas;
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 7.2. Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.459.025.374.470,97 atau 89,78% dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp3.852.949.417.741,00.
- 7.3. Sedangkan realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.570.959.018.593,06, terdiri dari :
- | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| • Belanja Operasi | Rp | 2.332.882.811.164,97 |
| • Belanja Modal | Rp | 706.181.651.526,09 |
| • Belanja Tak Terduga | Rp | 7.566.963.773,00 |
| • Tranfer | Rp | 524.327.592.129,00 |
| Jumlah | Rp | 3.570.959.018.593,06 |
- 7.4. Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada akhir tahun adalah sebesar Rp17.548.019.227,49.
- 7.5. Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2024 menunjukan jumlah Aset Rp Rp8.585.620.356.198,58, jumlah Kewajiban Rp341.534.627.798,08 dan Jumlah Ekuitas Rp8.244.085.728.400,50 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp8.585.620.356.198,58.
- 7.6. Laporan Operasional (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.336.554.640.672,19 sedangkan Beban Operasional sebesar Rp3.121.602.423.271,14. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp(26.816.334.897,34). Surplus dari Kegiatan Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp188.135.882.503,71, Pendapatan Luar Biasa Rp5.208.577.800,00 dan Beban Pos Luar Biasa sebesar Rp7.566.963.773,00 sehingga Surplus LO adalah Rp185.777.496.530,71.
- 7.7. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 menggambarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp594.195.384.404,00; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(726.129.028.526,09); Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (Rp0,00); dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp7.915.805,00 maka Saldo Akhir Kas sebesar Rp17.541.209.227,49.



- 7.8. Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp8.244.085.728.400,50. Bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal sebesar Rp8.082.480.187.118,96; maka terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp161.605.541.281,54.

Demikian CaLK ini, semoga dapat memperjelas semua pihak dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi maju dan yang terdepan.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Piutang Pajak Daerah	170.452.310,00	146.747.717,00	158.165.807,00	159.034.220,00
		Piutang Retribusi	2.530.000,00	3.490.000,00	2.530.000,00	3.490.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	86.575.342,46	-	86.575.342,46	0,00
2	RSUD dr. H. JUSUF SK	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	45.470.394.285,07	204.257.364.050,82	206.557.508.137,85	43.170.250.198,04
3	DINAS KEHUTANAN	Piutang Retribusi	53.550.000,00	53.250.000,00	53.550.000,00	53.250.000,00
	UPTD. PELABUHAN TENGGAYU II	Piutang Retribusi	-	39.595.350,00	-	39.595.350,00
4	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	261.986.301,00	-	261.986.301,00
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.518,00	164.799.761.000,00	7.518,00	164.799.761.000,00
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Piutang Lainnya	-	426.039.120,00	-	426.039.120,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	22.101.127,00	-	-	22.101.127,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Piutang Retribusi	5.200.000,00	25.058.503,34	5.200.000,00	25.058.503,34
		Piutang Lainnya	4.464.246.961,00	423.144.000,00	1.096.494.177,00	3.790.896.784,00
	Total		50.275.057.543,53	370.436.436.042,16	207.960.030.982,31	212.751.462.603,38

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024



NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	PIUTANG PAJAK DAERAH	159.034.220,00	15.753.234,20	143.280.985,80
2	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	121.393.853,34	33.511.500,00	87.882.353,34
3	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	43.454.337.626,04	21.586.427.400,33	21.867.910.225,71
		43.734.765.699,38	21.635.692.134,53	22.099.073.564,85

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024



NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
NIHIL				

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



No 1	Tahun 2	Nama 3	Dasar Hukum Penyertaan 4	Bentuk 5	Jumlah Penyertaan 6	Koreksi Laba/Rugi 8	Penyertaan Modal 9	Jumlah Modal 10	Sisa Modal 11	Hasil 12	Jumlah 13	Jumlah Sisa Modal 14
1	2024	PT. Bank Kaltimara	1) Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Bank Pembangunan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 2) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.29/2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.	Pernyataan Modal dalam bentuk Kas	235.000.000.000,00		20.000.000.000,00			-	-	255.000.000.000,00
2	2024	PT Benuanta Kaltara Jaya	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintan Daerah pada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya	Pernyataan Modal dalam bentuk Kas	5.467.296.921,00		-			-	-	5.467.296.921,00
3	2024	PT Migas Kaltara Jaya	Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya	Pernyataan Modal dalam bentuk Kas	7.987.212.702,00	-4.092.743.157,00	-					3.894.469.545,00
					248.454.509.623,00	(4.092.743.157,00)	20.000.000.000,00	-	-	-	-	264.361.766.466,00

GOVERNOR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.031.271.050.801,07	163.004.747.402,87	95.142.379.735,50	1.099.133.418.468,44
2	DINAS KESEHATAN	82.119.995.128,35	8.617.836.889,00	7.669.199.800,00	83.068.632.217,35
3	RSUD	505.729.367.704,09	94.361.057.611,40	67.380.593.517,52	532.709.831.797,97
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	4.068.768.056.454,27	906.334.071.114,50	657.808.624.453,16	4.317.293.503.115,61
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	599.519.308,00	120.182.000,00	279.844.594,00	439.856.714,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.703.320.312,99	1.695.256.000,00	808.593.567,00	2.589.982.745,99
7	DINAS SOSIAL	6.159.129.690,43	1.930.414.090,00	1.646.847.306,00	6.442.696.474,43
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	914.883.539,00	163.101.000,00	71.896.949,00	1.006.087.590,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	554.319.977,00	307.474.000,00	208.946.543,00	652.847.434,00
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	8.649.474.310,00	2.043.466.200,00	862.858.420,00	9.830.082.090,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.097.175.038,20	878.588.800,00	1.553.081.747,00	15.422.682.091,20
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	847.994.143,00	788.715.637,00	507.975.682,00	1.128.734.098,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	387.433.693,00	141.820.201,00	154.749.953,00	374.503.941,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	238.127.363.625,16	39.685.167.170,00	28.549.818.717,75	249.262.712.077,41
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN	25.458.398.288,20	2.932.692.760,00	2.692.413.182,00	25.698.677.866,20
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	896.588.061,00	151.200.000,00	237.797.279,00	809.990.782,00
17	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.382.980.082,00	1.222.860.720,00	688.310.596,00	1.917.530.206,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	16.585.503.374,67	717.947.219,00	669.073.868,00	16.634.376.725,67
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	36.951.804.790,27	24.221.235.540,02	20.026.205.113,02	41.146.835.217,27
20	DINAS PARIWISATA	695.117.218,00	443.667.000,00	165.014.119,00	973.770.099,00
21	DINAS KEHUTANAN	66.786.484.703,64	25.977.283.203,00	16.499.923.923,00	76.263.843.983,64
22	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	606.434.438.385,62	22.320.176.290,00	40.085.942.681,00	588.668.671.994,62
23	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	77.407.321.042,45	11.986.956.130,00	5.864.046.226,00	83.530.230.946,45
24	SEKRETARIAT DAERAH	20.843.459.454,00	7.823.291.567,41	6.507.543.720,00	22.159.207.301,41
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	3.320.409.970,00	2.601.977.550,00	1.506.699.833,00	4.415.687.687,00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG	1.231.304.865,00	848.531.800,00	705.427.528,00	1.374.409.137,00
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	160.078.647.482,00	34.037.644.888,00	20.697.600.192,00	173.418.692.178,00
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.364.425.473,00	21.732.616.760,56	20.757.521.264,56	30.339.520.969,00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	676.141.498,00	3.324.428.000,00	711.787.167,00	3.288.782.331,00
30	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.802.147.122,00	637.916.400,00	474.134.017,00	1.965.929.505,00
31	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	529.726.887,00	361.500.000,00	513.983.758,00	377.243.129,00
32	BADAN PENGHUBUNG	23.877.290.904,00	223.122.099,00	283.368.988,00	23.817.044.015,00
33	INSPEKTORAT DAERAH	4.086.478.157,00	1.242.500.129,32	1.392.010.288,32	3.936.967.998,00
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	168.513.582,00	666.480.000,00	627.075.916,00	207.917.666,00
JUMLAH		7.040.506.265.064,41	1.383.545.926.172,08	1.003.751.290.643,83	7.420.300.900.592,66

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024



No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	1.876.910.986.015,12	55.020.993.787,87	5.934.369.472,00	1.925.997.610.330,99
2	Peralatan dan Mesin	1.403.150.044.281,00	204.968.327.472,28	60.750.713.118,10	1.547.367.658.635,18
3	Gedung dan Bangunan	2.135.668.950.617,39	476.770.435.433,00	171.248.704.742,31	2.441.190.681.308,08
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	3.139.207.051.665,98	312.762.778.362,31	213.020.603.757,00	3.238.949.226.271,29
5	Aset Tetap Lainnya	22.690.023.838,01	3.733.957.586,02	1.236.860.798,02	25.187.120.626,01
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.277.389.663.931,64	211.891.521.875,50	226.932.968.592,16	1.262.348.217.214,98
	Nilai Perolehan Aset Tetap	9.855.016.720.349,14	1.265.148.014.516,98	679.124.220.479,59	10.441.040.514.386,53
7	Akumulasi Penyusutan	-2.814.510.455.284,73	-324.627.070.164,24	-118.397.911.655,10	-3.020.739.613.793,87
	Nilai Buku Aset Tetap	7.040.506.265.064,41	940.520.944.352,74	560.726.308.824,49	-3.020.739.613.793,87
	JUMLAH	7.040.506.265.064,41	940.520.944.352,74	560.726.308.824,49	7.420.300.900.592,66

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			TANAH	PERALATAN	GEDUNG DAN	JALAN, IRIGASI	TANAH	PERALATAN	GEDUNG DAN	JALAN, IRIGASI		
1	SEKRETARIAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA (BIRO	346.000.000,00										346.000.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,	955.372.789.733,13	-	-	89.139.528.802,50	73.273.246.114,00			214.308.457.004,16	1.416.530.000,00		902.060.577.645,47
3	DINAS PERHUBUNGAN	113.510.460.268,00		-	8.530.658.855,00				8.325.000,00			122.032.794.123,00
4	UPTD PELABUHAN TENGGAYU I	-			6.596.702.000,00							6.596.702.000,00
5	UPTD PLBL LIEM HIE DJUNG	143.882.800,00										143.882.800,00
6	DINAS KESEHATAN	36.280.404.924,51			3.517.455.400,00							39.797.860.324,51
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	74.363.747.517,00			26.159.947.677,00				11.019.202.738,00			89.504.492.456,00
8	DINAS SOSIAL	29.920.000,00			272.838.000,00							302.758.000,00
9	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU	49.900.000,00			355.311.000,00							405.211.000,00
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	166.650.000,00										166.650.000,00
11	UPTD PELABUHAN TENGGAYU 2	35.007.500,00										35.007.500,00
12	DINAS KEHUTANAN (UPT KESATUAN PENGELOLA HUTAN	49.517.100,00			29.775.750,00				19.574.850,00			59.718.000,00
13	DINAS KEHUTANAN (UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN	129.656.547,00			9.879.000,00				9.879.000,00			129.656.547,00
14	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN	14.477.247.542,00			3.662.682.655,00							18.139.930.197,00
15	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	71.781.486.100,00										71.781.486.100,00
16	BADAN PENDAPATAN DAERAH	127.750.000,00	-		93.656.250,00						98.840.372,00	320.246.622,00
17	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	10.525.243.900,00										10.525.243.900,00
	JUMLAH	1.277.389.663.931,64	-	-	138.368.435.389,50	73.273.246.114,00	-	-	225.365.438.592,16	1.416.530.000,00	98.840.372,00	1.262.348.217.214,98

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024



NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.373.457.803,21	2.204.359.165,00	508.255.666,31	10.069.561.301,90
2	DINAS KESEHATAN	14.114.376,00	100.080.620,00	114.194.996,00	-
3	RSUD dr.H.JUSUF SK	1.398.772.102,10	9.059.965.149,09	10.458.737.251,19	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	37.938.679.086,88	151.882.642.431,00	118.067.387.450,88	71.753.934.067,00
5	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	93.930.696,00	410.389.959,00	426.156.625,00	78.164.030,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	161.408.960,00	562.980.775,00	668.780.152,00	55.609.583,00
7	DINAS SOSIAL	11.229.750,00	49.600.000,00	9.810.467,00	51.019.283,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	55.441.282,00	172.392.628,00	227.833.910,00	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	36.616.666,00	0,00	13.683.333,00	22.933.333,00
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	126.044.463,00	0,00	38.852.986,00	87.191.477,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62.627.056,00	1.319.874.434,00	439.750.067,00	942.751.423,00
12	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	69.373.342,00	13.698.000,00	47.218.578,00	35.852.764,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	106.000.000,00	0,00	24.400.000,00	81.600.000,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	2.753.951.583,17	1.269.964.455,00	1.627.494.908,00	2.396.421.130,17
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	443.586.585,00	10.754.031,00	227.423.949,00	226.916.667,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL	9.345.154,02	451.463.002,00	460.808.156,02	-
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	83.994.750,00	0,00	20.142.000,00	63.852.750,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.307.106,00	0,00	0,00	3.307.106,00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	21.575.404.337,00	145.360.389,00	980.605.140,00	20.740.159.586,00
20	DINAS PARIWISATA	41.561.652,00	3.657.500,00	29.017.252,00	16.201.900,00
21	DINAS KEHUTANAN	501.562.608,00	263.091.100,00	359.789.973,00	404.863.735,00
22	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.581.856.637,00	21.931.187.850,00	21.726.830.371,00	1.786.214.116,00
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	348.309.508,00	49.900.000,00	101.733.967,00	296.475.541,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	735.409.316,00	346.150.030,00	593.094.783,00	488.464.563,00
25	SEKRETARIAT DPRD	61.903.125,00	1.109.492.875,00	1.128.496.000,00	42.900.000,00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	-	153.391.550,00	153.391.550,00	-
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	389.084.320.895,51	20.197.810.280,89	381.414.252.397,00	27.867.878.779,40
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	331.304.175,00	305.250.000,00	180.086.766,00	456.467.409,00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	0,00	0,00	-
30	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUS	10.727.118,34	81.187.554,00	91.914.672,34	-
31	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	332.530.000,00	332.530.000,00	-
32	BADAN PENGHUBUNG	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	-
33	INSPEKTORAT	33.333.300,00	0,00	15.833.300,00	17.500.000,00
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.653.250,00	-	3.993.000,00	3.660.250,00
	JUMLAH	466.056.381.683,23	212.427.173.777,98	540.493.654.666,74	137.989.900.794,47

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



NO	TUJUAN PEMBENTUKAN	DASAR HUKUM	JUMLAH DANA	SALDO AWAL	TRANSFER DARI	TRANSFER KE KAS	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIHIL								

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARAFIN PALIWANG



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024



No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	40.615.873,33	17.475.840,00	40.615.873,33	17.475.840,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	7.904.879.166,67	6.124.322.523,33	7.904.879.166,67	6.124.322.523,33
3	Utang Belanja Barang	-	15.256.964.504,55	690.219.266,00	14.566.745.238,55
4	Utang Belanja Jasa	10.657.088.835,00	31.178.498.643,69	10.657.490.398,00	31.178.097.080,69
5	Utang Belanja Pemeliharaan	988.744.118,00	919.506.709,00	988.744.118,00	919.506.709,00
6	Utang Belanja Perjalanan Dinas	-	568.153.157,00	568.153.157,00	-
7	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.147.000.000,00	298.000.000,00	3.147.000.000,00	298.000.000,00
8	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	18.083.423.027,17	1.645.557.967,50	7.661.900.745,16	12.067.080.249,51
9	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	-	865.140.833,00		865.140.833,00
10	Utang Belanja Modal Bangunan Air	-	340.878.497,00		340.878.497,00
11	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	141.330.011.431,00	83.236.477.119,00		224.566.488.550,00
12	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	28.001.162.653,00	20.979.383.420,00		48.980.546.073,00
13	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	-	10.737.400,00	-	10.737.400,00
14	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00
15	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	15.796.139.305,92		15.796.139.305,92	-
16	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	23.166.642.441,00	11.099.626.000,00	34.266.268.441,00	-
		249.115.706.851,09	172.549.722.614,07	81.721.410.471,08	339.944.018.994,08

GOVERNOR OF KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024



No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4) - 5
1	Dana Jaminan Reklamasi	765.421.804,00	72.500.500,00		837.922.304,00
2	Dana Jaminan Kesungguhan	752.686.500,00	-	-	752.686.500,00
		1.518.108.304,00	72.500.500,00	-	1.590.608.804,00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA



No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Jumlah				Jumlah Yang Masih Harus Dianggarkan Kembali Pada APBD Berikutnya	Dasar Hukum
			Anggaran	Realisasi	Tambah / Kurang	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIHIL								

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



No	BUMD / Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
1	Bidang Pengelolaan Minyak Gas dan																	
	1. PT. Migas Kaltara Jaya			741.749.242,00	7.190.568.440,00	-	7.932.317.682,00	4.037.848.137,00	-	4.037.848.137,00	10.000.000.000,00	-	-	-	(6.105.530.456,00)	3.894.469.544,00	100%	3.894.469.544,00
				741.749.242,00	7.190.568.440,00	-	7.932.317.682,00	4.037.848.137,00	-	4.037.848.137,00	10.000.000.000,00	-	-	-	(6.105.530.456,00)	3.894.469.544,00		3.894.469.544,00
2	Bidang Jasa, Perdagangan, Industri, Pariwisata, dan Agroindustri																	
	1. PT. Benuanta Kaltara Jaya			15.821.914.200,00	7.927.912.958,00	239.579.385,00	23.989.406.543,00	1.985.620.650,00	16.536.488.972,00	18.522.109.622,00	5.000.000.000,00	-	-	-	467.296.921,00	5.467.296.921,00	100%	5.467.296.921,00
				15.821.914.200,00	7.927.912.958,00	239.579.385,00	23.989.406.543,00	1.985.620.650,00	16.536.488.972,00	18.522.109.622,00	5.000.000.000,00	-	-	-	467.296.921,00	5.467.296.921,00		5.467.296.921,00
	Total Seluruh Bidang Industri			16.563.663.442,00	15.118.481.398,00	239.579.385,00	31.921.724.225,00	6.023.468.787,00	16.536.488.972,00	22.559.957.759,00	15.000.000.000,00	-	-	-		9.361.766.465,00		9.361.766.465,00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ZAINAL ARIFIN PALIWANG